

KOMODIFIKASI AGAMA DALAM PILKADA
(STUDI NETNOGRAFI TERHADAP GNPf-MUI DAN TIM
PEMENANGAN PASANGAN CALON DI PILKADA DKI JAKARTA 2017)

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Studi Islam



Oleh

Muhammad Chabibi

NIM. F53416021

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Chabibi

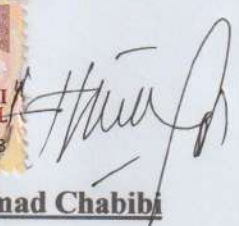
NIM : F53416021

Program : Doktor (S3)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 Pebruari 2022




Muhammad Chabibi
F53416021

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi berjudul

KOMODIFIKASI AGAMA DALAM PILKADA

**(STUDI NETNOGRAFI TERHADAP GNPf-MUI DAN TIM
PEMENANGAN PASANGAN CALON DI PILKADA DKI JAKARTA 2017)**

Yang ditulis oleh **MUHAMMAD CHABIBI, NIM F53416021**

Telah disetujui pada tanggal 01 Pebruari 2022

Oleh

Promotor



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil, Ph.D

NIP. 197402091998031002

Promotor



Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I

NIP. 197510162002121001

PENGESAHAN TIM PENGUJI VERIFIKASI NASKAH DISERTASI

Disertasi berjudul “**KOMODIFIKASI AGAMA DALAM PILKADA (STUDI NETNOGRAFI TERHADAP GNPf-MUI DAN TIM PEMENANGAN PASANGAN CALON DI PILKADA DKI JAKARTA 2017)** ini telah diuji verifikasi naskah pada tanggal 15 Pebruari 2022

Tim Penguji:

1. Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil, Ph.D

(Ketua)

2. Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I

3. Dr. Phil. Khoirun Ni'am

4. Dr. Abdul Chalik, M. Ag

5. Dr. Khoirul Yahya, M.Si

6. Dr. Hj. Anis Faridah, M.Si

Surabaya, 15 Pebruari 2022

Ketua,


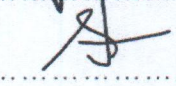
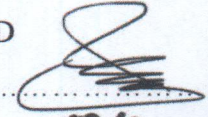
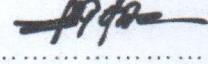

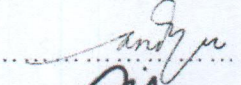
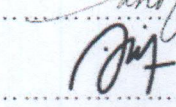

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA,
M.Phil, Ph.D

NIP. 197402091998031002

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP

Disertasi berjudul “**KOMODIFIKASI AGAMA DALAM PILKADA (STUDI NETNOGRAFI TERHADAP GNPF-MUI DAN TIM PEMENANGAN PASANGAN CALON DI PILKADA DKI JAKARTA 2017)** ini telah diuji dalam ujian tertutup pada tanggal 29 Maret 2022

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag (Ketua/Penguji) 
2. Dr. Khoirul Yahya, M. Si (Sekretaris/Penguji) 
3. Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil, Ph.D (Promotor/Penguji) 
4. Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I (Promotor/Penguji) 
5. Prof. H. Kacung Marijan, Drs., MA., Ph.D (Penguji Utama) 
6. Prof. Dr. Achmad Zainul Hamdi, M. Ag (Penguji) 
7. Dr. Hj. Anis Faridah, M.Si (Penguji) 

Surabaya, 29 Maret 2022




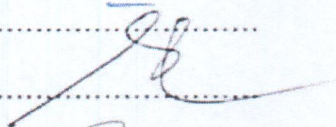

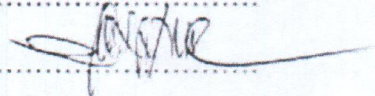

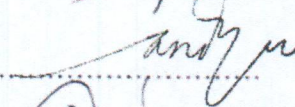
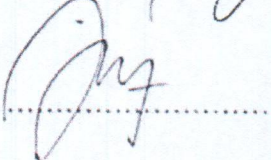
Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag

NIP. 196004121994031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA

Disertasi berjudul "KOMODIFIKASI AGAMA DALAM PILKADA (STUDI NETNOGRAFI TERHADAP GNPf-MUI DAN TIM PEMENANGAN PASANGAN CALON DI PILKADA DKI JAKARTA 2017) ini telah diuji dalam ujian terbuka pada tanggal 29 Juni 2022

Tim Penguji:

1. Prof. H. Masdar Hilmy, S.Ag, MA, Ph.D
(Ketua/Penguji) 
2. Dr. Khoirul Yahya, M. Si (Sekretaris/Penguji) 
3. Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil, Ph.D
(Promotor/Penguji) 
4. Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I (Promotor/Penguji) 
5. Prof. H. Kacung Marijan, Drs., MA., Ph.D
(Penguji Utama) 
6. Prof. Dr. Achmad Zainul Hamdi, M. Ag
(Penguji) 
7. Dr. Hj. Anis Faridah, S. Sos., SH., M.Si
(Penguji) 

Surabaya, 29 Juni 2022



Prof. H. Masdar Hilmy, S.Ag, MA, Ph.D

NIP. 197103021996031002



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Chabibi
NIM : F53416021
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana S3: Studi Islam
E-mail address : chabibi.akib@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Komodifikasi Agama dalam Pilkada (studi Netnografi
atas GRNPF-MUI dan Tim Pemeragaan Pasangan Calon
di Pilkada DKI JAKARTA 2017)

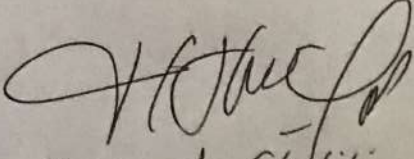
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Oktober 2022

Penulis


(Muhammad Chabibi)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Judul : Komodifikasi Agama dalam PILKADA: Studi Netnografi terhadap GNPf-MUI dan Tim Pemenangan Pasangan Calon di PILKADA DKI Jakarta 2017
Penulis : Muhammad Chabibi
Promotor : Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil, Ph.D;
Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I
Kata Kunci : Komodifikasi Agama, GNPf-MUI, PILKADA DKI Jakarta 2017

PILKADA DKI Jakarta 2017 merepresentasikan adanya gejala sosial-politik yang menjadikan agama sebagai komoditas publik demi terpenuhinya kepentingan politik dan kekuasaan ekonomi yang dilakukan oleh GNPf-MUI dan tim pemenangan pasangan calon di PILKADA DKI Jakarta 2017. Secara teknis, disertasi ini menjawab dua problematika utama dalam PILKADA DKI 2017 tersebut, yaitu: Bagaimana GNPf-MUI dan tim pemenangan pasangan calon melakukan komodifikasi agama dalam PILKADA DKI 2017? Mengapa serta apa motif mereka melakukan komodifikasi agama dalam PILKADA DKI Jakarta 2017?. Penelitian ini menerapkan studi netnografi sebagai cara melacak, mengamati dan memahami data serta informasi tentang dua kelompok utama; GNPf-MUI dan tim pemenangan pasangan calonnya di PILKADA DKI Jakarta 2017 yang terekam dan tersebar di dunia maya seperti website, Instagram, dan Youtube. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan pendekatan *political economy*, dengan meminjam dua landasan teori utama; teori *speech-act* dalam tindakan komunikatif dan tindakan kolektif. Disertasi ini mempunyai kesimpulan: *Pertama*, komodifikasi agama di PILKADA DKI Jakarta 2017 terjadi melalui tiga fase; fase friksi, fase penguatan dan fase bangkit dengan dua bentuk komodifikasi agama dari GNPf-MUI dan tim pemenangan pasangan calonnya. Bentuk pertama lahir dari GNPf-MUI melalui penggunaan sejumlah ayat al-Qur'an yang tematik dengan ideologi anti-pemimpin kafir, penggunaan masjid sebagai ruang dakwah politik, gerakan subuh berjema'ah sebagai pembanding serangan fajar dari tim sukses calon, khotbah jum'at, tamasya al-maidah dan spanduk fatwa penolakan shalat jenazah bagi pendukung Ahok. Bentuk kedua lahir dari tim pemenangan pasangan calonnya melalui penampilan-diri secara simbolis dengan pakaian baju putih dan peci hitam, serta melalui penampilan-diri secara ekspresif dengan branding personal sebagai pemimpin soleh, pemimpin muslim dan pemimpin bela agama Islam. *Kedua*, komodifikasi agama di PILKADA DKI Jakarta 2017 mempunyai makna GNPf-MUI mereproduksi komoditas politik dalam agama yang berorientasikan keberhasilan pemahaman dakwah Islam politik dan makna tim pemenangan pasangan calonnya adalah reproduksi komoditas agama dalam politik yang berorientasikan keberhasilan tujuan politik elektoral. Tindakan komodifikasi agama tersebut memiliki motif konflik ideologi, rasionalitas moral politik, mitigasi politik, motif hegemoni politik ulama 212 dan motif insentif ekonomi sehingga motif-motif tersebut memunculkan implikasi secara ekonomi politik yaitu *islamic political engagement* dan *new-market disruption* dengan 212 market.

ABSTRACT

Title : Commodification of Religion in the Local Elections: Netnographic Study of National Movement for Defending Fatwa of the Indonesian Ulama Council (GNPF-MUI) and the Campaign Team of Jakarta Gubernatorial Election 2017

Author : Muhammad Chabibi

Promotor : Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil, Ph.D; Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I

Key Words : Commodification of Religion, GNPF-MUI, Jakarta Gubernatorial Election 2017

This dissertation is motivated by socio-political phenomena that make religion a public commodity for the fulfillment of political interests and economic power carried out by the GNPF-MUI and the campaign team of Jakarta Gubernatorial Election 2017. Technically, this dissertation answers two main problems, namely: How did the GNPF-MUI and the campaign team carry out religious commodification in the Jakarta Gubernatorial Election 2017? Why And what is the motive did they commodify religion in the Jakarta Gubernatorial Election 2017?

This research applies a netnographic study as a way of tracking, observing and understanding data and information about two main groups; GNPF-MUI and the campaign team of Jakarta Gubernatorial Election 2017 which were recorded and spread in cyberspace such as websites, Instagram, and Youtube. In its analysis, this research uses a political economy approach, borrowing from two main theoretical foundations; speech-act theory in communicative action and collective action

This dissertation has the following conclusions: First, the commodification of religion in the Jakarta Gubernatorial Election 2017 occurred through three phases; friction phase, strengthening phase and rising phase with two forms of religious commodification from GNPF-MUI and the campaign team for the pair of candidates. The first form was born from the GNPF-MUI through the use of a number of thematic verses of the Koran with the ideology of anti-kafir leaders, the use of mosques as a space for political da'wah, the morning congregational movement as a comparison to the dawn attack from the candidate's success team, Friday sermons. the al-maidah excursion and the fatwa banner refusing the funeral prayer for Ahok supporters. The second form was born from the campaign team of the candidate pairs through a symbolic self-presentation in white clothes and a black cap, as well as through an expressive self-presentation with personal branding as pious leaders, Muslim leaders and leaders of the defense of Islam. Second, the commodification of religion in the Jakarta Gubernatorial Election 2017 means that GNPF-MUI reproduces political commodities in religion that are oriented towards the success of understanding political Islamic da'wah and the meaning of the winning team for the pair of candidates is the reproduction of religious commodities in politics that is oriented towards the success of electoral political goals. The act of commodification of

religion has the motive of ideological conflict, political moral rationality, political mitigation, the motives of political hegemony of the ulama 212 and the motive of economically incentives. so that these motives give rise to political economic implications, namely Islamic political engagement and new-market disruption with 212 markets.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

الملخص

الموضوع : تسليع الدين في انتخاب الرئاسة المحلية: دراسة تنتوجرافي عن الحركة الوطنية لحماية فتوى مجلس العلماء الإندونيسي والحملة الانتخابية في انتخاب الرئاسة المحلية بجاكارتا 2017م.

الباحثة : محمد حبيبي

المشرف : أ.د. أحمد مزكي الماجستير، د. هامش شفق الماجستير

الكلمات الأساسية : تسليع الدين ، الحركة الوطنية لحماية فتوى مجلس العلماء الإندونيسي ، انتخاب الرئاسة المحلية بجاكارتا 2017

خلفية هذه الأطروحة بسبب الظواهر الاجتماعية والسياسية التي تجعل الدين سلعة عامة لتحقيق المصالح السياسية والقوة الاقتصادية التي نفذها الحركة الوطنية لحماية فتوى مجلس العلماء الإندونيسي والحملة الانتخابية في انتخاب الرئاسة المحلية بجاكارتا 2017م. فيهدف هذا البحث إلى إجابة الأسئلة الآتية: كيف قام الحركة الوطنية لحماية فتوى مجلس العلماء الإندونيسي والحملة الانتخابية بتسليع الدين؟ لماذا فعل الحركة الوطنية لحماية فتوى مجلس العلماء الإندونيسي والحملة الانتخابية بتسليع الدين؟ وما هي دوافع التسليع التي نفذها الحركة الوطنية لحماية فتوى مجلس العلماء الإندونيسي والحملة الانتخابية في انتخاب الرئاسة المحلية بجاكارتا 2017م.

لإجابة الأسئلة السابقة، قام الباحث باستخدام دراسة تنتوجرافي لمتابع البيانات، ومراقبتها، وفهمها مع المعلومات التي تتعلق بالفرقتين السابقتين، وهذه البيانات أوالمعلومات موجودة في مواقع الويب، انستغرام، ويوتيوب. وحلل الباحث هذه البيانات باستخدام المدخل السياسي الاقتصادي، باستعار الإطار النظري الأساسي أي نظرية الفعل الكلامي في الفعل التواصلي والعمل الجماعي. وطريقة جمع هذه البيانات باستخدام الوثائق والملاحظة.

الاستخلاص من هذه الأطروحة كما تلي: أولاً، حدث تسليع الدين في انتخاب الرئاسة المحلية بجاكارتا 2017م على ثلاث مراحل -الخيالية، التأكيد، والقيام- بالتسليعين. ظهر التسليع الأول من الحركة الوطنية لحماية فتوى مجلس العلماء الإندونيسي بطريقة استخدام الآيات القرآنية الموضوعية عن حرام الرئاسة الكفار، انتفاع المساجد للدعوة السياسية، حركة صلاة الصبح جماعة، خطبة الجمعة، رحلة المائدة، واللوحة الإعلانية عن فتوى حرام صلاة الجنائز لمن يؤيد أهوك. وظهر التسليع الثاني من الحملة

الانتخابية التي لاتدعم أهوك، بطريقة ارتداء القميص الأبيض والقلنسوة السوداء كرمز ذاتي، مع العرض النفسي أنه لابد أن يدعم الرئيس الصالح، المسلم، وينصر الإسلام. ثانيا، إن تسليع الدين في انتخاب الرئاسة المحلية بجاكارتا 2017م له معنى للحركة الوطنية لحماية فتوى مجلس العلماء الإندونيسي أنه قد حصل على إنتاج تسليع السياسة في الدين الموجهة على نجاح الدعوة الإسلامية السياسية، ومعنى للحملة الانتخابية التي تدعمه أن إنتاج تسليع الدين في السياسة الموجهة على نجاح الأهداف السياسية الانتخابية. إن فعل تسليع الدين له دافع الصراع الأيديولوجي والعقلانية الأخلاقية السياسية والتخفيف السياسي ودوافع الهيمنة السياسية للعلماء 212 و الدافع من الحوافز الاقتصادية بحيث تؤدي هذه الدوافع إلى تداعيات اقتصادية سياسية، أي الانخراط السياسي الإسلامي واضطراب السوق الجديدة أى سوق 212.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

COVER DEPAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PROMOTOR	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI VERIFIKASI	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI DISERTASI TERTUTUP	v
PENGESAHAN TIM PENGUJI DISERTASI TERBUKA	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	viii
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	ix
ABSTRAK BAHASA ARAB	xi
UCAPAN TERIMAKASIH	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR SINGKATAN	xxiii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	17
C. Rumusan Masalah	21
D. Tujuan Penelitian	21
E. Kegunaan Penelitian	22
F. Kerangka Teoritis	24
1. Teori Tindakan Kolektif	24

2. Teori Tindakan Komunikatif	28
G. Penelitian Terdahulu	36
1. Klaster Literatur Review tentang PILKADA DKI Jakarta 2017	37
a. Penelitian PILKADA DKI Jakarta 2017 sebagai Cerminan Politik Identitas	37
b. Penelitian PILKADA DKI Jakarta 2017 terkait dengan Sentimen Primordial	46
c. Penelitian PILKADA DKI Jakarta 2017 terkait dengan Aksi Bela Islam dan Populisme Islam	51
d. Komodifikasi Agama dalam Politik Lokal Indonesia	62
e. Strategi Pemenangan Pasangan Calon Gubernur di PILKADA DKI Jakarta 2017	66
2. Perbedaan Penelitian Ini dengan Penelitian Sebelumnya	69
H. Metode Penelitian	73
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	73
2. Sumber Data	77
3. Teknik Pengumpulan Data	79
a. Dokumentasi	79
b. Audio Visual	80
c. Observasi <i>Online</i>	81
4. Teknik Analisis Data	81
5. Teknik Keabsahan Data	86
I. Sistematika Pembahasan	88
BAB II: GAMBARAN UMUM PILKADA DKI JAKARTA 2017: TIM PEMENANGAN PASANGAN CALON DAN GNPF-MUI DALAM TINJAUAN KOMODIFIKASI AGAMA	90
A. Formula Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta	90

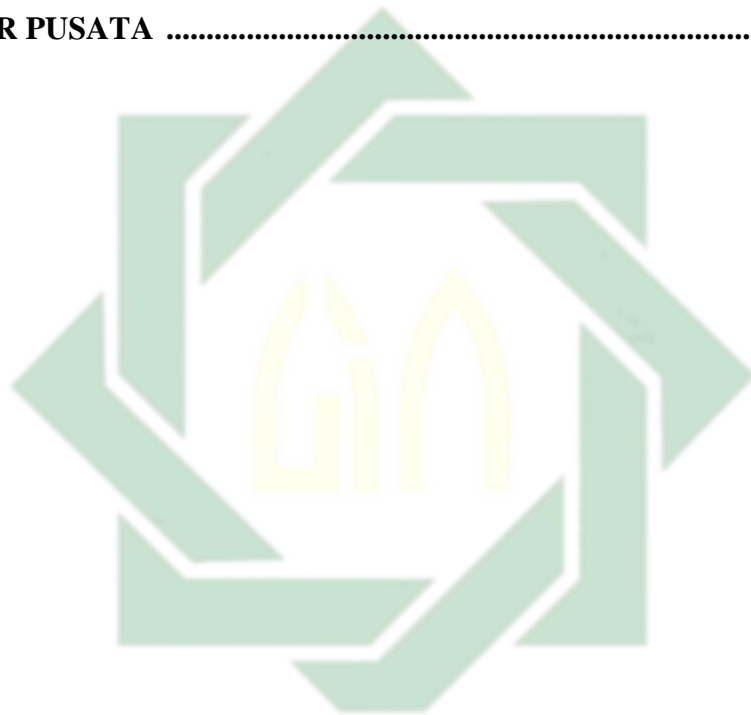
B. PILKADA DKI JAKARTA 2017	95
1. Putaran Pertama	98
2. Putaran Kedua	105
3. Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur	113
C. Kasus Penistaan Agama dan Gerakan Politik Islam di Tengah PILKADA DKI Jakarta 2017	120
1. Surat al-Maidah 51: Peristiwa Pulau Pramuka dan Unggahan Provokatif di Facebook	121
2. Genealogi GNPf-MUI	136
D. Konsep Komodifikasi Agama dan Keterkaitannya dengan Politik	144
BAB III: PROSES KEMUNCULAN DAN BENTUK KOMODIFIKASI AGAMA GNPf-MUI DAN TIM PEMENANGAN PASANGAN CALON DALAM PILKADA DKI JAKARTA 2017	156
A. Proses Kemunculan Komodifikasi Agama dalam PILKADA DKI Jakarta 2017	156
1. Fase Friksi	157
2. Fase Penguatan	175
3. Fase Bangkit	181
B. Bentuk Komodifikasi Agama GNPf-MUI	186
1. Penggunaan Ayat-ayat Ideologis “anti-Pemimpin Kafir”	186
2. Masjid dalam Ruang Komoditas Politik	191
3. Gerakan Subuh Berjemaah	194
4. Khotbah Jum’at	202
5. Tamasya al-Maidah	206
6. Penolakan Shalat Jenazah bagi Muslim Pendukung Ahok	209
a. Spanduk Penolakan Jenazah Pendukung Ahok	210
b. Fatwa DDII: Larangan Shalat Jenazah Pendukung Ahok	215

C. Bentuk Komodifikasi Agama Tim Pemenangan Pasangan Calon dalam PILKADA DKI Jakarta 2017	219
1. Strategi Marketing Politik Tim Pemenangan Pasangan Calon	219
2. Komodifikasi Agama dalam Marketing Politik Tim Pemenangan Anies-Sandi	225

BAB IV: MAKNA DAN MOTIF KOMODIFIKASI AGAMA GNPF-MUI DAN TIM PEMENANGAN PASANGAN CALON ANIES-SANDI DI PILKADA DKI JAKARTA 2017..... 237

A. Makna di Balik Tindakan Komodifikasi Agama: GNPF-MUI dan Tim Pemenangan Anies-Sandi di PILKADA DKI Jakarta 2017	237
1. Makna di Balik Tindakan Komodifikasi Agama: GNPF-MUI dan Anies Baswedan	238
2. Komodifikasi Agama karena Jaringan Skenario Tuhan	262
3. Kuasa atas Komodifikasi Agama: Dakwah atau Kampanye?	269
4. Kepentingan Kelompok dan Identitas: GNPF-MUI dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Anies-Sandi	273
5. Pola Dasar Orientasi GNPF-MUI dan Tim Pemenangan Anies-Sandi dalam Komodifikasi Agama di PILKADA DKI Jakarta 2017	282
B. Motif Komodifikasi Agama GNPF-MUI dan Tim Pemenangan Anies-Sandi di PILKADA DKI Jakarta 2017	287
1. Motif Konflik Ideologi Politik	289
2. Motif Rasionalitas Moral dalam Politik	292
3. Motif Mitigasi Politik	294
4. Motif Hegemoni Politik Ulama 212	299
5. Motif Insentif Ekonomi	303
C. Implikasi Komodifikasi Agama Secara <i>Political Economy</i> dalam PILKADA DKI Jakarta 2017	311
1. <i>Political Islamic Engagement</i>	311
2. <i>New-Market Disruption: “212 Market”</i>	324

BAB V: PENUTUP	331
A. Kesimpulan	331
B. Implikasi Teoritis	333
C. Keterbatasan Studi	336
D. Rekomendasi	338
DAFTAR PUSATA	340



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Domain dalam Penelitian tentang Komodifikasi Agama dalam PILKADA DKI Jakarta 2017	84
Tabel 2.1 Perolehan Suara PILKADA DKI Jakarta 2017 Putaran I	104
Tabel 2.2 Data Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih	104
Tabel 2.3 Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Putaran I	104
Tabel 2.4 Dana Kampanye PASLON Ahok-Djarot Putaran II	106
Tabel 2.5 Dana Kampanye PASLON Anies-Sandi Putaran II	106
Tabel 2.6 Hasil Perolehan Suara PILKADA DKI Jakarta 2017 Putaran II	110
Tabel 2.7 Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Putaran II	110
Tabel 2.8 Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah Putaran II	110
Tabel 3.1 Tema Komodifikasi Ayat al-Qur'an di PILKADA DKI Jakarta 2017 .	187
Tabel 3.2 Data Rekapitulasi Masjid Pelaksana Subuh Berjamaah Nasional Spirit 212	197
Tabel 3.3 Tanggal Peristiwa Aksi Bela Islam dan Segmentasi Babak Marketing Politik	228
Tabel 4.1 Pernyataan Pembicara Utama dalam Tabligh Akbar Pengajian Politik Islam di Masjid Agung al-Azhar, Jakarta	241
Tabel 4.2 Proses Lokusioner, I-lokusioner dan Perlokusioner dalam Pernyataan Bachtiar Nashir di Tabligh Pengajian Politik Islam	246
Tabel 4.3 Proses Lokusioner, I-lokusioner dan PERlokusioner dalam Pernyataan M. al Khaththath di Tabligh Pengajian Politik Islam	248
Tabel 4.4 proses Lokusioner, I-lokusioner dan Perlokusioner dalam Pernyataan Tengku Zulkarnain di Tabligh Pengajian Politik Islam	250
Tabel 4.5 Proses Lokusioner, I-lokusioner dan Perlokusioner dalam Pernyataan Anies Baswedan di Tabligh Pengajian Politik Islam	253
Tabel 4.6 Proses Respon Perlokusioner Jema'ah Tabligh Pengajian Politik Islam	258
Tabel 4.7 Data Masjid, Musala dan Majelis Taklim Penerima Dana Hibah DKI Jakarta Tahun 2018	306

Tabel 4.8 Data Masjid, Musala dan Majelis Taklim Penerima Dana Hibah DKI Jakarta Tahun 2019	307
Tabel 4.9 Data Masjid, Musala dan Majelis Taklim Penerima Dana Hibah DKI Jakarta Tahun 2020	309



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pemasukan dan Pengeluaran Dana Kampanye PILKADA DKI Jakarta 2017 Putaran Pertama	103
Gambar 2.2 Peta Sebaran Suara PILKADA DKI Jakarta 2017 Putaran I	104
Gambar 2.3 Peta Sebaran Suara PILKADA DKI Jakarta 2017 Putaran II	111
Gambar 2.4 Tampilan Unggahan Penistaan Agama yang Dituduhkan Kepada Ahok di Beranda Facebook Buni Yani	114
Gambar 2.5 Surat Pernyataan Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI	121
Gambar 3.1 Surat Rekomendasi Ahok kepada Kemendagri dan Kemenkumham Tentang Pembubaran FPI	167
Gambar 3.2 Selebaran (<i>flyer</i>) Maklumat DPD FPI Jakarta tentang Penolakan Ahok di Media Sosial	168
Gambar 3.3 Pamflet Risalah Istiqlal	178
Gambar 3.4 Selebaran Flyer Perbandingan Jumlah Ayat Qur'an tentang Haramnya Memilih Pemimpin Kafir dan Makan Babi	188
Gambar 3.5 Selebaran Flyer Undangan Subuh Berjamaah Nasional	196
Gambar 3.6 Selebaran Flyer Mobilisasi Tamasya al-Maidah	208
Gambar 3.7 Spanduk Dakwah Penolakan Shalat Jenazah bagi Muslim Pendukung Ahok di Masjid at-Tawwab Jakarta Timur	211
Gambar 3.8 Spanduk Tauhid Penolakan Shalat Jenazah bagi Muslim Pendukung Ahok di Rumah Sekitar Masjid al-Anwar Bangka Jakarta	213
Gambar 3.9 Surat Suara PILKADA DKI Jakarta 2017 Putaran I dan II	227
Gambar 4.1 Para Pandemo Mengarak Bendera Hitam di Jl. MH. Thamrin	278
Gambar 4.2 Strategi Marketing Berbasis Orientasi Market dan Produk	284
Gambar 5.1 Trias Epistemologi Politik 212	301

DAFTAR SINGKATAN

ABI	Aksi Bela Islam
ACTA	Advokat Cinta Tanah Air
AHY	Agus Harimurti Yudhoyono
BABE ASLI	Barisan Betawi Agus-Sylvi
BAJA	Barisan Anak Jakarta
BATAS	Barisan Teman Agus-Sylvi
BARA	Barisan Relawan Agus-Sylvi
BAWASLU	Badan Pengawas Pemilihan Umum
DDII	Dewan Dakwah Islam Indonesia
DKI Jakarta	Daerah Khusus Ibukota Jakarta
DPD	Dewan Pimpinan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPT	Daftar Pemilih Tetap
DUM	Dakwah Ustadz Memberi
FBB	Forum Betawi Bersatu
FBR	Forum Betawi Rempug
FKPBM	Forum Kerukunan Pemuda Bugis Makassar
FPI	Front Pembela Islam
FS-LDK	Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus
FUI	Forum Umat Islam
FUHAB	Forum Ulama dan Habaib
FUPA	Forum Anti Penistaan Agama
GERINDRA	Partai Gerakan Indonesia Raya
GERASI	Gerakan Relawan Agus-Sylvi
GISS	Gerakan Indonesia Shalat Subuh
GMJ	Gubernur Muslim Jakarta
GNPF-MUI	Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia
GOLKAR	Partai Golongan Karya

HANURA	Partai Hati Nurani Rakyat
HTI	Hizbut Tahrir Indonesia
INSIST	Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization
KAMMI	Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
KISDI	Komite untuk Solidaritas Dunia Islam
KKN	Korupsi Kolusi dan Nepotisme
KOMPAS	Komunitas Pendukung Agus-Sylvi
KOTAK ADJA	Relawan Komunitas Advokat Muda Ahok-Djarot
KPU	Komisi Pemilihan Umum
LSI	Lembaga Survei Indonesia
MMI	Majelis Mujahidin Indonesia
MIUMI	Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia
MUI	Majelis Ulama Indonesia
MPJ	Majelis Pelayan Jakarta
MPP FAHMI TAMAMI	Majelis Pimpinan Pusat Forum Silaturami Takmir Masjid dan Musala Indonesia
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MTJB-GMJ	Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah untuk Gubernur Muslim Jakarta
NU	Nahdlatul Ulama
NASDEM	Partai Nasional Demokrat
ORMAS	Organisasi Masyarakat
PARMUSI	Persaudaraan Muslim Indonesia
PERISAI	Pengawal Risalah Istiqlal
PERTI	Persatuan Tarbiyah Islamiyah
PILEG	Pemilihan Legislatif
PILKADA	Pemilihan Kepala Daerah
PILPRES	Pemilihan Presiden
PAN	Partai Amanat Nasional
PBB	Partai Bulan Bintang
PBR	Partai Bintang Reformasi

PDI Perjuangan	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PDS	Partai Damai Sejahtera
PERINDO	Partai Persatuan Indonesia
PKS	Partai Keadilan Sejahtera
PKB	Partai Kebangkitan Bangsa
PKNU	Partai Kebangkitan Nasional Ulama
PKPU	Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PMB	Partai Matahari Bangsa
PUSDAI	Pusat Dakwah Islam
PPP	Partai Persatuan Pembangunan
PWNU	Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama
RT/RW	Rukun Tetangga/Rukun Warga
SARA	Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan
SDM	Sumber Daya Manusia
SMRC	Saiful Mujani Research Center
TPS	Tempat Pemungutan Suara
WASIAT Ulama	Wadah Silaturahmi Asatidz Ulama

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian disertasi ini dengan sengaja mengangkat komodifikasi agama sebagai topik penelitian, dengan spesifikasi bahwa disertasi ini melihat bagaimana fenomena komodifikasi agama yang terjadi di PILKADA DKI Jakarta 2017 bukan hanya sekedar persoalan penggunaan agama sebagai *religious markets*¹, bukan persoalan konsumsi masyarakat Islam atas tanda simbolis agama yang dapat dijual (*Islam consumersim*)², bukan juga aktivitas agama yang diproduksi secara komersial untuk tujuan industri kapitalisme kultural (*commercial Islam*)³, melainkan sejumlah tindakan yang dilakukan oleh GNPf-MUI dan tim pemenangan pasangan calon kepala daerah di PILKADA DKI Jakarta 2017 untuk menjadikan segala hal yang berkaitan dengan agama sebagai komoditas yang dipertukarkan secara simbolis melalui menjual simbol agama serta menjual ideologi

¹ Farish A. Noor. When Religion Becomes a Comodity. <https://www.straitstimes.com/opinion/when-religion-becomes-a-commodity> . Diakses pada tanggal 16 Februari 2019

² Greg Fealy, "Consuming Islam: Commodified Religion and Aspirational Pietism in Contemporary Indonesia" dalam Greg Fealy and Sally White (ed.), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia* (Singapore: ISAS, 2008). Pattana Kitiarsa, *Religious Commodification in Asia: Marketing Gods* (London: Routledge, 2008). Akh. Muzakki, "Islamisme dan Politisasi Agama Model PKS dalam PILPRES 2009", *Islamica*, Vol. 5, No. 1, September 2010. Featherstone, *Consumer Culture and Postmodernism*. (London: Sage Publication, 1991), 126. Roof, W. C. *Spiritual Marketplace: Baby Boomers and the Remaking of American Religion*. (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1999).

³ Gareth Barkin, Commercial Islam in Indonesia: How Television Producers Mediate Religiosity among National Audiences. *International Journal of Asian Studies*, 11, 1 (2014), pp. 1-24. Pattana Kitiarsa, Menuju Sosiologi Komodifikasi Agama, dalam *The New Blackwell Companion to The Sociology of Religion*, ed. B.S. Turner, 2010. Terj. Daryatmo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 984. Naili Ni'matul Illiyun, Commodification of Religion. *Jurnal Penelitian*, Vol. 15 No. 2 (2018). 94.

agama tertentu⁴ dengan cara memonopoli keagamaan (*religious monopolies*⁵) untuk tujuan politik elektoral (*political marketing*).

Monopoli agama (penguasaan terhadap agama) menjadi basis ekonomi politik yang terjadi di PILKADA DKI Jakarta 2017. Sebagai basis, ekonomi politik bergantung pada tiga hal; yaitu institusi politik, lingkungan sosial dan kapitalisme⁶. Dalam konteks lain, monopoli agama dalam pemilihan dapat berasimilasi dari proses *religious market* dan *political market* yang dilakukan oleh *entrepreneur* politik⁷. GNPf-MUI bertindak sebagai institusi politik keagamaan; menjadikan simbol-simbol keagamaan dan isu keagamaan tentang kepemimpinan sebagai bagian dari aspek ekonomi yang dapat dipertukarkan melalui proses dakwah politik keagamaannya (*public services*)⁸. Asumsi dasarnya adalah semakin besar frekuensi dakwah politik tentang kepemimpinan yang disampaikan, maka semakin besar pula intensitas dalam perolehan keuntungan ekonomisnya.

Di sisi yang lain, institusi politik lainnya adalah tim pemenangan pasangan calon Anies-Sandi di PILKADA DKI Jakarta 2017 di mana mereka melihat pemilih Muslim di Jakarta sebagai target utama (*consumer/costumer*) dalam praktik *political marketing* yang diyakini dapat mengalahkan lawan politiknya, sekalipun

⁴ Lukens-Bull, "Commodification of Religion and the reification of commodities", dalam *Religious Commodification in Asia: Marketing Goods*, ed. P. Kitiarsa (London: Routledge, 2008), 220-234.

⁵ Shima Baradaran, Brett G. Scharffs, dan Elizabeth A. Sewell. *Religious Monopolies and the Commodification of Religion*, *Pepperdine Law Review*. Vol. 32. L. Rev. 4 (2005).

⁶ Pedro M. Rey-Araujo. *Capitalism, Institutions and Social Orders: The Case of Contemporary Spain*. (London: Routledge, 2021).

⁷ Abel François. The Political Entrepreneur and the Coordination of the Political Process: A Market Process Perspective of the Political Market. *The Review of Austrian Economics* 16, 153–168 (2003). <https://doi.org/10.1023/A:1024588606724>

⁸ Dakwah politik keagamaan tentang kepemimpinan di saat PILKADA DKI Jakarta 2017 menjadi tren yang masif dilakukan sebagai wujud dari sebuah layanan publik keagamaan yang diadakan di berbagai acara kegiatan keagamaan.

petahana. Hal ini ditambah dengan adanya faktor lingkungan sosial yang mencuat karena isu kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok selaku calon gubernur petahana. Perhatian terhadap isu di tengah PILKADA DKI Jakarta 2017 inilah yang direspon oleh tim pemenangan calon Anies-Sandi sebagai isu utama dalam proses market politiknya melebihi isu kebutuhan pemilih⁹.

Komodifikasi agama di PILKADA DKI Jakarta tahun 2017 menjadi sangat kapitalis di dalam mengekspresikannya. Sebuah ekspresi yang menggunakan pengaruh agama sebagai komoditas publik dalam hidup bermasyarakat dan berekonomi yang lebih berputar pada sekitar konsumsi simbol-simbol dan gaya hidup dalam politik (*political process*) dan ekonomi (*market process*) dari pada produksi kreativitas dan kemajuan melalui kerja dan kinerja kepemimpinan dalam pemerintahan lokal. Tampilan ideologi politik, parodi demonstrasi, gaya pakaian politik dan kampanye politik dengan gaya *islamic sylistic* adalah contoh bagaimana komodifikasi agama telah menjadi gejala sosial-politik yang signifikan karena semakin meluasnya reorganisasi kepemimpinan dan kekuasaan yang dilakukan oleh GNPF-MUI (kuasa atas *religious market*) dan tim pemenangan pasangan calonnya (kuasa atas politik) dari sistem persaingan yang biasa menjadi sebuah sistem persaingan tanda dengan simbol-simbol agama yang dipaksakan kepada masyarakat Islam agar senantiasa mengonsumsinya.

Persaingan tersebut terlihat dari adanya tarik-menarik kepentingan antara GNPF-MUI dan tim pemenangan pasangan calon gubernur DKI Jakarta di

⁹ Klüver, Heike, and Jae-Jae Spoon. "Who Responds? Voters, Parties and Issue Attention." *British Journal of Political Science* 46, no. 3 (2016): 633–654.

sepanjang proses PILKADA DKI Jakarta 2017 untuk mendapatkan panggung politiknya masing-masing. Agama sebagai komoditas publik diharapkan dapat menarik perhatian publik atas panggung-panggung politik yang mereka tampilkan sepanjang PILKADA DKI Jakarta 2017. GNPF-MUI mempunyai panggung politik di saat salah satu pasangan calon gubernur, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tersangkut tuduhan kasus penistaan agama. Di lain pihak, tim pemenangan pasangan calon Anies-Sandi menyadari bahwa kompetitornya adalah seorang gubernur petahana yang mempunyai modal politik dan modal ekonomi yang kuat sehingga tim pemenangan pasangan calon Anies-Sandi mencoba untuk memanfaatkan modal sosial-agama sebagai kekuatan komoditas yang dapat menarik simpati publik melalui representasi diri pasangan calonnya dengan pentahbisan sebagai “pemimpin Muslim” di arena panggung politik yang sesungguhnya.

Fenomena tersebut menurut kebanyakan ilmuwan politik dianggap sebagai hasil dari praktik politik identitas. Bahkan meningkatnya isu politik identitas dan sentimen etnis-agama dalam PILKADA menjadi topik perdebatan politik nasional yang hangat hingga kini. Tidak hanya itu saja, banyak ilmuwan dan peneliti politik merasakan kekhawatiran atas politik identitas ini yang juga dapat terjadi pada PILKADA-PILKADA lain, khususnya Pemilihan Umum Nasional¹⁰. Selain itu,

¹⁰ Ari Ganjar Herdiansah, Yusa Djuyandi and Widya Setiabudi Sumadinata, ‘Extending Aliran Politics in Electoral Contest: An Insight of Indonesia’s Democracy in the Post-2014’, *Central European Journal of International and Security Studies*, 13.4 (2019), 545. Charlotte Setijadi, ‘Anti-Chinese Sentiment and the “return” of the Pribumi Discourse’, *Contentious Belonging*, 2019, 194–213 <<http://dx.doi.org/10.1355/9789814843478-015>>. Cahyo Pamungkas and Yogi Setya Permana, eds., *Intoleransi Dan Politik Identitas Kontemporer Di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2020)., h. 95. Arya Fernandes, “Politik Identitas Dalam Pemilu 2019 : Proyeksi Dan Efektivitas,” *Centre For Strategic And International Studies*, no. 1 (2019): 6.

terdapat kecemasan atas meningkatnya sentimen etnis-agama dalam ruang sosio-politik Indonesia¹¹.

Kerumitan dalam persoalan PILKADA DKI Jakarta 2017 terkait dengan politik identitas ditunjukkan pada gerakan-gerakan massal melalui mobilisasi para pemilih Muslim yang dimotori oleh kelompok gerakan politik Islam dengan tujuan untuk menolak seseorang karena karakter pribadi calon yang bersangkutan¹² dan lebih memilih orang lain dikarenakan adanya kesamaan dalam identitas agama, bukan karena program kebijakan¹³. Dalam sebuah riset Mietzner dan Burhanuddin Muhtadi disebutkan bahwa dari hasil rekapitulasi *exit poll* yang dilakukan pada hari PILKADA Jakarta, lebih dari 70% pemilih merasa puas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Gubernur Petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada saat menjabat, namun sayangnya hampir 50% pemilih tersebut tidak memilihnya karena terlibat dalam kasus penistaan agama. Bahkan, 54,5% pemilih adalah orang yang tidak memilih Ahok karena identitas agama.¹⁴

Persoalan lain pada PILKADA DKI Jakarta 2017 tersebut adalah maraknya aksi sentimen primordial yang mengarah kepada etnis-agama Ahok yang mempunyai latar belakang keturunan Cina dan seorang Kristen Katolik. Melalui

¹¹ Charlotte Setijadi, 'Chinese Indonesians in the Eyes of the Pribumi Public', *Perspective*, 2017, 1–12. Sugit Sanjaya Arjon, "Religious Sentiments In Local Politics," *Jurnal Politik* 3, no. 2 (2018): 171.

¹² Stanley Fish, "When Identity Politics is Rational". *The New York Times*, 17 Februari 2008. Diunduh 02 April 2018 dari <http://opinionator.blogs.nytimes.com/2008/02/01/whenidentitypoliticsisrational/> . Fernandes, "Politik Identitas Dalam Pemilu 2019 : Proyeksi Dan Efektivitas." *Centre For Strategic And International Studies*, no. 1 (2019): 3.

¹³ Nick Kuipers, Mosque Polling Stations Voting for Anies, *New Mandala*, 2017. Diunduh dan diakses dari <https://www.newmandala.org/anies-mosque-tps/> pada tanggal 13 April 2018.

¹⁴ Marcus Mietzner dan Burhanuddin Muhtadi, Ahok's Satisfied Non-Voters: an Anatomy, *New Mandala*, 2017. Diunduh dan diakses dari <https://www.newmandala.org/ahoks-satisfied-non-voters-anatomy/> pada tanggal 13 April 2018.

analisis wacana media sosial dan analisis komentar publik yang dilakukan oleh Greg Fealy¹⁵, diperoleh bukti di balik isu penistaan agama yang dilakukan Ahok, terdapat arus kebencian yang kuat terhadap orang Cina dan Kristen. Sentimen anti-Cina ini berkembang selama masa kepresidenan Joko Widodo -yang juga sahabat Ahok-, karena adanya program investasi yang besar dari Cina yang belum pernah terjadi sebelumnya. Disamping itu, negara Cina selalu dikaitkan dengan perasaan anti-Komunis yang ada di antara kelompok-kelompok Muslim Indonesia.

Berbeda dengan penelitian ilmuwan politik tersebut, riset ini lebih melihat bagaimana probelamatika yang rumit antara agama dan politik di PILKADA DKI Jakarta 2017 tentu tidak luput dari sejumlah tindakan komodifikasi agama yang juga merupakan sebuah gejala ekonomi politik dalam pengarusutamaan simbol dan identitas keagamaan sebagai tanda bagi kelompok masyarakat Islam yang telah mengikuti arah dan petunjuk GNPf-MUI sebagai aktor sentral dalam penyedia objek materi konsumsi tentang PILKADA dan kepemimpinan Islam. Objek konsumsi ini seperti isu al-Maidah, program pembangunan Masjid Raya Ahok-Djarot¹⁶, larangan shalat jenazah pendukung Ahok, dan ceramah memilih pemimpin non-Muslim.

Sejak putaran pertama PILKADA DKI Jakarta 2017, antara pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono-Silviana Murni, Basuki Tjahya Purnama (Ahok)-

¹⁵ Greg Fealy, *Bigger Than Ahok: Explaining the 2 December Mass Rally, Indonesia at Melbourne*, 2016. Diunduh dan diakses dari <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/bigger-than-ahok-explaining-jakartas-2-december-mass-rally/> pada tanggal 13 April 2018.

¹⁶ Ervan Ismail, "Kontroversi Iklan Politik Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017," *Perspektif Komunikasi* 1, no. 3 (2018).

Djarot Saiful Hidayat, dan Anis Baswedan-Sandiaga Uno¹⁷, hingga putaran kedua PILKADA yang menyisakan dua pasangan calon Basuki Thahya Purnama (Ahok)-Djarot dan Anis Baswedan-Sandiaga Uno, diwarnai oleh sejumlah produksi agama sebagai komoditas politik (komodifikasi agama) dengan tujuan dapat mentransformasi pandangan politik masyarakat dalam memilih salah satu pasangan calon. Komodifikasi tidak hanya memainkan isu penistaan agama saja, namun atribut agama sebagai produk untuk mendapatkan daya tarik pemilih seperti produk “Sabun al-Maidah” dalam kegiatan pelatihan membuat sabun yang dihadiri oleh istri calon Gubernur Anis Baswedan dan komunitas OK ECE. Tidak berhenti di sini saja, label “al-Maidah” juga digunakan sebagai nama komunitas “Tamasya al-Maidah” yang difungsikan sebagai aksi atau tindakan berkeliling ke tempat-tempat ibadah dan menjaga TPS-TPS pada hari pemungutan suara PILKADA DKI Jakarta 2017.¹⁸

Terkait dengan tindakan komodifikasi agama seputar narasi al-Maidah, isu penistaan agama bermula dari video rekaman Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama (Ahok) dalam kunjungan kedinasan di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu di akhir tahun 2016 dengan mengutip Surat al-Maidah ayat 51.¹⁹ Video tersebut diunggah oleh Buni Yani dalam laman Facebook-nya pada tanggal 6 Oktober 2016 (9 hari setelah pidato Ahok di Kepulauan Seribu/27 September 2016) dengan judul

¹⁷ Pasangan AHY-Silvi didukung oleh Partai Demokrat, PAN, PKB dan PPP. Pasangan Ahok-Djarot ketika itu didukung oleh empat partai politik yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura dan Partai NasDem. Pasangan Anis-Sandi didukung oleh Partai Gerindra dan PKS. Bambang Sulistyono, dkk. Mahalnya Kursi DKI-1. *Majalah Gatra*, Edisi 20 September-5 Oktober 2016.

¹⁸ Ahmad Khadafi, Komoditas al-Maidah, *tirto.id*, 2017. Diakses dan diunduh dari <https://tirto.id/komoditas-al-maidah-cmRl> pada tanggal 14 April 2018.

¹⁹ Daniel Peterson, *Islam, Blasphemy, and Human Rights in Indonesia* (London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2020).

“*Penistaan terhadap Agama*” dengan transkrip yang diedit dengan cara memotong 30 detik dari durasi asli 1 jam 48 menit serta menghapus kata “*pakai*” dari pernyataan asli Ahok “*jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak ibu enggak bisa pilih saya, dibohongin pakai surah al-Maidah 51, Macam-macam itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya*”. Dalam laman Facebook video tersebut, Buni Yani menuliskan *caption* status Facebook dengan “*Bapak-ibu (pemilih muslim)...dibohongi Surat al-Maidah 51*”...(dan) “*masuk neraka (juga Bapak-ibu) dibodohi...*”. Satu hari pasca postingan video tersebut (7 Oktober 2016), video dengan status “*Penistaan terhadap Agama*” telah dilihat sebanyak 185.000 (*views*), 1.100.000 penyuka (*likes*), dan 8.916 kali dibagikan secara publik (*shares*)²⁰ sehingga video ini secara otomatis menjadi viral di media sosial.

Ketika agama menjadi kian besar ukuran, pengaruh dan tanggungjawabnya, maka komodifikasi agama menjadi semakin politis di mana institusi keagamaan seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa dalam bentuk pendapat dan sikap keagamaan MUI pada tanggal 11 Oktober 2016. Secara garis besar, fatwa tersebut menyatakan bahwa Basuki Tjahya Purnama (Ahok) menistakan agama Islam, menghina ulama, menghina umat Islam, menodai al-Qur’an, menuntut aparat penegak hukum untuk segera memprosesnya secara

²⁰ Data diambil dari hasil screenshot akun Facebook Buni Yani yang mengunggah video Ahok. www.solopos.com/dimintai-komentar-soal-status-tersangka-buni-yani-ini-jawaban-ahok-771542. Diakses pada tanggal 27 Februari 2018

hukum dan mewajibkan setiap orang Islam untuk menjadikan surat tersebut sebagai panduan memilih pemimpin dan larangan memilih pemimpin non-Muslim.²¹

Dari video yang diupload Buni Yani dan Fatwa MUI, muncul tindakan-tindakan demonstrasi dengan sebutan Aksi Bela Islam yang dilakukan oleh gabungan kelompok gerakan politik Islam dengan nama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI).²² Kelompok ini terdiri dari Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Forum Umat Islam (FUI), Dewan Dakwah Islam (DDI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan massa Islam lainnya yang mayoritas berpakaian putih dan bergamis. Selain itu, aksi tersebut diikuti oleh sejumlah tokoh partai politik dari Gerindra, PKS, PBB, PBR dan PKS²³.

Aksi ini pun ternyata menjadi rangkaian aksi yang berkelanjutan di mana Aksi Bela Islam yang pertama (ABI-I) diadakan pada tanggal 14 Oktober 2016 yang dikomandoi oleh FPI dengan ribuan massa Islam melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Aksi Bela Islam kedua (ABI-II) dikenal dengan istilah “Aksi 4 November” atau “Aksi Damai 411” di tahun 2016. Aksi Bela Islam ketiga (ABI-III) atau Aksi 212 diprakarsai oleh FPI dan GNPF-MUI yang diadakan pada 2 Desember 2016 dan ia merupakan aksi terbesar²⁴ di antara aksi bela Islam

²¹ Dokumen Fatwa MUI tentang *Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia* tertanggal 11 Oktober 2016.

²² Arie Setyaningrum Pamungkas and Gita Octaviani, “Aksi Bela Islam Dan Ruang Publik Muslim: Dari Representasi Daring Ke Komunitas Luring,” *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 4, no. 2 (2017): 108–125.

²³ <https://tirto.id/mereka-yang-bersatu-dan-berseteru-dalam-aksi-bela-islam-ii-b1NY>, diakses pada tanggal 27 Februari 2019

²⁴ Ada perbedaan pendapat dalam jumlah orang yang menghadiri Aksi 212, di antaranya Mietzner dan Burhanuddin Muhtadi (2018) mengatakan 500.000, Greg Fealy (2016) mengatakan 500.000-750.000. Menurut Peterson (2020), lebih dari setengah juta orang.

yang pernah dilakukan sebelumnya di mana dihadiri pula oleh Presiden Joko Widodo pada saat itu²⁵. Aksi Bela Islam ke-empat (ABI-IV) dikenal juga dengan istilah Aksi 112, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2017 dan dikoordinasi oleh Forum Umat Islam (FUI) dan GNPF. Aksi Bela Islam Ke-lima (ABI-V) atau Aksi 212-2017 diselenggarakan pada tanggal 21 Februari 2017 di depan Gedung DPR yang diprakarsai oleh Forum Umat Islam, dan FPI. Aksi Bela Islam ke-enam (ABI-VI) diadakan pada tanggal 31 Maret 2017 sehingga aksinya juga dapat disebut aksi 313 yang juga diprakarsai oleh Forum Umat Islam dan beberapa kelompok organisasi massa Islam lainnya. Aksi Bela Islam ke-tujuh (ABI-VII) merupakan aksi yang terakhir menurut GNPF yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2017 dengan inisiasi pengawalan hukum di hadapan Mahkamah Agung atas kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok.²⁶

Di antara sekian aksi Bela Islam, komodifikasi agama yang paling kuat adalah Aksi Bela Islam II atau aksi 411 di hari Jum'at, 4 November 2016. GNPF-MUI dengan inisiator Habib Riziq Syihab, Bachtiar Nasir, Misbahul Anam, Muhammad Zaitun dan Munarman berupaya untuk melakukan propaganda keagamaan agar dapat meningkatkan emosi massa Islam sebagai kelompok mayoritas yang sama-sama terluka secara identitas akibat penistaan agama oleh Ahok. Di dalam aksi ini, diperkirakan massa yang hadir berjumlah 100.000 orang²⁷

²⁵ Rangga Kusumo and Hurriyah Hurriyah, "Populisme Islam Di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela Islam Oleh GNPF-MUI Tahun 2016-2017," *Jurnal Politik* 4, no. 1 (2019): 87.

²⁶ Fachri Aidulsyah and Yuji Mizuno, "The Entanglement between Anti-Liberalism and Conservatism: The Insists and Miami Effect within the "212 Movement" in Indonesia," *Journal of Indonesian Islam* 14, no. 1 (2020): 1–25.

²⁷ Jumlah peserta Aksi Bela Islam 411 terdapat perbedaan pendapat. Petterson (2020) berpendapat jumlahnya ada sekitar 150.000 sampai 250.000 orang.

dengan mayoritas pria berpakaian putih, bergamis dan membawa sajadah untuk melaksanakan shalat Jum'at di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Begitu Shalat Jum'at dimulai, Khatib (Eggi Sudjana) menggunakan isu penistaan agama Ahok ke dalam bagian isi ceramah khotbah bahwa "*kalau ahok tidak dicopot, tidak jadi tersangka, maka ada kekuatan agar hukum tidak ditegakkan*".²⁸

Di sini, para pengunjung rasa menggambarkan tindakan mereka sebagai bentuk perjuangan umat untuk penegakan hukum, bahkan mengklaim bahwa negara tidak berkenan untuk menggunakan undang-undang penistaan agama karena hubungan dekat antara presiden dan gubernur DKI Jakarta waktu itu.²⁹ Padahal di dalam tindakan tersebut, terdapat komodifikasi agama (Islam) yang muncul secara *gradual* melalui mobilisasi massa basis politik keagamaan yang berakibat pada terbentuknya politik identitas. Tindakan komodifikasi tersebut dikonstruksi dengan cara menyajikan atribut-atribut dan narasi agama sebagai komoditas kultural pada satu sisi dan pada sisi yang lain sebagai ideologisasi pergerakan politik di ruang-ruang agama demi melawan penguasa.

Komodifikasi agama pada Pilkada DKI Jakarta 2017 ini mempunyai sisi menarik dari pada komodifikasi agama pada PILKADA-PILKADA lainnya yang sebelumnya telah diteliti oleh banyak peneliti. Kunci utama dalam komodifikasi agama pada PILKADA lainnya adalah hanya sebatas penggunaan simbol pakaian Islam; seperti penggunaan atribut pakaian agama seperti kerudung atau jilbab, serban, peci, baju koko serta kegiatan ritual keislaman di acara Majelis pengajian

²⁸ <https://www.cnnindonesia.com/kursipanasdki/20161127204559-522-175673/karpet-merah-islam-radikal-di-aksi-anti-ahok-212/> diakses pada tanggal 28 Februari 2019

²⁹ Marcus Mietzner, 'Authoritarian Innovations in Indonesia: Electoral Narrowing, Identity Politics and Executive Illiberalism', *Democratization*, 27.6 (2020), 8.

seperti Isra' Mi'raj dan Haul Akbar.³⁰ Di sini, aktor yang menggunakan simbol Islam tersebut bertujuan menarik simpati masyarakat sebagai pemilih adalah politisi atau calon (kepala daerah, legislatif dan presiden).

Sedangkan komodifikasi agama pada PILKADA DKI Jakarta 2017, banyak terlihat pada sejumlah aktor dari kelompok gerakan politik Islam dan kelompok tim kemenangan politik yang menggunakan simbol Islam dalam mobilisasi pemilih di ruang publik keagamaan maupun di media sosial. Kendati demikian, penggunaan agama dan wacana Islam sebagai simbol komoditas politik tidak dapat luput dari penguasaan kelompok gerakan politik Islam yang tergabung dalam GNPF-MUI atas sumber daya pengetahuan keagamaan dan massa Islam sebagai pemilih di DKI Jakarta. Di samping itu, penggunaan agama oleh kelompok gerakan politik Islam ini semakin kuat ketika tokoh elit partai politik (tim kemenangan calon) membantu dalam penyebaran komodifikasi agama tersebut dengan sumber daya strategi kampanye yang dikuasainya.

Penggunaan agama ini cukup terbukti dari hasil rekapitulasi PILKADA DKI Jakarta 2017 dan hasil survei yang dilakukan oleh Media Survei Nasional (MEDIAN) yang pengambilan data dimulai dari tanggal 21-27 Februari 2017 atau pada masa pemilihan Putaran Kedua berlangsung. Ketika pada hasil rekapitulasi suara Putaran Pertama, perolehan suara pasangan Anis-Sandi dan Agus-Sylvi berada di bawah perolehan suara Ahok-Djarot sebesar 2.364.577 (42,99 %) sedangkan Anis-Sandi memperoleh suara sebesar 2.197.333 (39,95 %) dan Agus-

³⁰ Umaimah Wahid, "Media and Commodification of Islamic Symbols in Political Campaign Towards General Election of Governor/Vice Governor of DKI Jakarta 2017," *Journal of Computational and Theoretical Nanoscience* 24, no. 4 (2018): 2213–2217. Muhammad Chabibi, *Pertukaran Politik Calon Tunggal Dalam Pilkada*, (Depok: Gemala, 2020), 104.

Sylvi memperoleh suara 937.955 (17,05 %). Namun, pada saat Putaran Kedua, hasil rekapitulasi suara membuktikan adanya perubahan suara yang signifikan di antara pasangan calon Ahok-Djarot dan Anis-Sandi. Berbalik arah, pasangan Anis-Sandi unggul di atas pasangan Ahok-Djarot di mana Anis-Sandi memperoleh 3.240.987 (57,96 %) dan Ahok-Djarot memperoleh 2.350.366 (42,03 %)³¹. Ini artinya, suara pasangan Anis-Sandi mengalami kenaikan 14,97 % dibanding suara Ahok-Djarot yang mengalami penurunan 0,96 %. Kendati demikian, hasil survei MEDIAN sangat mengejutkan bahwa bagaimana peningkatan suara Anis-Sandi dilatarbelakangi oleh dua variabel yang menjadi motif alasan orang memilih Anis-Sandi pada Putaran Kedua, yaitu karena “seagama” (27,1)³² dan “yang penting jangan Ahok” (25,9). Bahkan, tren negatif dari variabel “yang penting jangan Ahok” terdapat pada indikator “penista agama” (10,7 %) dan “non-Muslim” (5,7 %) di atas indikator kesukuan “Cina” (0,7%) yang merupakan indikator paling bawah³³.

Dari hasil tren negatif “penista agama” dan “Non-Muslim” tersebut, muncul beragam penggunaan agama secara politis yang dilakukan oleh para pendukung pasangan calon, seperti penolakan sejumlah tempat ibadah dalam shalat jenazah bagi pendukung Ahok, larangan memilih pemimpin Non-Muslim di ceramah-

³¹ KPU DKI Jakarta, *Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua*, 2017. Diunduh dari https://jakarta.kpu.go.id/file_data/BA%20Hasil%20Rekap%20Perolehan%20Suara%20Putaran%20Kedua%20ok.pdf pada tanggal 06 April 2018.

³² Dony Arung Triantoro, “Praktik Politik Identitas Dalam Akun Media Sosial Anies-Sandi,” *Jurnal ILMU KOMUNIKASI* 16, no. 1 (2019): 19.

³³ MEDIAN, *Hasil Survei PILGUB DKI Jakarta 2017: Memahami Peta Kompetisi Putaran Ke-2 PILGUB DKI Jakarta*, Februari 2017. www.median.or.id, diakses pada tanggal 28 Maret 2018.

ceramah agama maupun khotbah Jum'at³⁴, diseminasi narasi “pemimpin kafir” dan “penista agama” di media-media sosial dan lain-lain.

Berkaitan dengan topik PILKADA DKI Jakarta 2017 dan agama, ada banyak literatur penelitian yang membahasnya. Setidaknya, penelitian-penelitian ini dapat dibagi ke dalam empat kecenderungan utama. *Pertama*, penelitian-penelitian yang memandang pelaksanaan PILKADA DKI Jakarta 2017 sebagai cerminan dari praktik politik identitas.³⁵ *Kedua*, penelitian-penelitian yang menganalisis adanya sentimen politik basis agama-etnis di dalam PILKADA DKI Jakarta 2017³⁶. *Ketiga*, penelitian-penelitian PILKADA DKI Jakarta 2017 yang secara umum berhubungan dengan upaya mobilisasi umat Islam dan pengaruhnya terhadap intoleransi dalam aksi gerakan massa Bela Islam³⁷. *Keempat*, penggunaan

³⁴ Marcus Mietzner, Burhanuddin Muhtadi, and Rizka Halida, “Entrepreneurs of Grievance: Drivers and Effects of Indonesia’s Islamist Mobilization,” *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania* 174, no. 2–3 (2018): 159–187.

³⁵ Muzayyin Ahyar and Alfitri, “Aksi Bela Islam: Islamic Clicktivism and the New Authority of Religious Propaganda in the Millennial Age Indonesia,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 1 (2019): 1–29. Irfan Prayogi, “Populisme Islam Dan Imajinasi Politik Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017,” *Politeia: Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 2 (2019): 31–43. Vedi R. Hadiz, “The ‘Floating’ Ummah in the Fall of ‘Ahok’ in Indonesia,” *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia* 7, no. 2 (2019): 271–290. Triantoro, “Praktik Politik Identitas Dalam Akun Media Sosial Anies-Sandi,” *Jurnal ILMU KOMUNIKASI* 16, no. 1 (2019).

³⁶ Charlotte Setijadi, ‘Chinese Indonesians in the Eyes of the Pribumi Public’ *Perspective*, no. 73 (2017): 1–12.; Charlotte Setijadi, ‘Anti-Chinese Sentiment and the “return” of the Pribumi Discourse’ *Contentious Belonging*, 2019, 194–213. Arjon, “Religious Sentiments In Local Politics.” *Jurnal Politik* 3, no. 2 (2018): 171.; Nathanael Gratias Sumaktoyo, “Ethnic and Religious Sentiments in Indonesian Politics: Evidence From the 2017 Jakarta gubernatorial Election,” *Journal of East Asian Studies* 21, no. 1 (2021): 141–164.

³⁷ Marcus Mietzner and Burhanuddin Muhtadi, “The Mobilisation of Intolerance and Its Trajectories: Indonesian Muslims’ Views of Religious Minorities and Ethnic Chinese,” *Contentious Belonging*, no. Scherpen (2019): 155–174; Marcus Mietzner and Burhanuddin Muhtadi, “Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation,” *Asian Studies Review* 42, no. 3 (2018): 479–497, <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335>. Marcus Mietzner, Burhanuddin Muhtadi and Rizka Halida, “Entrepreneurs of Grievance: Drivers and Effects of Indonesia’s Islamist Mobilization”, *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania*, Vol. 174, 159-187, 2018.; Ulla Fionna, “Manipulating ‘Diversity’: Campaign against Ahok Threatens Democracy,” *Perspective* 2017, no. 6 (2017): 1–7. Pamungkas and Octaviani, “Aksi Bela Islam Dan Ruang Publik Muslim: Dari Representasi Daring Ke Komunitas Luring.” *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 4, no. 2 (2017): 108–125.

simbol agama dalam kampanye politik seperti peci, baju putih dan narasi Islam (*syariah, ummat, al-maidah* ayat 51).³⁸

Dari sejumlah kajian literatur penelitian tersebut, peneliti melihat bagaimana politik identitas, sentimen agama-etnis, masifnya gerakan intoleran dan tersebarnya narasi-narasi primordialisme di dunia maya adalah akibat dari agama yang semakin sering diperjual-belikan atau diperdagangkan dalam bentuk komoditas (*religious market*) yang dikonsumsi oleh masyarakat Muslim sebagai penduduk mayoritas di Indonesia. Komodifikasi agama tersebut dapat dipahami sebagai rangkaian aksi-tindakan dari gerakan sosial-keagamaan yang dimobilisasi oleh para aktor yang tergabung dalam sebuah kelompok tertentu (GNPF-MUI).

Di samping itu, apa yang menjadi titik utama problematika dalam penelitian ini adalah bagaimana *positioning* GNPF-MUI dan tim pemenangan pasangan calonnya terhadap Ahok itu sendiri baik di saat pra- maupun pasca- kasus penistaan agama yang dituduhkan kepadanya di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada kenyataannya telah berada pada situasi yang tidak harmonis. Di saat PILKADA DKI Jakarta 2017 baru mulai babak barunya, tim relawan dan dukungan Ahok sebagai petahana dan pemimpin yang dianggap baik dalam pengambilan kebijakan dan sistem birokrasi pemerintahan DKI Jakarta, para aktor GNPF-MUI dan tim pemenangan pasangan calonnya menyadari bahwa melawan Ahok di PILKADA DKI Jakarta 2017 secara kalkulatif suara dan finansial adalah berat. Akan tetapi

³⁸ Wahid, "Media and Commodification of Islamic Symbols in Political Campaign Towards General Election of Governor/Vice Governor of DKI Jakarta 2017" *Journal of Computational and Theoretical Nanoscience* 24, no. 4 (2018): 2213–2217.; Triantoro, "Praktik Politik Identitas Dalam Akun Media Sosial Anies-Sandi" *Jurnal ILMU KOMUNIKASI* 16, no. 1 (2019); Luthfi Assyaukanie, "Religion as a Political Tool Secular and Islamist Roles in Indonesian Elections," *Journal of Indonesian Islam* 13, no. 2 (2019): 454–479.

karena ada peristiwa Surat al-Maidah 51 di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, mereka melihat ada perhitungan lain yang dapat mengalahkan Ahok di kepemimpinan Jakarta, yaitu melakukan serangkaian tindakan penggunaan agama secara masif sebagai komoditas publik untuk dapat memenangkan kompetisi politik pada satu sisi, sekaligus memenangkan hegemoni ekonomi dari kelompok masyarakat atas secara ekonomi yang dianggap sebagai penyokong kekuatan Ahok di DKI Jakarta dan Indonesia, di sisi yang lain. Di sini, peneliti melihat adanya gejala sosial-politik yang menjadikan agama sebagai komoditas publik (*religious market*) demi terpenuhinya kepentingan politik dan kekuasaan ekonomi (*political market*) yang dilakukan oleh kelompok GNPF-MUI dan tim pemenangan pasangan calonnya.

Berdasarkan rasionalisasi inilah, tidak sedikit ilmuwan dan peneliti politik yang berusaha meneliti makna PILKADA DKI Jakarta 2017 dan kasus penistaan agama sebagai hasil dari praktik politik identitas. Namun sayangnya, dari sekian banyak analisis tersebut, ada satu masalah yang belum dianalisis yaitu tentang bagaimana PILKADA DKI Jakarta 2017 menjadi lahan subur akan praktik komodifikasi agama yang ditinjau dari analisis tindakan secara *political economy* yang dilakukan oleh sejumlah kelompok gerakan politik Islam yang tergabung dalam aliansi GNPF-MUI (institusi politik keagamaan) melalui penguasaan terhadap simbol agama (*religious monopolies*) dan tim pemenangan pasangan calonnya di PILKADA DKI Jakarta 2017 melalui *political market*.

Penelitian politik dalam ranah agama sangat banyak, namun sebaliknya penelitian agama dalam ranah politik begitu langka. Dengan demikian, penelitian

ini memiliki fokus kajian pada bagaimana kelompok gerakan politik Islam yang tergabung dalam GNPF-MUI dan tim pemenangan calon gubernur menggunakan kekuasaannya untuk berinteraksi secara strategis dengan tokoh ulama dan massa Islam untuk menjadikan agama sebagai komoditas publik selama perhelatan PILKADA DKI Jakarta dan apa makna semua ini secara eksplanatif dan konseptual dengan pendekatan analisis *political economy*.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Penelitian disertasi ini dengan sengaja mengangkat tema isu agama dan isu politik dengan topik penelitian “Komodifikasi Agama yang dilakukan oleh kelompok gerakan politik Islam: GNPF-MUI dan Tim pemenangan PILKADA dengan mengambil kasus PILKADA Daerah Khusus Istimewa Jakarta pada tahun 2017. Penelitian ini berangkat dari identifikasi beberapa sumber masalah yang terjadi di PILKADA DKI Jakarta 2017 sebagaimana berikut ini:

Pertama; problem harmonisasi agama selama perhelatan PILKADA DKI Jakarta 2017 mengalami pemudaran di mana muncul kelompok-kelompok Islam yang melakukan sejumlah aksi intoleran yang ditujukan kepada Ahok sebagai salah satu calon Gubernur sekaligus tertuduh penista agama di kala itu.

Kedua, sentimen agama semakin menjamur di tengah masyarakat DKI Jakarta yang secara khusus ditujukan kepada masyarakat yang beretnis Cina pasca kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok hingga pelaksanaan PILKADA DKI Jakarta 2017.

Ketiga, maraknya aksi gerakan politik Islam yang dilakukan oleh GNPF-MUI yang menginisiasi serta mengomandoi terjadinya sejumlah Aksi Bela Islam dengan cara memobilisasi massa Islam sebagai masyarakat pengunjuk rasa permasalahan penistaan agama sekaligus sebagai masyarakat pemilih di PILKADA DKI Jakarta 2017. ,

Keempat, menguatnya politik identitas atau politik aliran keagamaan yang muncul di tengah-tengah kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada gubernur DKI Jakarta Ahok hingga mengalami pergeseran paradigma menjadi kekuatan politik elektoral di kontestasi PILKADA DKI Jakarta 2017.

Kelima, munculnya politik populis yang menjadi bagian dari strategi kampanye politik dari tim pemenangan pasangan calon di PILKADA DKI Jakarta 2017. Kendatipun realitanya, politik populisme yang ada tentang narasi konfrontatif antara masyarakat Pribumi dan masyarakat non-pribumi, namun sayangnya, politik populisme ini justru mengarah dan bergeser pada persoalan perbedaan sosial keagamaan.

Keenam, munculnya narasi-narasi kepemimpinan politik berbasis legitimasi agama selama PILKADA DKI Jakarta 2017 bahkan narasi tersebut menjadi komoditas yang terus disampaikan di pelbagai even tradisi ritual keagamaan.

Ketujuh, tindakan politisasi agama sebagai cara untuk mengambil hati masyarakat pemilih di Jakarta pasca kasus penistaan agama yang dilakukan oleh tertuduh calon gubernur dari petahana, Ahok. Dalam hal ini, agama dijadikan sebagai objek untuk kepentingan politik praktis.

Memahami dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di PILKADA DKI Jakarta 2017 tersebut, peneliti sengaja memilih batasan masalah lain, yaitu seputar isu komodifikasi agama atau penggunaan agama sebagai komoditas (*market process*) pada PILKADA DKI Jakarta 2017 yang tidak mungkin dilakukan oleh selain aktor yang memiliki kekuasaan atas pengetahuan keagamaan (*religious monopolies*) dan atas massa Islam sehingga aktor-aktor ini dapat peneliti asumsikan yang tergabung di GNPF-MUI. Kemudian, dimungkinkan adanya kekuasaan dari tim pemenangan pasangan calon Gubernur atas penyebaran bentuk komodifikasi agama tersebut melalui penguasaan dan pengalamannya dalam strategi pemenangan politik melalui kampanye politik (*political market*).

Komodifikasi agama mempunyai kemiripan dengan politisasi agama dalam hal penyalahgunaan terhadap agama dalam konteks ranah yang berbeda. Misalnya, di dalam agama, tentu saja terdapat simbol dan ritual keagamaan yang sangat lazim diketahui dan dijalankan oleh para pemeluknya. Simbol dan ritual keagamaan tersebut dapat saja disalahgunakan oleh individu maupun golongan untuk tujuan kepentingannya. Dalam konteks ranah komodifikasi, agama dipraktikkan sebagai sesuatu yang dapat diperjual-belikan secara komersial demi kepentingan yang bersifat ekonomis. Sedangkan konteks ranah politisasi, agama dipraktikkan sebagai propaganda tertentu yang bertujuan pada kepentingan yang bersifat politis. Di dalam kasus PILKADA DKI Jakarta 2017, peneliti melihat adanya komersialisasi simbol dan ideologi politik agama (konteks komodifikasi) bersamaan dengan politisasi agama untuk tujuan pemenangan pasangan calon gubernur yang didukung oleh GNPF-MUI.

Secara umum, peneliti lebih mengambil batasan penelitian pada konteks komodifikasi agama di PILKADA DKI Jakarta 2017 yang satu sisi tidak keluar dari unsur keyakinan, melainkan peneliti juga melihat di sisi yang lain adanya ekonomi politik (*political economy*) di balik politik berbasis keyakinan-keagamaan tersebut. Oleh karenanya, dengan pendekatan analisis *political economy* penelitian ini memiliki fokus utama yaitu *pertama*, bagaimana preferensi-preferensi individual dalam motif dan tindakan kelompok gerakan politik Islam; GNPF-MUI dan tim pemenangan calon Gubernur dalam mengonsumsi agama sebagai komoditas politik sehingga menciptakan rangkaian-rangkaian tindakan yang menghasilkan perilaku politis tertentu pada kelompok-kelompok yang memaknai agama secara ekonomis dan konsumtif. *Kedua*, mengapa mereka melakukannya dan apa motif pikiran serta tindakan di balik tindakan komodifikasi agama mereka dalam struktur simbolis yang diproduksi secara berulang kali dalam penggunaan isu agama serta simbol-simbolnya sebagai komoditas publik-politik karena menganggapnya masih dalam konteks ruang keagamaan yang permisif. Kemudian, penelitian ini mengambil batasan waktu: menjelang dan di saat Pilkada DKI Jakarta 2017 baik pada putaran pertama maupun putaran kedua.

2. Batasan Masalah

Masalah-masalah yang sudah diidentifikasi oleh peneliti di atas, kemudian peneliti membatasinya sebagaimana berikut ini:

- a. Proses komodifikasi agama di PILKADA DKI Jakarta 2017 dengan target untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk komodifikasi agama tersebut yang dilakukan oleh GNPF-MUI dan tim pemenangan pasangan

calonnya, sekaligus perbedaan strategis antara komodifikasi agama GNPf-MUI dan tim pemenangan pasangan calon.

- b. Makna komodifikasi agama yang dilakukan oleh GNPf-MUI dan tim pemenangan pasangan calon di PILKADA DKI Jakarta 2017; serta motif yang melatarbelakangi komodifikasi agama tersebut.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah yang didasarkan pada pendekatan analisis *political economy* dan metode data netnografi dengan penekanan fokus substansial terhadap *meaning making* (pemaknaan suatu peristiwa) dalam proses komodifikasi agama di PILKADA DKI Jakarta 2017 yang dilakukan oleh GNPf-MUI dan tim pemenangan pasangan calon. Oleh karena itu, dua rumusan masalahnya adalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana GNPf-MUI dan tim pemenangan pasangan calon Gubernur melakukan komodifikasi agama di PILKADA DKI Jakarta 2017?
2. Mengapa GNPf-MUI dan tim pemenangan pasangan calon Gubernur melakukan komodifikasi agama di PILKADA DKI Jakarta 2017; serta apa motif di balik komodifikasi agama tersebut?

D. Tujuan Penelitian

Secara keseluruhan, tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman secara eksploratif tentang bagaimana komodifikasi agama itu muncul dari kelompok GNPf-MUI dan tim pemenangan politik selama proses penyelenggaraan PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) DKI Jakarta 2017.

Khususnya, proses-proses penting yang mengasosiasikan hubungan-hubungan erat antar-aktor sehingga dapat memengaruhi pemahaman dan pandangan masyarakat dalam perkembangan perpolitikan di Jakarta.

Oleh karenanya, secara teknis, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan kejelasan tentang komodifikasi agama yang dilakukan oleh GNPF-MUI dan tim pemenangan pasangan calon di PILKADA DKI Jakarta 2017.
2. Untuk menganalisis dan menemukan makna serta motif di balik komodifikasi agama yang dilakukan oleh GNPF-MUI dan tim pemenangan pasangan calon di PILKADA DKI Jakarta 2017.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian tindakan komodifikasi agama di PILKADA DKI Jakarta 2017 memiliki relevansi untuk diteliti karena beberapa alasan baik bersifat teoritis dan praktis.

1. Bersifat Teoritis

- a. Jika penelitian ini dikaitkan secara umum dengan penelitian-penelitian seputar PILKADA DKI Jakarta 2017, maka sejatinya ia adalah penelitian pengembangan atas penelitian-penelitian tematik lainnya. Akan tetapi, peneliti mengklaim bahwa penelitian ini merupakan penelitian baru atas literatur-literatur akademis sebelumnya yang terkait dengan studi agama dan PILKADA DKI Jakarta 2017, terutama penelitian yang menggunakan sudut pandang politik identitas, sentimen

agama dan populisme Islam. Berbeda dengan literatur tersebut, penelitian ini menemukan sisi kebaruannya ketika tindakan komodifikasi agama yang terjadi dan berkembang pada PILKADA DKI Jakarta 2017 yang dilakukan oleh kelompok GNPf-MUI dan tim pemenangan pasangan calon bukan hanya bertujuan untuk keuntungan politis dalam rangka perolehan suara elektoral untuk pasangan calon yang mereka dukung, akan tetapi secara ekonomi politik, ia menyebabkan *islamic political engagement* dan pasar 212 sebagai *new-market disruption*.

- b. Penelitian ini memberikan masukan secara teoritis dalam pengembangan studi Islam yang dihubungkan dengan PILKADA.
- c. Keterbatasan hasil studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada peneliti lain untuk menindaklanjuti persoalan gerakan kelompok politik Islam; GNPf-MUI tentang kepemimpinan non-Muslim dari perspektif hukum tata negara.

2. Bersifat Praktis

Berkaitan dengan manfaat praktis dari penelitian komodifikasi agama di PILKADA DKI Jakarta 2017 ini, peneliti berharap hasil penelitian ini (a) dapat menambah khazanah pengetahuan bagi kalangan akademisi dan masyarakat pada umumnya serta memberi gambaran mengenai komodifikasi agama dan PILKADA. (b) hasil disertasi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi dan pemangku kebijakan publik tentang PILKADA yang bebas dari sensitif-suku, agama,

ras dan antar golongan serta praktik pemanfaatan tempat ibadah sebagai lahan produksi politik elektoral.

F. Kerangka Teoretis

Untuk mendapatkan penjelasan atas fenomena tindakan komodifikasi agama dalam PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) DKI Jakarta tahun 2017, maka penelitian ini memerlukan kerangka teori yang memiliki fokus pada analisis tindakan *political economy*, sehingga peneliti memilih dua teori; yaitu teori “Tindakan Kolektif” Mancur Olson dan “Tindakan Komunikatif” Jürgen Habermas.

1. Teori Tindakan Kolektif

Teori tindakan kolektif diprakarsai oleh Mancur Olson dan Anthony Downs. Teori ini merupakan turunan dari teori pilihan kolektif (berangkat dari teori pilihan rasional) yang secara umum menerapkan metode-metode ekonomi terhadap politik³⁹ (*political economy*). Dengan kata lain, pilihan publik berhubungan erat dengan model berbasis pasar, yang pada intinya memandang bahwa warga masyarakat sebagai konsumen dan sekaligus sebagai pemilih⁴⁰. Bahkan, teori tindakan kolektif mennganggap bahwa hubungan barang publik dan tindakan kolektif adalah sangat erat⁴¹. Olson menyatakan bahwa teorinya tentang tindakan

³⁹ James Buchanan, “Public Without Romance: a Sketch of Positive Public Choice Theory and It’s Normative Implications,” dalam *The Theory of Public Choice*, ed. James M. Buchanan and Robert D. Tollison, (Ann Arbor: University of Michigan Press: 1984), 13.

⁴⁰ Richard A. Wandling, “Rasionalitas dan Pilihan Rasional, dalam *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Ke-21 Jilid 1*,” ed. John T. Ishiyama dan Marijke Breuning, terj. A. Fedyani S, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2013), 63. Robert Ekelund and Robert D. Tollison, *Microeconomics*, (Boston: Little Brown, 1986), 440.

⁴¹ Mancur Olson, *The Logic of Collective Action*, (Cambridge Mass: Harvard University Press, 1965).

kolektif akan berlaku dengan sangat baik untuk kelompok kepentingan ekonomi dan bukan untuk kelompok kepentingan filantropi⁴².

Teori tindakan kolektif melihat ekonomi sebagai pertukaran pasar, produksi, dan konsumsi. Sedangkan politik sebagai pertukaran suara, kekuasaan dan hubungan kewenangan. Politik dipahami hanya sebagai proses-proses di mana individu berusaha memenuhi kebutuhan atau pilihan mereka yang terkait dengan barang-barang (*goods*) yang dibutuhkan oleh orang banyak atau yang bersifat publik⁴³. Oleh karenanya, perilaku politik itu sama dengan perilaku ekonomi individual di mana orang akan mempertimbangkan untuk memilih biaya (*cost*) dan keuntungan (*benefit*) dalam setiap penentuan tindakannya⁴⁴. Proses-proses politik tersebut merupakan akumulasi dari tindakan-tindakan masyarakat dengan kepentingan diri mereka masing-masing sehingga dampak politik yang sudah terjadi atau aktual dapat dijelaskan dengan konsep kepentingan diri itu sendiri (kepentingan diri dalam artian ilmu ekonomi).

Dari sini, dapat dipahami bahwa proses politik di mana individu-individu itu memiliki peran politik yang sekalipun berbeda-beda, akan tetapi mereka sama-sama dimotivasi oleh kepentingan pribadi dan siap melakukan pertukaran untuk mencapai kepentingan pribadi itu. Faktor kepentingan dan persepsi kegunaan (*utility*) yang maksimal dalam proses pemilihan umum menjadi lebih superior dari

⁴² Ibid., 64-65.

⁴³ James A. Caporaso dan David P. Levine, *Teori-teori Ekonomi Politik*. terj. Suraji, Cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 323.

⁴⁴ Todd Landman, *Issues and Methods in Comparative Politics; An Introduction*, (London: Routledge, 2000), 136.

pada faktor ideologi partai politik, faktor *membership* (keanggotaan dan kesetiaan terhadap partai) dan faktor program kebijakan calon yang dikampanyekan.

Kegunaan yang maksimal dapat dimasukkan sebagai sebuah model utilitarian yang membahas partisipasi perilaku kolektif yang dialami oleh individu yang terlibat di dalamnya karena ada suatu “imbalan” (*reward*) dan “biaya” (*cost*). Imbalan (*reward*) merupakan konsep insentif-selektif (*selective incentives*) yang dicetuskan oleh Olson meliputi dari: prestise, gaji, dan kepemimpinan untuk memperoleh daya tarik partisipasi kolektif dari setiap individu. Sementara biaya (*cost*) yang berasosiasi dengan partisipasi tindakan kolektif di antaranya seperti waktu, uang, keamanan personal dan hilangnya pekerjaan.⁴⁵ Konsep insentif-selektif (*selective incentives*) dapat dikatakan sebagai dorongan-dorongan stimulatif yang ditawarkan oleh suatu kelompok kepada orang-orang agar mau memilih ikut terlibat (partisipasi) atau tidak ikut terlibat dalam suatu tindakan kolektif. Dengan demikian, melalui dorongan selektif tersebut, kelompok dapat memobilisasi mereka sebagai para pendukung atas tindakan-tindakannya.

Berkaitan dengan kepentingan, Olson melihat dari sejumlah fenomena politik yang dapat dianggap penting dalam kajian politik adalah pengorganisasian kelompok kepentingan (*interest group*) dan pengorganisasian pengaruh yang keduanya sebagai barang publik. Analogi barang publik di sini mempunyai arti karena sama-sama pasokannya terbatas dan bisa mengalami masalah pemboncengan atau penumpang gratis (*free ride*).⁴⁶ Masalah “penumpang gratis”

⁴⁵ Nelson A. Pichardo. Resource Mobilization: an Analysis of Conflicting Theoretical Variations. *Spring The Sociological Quartely*, Vol. 29, No. 1, 1988., pp. 97-110.

⁴⁶ Mancur Olson, Jr. *The Logic of Collective Action*, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1965).

ini berkaitan dengan kelompok-kelompok kepentingan, dan khususnya kelompok kepentingan yang besar. Pengorganisasian kelompok kepentingan tersebut bisa jadi dilakukan hanya oleh satu orang saja secara sendirian. Menurut Olson, kemunculan kelompok kepentingan adalah pemahaman terhadap konsep kepentingan pribadi itu sendiri. Bahwa individu bersedia untuk berpartisipasi dalam sebuah kelompok karena mereka dipaksa, atau diberi insentif selektif atau karena individu itu merasa dirinya bagian dari “kelas istimewa”⁴⁷. Pengoorganisasin ini yang dapat mendorong serta memobilisasi massa ikut terlibat di dalam aksi-aksi yang dibentuknya.⁴⁸

Bagi teori tindakan kolektif, seluruh individu dengan segala keterlibatannya (partisipasinya) dalam sebuah tindakan yang bersifat kolektif (misalnya dalam penelitian ini, aksi bela Islam atau aksi penolakan pemimpin Non-Muslim) dianggap sangat mahal (membutuhkan biaya yang tidak sedikit). Oleh karenanya, kelompok politik tentu memiliki kepentingan (dalam makna rasional publik) untuk tidak berpartisipasi dan terlibat di dalamnya karena bagaimanapun juga kelompok politik ini akan mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari sejumlah aksi-aksi massa tersebut. Inilah yang disebut dengan “jalan rahasia”.⁴⁹

⁴⁷ James A. Caporaso dan David P. Levine, *Teori-teori Ekonomi Politik*. terj. Suraji, Cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 340-342.

⁴⁸ Marjorie Randon Hershey, “Partai Politik Sebagai Mekanisme Pilihan Rasional”, dalam *Handbook Partai Politik*, ed. Richard S. Katz dan William Crotty, terj. Ahmad Asnawi, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2014), 129-130.

⁴⁹ Alessandro Pizzorno, “Identitas dan Tindakan Kolektif”, dalam *Sosiologi: Sejarah dan Berbagai Pemikirannya*, ed. Anthony Giddens, Daniel Bell, Michel Forse, etc. Terj. Ninik Rochani, (Bantul: Kreasi Wacana, 2009), 178-200.

2. Teori Tindakan Komunikatif

Teori tindakan komunikatif ini digagas oleh Jurgen Habermas di mana ia lebih mempertimbangkan seluruh fungsi bahasa yang terlahir dari proses interaksionisme simbolik Mead⁵⁰, konsep permainan bahasa (*language games*) Wittgenstein⁵¹, teori tindak-wicara (*speech-act*) Austin⁵², hermeneutika Gadamer dan teori tindakan Weber.⁵³ Tindakan diartikan sebagai suatu hal yang berbeda dengan perilaku. Perilaku manusia adalah aktivitas secara umum –apakah eksternal atau internal- baik tidak berbuat atau pasif mengikuti sesuatu yang terjadi. Namun tindakan adalah aktivitas tersebut yang ada dalam perilaku, di mana aktor melekatkan makna subjektif kepada perilaku tersebut⁵⁴.

Tindakan berbeda dengan gerak dan kerja badaniah yang juga keduanya sama-sama dilakukan dan kebebasan di dalamnya hanya bersifat sekunder. Tindakan sebagai peristiwa yang dapat diamati yang terjadi di dunia, tindakan juga memang tampak sebagai gerak tubuh makhluk hidup biasa. Ia dikendalikan oleh sistem saraf pusat, gerak-gerak ini merupakan substrata yang menjadi landasan dilakukannya berbagai tindakan. Dengan tindakan, agen mengubah sesuatu di dunia ini. Tindakan yang digunakan oleh Habermas dimaksudkan untuk ekspresi-ekspresi

⁵⁰ George H. Mead, *Mind, Self, and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist* (Chicago: University of Chicago Press, 1934).

⁵¹ Ludwig Wittgenstein, *On Certainty* (New York: New York Press, 1972).

⁵² J. L. Austin, *How To Do Things with Words* (Oxford: Oxford Press, 1962).

⁵³ Jurgen Habermas, *The Theory of Communicative Action: Reason and The Rationalization of Society Vol. I*, Trans. Thomas MacCharty, (Boston: Beacon Press, 1981), 95.

⁵⁴ Jurgen Habermas, *The Theory of Communicative Action: Reason and The Rationalization of Society Vol. I*, Trans. Thomas MacCharty, (Boston: Beacon Press, 1981), 279.

simbolis yang dengannya aktor menciptakan hubungan paling tidak dengan satu dunia (sebagaimana juga dia selalu berhubungan dengan dunia objektif).⁵⁵

Di dalam tindakan tersebut terdapat dua relevansi, yaitu relevansi kausal dan relevansi semantik. Relevansi kausal yaitu gerak yang dilakukan oleh seorang subjek ketika melakukan intervensi ke dalam dunia (bertindak secara instrumental), contoh menegakkan tubuh, mengembangkan tangan, mengangkat lengan, melipat kaki dan lain-lain. Relevansi semantik, yaitu dari proses intervensi tersebut, subjek melekatkan suatu makna (mengekspresikan dirinya secara komunikatif), contoh gerak kerongkongan, lidah, bibir, menganggukkan kepala dan lain-lain⁵⁶.

Tindakan komunikatif yaitu manakala para agen yang terlibat tidak diatur dengan kalkulasi egosentris keberhasilan namun dengan aktus-aktus pencapaian pemahaman. Dalam tindakan komunikatif, orientasi utama partisipan bukanlah mencapai keberhasilan pribadi, para partisipan tersebut dapat mengejar tujuan-tujuan asalkan mereka dapat mengharmoniskan rencana tindakan mereka berdasarkan definisi-situasi yang sama. Dalam hal ini negosiasi definisi-situasi adalah suatu elemen mendasar bagi upaya interpretif yang diperlukan bagi tindakan komunikatif.⁵⁷

Habermas berasumsi bahwa tindakan konkret dapat diklasifikasikan berdasarkan pada dua sudut pandang, yaitu tindakan strategis dan tindakan komunikatif, sehingga sebuah tindakan dapat dijabarkan dengan dua tipe analitis tersebut. strategis berarti pengaruh resiprokal satu sama lain oleh pihak lawan yang

⁵⁵ Jurgen Habermas, *The Theory of Communicative Action: Reason and The Rationalization Vol. 1*, ..., 96.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ibid., 286

bertindak secara rasional-bertujuan (tindakan berorientasikan pada keberhasilan). Sedangkan istilah “komunikatif” berarti proses pencapaian pemahaman di antara para anggota suatu dunia-kehidupan. Oleh karenanya, tindakan sosial dapat dipilah-pilah menurut apakah para partisipan menerapkan sikap orientasi pada keberhasilan atau pada orientasi pencapaian pemahaman⁵⁸. Di sini, Habermas berkeinginan untuk memahami unsur-unsur struktural proses pencapaian pemahaman, di mana melaluinya, peneliti dapat mengambil beberapa asumsi pragmatis umum yang berkaitan dengan tindakan komunikatif.

Tercapainya pemahaman (*Verständigung*) dipandang sebagai suatu proses tercapainya kesepakatan (*Einigung*) antar subjek yang berbicara dan bertindak. Suatu kesepakatan yang dicapai secara komunikatif atau kesepakatan yang secara timbal balik diasumsikan terjadi di dalam tindakan komunikatif, dipilah-pilah berdasarkan kandungan proposisionalnya. Dikarenakan adanya struktur linguistik tersebut, kesepakatan ini tidak dapat hanya diraih melalui pengaruh dari luar, kesepakatan ini harus diterima atau diyakini validitasnya oleh para partisipan. Kesepakatan berbeda dengan persetujuan secara *de facto* (*Übereinstimmung*).⁵⁹

Proses tercapainya pemahaman berusaha merai suatu kesepakatan yang memenuhi syarat-syarat persetujuan yang bermotif rasional terhadap isi wicara. Suatu kesepakatan yang dicapai secara komunikatif memiliki basis rasional, dia tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak, apakah secara instrumental melalui intervensi di dalam situasi secara langsung atau secara strategis dengan cara

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid., 287.

mempengaruhi keputusan pihak lawan. Kesepakatan memang bisa dicapai secara objektif melalui paksaan, namun yang muncul secara terang-terangan melalui pengaruh luar atau penggunaan kekerasan tidak dapat secara subjektif disebut sebagai kesepakatan. Kesepakatan terletak pada keyakinan bersama.⁶⁰

Dalam pencapaian pemahaman, penggunaan bahasa komunikasi masyarakat adalah hal yang penting sebagai fokus bahasan. Di kehidupan sehari-hari, penggunaan bahasa itu pun mengalami kemunduran rasionalitas yang bersifat paradigmatik. Bahwa Ketika manusia dalam masyarakat tersebut berasumsi bahwa ia telah mengukuhkan dirinya melalui aktivitas-aktivitas para anggotanya yang terkoordinasi secara sosial. Dalam pandangan Habermas, manusia tersebut sebenarnya dikoordinasi dan dikonstruksi melalui komunikasi, bukan hanya secara sosial saja demi tercapainya pemahaman yang rasional.

Model tindakan komunikatif tidak menyamakan tindakan dengan komunikasi. Bahasa adalah sarana komunikasi yang mencari pemahaman timbal balik, sementara aktor, yang berusaha mencapai pemahaman satu sama lain agar bisa menata tindakan-tindakan mereka, mengejar tujuan-tujuan tertentu...⁶¹

Peneliti meminjam teori *speech-act* Austin⁶² di mana pemakaian bahasa yang berorientasi pada tercapainya pemahaman adalah mode penggunaan bahasa orisinal, di mana pemahaman secara tidak langsung, pemberian sesuatu untuk dipahami atau membiarkan sesuatu dipahami, dan penggunaan bahasa secara instrumental secara umum, bersifat parasitik (sekunder). Oleh karenanya, dalam

⁶⁰ Ibid., 288.

⁶¹ Jurgen Habermas, *The Theory of Communicative Action: Reason and The Rationalization of Society...*, ix

⁶² J. L. Austin, *How To Do Things with Words* (Oxford: Oxford University Press, 1975)

tercapainya pemahaman tersebut ada dua tindakan dalam pemakaian bahasa, yaitu: “tindakan lokusioner” dan “tindakan ilokusioner”.

Tindakan lokusioner yaitu untuk menunjuk kandungan kalimat yang proposisional (p) atau isi kalimat nominal yang proposisional (bahwa p). Dengan menggunakan lokusioner, pembicara mengekspresikan keadaan-keadaan (*states of affairs*), dia mengatakan sesuatu. Sedangkan, tindakan ilokusioner yaitu di mana pembicara menampilkan (*perform*) suatu tindakan ketika mengatakan sesuatu. Peran ilokusioner membentuk mode kalimat (Mp) yang digunakan sebagai pernyataan, janji, perintah, persetujuan atau semacamnya. Dalam kondisi standar, mode ini diekspresikan dengan kata kerja performatif dalam bentuk orang pertama; makna tindakan dapat dilihat terutama di dalam fakta bahwa frase “dengan ini” dapat ditambahkan pada komponen ilokusioner percakapan: “dengan ini saya berjanji kepadamu (memerintahkamu, mengaku kepadamu) bahwa “p”.⁶³

Tujuan ilokusioner adalah upaya identifikasi diri dalam tindak-wicara. Dengan tindakan ilokusioner, pembicara membiarkan pendengarnya mengetahui kalau dia menginginkan apa yang dia katakan dipahami sebagai sapaan, perintah, peringatan, penjelasan dan lain-lain.⁶⁴ Kemudian muncul “tindakan perlokusioner” di mana pembicara menimbulkan efek bagi pendengar. Dengan melakukan percakapan dia menyebabkan terjadinya sesuatu di dunia ini. Efek perlokusioner muncul dari fakta bahwa tindakan ilokusioner menubuh pada konteks interaksi. Bahkan tindakan efek perlokusioner yang muncul dari fakta bahwa tindakan

⁶³ Ibid., 289.

⁶⁴ Ibid., 290.

ilokusioner kadang-kadang berperan di dalam konteks interaksi strategis. Efek-efek ini muncul ketika suatu percakapan dengan orientasi keberhasilan memperlambat percakapan untuk tujuan yang kaitannya dengan makna hal-hal yang dikatakan tidak dapat dipastikan.⁶⁵

Tiga akar tindakan komunikatif (3 komponen struktural tindak-wicara/*speech acts*) adalah lokusioner (proposisional), ilokusioner (*illocutionary*) dan perlokusioner (ekspresif). Korelasi ketiga komponen tindak-wicara tersebut yaitu dengan kognisi, kewajiban dan ekspresi⁶⁶. Solidaritas yang dibangun melalui ritual, kewajiban terhadap kolektivitas terbagi pada level tindakan yang dipandu norma menjadi pengakuan intersubjektif atas norma yang ada, di satu sisi, dengan motif bertindak yang berlawanan dengan norma yang ada, di satu sisi lainnya. kognisi, kewajiban dan ekspresi pada akhirnya membuka kemungkinan bagi sarana komunikasi untuk memerankan fungsi baru, selain fungsi pencapaian pemahaman, koordinasi tindakan serta sosialisasi aktor. Berdasarkan aspek pencapaian pemahaman, tindakan komunikatif mentransmisikan pengetahuan yang tersimpan secara kultural. Tradisi kultural mereproduksi dirinya melalui media tindakan yang berorientasi pada pencapaian pemahaman.⁶⁷

Dalam pemikiran atomistis, hubungan subjek dengan dunia objek mempunyai dua macam; yaitu representasi dan tindakan. Konteks pertama (representasi) merupakan pengejawantahan dari tipe rasionalitas yang diasosiasikan dengan kognitif-instrumental di mana subyek atau orangnya mampu memperoleh

⁶⁵ Ibid., 289.

⁶⁶ Jurgen Habermas, *The Theory of Communicative Action: Lifeworld and System a Critique of Functionalist Reason*, Trans. Thomas MacCarthy. (Boston: Bacon Press, 1987), 62.

⁶⁷ Ibid., 63.

pengetahuan tentang lingkungan yang tidak tentu dan memanfaatkannya secara efektif dengan beradaptasi dan merekayasa lingkungan itu sesuai dengan atau berdasarkan pada kecerdasannya. Kemudian, konteks kedua (tindakan) dapat dipahami bahwa terdapat fakta adanya suatu tindakan itu berorientasi pada tujuan dari berbagai individu yang dikoordinasikan secara sosial. Habermas melihat konteks tindakan-berorientasi tujuan atau tindakan-bertujuan individu itu bahkan bergeser menuju ke struktur interaksi sosial yang menjadi tempat utama untuk terwujudnya tindakan-tindakan yang berorientasi tujuan tersebut.

Habermas berargumen bahwa kemampuan manusia dalam berkomunikasi memiliki penguasaan inti yang universal-struktural terhadap aturan bahasa yang dipelajarinya. Di dalam kompetensi komunikasi tersebut bukan hanya menyiratkan kemampuan dalam memproduksi kalimat-kalimat secara gramatikal saja, akan tetapi manusia juga mampu menceritakan dirinya kepada dunia dan kepada subjek (orang) lainnya tentang maksud, perasaan dan hasrat-hasratnya. Pada masing-masing dimensi tersebut, manusia selalu mengklaim validitas atau kebenaran dari apa yang ia katakan dan ia maksudkan. Misalnya, klaim atas kebenaran dari apa yang dikatakan menyangkut tentang dunia objektif, atau legitimasi pembicaraan seseorang tentang nilai-nilai dan norma-norma di mana klaim-klaim tersebut masih bersifat subjektif yang masih bisa diperdebatkan dan dikritik atau dipertahankan dan direvisi.⁶⁸

⁶⁸ Jurgen Habermas, *The Theory of Communicative Action: Lifeworld and System a Critique of Functionalist Reason*. Trans. Thomas MacCarthy. (Boston: Bacon Press, 1987),

Tindakan komunikatif tergantung kepada konteks situasional, yang ada gilirannya merepresentasikan segmen dunia kehidupan partisipasi di dalam interaksi⁶⁹. Kemudian ia sepenuhnya melibatkan bahasa sebagai media pencapaian pemahaman dalam tawar-menawar tentang suatu situasi yang mesti disepakati bersama. Dalam pemahaman lain, situasi tersebut dapat berupa definisi yang harus disepakati secara umum di mana manusia bisa menguasainya dengan klaim kebenaran atas tafsiran-tafsiran situasional yang dilakukannya dan dikonseptualisasikannya.

Klaim kebenaran atas norma sosial dapat tercipta dari otoritas moral yang berakar pada hal-hal yang sakral. Emile Durkheim dalam bukunya "*Elementary Forms of Religious Life*" mengemukakan bahwa simbol sakral tertua dapat mengekspresikan konsensus normatif yang dibangun dan diperbarui dalam praktik ritual. Konsensus normatif yang dibangun secara ritual dan diperantarai secara simbolis adalah inti dari identitas kolektif.⁷⁰ Dalam pandangan Habermas, normativitas simbol sakral tersebut diistilahkan dengan konsep "linguistifikasi hal-hal sakral". Dia berargumen bahwa proses-proses di mana pada awalnya praktik ritual dan simbolisme religius bisa memenuhi fungsi-fungsi sosial dan secara perlahan beralih ke wilayah tindakan komunikatif. Melalui linguistifikasi komunikatif tersebut, di dalam konsensus-konsensus religius dasar, struktur tindakan yang diorientasikan pada pencapaian pemahaman menjadi semakin efektif

⁶⁹ Jurgen Habermas, *The Theory of Communicative Action: Reason and The Rationalization of the Society...*, 279.

⁷⁰ Emile Durkheim, *Elementary Forms of Religious Life*, (New York, The Free Press, 1995)

di dalam reproduksi budaya, integrasi sosial, dan pembentukan kepribadian. Dan pemahaman linguistikasi hal-hal sakral ini adalah rasionalisasi dunia kehidupan.

Teori tindakan komunikatif Habermas menandai adanya pergeseran penekanan dari segi pragmatik universal di mana situasi bertutur yang ideal berfungsi sebagai pemahaman normatif, menuju diskursus atau argumentasi itu sendiri. Kriteria rasionalitas bagi tindakan sosial ditempatkan dan dipertegas di dalam tindakan berbicara itu sendiri.⁷¹

G. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian tentang PILKADA DKI Jakarta 2017 bukanlah bahasan penelitian yang baru. Kebanyakan penelitian tersebut berkaitan dengan isu politik identitas, sentimen agama-ras, mobilisasi umat Islam dan penggunaan simbol agama dalam kampanye. Namun, apabila fenomena PILKADA DKI Jakarta 2017 tersebut dikaitkan dengan isu komodifikasi agama dalam analisis tindakan masih relatif jarang. Kendati demikian, perlu adanya kajian mendalam terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sehingga diharapkan dapat menemukan titik persamaan dan perbedaan yang otoritatif dalam konteks studi literatur. Oleh karenanya, berikut ini peneliti membagi penelitian terdahulu menjadi empat klaster bagian dengan prioritas relevansinya dengan objek kajian penelitian ini.

⁷¹ Peter Beilharz, *Teori-teori Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 221.

1. Klaster *Literatur Review* tentang PILKADA DKI Jakarta 2017

a. PILKADA DKI Jakarta 2017 sebagai Cerminan Politik Identitas

Banyak studi yang telah membahas PILKADA DKI Jakarta 2017 terkait dengan politik identitas di antaranya adalah artikel Greg Fealy berjudul “*Accommodating Indonesia’s Islamist Fringe: The Case for a More Inclusive Electoral System*”⁷². Artikel ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana selama pelaksanaan PEMILU pasca-Soeharto dalam kurun lima periode PEMILU Indonesia, pendaftaran partai politik dikecilkan sehingga sulit untuk lolos menjadi peserta pemilu, apalagi untuk memenangkan kursi parlemen. Persyaratan untuk mendaftarkan partai menjadi lebih berat dan ambang batas untuk mendapatkan perwakilan legislatif telah meningkat dengan hampir setiap pemilihan dan saat ini berada di angka 4%. Ini berarti lebih sedikit partai yang dapat ikut serta dalam pemilihan, terutama jika mereka kekurangan pendukung yang kaya. Salah satu bagian dari komunitas yang telah terpengaruh oleh pembatasan ini adalah kaum Islamis, yaitu kaum Muslim yang ingin membawa prinsip dan hukum Islam ke dalam kehidupan publik. Dari empat partai Islam yang sekarang memegang kursi di parlemen, tidak ada yang mengaku Islamis, meski bisa dibilang setidaknya ada dua partai; yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), memiliki kecenderungan Islamis. Tidak ada suara untuk lebih banyak Islamis doktriner di parlemen karena pembatasan partai kecil.

⁷² Greg Fealy, *Accommodating Indonesia’s Islamist Fringe: The Case for a More Inclusive Electoral System*, *Indonesian Journal of Political Research* (IJPR), Volume 1, December 2020, 25-40.

Berkaitan dengan PILKADA DKI Jakarta 2017, Greg Fealy menjelaskan bagaimana kampanye *Islamist* yang diprakarsai oleh gerakan Islam (Front Pembela Islam) di Indonesia, ternyata dapat memobilisasi aksi massa Islam hingga turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi secara masif atas kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok pada akhir tahun 2016. Dalam pandangan Fealy, aksi ini bukan hanya sekedar aksi anti-Ahok saja, melainkan pemberian ruang yang luas kepada para *Islamist* untuk mempromosikan agenda mereka yang lebih luas. Alasan ini yang menyebabkan para pluralis dan politisi nasionalis Indonesia terdorong untuk membatasi dampak Islamisme di Indonesia.⁷³ Selain itu, hukuman penjara bagi Ahok atas komentarnya terhadap ayat al-Qur'an adalah cerminan aparatur peradilan yang mengakomodasi tuntutan dan pemikiran Islam Konservatif.⁷⁴ Fealy pun secara implisit, tidak menyangkal kalau kasus yang terjadi pada Ahok adalah bagian dari pemberian ruang terhadap populisme Islam yang kemungkinan dapat membahayakan demokrasi dengan cara-cara politik identitas⁷⁵.

Marcus Mietzner menulis "*Authoritarian Innovations in Indonesia: Electoral Narrowing, Identity Politics and Executive Illiberalism*"⁷⁶ secara tidak langsung membahas bagaimana negara yang menerapkan il-liberalisme (negara demokrasi yang tidak liberal) dapat menyebabkan penurunan kualitas demokrasi negara itu sendiri. Strategi *illiberal* tersebut berupa penyempitan ruang

⁷³ Ibid., 30.

⁷⁴ Ibid., 62.

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Marcus Mietzner, 'Authoritarian Innovations in Indonesia: Electoral Narrowing, Identity Politics and Executive Illiberalism', *Democratization*, 27.6 (2020), 1021–36 .

kompetisi elektoral, penyempitan mobilisasi politik identitas, dan upaya pemusatan dan maksimalisasi kekuasaan oleh eksekutif. Mietzner dalam hal ini, menyoroti penggunaan politik identitas di Indonesia selama pemilu 2019 dan membangkitkan sentimen anti-minoritas untuk memenangkan suara mayoritas yang dapat menjadi ancaman berbahaya bagi demokrasi⁷⁷.

Politik identitas tersebut berawal dari kasus Ahok dalam penistaan agama menjelang PILKADA DKI Jakarta 2017 kemudian berlanjut pada proses Pemilihan Umum Presiden tahun 2019. Dalam artikel ini, dijelaskan bahwa pemimpin petahana (Ahok) dan partai pendukung pemerintah berupaya untuk memanipulasi para pemilih agar tidak melakukan perlawanan dan penolakan terhadap keberadaan pemerintah. Sebaliknya, politik identitas digunakan oleh para tokoh oposisi sebagai alat elektoral untuk mendapatkan kekuasaan. Bahkan walaupun itu gagal, maka politik identitas tersebut setidaknya untuk merusak citra presiden petahana⁷⁸ sebagaimana terjadi pada kasus citra Gubernur DKI Jakarta, Ahok.

Penelitian Charlotte Setijadi dengan judul "*Ahok's Downfall and The Rise of Islamist Populism in Indonesia*" membahas kemungkinan penjelasan untuk menjawab pertanyaan mengapa Ahok mengalami kekalahan kemudian dipenjara karena kasus penistaan agama, padahal dia mendapatkan angka kepuasan yang cukup tinggi dalam kinerjanya sebagai gubernur petahana. Selanjutnya pertanyaan apakah kekalahan dan pemenjarannya akibat kasus penistaan agama

⁷⁷ Mietzner and Muhtadi, "The Mobilisation of Intolerance and Its Trajectories: Indonesian Muslims' Views of Religious Minorities and Ethnic Chinese." *Contentious Belonging*, no. Scherpen (2019): 155–174.

⁷⁸ *Ibid.*, 7.

mengindikasikan kebangkitan Islam yang konservatif garis keras dan in-toleran di masyarakat Indonesia dan bagaimana potensi politik identitas tersebut berimplikasi pada pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

Artikel ini menyimpulkan bahwa sejumlah aktivis, kelompok minoritas dan progresif merasa khawatir akan pengaruh dari meningkatnya kelompok Islamis garis-keras dengan lebih mudah memanfaatkan undang-undang penodaan agama sebagai alat untuk menindas non-Muslim dan kelompok minoritas di Indonesia. Politik identitas pada Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 berpotensi penggunaan retorika primordial yang mengirimkan pesan kepada minoritas etnis dan agama di Indonesia.⁷⁹

Vedi R. Hadiz dengan judul “*The Floating Ummah in The Fall of Ahok in Indonesia*” menjelaskan tentang bagaimana gagasan “ummat yang mengambang” (*floating ummah*) di waktu PILKADA DKI Jakarta telah mempengaruhi jalannya politik Islam dan demokrasi di Indonesia. “Ummat yang mengambang” terdiri dari masyarakat kelas menengah-bawah dan kelas menengah berpendidikan, mengalami keterputusan hubungan dengan organisasi masyarakat keagamaan yang *mainstream* di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan lebih menemukan daya tarik dalam organisasi-organisasi Islam *pinggiran* dikarenakan adanya retorika moralitas yang ditawarkan sebagai cara untuk mengatasi kesulitan sosial dan ekonomi yang

⁷⁹ Charlotte Setijadi, “Ahok’s Downfall and the Rise of Islamist Populism in Indonesia,” *ISEAS Perspective*, no. 38 (2017): 1–9, https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2017_38.pdf.

dialami mereka sehingga kondisi ini mempengaruhi sikap keagamaan mereka yang kaku dan konservatif.

Peristiwa jatuhnya Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta dalam kasus penistaan agama di tahun 2017 menyebabkan kampanye anti-Ahok dengan pelibatan demonstrasi massa, yang menggabungkan masalah politik identitas dengan permusuhan sosial ekonomi yang terpendam. Artikel ini melihat bagaimana masyarakat Islam yang masuk dalam kategori “ummat mengambang” telah menjauhi organisasi keagamaan yang utama (mainstream) serta menemukan kejenuhan yang frustrasi akibat status quo pemerintahan yang mendominasi di ranah sosial dan ekonomi. Konsekuensinya adalah muncul politik Islam yang kaku dan konservatif di mana pemerintah Indonesia juga tidak terlalu memperhatikan perkembangan politik Islam konservatif ini telah mendapatka perhatian dan daya tariknya dari masyarakat dengan bentuk kampanye isu “moral”. Hadiz pun berkesimpulan kalau politik Islam pasca kekalahan Ahok tidak mengarah kepada spektrum eksklusif maupun inklusif, akan tetapi kepada konservatif yang justru membuat sikap intoleran meningkat.⁸⁰

Penelitian Ari Ganjar Herdiansyah, Yusa Djuyandi, Widya Setyabudi Sumadinata yang berjudul “*Extending Aliran Politics in Electoral Contest: an Insight of Indonesia’s Democracy in The Post-2014*”⁸¹ melihat bagaimana kontes PILKADA DKI Jakarta tidak luput dari kerangka politik aliran yang

⁸⁰ Hadiz, “The ‘Floating’ Ummah in the Fall of ‘Ahok’ in Indonesia.” *TRANS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia* 7, no. 2 (2019): 271–290.

⁸¹ Ari Ganjar Herdiansyah, Yusa Djuyandi, Widya Setyabudi Sumadinata, “Extending Aliran Politics in Electoral Contest: an Insight of Indonesia’s Democracy in The Post-2014. *Central European Journal of International and Security Studies*, 13, no. 4, 2019, 518-545.

masih tetap bertahan dalam bentuk politisasi jati diri yang tercermin pada perpolitikan pasca 2014. Analisisnya dikonstruksikan dengan mencermati dinamika Pemilu Indonesia dengan memberikan wawasan tentang pemilihan guberal Jakarta 2017. Kajian tersebut mengungkapkan bahwa semakin terintegrasinya kontestasi elektoral antara tingkat lokal dan nasional telah mendorong polarisasi elit politik yang sejalan dengan pengelompokan massa berbasis ideologi. Meski dimensi kepentingan masih menonjol di mana beberapa partai dan kelompok Islam memilih untuk menentang mitranya, friksi antara kelompok Islam dan nasionalis-sekuler tidak dapat dihindari. Mempertimbangkan keuntungan dari komodifikasi identitas agama, etnis, dan ideologis, kebangkitan kembali politik “*aliran*” berpotensi menjadi unggulan dalam basis identitas sosial dan ideologi.

PILKADA DKI Jakarta 2017 menjadi tempat percampuran antara isu agama bagi massa basis Islam dan kepentingan politik yang tidak dapat dipisahkan dari faktor sosiologis dan ideologis yang mempromosikan kesadaran identitas dalam ranah politik. Riset ini memberikan saran agar kehidupan demokrasi negara tetap sehat yaitu dengan cara menjauhkan komodifikasi agama dalam politik. Namun sayangnya, riset ini tidak begitu jelas dalam pembahasan apa, bagaimana dan mengapa komodifikasi agama tersebut muncul di dalam PILKADA DKI Jakarta 2017 sehingga perlu untuk dihindari.

Artikel ilmiah karya Juhana Nasrudin berjudul “*Politik Identitas dan Representasi Politik: Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022*”⁸². Artikel ini mengkaji bagaimana proses demokrasi pada PILKADA DKI Jakarta 2017 tidak bisa luput dari orientasi identitas dan representasi. Orientasi identitas tercerminkan pada masalah agama, sedangkan representasi pada etnis. Dengan fokus kajian hanya pada PILKADA DKI Jakarta 2017 putaran kedua saja, artikel ini menyimpulkan bahwa perhelatan PILKADA DKI Jakarta 2017 tidak lepas dari tiga orientasi mendasar, yaitu ekonomi, agama dan ras. Anis Baswedan direpresentasikan dengan ras keturunan Arab dan seorang Muslim, sementara Ahok direpresentasikan dengan ras Cina dan seorang Non-Muslim. Dari representasi tersebut muncullah politik identitas yang menjadikan agama sebagai alat politisasi yang jitu untuk menarik simpati para pemilih. Hal ini sangat berbeda dengan fokus penelitian riset ini di mana ia menekankan pada komodifikasi agama dari perspektif analisis tindakan.

Buku yang ditulis oleh Laode Machdani Afala dengan judul “Politik Identitas di Indonesia”, di mana ia melihat fenomena politik pada PILKADA DKI Jakarta 2017, khususnya salah satu calon Gubernur petahana Ahok, tidak dapat dilepaskan dari politik identitas. Isu etnis dan penistaan agama tersebar luas di media sosial sehingga dapat mendorong adanya gerakan massa kaum Muslim untuk menuntut Ahok agar diadili. Fenomena populisme Islam pada PILKADA DKI Jakarta 2017 merupakan gejala fakual dari politik identitas yang

⁸² Juhana Nasrudin and Ahmad Ali Nurdin, ‘Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada DKI Periode 2018-2022)’, *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1.1 (2019), 34–47.

melibatkan politik dengan pengorganisasian agama dan ras yang di dalamnya terpendam sentimen primordial yang diserukan oleh setiap kelompok identitas.⁸³ Penulis menyimpulkan bahwa fenomena politik semacam ini muncul akibat dari adanya gerakan keagamaan yang dijadikan oleh sebagian pihak sebagai kekuatan politik untuk memenangkan PILKADA DKI Jakarta 2017. Namun sayangnya, penulis tidak menjelaskan bentuk-bentuk politik identitas tersebut atau bukti adanya kekuatan politik tersebut dimobilisasi oleh kelompok identitas yang dimaksud baik dari segi motif dan bentuknya.

Artikel lainnya adalah karya Dina Lestari yang berjudul “*PILKADA DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas di Indonesia*”⁸⁴. PILKADA DKI Jakarta 2017 diwarnai oleh politik identitas untuk mencapai tujuan pragmatis, sehingga memberikan dampak terhadap dinamika politik identitas di Indonesia. Ia menyimpulkan bahwa politik identitas telah berhasil digunakan sebagai instrumen untuk menarik simpati pemilih agar dapat memilih salah satu pasangan calon yang mempunyai identitas yang sama. Artikel ini merekomendasikan agar pemerintah bersikap adil dalam menghadapi permasalahan agama dan negara, melakukan rekonsiliasi untuk pemulihan kondisi sosial negara, penyelenggaraan kampanye anti-politik identitas dan penegakan aturan dalam UU. No. 7 Tahun 2017 Pasal 280 tentang larangan kampanye pemilu.

⁸³ Laode Machdani Afala, *Politik Identitas di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2018), 2 & 91.

⁸⁴ Dina Lestari, “Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas Di Indonesia,” *Simulacra: Jurnal Sosiologi* 2, no. 1 (2019): 31.

Artikel yang terbaru dari karya Saiful Mujani dengan judul “*RELIGION AND VOTING BEHAVIOR Evidence from the 2017 Jakarta Gubernatorial Election*”. Ia dengan kerangka perilaku rasional, membahas bagaimana perbandingan pengaruh identitas agama, faktor ekonomi-politik dan faktor psikologis terhadap perilaku pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017. Melalui data survei opini publik sebelum dan di hari pemilihan, artikel ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup dominan dari faktor identitas agama yang menyebabkan pasangan calon yang beragama Islam keluar sebagai pemenang PILKADA. Sementara, faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih pasangan calon petahana yang berlatarbelakang non-Muslim mendapatkan dukungan karena adanya faktor identitas kepartaian dan pengaruh ekonomi-politik.⁸⁵

Peneliti menyimpulkan bahwa relasi PILKADA DKI Jakarta 2017 dan politik identitas memiliki pertautan yang sangat kuat di mana kompleksitas permasalahan politik dan agama tidak bisa disederhanakan begitu saja dengan melihat boleh mencampur dan tidaknya. Namun, setidaknya politik identitas tersebut tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak dibarengi dengan mobilisasi gerakan dan kampanye yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam masing-masing agama dan politik. Dengan demikian, dari sekian penjelasan artikel yang sudah peneliti bahas di atas belum ada yang menjelaskan keterhubungan PILKADA DKI Jakarta dengan mobilisasi gerakan agama dan

⁸⁵ Saiful Mujani, “Religion and Voting Behavior Evidence from the 2017 Jakarta Gubernatorial Election,” *Al-Jami'ah* 58, no. 2 (2020): 419–450.

kampanye sekaligus yang dilakukan oleh aktor agama dan aktor pemenangan PILKADA dalam konteks PILKADA DKI Jakarta 2017. Padahal relasi keduanya berinteraksi secara dinamis (dapat menguat dan juga merenggang) sesuai dengan tawar-menawar dan daya tarik dalam kekuatan yang menghubungkan keduanya.

b. Penelitian PILKADA DKI Jakarta Terkait dengan Sentimen Primordial

Charlotte Setijadi menulis “*Chinese Indonesians in The Eyes of The Pribumi Public*” yang membahas tentang bagaimana retorika rasial yang terlihat dalam kasus penistaan agama Ahok dan selama pelaksanaan PILKADA DKI Jakarta dapat memicu peningkatan sentimen anti-Cina Indonesia. Melalui metode ukur survei sentimen publik terhadap etnis Cina, artikel ini berkesimpulan bahwa mayoritas responden survei “pribumi” setuju dengan pernyataan dengan adanya dugaan dominasi ekonomi dan hak istimewa orang Cina-Indonesia dengan hampir 60% orang mengatakan bahwa orang Cina-Indonesia lebih cenderung kaya dari pada orang “pribumi”. Hal ini menunjukkan adanya prasangka negatif terhadap pengaruh etnis Cina terhadap politik dan ekonomi Indonesia, dan mayoritas pribumi percaya bahwa orang Indonesia-Cina memiliki loyalitas nasional yang terpecah-pecah.⁸⁶

Dalam konteks yang sama, tulisan Charlotte Setijadi yang lain adalah “*Anti-Chinese Sentiment and the Return of The Pribumi Discourse*”⁸⁷. Dengan jelas,

⁸⁶ Charlotte Setijadi, “Chinese Indonesians in the Eyes of the Pribumi Public.” *Perspective*, no. 73 (2017): 1–12.

⁸⁷ Charlotte Setijadi, ‘Anti-Chinese Sentiment and the “return” of the Pribumi Discourse’, *Contentious Belonging*, 2019, 194–213 <<http://dx.doi.org/10.1355/9789814843478-015>>.

artikel ini membahas bagaimana sentimen anti-Cina selama PILKADA DKI Jakarta 2017 meningkat, kemudian pasca PILKADA, sentimen tersebut menurun. Orang Cina masih menjadi kambing hitam dan sasaran kemarahan serta frustrasi massa ketika terjadinya ketidakstabilan ekonomi dan politik di Indonesia. Ditambah dengan, meningkatnya konservatisme Islam dan ketidaksetaraan sosio-ekonomi mengakibatkan peningkatan persepsi klasikal yaitu tentang perbedaan esensial antara orang Indonesia keturunan Cina dan orang Indonesia lainnya (pribumi).

Sentimen anti-Cina tersebut pada PILKADA DKI Jakarta 2017 cukup beralasan karena maraknya narasi-narasi pribumi dan anti-pati terhadap Cina dalam diskursus publik. Muncul konstruksi sosial tentang orang Indonesia yang beretnis Cina adalah orang Cina dan non-pribumi. Di sini, terlihat jelas bahwa hubungan antara minoritas etnis-agama di Indonesia dan kepentingan mayoritas Muslim. Artikel ini memberikan saran kepada pemerintah dan organisasi masyarakat sipil secara luas bahwa menangani masalah Cina dan memelihara kerukunan antar-etnis dan antar-agama secara lebih luas akan membutuhkan kerja keras yang bersifat kontinyu sebagai upaya pembangunan bangsa Indonesia. Negara harus memberikan perlindungan dan hak-hak yang bukan hanya etnis Cina saja akan tetapi bagi semua kelompok minoritas lainnya.

Nathanael Gratiyas Sumaktoyo menulis "*Ethnic and Religious Sentiments in Indonesian Politics: Evidence from the 2017 Jakarta Gubernatorial Election*" dengan kajian yang mendokumentasikan tentang bagaimana perilaku suara umat Islam Indonesia dilatarbelakangi oleh adanya sentimen agama dan etnis. Dengan

menggunakan analisis korelasional dan eksperimental terhadap survei yang dilakukannya, Sumaktoyo menemukan bahwa suara pemilih kalangan Muslim lebih menolak Ahok dari pada suara pemilih non-Muslim dan penolakan tersebut lebih dikarenakan oleh persoalan etnisitas Ahok, sekaligus menolak agamanya⁸⁸.

Sugit S. Arjon melalui artikel "*Religious Sentiments in Local Politics*" secara kualitatif menjelaskan bahwa penggunaan sentimen keagamaan dan politik identitas mengalami peningkatan di era reformasi, termasuk pada kasus PILKADA DKI Jakarta 2017. Artikel ini melihat bagaimana sentimen keagamaan digunakan untuk menyerang agama lain di waktu kontestasi politik yang berakibat pada pembelahan masyarakat menjadi dua dikotomi ideologi; yaitu ideologi agama dan ideologi nasionalis. Dua dikotomi ideologi tersebut dapat menciptakan dua praktik yang kurang baik dalam demokrasi yaitu pengistimewaan Islam (*Islam Exceptionalism*) dan pemerintah bertangan besi.

Pertanyaan yang bersifat cemas dalam artikel ini adalah sejauh mana segregasi dan polarisasi ideologi masyarakat yang muncul pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dapat mempengaruhi perpolitikan lokal, khususnya daerah lokal meskipun sudah desentralisasi dan otonomi daerah namun ia rawan konflik akibat basis etnis dan agama. Artikel ini berkesimpulan bahwa sentimen agama dan etnis memainkan peran yang cukup signifikan. Kandidat kepala daerah di lokal seringkali menggunakan sentimen agama untuk menyerang kandidat dengan keyakinan yang sama. Namun sayangnya, PILKADA DKI Jakarta 2017, sentimen

⁸⁸ Sumaktoyo, "Ethnic and Religious Sentiments in Indonesian Politics: Evidence From the 2017 Jakarta gubernatorial Election." *Journal of East Asian Studies* 21, no. 1 (2021): 141–164.

agama justru digunakan untuk melawan seseorang yang berbeda keyakinan dan etnis. Akibatnya, muncul polarisasi yang menimbulkan permasalahan dalam masyarakat antara lain tekanan psikologis, disrupsi sosial, kerugian dan kehilangan material, dan korban dari konflik kekerasan.⁸⁹

Artikel Ulla Fiona yang berjudul “*Manipulating Diversity: Campaign against Ahok Threatens Democracy*” membahas peningkatan kampanye yang menyerang kepada kelompok minoritas di Indonesia khususnya kepada Gubernur petahana Ahok yang maju kembali pada pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017. Kampanye anti-Ahok tersebut berupa pemenjaraan Ahok karena terlibat kasus penistaan agama serta menuduhnya sebagai orang yang melawan “diversitas” atau keragaman Indonesia dan sebagai orang yang tidak menghormati Islam. Artikel ini berkesimpulan bahwa meningkatnya kampanye anti-Ahok menunjukkan peningkatan intoleransi di Indonesia yang diprakarsai oleh gerakan radikal dan ultra-konservatif Islam. Kampanye anti-Ahok juga menandai adanya promosi isu agama-rasial untuk kepentingan politik. Bukan itu saja, ia juga menandai adanya peningkatan pengaruh kelompok radikal dalam dinamika perpolitikan Indonesia. Hal ini justru menjadi ancaman bagi keberlangsungan keragaman dan demokrasi Indonesia.⁹⁰

Literatur buku yang diterbitkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan editor Cahyo Pamungkas dan Yogi Setya Permana berjudul “*Intoleransi dan Politik Identitas Kontemporer di Indonesia*”, secara umum ia menjelaskan

⁸⁹ Arjon, “Religious Sentiments In Local Politics.” *Jurnal Politik* 3, no. 2 (2018): 171.

⁹⁰ Fionna, “Manipulating ‘Diversity’: Campaign against Ahok Threatens Democracy.” *Perspective* 2017, no. 6 (2017).

perkembangan intoleransi dan radikalisme dengan mengatasnamakan agama dan etnis mengalami peningkatan selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia mulai dari tahun 2015 hingga 2018. Berbagai macam narasi berbasis primordialisme seperti agama dan etnis yang berlebihan di dunia nyata maupun dunia maya mengantarkan Indonesia masuk ke dalam lingkaran potensi konflik yang dekat dengan perbedaan identitas sosial tertentu.⁹¹

Mengambil tiga kasus besar intoleransi; seperti kasus Tanjung Balai 2016, Tolikara 2015 dan rangkaian aksi demo anti-Ahok atas kasus penistaan agama pada akhir tahun 2016. Intoleransi dan radikalisme berkuat dengan beberapa hal seperti konflik dan kekerasan di berbagai daerah akibat mobilisasi isu agama atau etnis, persekusi kelompok mayoritas atas minoritas, perkembangan teknologi informasi atau internet dalam penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian berlatar etnis dan politik.⁹²

Berkaitan dengan PILKADA DKI Jakarta 2017, narasi agama yang kerap kali digunakan untuk menarik perhatian para pemilih adalah tiga hal, *pertama*; narasi larangan memilih pemimpin non-Muslim di baliho dan pengajian. *kedua*, narasi ketimpangan dalam perekonomian antara umat Islam dan non-Muslim, *ketiga*; narasi penistaan agama terhadap surat al-Maidah ayat 51 menjadi penguat akan haramnya memilih pemimpin non-Muslim.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor utama dalam intoleransi dan aksi primordial adalah sentimen agama-etnis yang menggunakan narasi

⁹¹ Pamungkas and Permana, *Intoleransi Dan Politik Identitas Kontemporer Di Indonesia*. 1.

⁹² *Ibid.*, 3-8.

agama-etnis sebagai alat kampanye untuk memojokkan kelompok minoritas tertentu dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah yang bertujuan untuk menciptakan pemahaman adanya kekuasaan kelompok mayoritas agar dapat memengaruhi individu pemilih maupun kelompok lain. Kendati demikian, kelemahan kajian-kajian tersebut tidak mengungkapkan secara detail tentang bagaimana aktor-aktor yang bermain dalam sentimen agama-etnis tersebut menggunakan narasi agama-etnisnya dalam kerangka komodifikasi.

c. Penelitian PILKADA DKI Jakarta 2017 Terkait dengan Aksi Bela Islam dan Populisme Islam

Penelitian kolaborasi yang dilakukan oleh Marcus Mietzner dan Burhanuddin Muhtadi berjudul “*Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation*”⁹³. Demonstrasi massa Islam pada waktu akhir tahun 2016 menimbulkan banyak perdebatan di kalangan akademisi. Beberapa ahli berpendapat bahwa penyebabnya adalah meningkatnya intoleransi dan konservatisme Islam. Sementara yang lain menolaknya karena tidak ada bukti yang mendukung adanya agenda Islamis. Artikel ini menganalisis dari hasil pengumpulan data yang unik melalui jajak pendapat dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa a) sikap konservatif di kalangan Muslim Indonesia menurun sebelumnya dari pada adanya peningkatan di waktu mobilisasi; b) sekitar seperempat Muslim Indonesia mendukung agenda sosio-politik Islam.

⁹³ Mietzner and Muhtadi, “Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation.” *Asian Studies Review* 42, no. 3 (2018): 479–497, <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335>

Artikel ini melihat bahwa konstituensi inti Muslim konservatif telah tumbuh berkembang dan lebih terdidik dan lebih terhubung dalam waktu dekade terakhir ini dengan adanya peningkatan kualitas organisasi. Kapasitas ini berkembang sebab dimobilisasi pada saat Muslim konservatif merasa dikucilkan dari pemerintahan saat ini.

Penelitian Marcus Mietzner dan Burhanuddin Muhtadi lainnya adalah “*The Mobilisation of Intolerance and it’s Trajectories: Indonesian Muslims’ Views of Religious Minorities and Ethnic Chinese*”⁹⁴. Penelitian secara global membahas tiga masalah utama, yaitu; 1) penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tingkat intoleransi dan sentimen diskriminatif di kalangan Muslim Indonesia terhadap minoritas agama dan etnis (khususnya etnis Cina); 2) untuk menguji perubahan tingkat intoleransi dari waktu ke waktu, dengan melihat data sebelum, selama dan sesudah protes atau penolakan Ahok; 3) menganalisis latar belakang sosio-ekonomi dari Muslim yang memegang prasangka agama-rasial serta menjelaskan bagaimana pola-pola ini berkembang selama mobilisasi anti-Ahok.

Berkaitan dengan tiga masalah di atas, artikel ini berkesimpulan bahwa *pertama*, ada konstituensi Islamis yang signifikan dengan kemunculan sentimen agama-rasial di Indonesia, yaitu sekitar 30% Muslim Indonesia berpandangan yang sangat tidak toleran terhadap non-Muslim dan prasangka anti-Cina yang mendalam. Kendati, angka persentase tersebut mempunyai kesamaan dengan tingkat intoleransi di negara lain, tetapi Muslim Indonesia tidak menolak

⁹⁴ Mietzner and Muhtadi, “The Mobilisation of Intolerance and Its Trajectories: Indonesian Muslims’ Views of Religious Minorities and Ethnic Chinese.” *Contentious Belonging*, no. Scherpen (2019): 155–174.

kampanye anti-Ahok sebagai basis kemurnian iman atau peristiwa politik meskipun tanpa relevansi dengan masyarakat Indonesia secara luas. *Kedua*, data menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan intoleransi pra-kampanye anti-Ahok yang dapat menyebabkan mobilisasi. Sebaliknya, peningkatan itu terjadi setelah protes Islamis (anti-Ahok) dan pasca protes semakin terkonsolidasi. Singkatnya, intoleransi dimobilisasi, dan bukan menjadi faktor penggerak. Ini menyoroti peran *entrepreneur politik-agama (religio-political entrepreneurs)* dalam menggunakan dasar intoleransi yang ada untuk menyulut intoleransi dan eksklusivisme agama setelahnya. *Ketiga*, data artikel ini mengindikasikan Muslim yang berpendidikan tinggi dan kaya adalah pendorong utama intoleransi pra-kampanye anti-Ahok. Sementara kelompok Muslim kelas-bawah (*lower-class*) adalah rekrutan utama kelompok intoleransi selama protes dan terus bergabung setelahnya.

Penelitian lainnya adalah “*Entrepreneurs of Grievance: Drivers and Effects of Indonesia’s Islamist Mobilization*” karya Marcus Mietzner, Burhanuddin Muhtadi dan Rizka Halida⁹⁵. Artikel ini sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan penelitian sebelumnya, di mana bermula dari perdebatan tentang sebab dan akibat dari mobilisasi Islamis. Kebanyakan berpendapat bahwa mobilisasi Islamis sebagai akibat dari meningkatnya sikap Islamis di kalangan Muslim Indonesia. Penelitian ini melakukan survei opini sebagai metodologi dalam penilaian atas verifikasi atau falsifikasi pernyataan tersebut. penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa sebelum adanya mobilisasi Islamis di akhir tahun 2016, sikap

⁹⁵ Marcus Mietzner, Burhanuddin Muhtadi and Rizka Halida, “Entrepreneurs of Grievance: Drivers and Effects of Indonesia’s Islamist Mobilization”, *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania*, Vol. 174, 159-187, 2018.

Muslim Indonesia sebenarnya adalah moderat. Sikap politik tersebut menjadi naik atau meningkat setelah adanya mobilisasi, dan mereka melakukannya secara konsisten dalam tema atau topik penyebaran yang sama oleh para aktornya. Ini mendukung teori *religio-political entrepreneurs* yang menjadi faktor pendorong utama dalam mobilisasi Islam. Kendati, di dalamnya juga terdapat faktor lain seperti keluhan atau pengaduan atas penistaan agama dan faktor keyakinan di sisi lain, hal ini sekalipun diperlukan namun tidak mencukupi untuk terjadinya kejadian semacam mobilisasi Islam tersebut.

Bukan hanya itu saja, permasalahan utama dalam mobilisasi Islamis adalah adanya strategi populisme Islam dan etnis yang turut menambah permasalahan di PILKADA DKI Jakarta 2017. Abdul Hamid mencermati strategi populisme Islam tersebut ternyata telah mengakibatkan pada pembelahan sosial menjadi dua kelompok yang terpolarisasi. Kelompok yang tergabung dalam pendukung calon gubernur Muslim versus pendukung gubernur petahana. Akar muncul kelompok pendukung calon gubernur Muslim ini karena sentimen mereka terhadap Gubernur DKI Jakarta, Ahok di saat itu. Kemudian, mereka menemukan momentum untuk menyerang Ahok di saat dirinya terjerat dalam tuduhan kasus penistaan agama di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Penelitian ini menyimpulkan adanya kesuksesan Anies Baswedan dalam memanfaatkan sentimen agama tersebut serta menggunakan masjid-masjid untuk melakukan resistensi kepada pasangan calon gubernur non-Muslim.⁹⁶

⁹⁶ Abdul Hamid, "Populism in the 2017 Jakarta gubernatorial Election," *Journal of Governance* 4, no. 1 (2019).

Irfan Prayogi dan Fernanda Putra “*Populisme Islam dan Imajinasi Politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017*” menjadikan Pilkada DKI Jakarta dan Aksi Bela Islam sebagai objek kajiannya. Artikel ini menganalisis bagaimana pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Aksi Bela Islam tersebut telah membentuk identitas dan polarisasi sosial yang dibawa oleh politik Islam sehingga menghasilkan preferensi pilihan dalam kontestasi perpolitikannya. Aksi Bela Islam merupakan pengejawantahan dari persatuan umat Islam dalam merespon ucapan Ahok tentang surat al-Maidah ayat 51 karena dicap sebagai penistaan agama. Wacana aksi bela Islam tersebut mengalir begitu saja menjadi sumber untuk mendulang suara politik. Media sosial digunakan sebagai mediasi kampanye tentang gerakan populisme Islam dan imajinasi kolektif baru melalui kasus penistaan agama oleh Ahok.

Agung Wicaksono dalam tulisannya “*Gubernur DKI Jakarta Dipilih Presiden: Sebuah Wacana yang Patut Dipertimbangkan*” menginginkan untuk menemukan titik terang dalam beredarnya wacana pemilihan Gubernur DKI Jakarta melalui pilihan pereogratif presiden pasca pelaksanaan PILKADA DKI Jakarta yang menderus kekokohan demokrasi Indonesia. Tulisan ini memberikan dua arah pemikiran apabila pemilihan Gubernur DKI Jakarta benar-benar dilakukan hanya oleh presiden; yaitu minimum demokrasi prosedural dan zero demokrasi prosedural. Di luar itu, tulisan ini juga membahas bagaimana kemenangan Anis Baswedan-Sandiaga Uno pada PILKADA DKI Jakarta tidak lepas dari peristiwa-peristiwa yang fundamental, yaitu kasus penistaan agama oleh Ahok yang memancing emosi dan resistensi dari kalangan umat Islam

melalui rentetan aksi-aksi yang diinisiasi oleh Front Pembela Islam dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI). GNPF-MUI mempunyai penafsiran tersendiri atas kasus penistaan agama bahwa 1) Ahok telah menghina ulama (pemimpin kaum Muslim) dan 2) Ahok telah menistakan al-Maidah Ayat 51 dengan indikasi ulama yang menggunakan ayat itu sebagai kepentingan untuk menipu umat Islam.⁹⁷

Kajian artikel ini diarahkan untuk melihat keterbelahan massa di Pilkada DKI 2017 dalam kerangka politis, bagaimana tiap-tiap individu memilih sesuai dengan preferensi identitasnya. Disimpulkan bahwa keterbelahan massa di Pilkada tersebut bersumber dari polarisasi yang dikonstruksi melalui kombinasi populisme Islam dan imajinasi politik Islam yang memosisikan Ahok sebagai “*the other*” (*liyan* atau sebatas “*aku-bukan aku*”) di mana PILKADA DKI Jakarta 2017 dan Aksi Bela Islam menghasilkan dua narasi yang imajiner yaitu “Bhineka” dan “ummat” atau “bela Islam”. Kubu Habib Riziq Shihab merepresentasikan pembelaan ummat dan Islam sebagai identitas yang populer dan *me-liyan*-kan Ahok, sementara kubu Ahok direpresentasikan “bhineka” yang dikonstruksi untuk *me-liyan*-kan Riziq Shihab. Dengan demikian, Anies Baswedan mempunyai logika persamaan dengan konstruksi “ummat” dan “bela Islam” sehingga dapat menjadi preferensi politik Islam pada PILKADA DKI Jakarta 2017.⁹⁸

Berkaitan dengan propaganda virtual, terdapat artikel Arie Setyaningrum dan Gita Octaviani berjudul “*Aksi Bela Islam dan Ruang Publik Muslim; dari*

⁹⁷ Agung Wicaksono, “Gubernur DKI Jakarta Dipilih Presiden: Sebuah Wacana Yang Patut Dipertimbangkan,” *Jurnal PolGov* 1, no. 1 (2019): 35.

⁹⁸ Prayogi, “Populisme Islam Dan Imajinasi Politik Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.” *Politeia: Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 2 (2019): 31–43.

Representasi Daring ke Komunitas Luring”. Kasus penintaan agama yang mengantarkan Ahok untuk dipenjara tidak luput dari mobilisasi aksi bela Islam di media sosial. Artikel ini melacak bagaimana strategi mobilisasi bela Islam dengan cara mediatisasi dakwah di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Whatsapp. Melalui Aksi Bela Islam, kelompok keagamaan menjadikannya sebagai strategi dakwah yang bertujuan pada sebuah revolusi politik di PILKADA DKI Jakarta 2017. Tidak terelakkan lagi bahwa aksi Bela Islam merupakan realitas sosial yang muncul akibat mobilisasi dukungan melalui peran aktivis keagamaan di media-media sosial dengan cara mengkonstruksi strategi dakwah dan politik moralitas publik dengan menunjukkan etika keshalehan orang di perpolitikan Indonesia. Akibatnya, aksi tersebut dapat memunculkan potensi ancaman bagi demokrasi Indonesia yang mengarah kepada tribalisme praktis yang berarti pemusatan istilah nasionalisme hanya untuk kelompok mayoritas saja dengan mengabaikan keragaman dan perbedaan identitas dan agama.⁹⁹

Muzayyin Ahyar dan Afitri menulis “*Aksi Bela Islam: Islamic Clicktivism and The New Authority of Religious Propaganda in The Millennial Age in Indonesia*”. Artikel ini bertujuan untuk menguji diskursus aktivisme Islam yang dilakukan melalui Aksi Bela Islam di ruang publik daring yang menjadikan internet dan media sosial sebagai bentuk transformasi propaganda agama yang otoritatif dari bentuk tradisional ke bentuk teknologi-modern. Aktivisme Islam daring tersebut mengangkat jargon “spirit 212” untuk disebar di internet dan

⁹⁹ Pamungkas and Octaviani, “Aksi Bela Islam Dan Ruang Publik Muslim: Dari Representasi Daring Ke Komunitas Luring.” *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 4, no. 2 (2017): 108–125.

media sosial agar memberikan pemahaman baru dalam keagamaan (propaganda keagamaan), sehingga artikel ini menyimpulkan adanya budaya baru bagi masyarakat Islam khususnya kaum Millineial yang disebut dengan “*Islamic Clicktivism*” yang diarahkan untuk membentuk wacana keagamaan dan politik yang otoritatif sekaligus. Akhirnya, Islamic Clicktivism ini secara konsisten mengambil peran dalam membentuk cara pandang kaum Millennial Islam dalam kontestasi politik identitas.¹⁰⁰

Rangga Kusumo dan Hurriyah melalui “*Populisme Islam di Indonesia; Studi Kasus Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI Tahun 2016-2017*” mencoba untuk menggali lebih dalam lagi tentang apakah benar Aksi Bela Islam itu menghasilkan populisme Islam yang baru di Indonesia yang tergabung dari berbagai kelompok-kelas dengan seruan dan mobilisasi narasi “*ummat*” yang diprediksi dapat mempersatukan umat Islam di Indonesia melalui aksi-aksi demonstrasi atas kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok pada akhir tahun 2016. Melalui proses penelusuran terhadap motif penyelenggaraan dan jumlah peserta yang hadir pada aksi-aksi Bela Islam, artikel ini berkesimpulan bahwa Aksi Bela Islam yang dimotori oleh GNPF-MUI memenuhi beberapa unsur populisme saja seperti adanya perwakilan peserta yang hadir dari kalangan multi-kelompok, namun populisme ini masih relatif semu (*pseudo Islamic Populism*) di mana aliansi ini tidak bisa mempertahankan dirinya dan pesertanya sehingga yang masih konsisten dalam aliansi ini hanyalah kelompok Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Umat

¹⁰⁰ Ahyar and Alfitri, “Aksi Bela Islam: Islamic Clicktivism and the New Authority of Religious Propaganda in the Millennial Age Indonesia.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 1 (2019): 1–29.

Islam (FUI). Selanjutnya, artikel ini juga menemukan adanya seruan dalam aksi Bela Islam tersebut yang semula untuk bela al-Qur'an, akan tetapi banyak seruan lain yang menyerukan untuk tidak memilih pemimpin kafir dan lebih memilih pemimpin Muslim.¹⁰¹

Peneliti tersebut melihat dari kajian-kajian PILKADA DKI Jakarta yang terkait dengan mobilisasi massa Islam (umat) yang terdapat dalam sejumlah rangkaian Aksi Bela Islam dengan inisiator utamanya adalah GNPf-MUI bahwa kajian-kajian tersebut hanya mampu memahami aksi-aksi tersebut sebagai pertumbuhan kembali konservatisme Islam yang menonjolkan aspek politik Islam dan populisme Islam (dalam hal ini - permasalahan tindak hukum atas kasus penistaan agama) melalui mekanisme propaganda dakwah-politik yang dilakukannya dengan cara beraksi di kehidupan nyata maupun virtual-online.

Dengan demikian, kelemahan dari kajian yang membahas tentang PILKADA DKI Jakarta 2017 dan mobilisasi umat adalah kajian-kajian tersebut hanya mampu memahami pola perilaku kelompok Aksi Bela Islam yang memobilisasi umat dalam dunia riil dan virtual ditinjau dari perspektif populisme dan konservatisme Islam sehingga kajian tersebut mengabaikan peran mereka yang juga didukung oleh tim pemenang PILKADA dalam penyusunan dan pengaplikasian gerakan mobilisasi tersebut. Ini berarti kajian terdahulu tersebut mengabaikan pola perilaku kelompok Aksi Bela Islam dalam konteks tindakan komodifikasi agama di segala ruang (ruang kehidupan riil dan virtual).

¹⁰¹ Kusumo and Hurriyah, "Populisme Islam Di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela Islam Oleh GNPf-MUI Tahun 2016-2017." *Jurnal Politik* 4, no. 1 (2019): 87.

Salah satu penggerak Aksi Bela Islam adalah kelompok Front Pembela Islam (FPI) di mana Gabriel Facal menegaskan bahwa FPI terlibat dalam gerakan demonstrasi anti-Ahok sejak tahun 2016 hingga awal 2017. Pemimpinnya Rizieq Shihab menjadi petinggi GNPF-MUI bersama Bachtiar Nashir dalam memimpin dan mengordinasi demonstrasi anti-Ahok. FPI bertanggungjawab atas narasi yang disuarakannya dengan istilah “kriminalisasi ulama” setelah Rizieq Shihab dan Bachtiar Nashir tersandung oleh masalah hukum dengan menggandeng para tokoh elite politik yang notabene juga kelompok oposisi pemerintahan Joko Widodo.¹⁰²

FPI dalam menggerakkan umat Islam sebagai kunci demonstrasi Aksi Bela Islam yang terjadi di Ibukota Jakarta, mendapatkan dukungan kekuatan secara dakwah dari kelompok Islam yang bergerak di bidang intelektual pemikiran seperti MIUMI (Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia) dan INSIST (*Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization*) dengan cara propaganda populisme Islam. perpaduan dua kelompok intelektual Islam Indonesia tersebut di pasca kasus Ahok merupakan sintesis dari gerakan konservatisme dan modernisme Islam yang melibatkan banyak aktor di balik agenda-agenda politik mereka.¹⁰³ Keterlibatan dua kelompok intelektual tersebut dalam sejumlah Aksi Bela Islam tidak dapat dipungkiri bahwa mobilisasi mereka sangat mudah diterima oleh masyarakat Islam karena kepiawaian dan kemampuan

¹⁰² Gabriel Facal, “Islamic Defenders Front Militia (Front Pembela Islam) and Its Impact on Growing Religious Intolerance in Indonesia,” *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia* 8, no. 1 (2020): 7–20.

¹⁰³ Aidulsyah and Mizuno, “The Entanglement between Anti-Liberalism and Conservatism: The Insists and Miumi Effect within the “212 Movement” in Indonesia.” *Journal of Indonesian Islam* 14, no. 1 (2020): 1–25.

mereka dalam menyampaikan permasalahan penistaan agama dan kepemimpinan Islam di Indonesia dengan pendekatan pemikiran intelektual.

Penelitian lain menyebutkan bahwa FPI dan GNPf-MUI mentahbiskan dirinya sebagai kelompok Islam yang revolusioner karena dapat menyatukan komunitas Islam Indonesia dalam satu gerakan yang diprakarsai dan dimobilisasinya, yaitu Aksi Bela Islam. mereka dapat mengakomodasi berbagai kelompok Islam sehingga melebur menjadi kelompok islamis-puritan-konservatif yang juga banyak mengisi kepengurusan secara struktural di Majelis Ulama Indonesia. Upaya mobilisasi umat Islam di Aksi Bela Islam tersebut bertujuan untuk mendapatkan legitimasi sosiologis dari pelbagai kalangan Islam Indonesia¹⁰⁴.

Assyari Abdullah melihat gerakan Aksi Bela Islam sebagai ruang yang dapat dikatakan sebagai politik identitas pada satu sisi. Dan sebagai ijtihad politik pada sisi yang lain. Dikatakan sebagai bagian dari ijtihad politik karena tuntutan para demonstran sangat jelas untuk mewujudkan rasa adil dan kemaslahatan untuk semua warga negara Indonesia pasca kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok. Tuntutan umat Islam di sejumlah aksi melihat bagaimana pemerintah Indonesia seakan-akan tidak memberikan penindakan secara hukum atas kasus penistaan agama yang terjadi Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Mereka berdemonstrasi dengan pengawalan surat pendapat dan pernyataan sikap dari MUI agar menindak pelaku penistaan agama dengan tertuduh Gubernur DKI

¹⁰⁴ Fuad Muhsin, Hani Hanifah, and Muhammad Hasan Al As Ari, "Islamic Defending Action And Fatwa Defenders Movement Indonesian Ulema Council," *International Journal of Islamic Khazanah* 10, no. 1 (2020): 11–15.

Jakarta Ahok di kala itu. Bahkan ia memuji GNPF-MUI adalah pergerakan politik yang cerdas yang telah memberikan kewenangan Aksi Bela Islam untuk para anggota koalisinya sebagai gerakan pro-MUI dan bukan gerakan anto-Ahok.¹⁰⁵ Kendati demikian, Assyari Abdullah tidak secara jelas membahas bagaimana politik identitas yang terjadi pada gerakan Aksi Bela Islam tersebut dan lebih mengurai akan pentingnya perjuangan umat Islam secara politik dengan pemahaman *politics at it's best*, bukan *politics at it's worse*.

d. Komodifikasi Agama dalam Politik Lokal Indonesia

Artikel Luthfi Assyaukanie berjudul "*Religion as a Political Tool: Secular and Islamist Roles in Indonesian Elections*". Artikel ini menganalisis penggunaan agama pada pemilihan umum di Indonesia (lokal dan nasional) ternyata sama-sama dilakukan oleh politisi religius dan politisi sekuler guna meningkatkan perolehan suara elektoral mereka. Fokus kajian artikel ini adalah mengeksplorasi peran agama dalam perpolitikan Indonesia, khususnya Pemilihan Umum Presiden pada tahun 2019 serta bagaimana orang menggunakannya sebagai alat politik. Pada kebangkitan politik identitas dan munculnya populisme global, agama mempunyai ruang kosong untuk diekspresikan sehingga orang dengan mudahnya melakukan politisasi agama. Artikel ini berkesimpulan bahwa dalam PILPRES 2019, penggunaan agama sebagai alat politik untuk memperoleh suara sama-sama digunakan oleh pemain religius dan pemain sekuler. Prabowo salah satu calon presiden kala itu mencoba untuk menggunakan agama sebagai strategi

¹⁰⁵ Assyari Abdullah, "Membaca Komunikasi Politik Gerakan Aksi Bela Islam 212: Antara Politik Identitas Dan Ijtihad Politik Alternatif [Reading the Political Communication of the Islamic Defense Action Movement 212: Between Identity Politics and A," *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam* 41, no. 2 (2017): 202–212.

pemenangan elektoral sebagaimana strategi tersebut berhasil dipraktikkan pada waktu PILKADA DKI Jakarta 2017. Ditambah dengan absensinya program politik alternatif menjadikan agama sebagai cara terbaik untuk menantang *incumbent* (Joko Widodo). Selain itu, peranan konservatif seperti Salafi dan Wahabi Indonesia sering disandarkan sebagai pelaku utama dalam menciptakan politisasi agama. Peranan lain adalah kelompok intoleran seperti FPI, HTI dan PKS telah mendukung Prabowo.¹⁰⁶

Dony Arung Triantoro menulis “*Praktik Politik Identitas dalam Akun Media Sosial Anies-Sandi*” secara khusus mengkaji praktik politik identitas di akun media sosial pasangan Anis Baswedan dan Sandiaga Uno di PILKADA DKI Jakarta 2017. Artikel ini melihat adanya tampilan simbol-simbol keagamaan Islam di akun media sosial yang dilakukan oleh aktor politik seperti Anis Baswedan, PKS dan media, sehingga politik identitas yang digunakan dalam akun media sosial di saat PILKADA menghasilkan pembentukan gerakan Islam yang radikal, konservatif dan Islamisme, di samping juga perlahan-lahan dapat mengikis demokrasi Pancasila.

Simbol keagamaan Islam yang berkembang secara *online* tersebut secara umum seperti kata-kata “dekat dengan Allah”, “seiman”, “syariah”, “Islami” dan simbol peci di mana praktik politik identitas ini dikembangkan oleh sejumlah tokoh ulama dan organisasi keagamaan.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Assyaukanie, “Religion as a Political Tool Secular and Islamist Roles in Indonesian Elections.” *Journal of Indonesian Islam* 13, no. 2 (2019): 454–479.

¹⁰⁷ Triantoro, “Praktik Politik Identitas Dalam Akun Media Sosial Anies-Sandi.” *Jurnal ILMU KOMUNIKASI* 16, no. 1 (2019)

Fardan Mahmudatul Imamah melalui “*Discourse on Penistaan Agama of Basuki Tjahaja Purnama’s Blasphemy Trial in Twitter*”¹⁰⁸, berkeinginan untuk memetakan dan menjelaskan bagaimana *netizen* Indonesia di Twitter memahami penistaan agama dalam kasus Ahok dan bagaimana mereka membangun diskursus tentangnya. Dengan analisis *hashtag* dalam Twitter, artikel ini menemukan ada 6 isu dominan terkait diskursus kasus Ahok, yaitu; 1) aksi bela Islam; 2) bela Ulama; 3) kepemimpinan Muslim, 4) keamanan nasional; 5) memenjarakan Ahok, 6) pemilihan kepala daerah. Dalam memahami penistaan agama tersebut, artikel ini menggunakan diskursus agama dan diskursus politik. Diskursus agama memahami penistaan agama sebagai ancaman terhadap agama dan negara, sedangkan diskursus politik memahami penistaan agama sebagai alat politik.

Akhmad Muzakki melihat bagaimana di balik komodifikasi agama terdapat politik identitas yang tersembunyi di dalam industri publikasi yang menjadikan Islam sebagai komoditas yang kian terus diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat Islam. Hal ini sebagaimana yang ditulisnya di dalam artikel “*Transmitting Islam Through Stories the Sociology of Production and Consumption Of Islam In Novel Literature*”. Ia mencatat bahwa setidaknya terdapat dua poin penting adanya politik identitas di antara masyarakat Islam akibat dari praktik komodifikasi Islam. Pertama, meningkatnya pameran buku yang disebut Arabisasi Islam, baik secara gagasan dan praktik. Kedua, eksploitasi terma-terma Arab lainnya melebihi apa yang dipromosikan dalam novel Islam

¹⁰⁸ Fardan Mahmudatul Imamah, “Discourse on Penistaan Agama of Basuki Tjahaja Purnama’s Blasphemy Trial in Twitter,” *Religió: Jurnal Studi Agama-agama* 7, no. 1 (2017): 84–116.

yang menunjukkan konteks kelompok Muslim tertentu. Dari perspektif praktik, perubahan politik identitas mereka dapat dilihat dari pakaian Muslim (*Muslim Fashions*) sehari-hari seiring dengan semakin banyaknya praktik komodifikasi Islam. Komodifikasi tersebut berjalan karena adanya modus transmisi Islam melalui cerita-cerita Islam dalam novel senada dengan semakin maraknya masyarakat Islam mengonsumsi publikasi karya yang bertemakan Islam¹⁰⁹.

Berkaitan dengan komodifikasi agama dalam PILKADA DKI Jakarta 2017, artikel karya Umaimah Wahid berjudul “*Media and Commodification of Islamic Symbols in Political Campaign Towards General Election of Governor / Vice Governor of DKI Jakarta 2017*” menjelaskan bahwa media memiliki peran sentral dalam kampanye politik selama perhelatan PILKADA DKI Jakarta 2017 di mana kampanye politiknya tidak dapat dipisahkan dari bentuk dan nuansa Islam sebagai agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat sehingga politisi tidak jarang menggunakannya sebagai instrumen politik. Penggunaan simbol dan atribut Islam dalam kampanye merupakan bentuk komodifikasi di sebuah market untuk mendapatkan opini yang positif dari masyarakat sehingga politisi dapat menarik minat dan perhatian mereka sebagai pendukung suaranya.

Secara teknis, artikel ini mempunyai fokus kajian pada masalah kenapa komodifikasi simbol dan atribut Islam digunakan oleh para politisi dalam kampanyenya, serta bagaimana media dan komodifikasi simbol dan atribut Islam memanipulasi realitas untuk politisi atau kandidatnya dalam proses kampanye

¹⁰⁹ Akh Muzakki, “Transmitting Islam through Stories: The Sociology of Production and Consumption of Islam in Novel Literature,” *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 1 (2017): 59–76.

politik. Temuan artikel ini adalah politisi menggunakan simbol dan atribut Islam dalam kampanye politik sebagai bentuk cara untuk memanipulasi persepsi publik yang diarahkan untuk memikat para pemilih. Komodifikasi simbol dan atribut Islam di media ditentukan oleh standarisasi kelompok dominan atau pemilik modal di industri budaya politik di mana politisi mengkonstruksi pesan yang berhubungan dengan pemahaman pemilih (*audiens*) terhadap realitas¹¹⁰.

Sayangnya, dikarenakan fokus artikel ini hanya pada media dan komodifikasi simbol Islam, peneliti melihat dalam artikel ini bagaimana atribut dan simbol Islam muncul di media massa seperti Media Indonesia dan Metro TV yang digunakan oleh calon pasangan Gubernur DKI Jakarta 2017 dianalisis dari perspektif ekonomi politik media sehingga kesimpulan secara sederhana dapat diketahui dari hubungan media-politisi dan keberpihakannya dalam mengkonstruksi media yang dibalut dengan simbol atau atribut Islam untuk tujuan manipulasi realitas demi tercapainya ketertarikan suara pemilih.

e. **Strategi Pemenangan Pasangan Calon di PILKADA DKI Jakarta 2017**

Artikel yang berbicara tentang strategi pemenangan pasangan calon di PILKADA DKI Jakarta 2017 meliputi artikel yang dituliskan oleh Arya Parama Widya dan Nur Hidayat Sardini dengan judul “*Strategi Pemenangan Pasangan Calon Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017*” di mana artikel ini menjelaskan bagaimana kemenangan telak pasangan calon Anies-Sandi di PILKADA DKI Jakarta 2017

¹¹⁰ Wahid, “Media and Commodification of Islamic Symbols in Political Campaign Towards General Election of Governor/Vice Governor of DKI Jakarta 2017.”

di hampir seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta (5 Kotamadya dan 1 Kabupaten) dengan mengalahkan petahana, pasangan calon Ahok-Djarot. Artikel ini menyimpulkan bahwa kemenangan Anies-Sandi tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor umum dan faktor khusus. Faktor umum lebih banyak dikarenakan oleh maraknya politik uang dan resistensi terhadap petahana, kerjasama relawan dan kader partai yang baik. Sementara faktor khususnya adalah munculnya politik identitas dalam masa kampanye dan isu reklamasi yang ditentang oleh pasangan calon Anies-Sandi dari mega proyek petahana, Ahok-Djarot. Selain itu, artikel ini juga mengklaim adanya tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi dari masyarakat dan partai politik pendukungnya kepada pasangan calon petahana Ahok-Djarot.¹¹¹

Sebaliknya, artikel lain berbicara tentang “Strategi Kampanye Gubernur Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam Menghadapi PILKADA DKI Jakarta 2017” yang ditulis oleh Rahmadya P. Nugraha dan Anastasya C. Puspitasari. Artikel ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana strategi kampanye Ahok-Djarot dalam menghadapi PILKADA Dki Jakarta 2017 secara konstruktivis. Ia berkesimpulan bahwa strategi yang selama ini digunakan adalah menunjukkan kembali program-program nyata mereka sebagai petahana atas kepuasan publik terhadap kinerjanya. Strategi lainnya adalah kampanye dengan

¹¹¹ A. P. Widya, and N. H. Sardini, "Strategi Pemenangan Pasangan Calon Anies Baswedan Dan Sandiaga Uno Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dki Jakarta Tahun 2017," *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 8, no. 03, Jul. 2019.

media baik dengan media klasikal seperti baliho dan poster dan dengan media digital seperti media sosial dan kanal Youtube¹¹².

Artikel yang ditulis oleh Aryojati Ardipandanto dengan judul “*Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017: Strategi Politik Kandidat*” di mana ia membahas tentang bagaimana masing-masing pasangan calon mempunyai strategi yang berbeda dalam menghadapi pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Artikel ini menyebutkan bahwa pasangan calon Ahok-Djarot sebagai petahana lebih mengedepankan strategi penonjolan prestasi kinerja mereka di sejumlah sektor urusan pemerintahan seperti penataan ruang wilayah, birokrasi yang sistematis dan ketegasan dalam pemberantasan korupsi. Untuk melawan petahana, baik Pasangan calon Agus-Sylvi dan Anies-Sandi mempunyai cara strategi yang berbeda. Agus Sylvi lebih menunjukkan strategi mengkritik kebijakan Ahok-Djarot dalam masalah relokasi atau penggusuran sejumlah masyarakat yang dianggapnya sebagai hal yang kurang manusiawi. Sedangkan pasangan calon Anies-Sandi lebih menunjukkan strategi isu SARA yang diarahkan langsung kepada pribadi Ahok.¹¹³

Ahmad Hasan Ubaid dan H.B Habibusubandi menulis artikel dengan judul *Political Polarization based on Religious Identities: Empirical Evidence from the 2017 Jakarta Gubernatorial Election* yang menekankan bagaimana kemunculan polarisasi baru yang bersifat ideologis dari selain pola moderat dan pluralistik

¹¹² Rahmadya P. Nugraha & Anastasya C. Puspitasari, Strategi Kampanye Gubernur Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam Menghadapi PILKADA DKI Jakarta 2017. *Jurnal Komunikasi*, Vol. 10, No. 2, Desember 2018, hal. 142-149.

¹¹³ Aryojati Ardipandanto. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017: Strategi Politik Kandidat. *Jurnal Kajian*, Vol. 22, No. 1, Maret 2017. Hal. 15-31.

yang berdasarkan pada identitas keagamaan di antara masyarakat pemilih di PILKADA DKI Jakarta 2017. Polarisasi ideologis ini diakibatkan oleh kesenjangan ideologis yang muncul dari kampanye dan spin politik yang dilakukan oleh para politisi Islam dan aliansi organisasinya. Secara konklusif, artikel ini menyebutkan polarisasi tersebut hasil dari strategi kampanye yang dilakukan oleh staf, politisi dan pemuka agama dengan cara mengeksploitasi isu agama sebagai senjata politik dalam PILKADA. Dengan demikian, kebangkitan identitas keagamaan tidak dapat dibendung lagi.¹¹⁴

2. Perbedaan Penelitian Ini dengan Penelitian Sebelumnya

Dari penelitian sebelumnya yang telah dibahas dalam empat klaster di atas, peneliti melihat bagaimana kecenderungan penelitian PILKADA DKI Jakarta 2017 lebih banyak dikaitkan dengan persoalan politik identitas atau identitas keagamaan. Survei opini publik yang dilakukan oleh Mujani¹¹⁵ tentang dominasi faktor identitas keagamaan yang mempengaruhi perilaku pemilih dapat memperkuat hasil penelitian serupa sebelumnya¹¹⁶. Dan menurut peneliti, faktor

¹¹⁴ AHMAD HASAN UBAID and H.B HABIBI SUBANDI, "Political Polarization Based on Religious Identities: Empirical Evidence from the 2017 Jakarta Gubernatorial," *Jurnal Studi Pemerintahan* 8, no. 4 (2017).

¹¹⁵ Mujani, "Religion and Voting Behavior Evidence from the 2017 Jakarta Gubernatorial Election." *Al-Jami'ah* 58, no. 2 (2020): 419–450.

¹¹⁶ Mietzner, "Authoritarian Innovations in Indonesia: Electoral Narrowing, Identity Politics and Executive Illiberalism" *Democratization* 27, no. 6 (2020): 1021–1036. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266>.; Setijadi, "Ahok's Downfall and the Rise of Islamist Populism in Indonesia" *ISEAS Perspective*, no. 38 (2017); Hadiz, "The 'Floating' Ummah in the Fall of 'Ahok' in Indonesia" *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia* 7, no. 2 (2019): 271–290.; Herdiansah, Djuyandi, and Sumadinata, "Extending Aliran Politics in Electoral Contest: An Insight of Indonesia's Democracy in the Post-2014" *Central European Journal of International and Security Studies* 13, no. 4 (2019): 518–545.; Nasrudin and Nurdin, "Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada DKI Periode 2018-2022)" *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 1 (2019): 34–47.; Lestari, "Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas Di Indonesia." *Simulacra: Jurnal Sosiologi* 2, no. 1 (2019): 31.; Fealy, Accomodating Indonesia's Islamist Fringe. *Indonesian*

identitas keagamaan atau politik identitas inilah dapat dianggap sebagai kunci awal segala permasalahan dalam kajian-kajian banyak cendekiawan dan peneliti tentang PILKADA DKI Jakarta 2017 dan agama. Permasalahan-permasalahan kajian tersebut seperti sentimen agama¹¹⁷ atau primordialisme, mobilisasi umat dan aksi intoleran selama PILKADA DKI Jakarta 2017¹¹⁸.

Kajian-kajian relasi PILKADA DKI Jakarta 2017 dan agama mempunyai hubungan yang tidak dapat diurai secara holistik kecuali dengan berbagai perspektif. Hal ini karena kuatnya kompleksitas permasalahan politik dan agama di perpolitikan Indonesia tidak bisa disederhanakan begitu saja dengan melihat boleh mencampur, menggabung, memisahkan dan tidaknya. Namun, setidaknya perspektif tertentu untuk membaca serta menganalisis fenomena agama dan PILKADA DKI Jakarta 2017 adalah sangat dibutuhkan.

Journal of Political Research (IJPR), Volume 1, December 2020, 25-40.; Laode Machdani, *Politik Identitas di Indonesia*. (Malang: UB Press, 2018).

¹¹⁷ Setijadi, "Anti-Chinese Sentiment and the 'Return' of the Pribumi Discourse" *Contentious Belonging*, 2019, 194–213.; Arjon, "Religious Sentiments In Local Politics" *Jurnal Politik* 3, no. 2 (2018): 171.; Fionna, "Manipulating 'Diversity': Campaign against Ahok Threatens Democracy" *Perspective* 2017, no. 6 (2017); Pamungkas and Permana, *Intoleransi Dan Politik Identitas Kontemporer Di Indonesia*.

¹¹⁸ Mietzner and Muhtadi, "Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation" *Asian Studies Review* 42, no. 3 (2018): 479–497, <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335>; Mietzner, Muhtadi, and Halida, "Entrepreneurs of Grievance: Drivers and Effects of Indonesia's Islamist Mobilization" *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania*, Vol. 174, 159–187, 2018; Mietzner and Muhtadi, "The Mobilisation of Intolerance and Its Trajectories: Indonesian Muslims' Views of Religious Minorities and Ethnic Chinese" *Contentious Belonging*, no. Scherpen (2019): 155–174.; Prayogi, "Populisme Islam Dan Imajinasi Politik Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017" *Politeia: Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 2 (2019): 31–43.; Wicaksono, "Gubernur DKI Jakarta Dipilih Presiden: Sebuah Wacana Yang Patut Dipertimbangkan" *Jurnal PolGov* 1, no. 1 (2019).; Pamungkas and Octaviani, "Aksi Bela Islam Dan Ruang Publik Muslim: Dari Representasi Daring Ke Komunitas Luring" *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 4, no. 2 (2017): 108–125.; Kusumo and Hurriyah, "Populisme Islam Di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela Islam Oleh GNPf-MUI Tahun 2016-2017." *Jurnal Politik* Vol. 4, no. 1 (2019).

Salah satunya adalah perspektif politik identitas atau identitas keagamaan yang menyebabkan perilaku pemilih di PILKADA DKI Jakarta 2017 dapat memenangkan pasangan calon karena adanya identitas yang homogen dan dominan sehingga dapat menyebabkan kemunculan sentimen agama (SARA) dan masifnya gerakan intoleran baik di dunia riil-sosial maupun siber-sosial. Bahkan, penelitian Hasan Ubaid & Habibisubandi menyebutkan bahwa identitas keagamaan sudah dijadikan strategi pemasaran politisi dan tokoh agama untuk memenangkan pasangan calon Anies-Sandi¹¹⁹. Dengan demikian, politik identitas menjadi cara para politisi dan tokoh agama mempengaruhi perilaku pemilih yang berdampak secara tidak langsung pada kemenangan Anies-Sandi secara politik elektoral.

Penelitian ini tidak demikian. Jauh sebelum terjadinya politik identitas di PILKADA DKI Jakarta 2017 dan kemudian berdampak pada situasi sosial-ekonomi politik seperti sentimen agama, gerakan intoleran dan sejumlah aksi bela Islam. Penelitian ini lebih menyoroti bagaimana komodifikasi agama yang dilakukan oleh GNPf-MUI dan tim pemenang pasangan calon di PILKADA DKI Jakarta 2017 memberikan dinamika menguatnya keadaan faktual tentang hubungan ideologi agama dan politik praktis dalam bentuk PILKADA DKI Jakarta 2017.

Peneliti berasumsi bahwa politik identitas atau identitas keagamaan dalam percaturan politik merupakan spektrum yang bersifat dinamis. Yaitu ia dapat

¹¹⁹ UBAID and SUBANDI, "Political Polarization Based on Religious Identities: Empirical Evidence from the 2017 Jakarta Gubernatorial." *Jurnal Studi Pemerintahan* 8, no. 4 (2017).

menguat dan dapat pula merenggang. Hal ini dibuktikan oleh adanya sejumlah penelitian yang menunjukkan politik identitas terkadang berpengaruh dan tidak berpengaruh pada perilaku pemilih dalam pemilihan, sekalipun di PILKADA DKI Jakarta 2017 meningkat keterpengaruhannya.¹²⁰ Akan tetapi, komodifikasi agama bagi peneliti adalah spektrum yang dapat menaikkan politik identitas tersebut. Semakin penggunaan agama dinaikkan frekuensinya -baik secara simbolis maupun doktriner- demi tujuan politik maka semakin besar memberikan efek-efek politis terhadap masyarakat seagama dan menancapkan makna dalam diri mereka.

Inilah perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya, di mana penelitian ini tidak sekedar melihat dari sisi bagaimanakah keyakinan ideologi itu berpengaruh dan masuk dalam politik praktis dalam hal ini bentuknya adalah PILKADA DKI Jakarta 2017. Akan tetapi bagaimana kemudian proses komodifikasi agama itu terjadi dari GNPf-MUI dan tim pemenangan pasangan calon serta kaitannya dalam pemenangan politik elektoral.

Selanjutnya, penelitian ini juga tidak sekedar melihat bagaimana agama sebagai alat politik baik dilakukan oleh politisi religius maupun sekuler hingga memunculkan politisasi agama yang kerap dilakukan oleh kelompok Islamis dan partai politik Islamis.¹²¹ Dan juga bukan sekedar pembahasan tentang bagaimana penggunaan simbol Islam dalam kampanye politik di PILKADA DKI Jakarta 2017 sebagai bentuk untuk memanipulasi persepsi publik agar memilih pasangan

¹²⁰ Mujani, "Religion and Voting Behavior Evidence from the 2017 Jakarta gubernatorial Election." *Al-Jami'ah* 58, no. 2 (2020): 419–450.

¹²¹ Assyaukanie, "Religion as a Political Tool Secular and Islamist Roles in Indonesian Elections." *Journal of Indonesian Islam* 13, no. 2 (2019): 454–479.

calon¹²² di mana penelitian-penelitian ini hanya mengungkapkan bentuk simbol-simbol Islam yang digunakan dan keterkaitannya dengan penarikan simpati masyarakat pemilih. Berbeda dengan hal itu, penelitian ini lebih fokus melihat bagaimana komodifikasi agama di PILKADA DKI Jakarta 2017 bukan hanya dari para politisi yang memanfaatkannya di dalam praktik kampanyenya, akan tetapi justru aliansi keagamaan yang tergabung dalam GNPf-MUI yang berkampanye politik praktis dengan penggunaan simbol agama dengan tujuan yang berbeda dengan para politisi. Oleh karenanya, peneliti selain bermaksud mengungkap bagaimana proses dan bentuk komodifikasi dari dua kelompok aktor GNPf-MUI dan tim pemenangan, peneliti juga melihatnya dari sisi makna dan motif-motif tujuan yang berbeda ini dapat terungkap, sekalipun dalam koridor domain yang sama, yaitu PILKADA.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah riset kualitatif yang merupakan penelitian yang menitikberatkan pada usaha pemaknaan terhadap suatu fenomena interaksi tingkah laku manusia dalam mengkomodifikasi agama yang terjadi dalam situasi PILKADA DKI Jakarta 2017. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pemahaman konsep komodifikasi dari Greg Fealy serta menerapkan dua landasan teori; yaitu 1) tindakan komunikatif Habermas -peneliti melengkapinya dengan

¹²² Wahid, "Media and Commodification of Islamic Symbols in Political Campaign Towards General Election of Governor/Vice Governor of DKI Jakarta 2017." *Journal of Computational and Theoretical Nanoscience* 24, no. 4 (2018): 2213–2217.

teori *speech-act* Austin yang juga sebenarnya termasuk bagian dari tindakan komunikatif Habermas-¹²³ dan 2) teori tindakan kolektif Mancur Olson.

Adapun pendekatan penelitian ini adalah *political economy* (ekonomi politik) yang dengan sengaja digunakan sebagai sebuah cara untuk mendekati jalinan interaksi antara *market* dengan aktor-aktor kuat¹²⁴ di balik komodifikasi agama di PILKADA DKI Jakarta 2017. Di dalam interaksi tersebut, terdapat kekuatan yang bertanggung jawab atas perubahan ekonomi dan bahkan lebih luas lagi atas perubahan sosial-politik. Dalam kepentingan ekonomi politik, terdapat institusi yang berperan dalam menentukan perilaku dan hasil ekonomi. Di antara institusi tersebut, adalah institusi sosial, ekonomi dan politik yang mempunyai peran penting dalam menentukan atau setidaknya mempengaruhi insentif yang membentuk interaksi individu dan kelompok sebagai aktor ekonomi dan politik.¹²⁵

Sebagai langkah penelitian atas penggalan data, peneliti menggunakan studi netnografi dengan alasan penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat sosial-politik yang yang secara teknis mengumpulkan data digital dan data *network* (jaringan internet) sehingga mempengaruhi analisis dan interpretasinya sesuai dengan prinsip etika dan cara kerja dokumentasi dan observasi *online*¹²⁶. Selain itu, peneliti menemukan keterbatasan dalam melaksanakan prosedur dan

¹²³ Jurgen Habermas, *The Theory of Communicative Action: Reason and The Rationalization of Society Vol. I*, Trans. Thomas MacCharty, (Boston: Beacon Press, 1981), 95.

¹²⁴ Robert Gilpin, *The Political Economy of International Relations* (Princeton: Princeton University Press, 1987).

¹²⁵ Robert Gilpin, *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*, (Princeton: Princeton University Press, 2001). 39.

¹²⁶ Robert Kozinets, *Netnography: Redefined*, (London: Sage Publications, 2015), 2-3.

standar riset lapangan (seperti observasi dan wawancara langsung di lapangan) di saat pandemi Covid-19 yang melanda mayoritas daerah Indonesia, khususnya Jakarta sehingga peneliti melihat studi netnografi adalah sebuah cara kerja penelitian yang relevan dalam hal ini.

Studi netnografi lebih memfokuskan diri pada mikrokosmik sosial di dunia internet¹²⁷. Sebagian peneliti mengaitkan studi kualitatif secara online atau netnografi dengan riset etnografi.¹²⁸ Netnografi adalah cara untuk melakukan penelitian budaya dan komunitas virtual yang ada dalam internet dengan mengamati percakapan yang ada di web internet, menganalisis perilaku dan opini para pengguna serta menggunakan internet untuk mengumpulkan informasi yang tersedia di dalam internet sebagai bahasan publik di mana semua orang bebas berinteraksi dan berbagi melalui media sosial¹²⁹.

Untuk penerapan netnografi dalam riset ini, peneliti pertama-tama menyimpulkan bahwa netnografi dapat dipahami sebagai suatu kajian etnografis yang berbasis internet. Artinya, peneliti menyadari bahwa netnografi merupakan gabungan dari dua kata: net dan etnografi di mana peneliti mengharuskan

¹²⁷ Serra Anisa, Studi Netnografi Aksi Beat Plastic Pollution oleh United Nations Environment di Instagram, *Jurnal ASPIKOM*, Vol. 3 No. 6, Januari 2019, 1112.

¹²⁸ C. Hine, *Virtual Ethnography*, London: Sage Publications, 2000). B.K. Daniel, *Handbook of Research Methods and Techniques for Studying Virtual Communities: Paradigms and Phenomena*, (New York: Information Science Reference, 2011). K.J. Ward, *Cyber-Ethnography and The Emergence of the Virtually New Community*. *Journal of Information Technology*, 1999, 95-105. A.C. Garcia, A.I. Standlee, J. Bechkoff & Y. Cui, *Ethnographic Approaches to The Internet and Computer-Mediated Communication*. *Journal of Contemporary Ehtnography*, 38 (1), 2009, 52-84. R.V. Kozinet, *Netnography: Redefined*. (Los Angeles: Sage Publications, 2015).

¹²⁹ Sharmila P. Ferris & William Paterson, *Millenials, Social Networking and Social Responsibility*”, dalam Information Resources Management Association, *Virtual Communities: Concepts, Methodologies, Tools and Aplications*. (New York: Information Science Reference, 2010). Umar Suryadi Bakry, *Pemanfaatan Metode Etnografi dan Netnografi dalam Penelitian Hubungan Internasional*, *Jurnal Global & Strategis*, No. 1, 2011.

menyelami serta mendalami segala peristiwa tentang komodifikasi agama di PILKADA DKI Jakarta 2017 dengan mengambil dua kelompok aktor yaitu GNPF-MUI dan tim pemenangan pasangan calon dari segala sumber yang terekam dan terdeteksi di dalam jaringan internet-digital.

Pendeteksian sumber lebih banyak didapatkan dari hasil penelusuran di dalam kanal Youtube yang dimiliki oleh GNPF-MUI maupun para aktornya yang tersebar di kanal-kanal Youtube seperti Media Center GNPF-MUI, AQL, VOA Islam, Ummat TV dan FUI Channel. Sedangkan sumber non-video, peneliti lebih banyak mendapatkan dari penelusuran di situs-situs website resmi yang berafiliasi dengan para tokoh GNPF-MUI seperti <https://www.panjimas.com> (website resmi FPI), www.erasuslim.com, <https://www.nahimunkar.org> dan situs website yang pernah melakukan wawancara dengan tim pemenangan pasangan calon seperti tirto.id dan viva.com

Di dalam proses penelitian, peneliti menerapkan dua metode studi; yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi media (*media research*). Studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran literatur kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel yang terkait dengan dinamika Pilkada DKI Jakarta 2017. Sedangkan studi media dimaksudkan untuk melacak data atau informasi elektronik baik itu berupa tulisan, hasil wawancara, gambar maupun video yang didapatkan dari media berita online dan media sosial di mana saat ini ia menjadi multi-modal yang

dapat merepresentasikan gambar, video, *hashtag*, *emoticon* serta teks yang tertulis sekaligus¹³⁰.

Data dan informasi ini tentu berhubungan dengan topik masalah yang dikaji sehingga data masih bisa didapat dan dianalisis sekalipun di dalam penelitian ini teknik wawancara langsung dan observasi partisipan tidak dilaksanakan, namun data tersebut tetap menjadi data primer karena keaslian dan kemurnian wawancara yang dilakukan secara resmi oleh pihak kedua (pihak media) serta observasi online tetap dilaksanakan.

Oleh karena data yang dicari adalah segala isu agama yang berkaitan dengan PILKADA DKI Jakarta 2017, maka peneliti tidak memungkiri bahwa di dalam penelitian disertasi ini, ada banyak data tentang politisasi agama di PILKADA DKI Jakarta 2017. Untuk itu, peneliti membatasi diri dalam riset ini dengan cara mencari masalah agama sebagai komoditas publik saja dengan spesifikasi yang mengarah pada tujuan ekonomi yang dijalankan bersamaan dengan propaganda politik yang bertujuan pada politik praktis (*electoral voting*).

2. Sumber Data

Di dalam penelitian ini, sumber data mempunyai dua sifat; yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam riset kualitatif adalah bersumber dari kata-kata dan tindakan¹³¹, sehingga sumber data primer dalam riset Komodifikasi Agama pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan jenis riset kualitatif

¹³⁰ U. Russmann & J. Svensson, Introduction to Visual Communication in The Age of Social Media: Conceptual, Theoretical and Methodological Challenges. *Media and Communication*, 2017, 1-5.

¹³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 157.

dan studi netnografi adalah segala data serta informasi yang diperoleh langsung dari narasumber sebagai informan dengan menggunakan teknik wawancara yang dilakukan oleh pihak kedua yang diperoleh melalui proses pelacakan data *online* (pihak media). Data online ini seperti diambil dari <https://www.panjimas.com> (website resmi FPI), www.eramuslim.com, <https://www.nahimunkar.org>, www.voa-islam.com, @belaquran (twitter resmi milik GNPf-MUI), GNPf-MUI Media Center (Channel Youtube resmi GNPf-MUI), AQL Channel, Ummat TV dan Channel Youtube Forum Umat Islam dan penyedia data online lainnya yang berhubungan dengan GNPf-MUI. Data serta informasi tersebut dapat berupa hasil rekaman video atau hasil wawancara secara tertulis maupun videografi yang didapatkan melalui pelacakan media berita online.

Sumber data berikutnya adalah yang bersifat sekunder. Kali ini, peneliti melakukan pendeteksian terhadap segala sumber informasi yang membahas tentang komodifikasi agama pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan berbagai media massa yang *mainstream* maupun media daring¹³². Data sekunder juga dapat ditelusuri dari hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dengan batasan topik komodifikasi agama atau pun sejenisnya pada kasus Pilkada DKI Jakarta 2017. Seperti penelusuran terhadap artikel ilmiah di jurnal dan artikel media cetak di media-media penyedia berita online.

Terkait dengan penentuan sumber data, maka peneliti menjadikan subjek-subjek yang terdapat pada kelompok gerakan politik Islam yang terafiliasi dalam

¹³² James A. Black & Dean J. Champion. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 350.

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) seperti Bachtiar Nashir, Riziq Shihab, M. al-Khaththath, KH. Cholil Ridwan, Tengku Zulkarnain dan lain sebagainya serta tim pemenangan PILKADA pasangan calon gubernur – wakil gubernur yang terlibat aktif dalam kontestasi PILKADA DKI Jakarta 2017 sebagai unit analisis-nya, utamanya seperti Mardani Ali Sera yang juga selaku ketua tim pemenangan Anies-Sandi. Oleh karenanya, unit analisis di sini bisa saja kelompok dan individu-individu yang terlibat di dalam GNPF-MUI dan tim pemenangan Anies-Sandi dari sudut pandang analisis tindakannya di mana jumlahnya yang dipilih, dianggap cukup bila ukuran kelayakan terpenuhi¹³³.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Salah satu teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan cara mencatat serta mendokumentasikan segala bentuk catatan dan dokumen yang ditemukan dari hasil *tracing* data online berkaitan dengan masalah yang diteliti yang dicatat secara runut dan sistematis di dalam *form* pencatatan dokumen¹³⁴. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada penelitian ini seperti dokumen kelompok politik dalam berkampanye dan marketing politiknya dan dokumen penggunaan agama sebagai komoditas yang di-*market*-kan (komodifikasi agama) serta penggunaan

¹³³ Siti Aminah & Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 138.

¹³⁴ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), 53. Lihat Suharsimi Arikuto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 149.

agama dalam politik praktis (politisasi agama) yang terkadang secara bersamaan digunakan dalam konteks narasi yang sama. Kemudian dokumen yang diterbitkan oleh media baik media cetak maupun daring (berita, gambar, video) yang resmi dan tentu saja berkaitan dengan isu-isu dan peristiwa penggunaan simbol agama di dalam praktik kampanye politik.

b. Audio Visual

Teknik selanjutnya yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah teknik audio visual mencakup foto, dan rekaman video yang tersebar di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube. Secara teori, tujuan penggunaan teknik audio visual adalah memperoleh informasi audiovisual, pemetaan ruang dan riset *networking*¹³⁵.

Format umum dalam teknik audio-visual pada penelitian ini adalah pengumpulan data online yang mencakup data virtual dan wawancara berbasis web/internet via rekaman video Youtube atau kanal video lainnya yang diupload oleh selain peneliti. Selain itu, segala informasi online di mana peneliti melakukan cara pengamatan baru dengan melihat teks-teks pada layar, dengan memperkuat keterampilan dalam menafsirkan data tekstual¹³⁶ yang tercatat dalam jejak rekam digital di media sosial.

Oleh karena itu, audio-visual dilakukan guna mencapai jangkauan informasi melalui jejak rekam media yang hanya dapat diketahui oleh pelaku sendiri

¹³⁵ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan*, terj. A. Lintang Lazuardi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 226.

¹³⁶ D. B. Nicholas, King, G. L, M. Scott, etc. Contrasting Internet and Face-to Face Focus Group for Children With Chronic Health Conditions: Outcomes and Participant Experiences. *International Journal of Qualitative Methods*, 9 (1), 2010, 105-121.

(narasumber) di mana perilaku eksternalnya sebagai manifestasi agama yang dapat dikomunikasikan, juga terdapat pengalaman internal personal yang sebaliknya tidak dapat dikomunikasikan akan tetapi dapat dimaknai dari bukti-bukti informasi tekstual di media sosial.

c. Observasi Online

Observasi dalam studi netnografi menekankan pada keterlibatan peneliti secara *online* maupun *offline* di mana peneliti dapat melakukan pengumpulan data sembari analisis data melalui pencarian informasi dari peristiwa-peristiwa yang dialami langsung melalui pendalaman dan penyelidikan (investigasi) data terhadap internet dan berita-berita online dengan menggunakan laptop, tablet, ponsel dan aplikasi lainnya¹³⁷. Unsur pelibatangannya harus mendapatkan temuan yang relevan untuk memperkuat pemahaman peneliti tentang jaringan yang lebih besar di mana semua pengalaman sosial diasosiasikan dalam rekam jejak digital.

4. Teknik Analisis Data

Sebagai proses analisis data, peneliti mengorganisasikan data yang terkumpulkan dari catatan, gambar, foto, dokumen, laporan dan video rekaman. Secara teknis, peneliti melakukan analisis data dari hasil penelusuran dan pengumpulan sejumlah data netnografis dengan cara mengatur, mengurutkan, mengelompokkan dan memberikan suatu kode tertentu dan membuatnya kategorisasi tersendiri sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan sebuah teori berbasis data¹³⁸.

¹³⁷ Robert Kozinets, *Netnography: Redefined*, 26.

¹³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 103.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan teknik analisis domain (*domain analysis*). Tujuannya adalah untuk menganalisis serta mengeksplorasi gambaran objek penelitian¹³⁹ atau komodifikasi agama secara umum atau di tingkat permukaan, namun relatif utuh tentang obyek masalah komodifikasi agama di Pilkada DKI Jakarta 2017. Sehubungan dengan bervariasinya domain, maka peneliti meminjam analisis domainnya James Spradley yang menyarankan adanya hubungan semantik yang bersifat universal di dalam analisis tersebut sebagaimana hubungan berikut ini¹⁴⁰:

1. Jenis (*Strict Inclusion*)
2. Ruang (*Spatial*)
3. Sebab akibat (*Cause-Effect*)
4. Rasional (*Rationale*)
5. Lokasi kegiatan (*Location for Action*)
6. Cara ke Tujuan (*Means-End*)
7. Fungsi (*Function*)
8. Urutan (*Sequence*)
9. Atribut (*Atribution*)¹⁴¹

Berkaitan dengan peneliti menggunakan teknik analisis domain, Spradley membuat enam cara yang saling berhubungan (hubungan semantik), sebagai berikut:

¹³⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), 85.

¹⁴⁰ James Spradley,

¹⁴¹ W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (London: Pearson Education Limited, 2014), 490-491.

1. Memilih pola hubungan semantik tertentu berdasarkan pada informasi atau fakta yang tersedia di dalam catatan peneliti
2. Menyiapkan kerja analisis domain
3. Memilih kesamaan-kesamaan data dari catatan peneliti
4. Mencari konsep-konsep induk dan kategori-kategori simbolis dari domain tertentu yang sesuai dengan suatu pola hubungan semantik
5. Menyusun pertanyaan-pertanyaan struktural untuk masing-masing domain.
6. Membuat daftar keseluruhan domain dari seluruh data yang ada.¹⁴²

Peneliti memulai untuk menganalisis dengan mengikuti pola-pola hubungan semantik yang telah direncanakan. Kemudian memilah-milah data untuk mencari kesamaan tertentu yang dikelompokkan dalam kategori jenis tertentu sehingga dapat dimasukkan ke dalam lembaran kerja Teknik Analisis Domain yang telah dipersiapkan. Dari hasil pemilahan tadi, peneliti mencari konsep-konsep utama dan kategori-kategori simbolik dari suatu domain yang sesuai dengan hubungan-hubungan semantik.

Mula-mula peneliti harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang struktural yang diformulasikan untuk masing-masing domain yang telah dipersiapkan sebelum membuat daftar seluruh domain yang final. Dalam hal ini peneliti dapat membuat draf daftar domain sementara yang nantinya akan diuji dengan pertanyaan struktural. Kemudian, peneliti harus menguji draf daftar domain sementara tersebut dengan hasil modifikasi yang sesuai dengan kebutuhan

¹⁴² Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif* (Malang: YA3 Malang, 1990), 97.

peneliti dalam analisis domain yang diinginkan¹⁴³. Oleh karena itu, peneliti telah membuat tabel draf domain yang bersifat sementara sesuai dengan tema penelitian yang diambil, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Domain dalam Penelitian tentang Komodifikasi Agama di Pilkada DKI Jakarta 2017

Daftar Domain	Hubungan Semantik	Bentuk Hubungan	Pertanyaan Struktural
Jenis Komodifikasi Agama	Jenis	X adalah jenis dari Y	Keseluruhan jenis/bentuk komodifikasi agama yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta 2017
Penggunaan simbol agama untuk berpolitik	Ruang	X adalah bagian dari Y X bertempat di Y	Tempat atau pakaian ibadah dalam politik adalah bagian dari komodifikasi agama
Sebab-sebab komodifikasi agama	Sebab-Akibat	X adalah sebab dari Y	penafsiran agama dalam politik praktis adalah penyebab terjadinya komodifikasi agama
Alasan memilih agama sebagai politik identitas	Rasional/Alasan	X adalah alasan melakukan Y	Apa saja yang menjadi alasan mereka melakukan komodifikasi agama di Pilkada DKI Jakarta 2017
Konsentrasi komodifikasi agama	Lokasi Kegiatan	X merupakan tempat melakukan Y	Di mana tempat-tempat konsentrasi komodifikasi agama
Cara komodifikasi agama	Cara bertujuan	X adalah cara untuk melakukan Y	Apa saja cara secara keseluruhan yang digunakan untuk komodifikasi agama

¹⁴³ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif...*, 87-89.

			di Pilkada DKI Jakarta 2017
Fungsi komodifikasi agama	Fungsi	X merupakan fungsi dari Y	Apa saja fungsi yang digunakan dalam melakukan komodifikasi agama di Pilkada DKI Jakarta 2017
Urutan komodifikasi agama	Urutan (<i>sequence</i>)	X merupakan urutan atau tahap dalam Y	Apa saja yang menjadi urutan/tahapan dalam komodifikasi agama
Atribut komodifikasi agama	Atribut	X merupakan atribut atau karakteristik Y	Apa saja yang menjadi atribut/karakteristik bagi komodifikasi Agama

Teknik analisis domain di dalam penelitian ini lebih cenderung untuk menggunakan logika deskriptif seperti yang telah dijelaskan dalam enam cara hubungan semantik tadi. Yang dimaksud dengan logika deskriptif di sini adalah mendeskripsikan serangkaian kegiatan yang menjadi langkah esensial yang paling utama ditemukan ketika melakukan studi observasi secara netnografis. Di sini, peneliti harus dapat mengidentifikasi sebuah temuan sesuai topik yang tidak ditemukan sebelumnya. Selain itu, dia harus dapat mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik itu serta meyakini akan pentingnya temuannya nanti¹⁴⁴.

¹⁴⁴ Prabhat Pandey and Meenu Mishra Pandey, *Research Methodology: Tools and Techniques* (Buzau: Bridge Center, 2015), 70.

5. Teknik Keabsahan Data

Ketika pengumpulan data tentang kelompok GNPF-MUI dan tim pemenangan pasangan calonnya secara daring mempunyai kuantitas yang sangat luar biasa, maka di sini peneliti membutuhkan beberapa tingkat penyaringan data agar keabsahan data (validasi) dapat senantiasa terjaga sehingga data yang jumlahnya luar biasa tersebut dapat disederhanakan berdasarkan metode penyaringan yang valid. Untuk itu, peneliti melakukan rangkaian teknik untuk keabsahan data penelitian ini dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Pemetaan Domain

Sebagai bekal permulaan, peneliti mengumpulkan informasi awal mengenai komodifikasi agama di PILKADA DKI Jakarta 2017 berdasarkan sembilan daftar domain yang sudah ditetapkan oleh peneliti (sebagaimana ada pada Tabel 1.1 Domain dalam Penelitian tentang Komodifikasi Agama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017) dari arus percakapan yang terjadi di dunia maya. Tujuan peneliti dalam pemetaan domain berdasarkan pada daftar sembilan domain tadi adalah peneliti dapat mengetahui dan memisahkan mana yang termasuk data dan mana yang bukan (non-data).

Dari mengamati dan memahami arus percakapan di dunia maya tersebut, peneliti memproses penyaringan data yang dianggap relevan dan *reliable*, namun masih dalam bentuk data mentah sehingga peneliti mengumpulkannya untuk mengekstraksinya agar memperoleh intisari (esensi) dari data tersebut. Data yang masuk kategori relevan dan *reliable* berdasarkan sudut pandang peneliti bahwa data yang relevan adalah data yang berkesesuaian dengan daftar

domain Tabel 1.1 yang sudah ditetapkan. Adapun data yang *reliable* adalah data yang berkesesuaian dengan produk data berupa *files* tekstual, grafis dan video yang diterbitkan (diunggah) oleh anggota komunitas GNPf-MUI dan media nasional terpercaya lainnya.

b) Teknik Triangulasi

Langkah untuk mendeteksi keabsahan data berikutnya adalah teknik triangulasi. Peneliti menggunakan teknik ini dengan tujuan untuk memeriksa, mengecek dan membandingkan data yang terkumpulkan dari komunitas GNPf-MUI dan tim pemenang secara daring dengan fokus pada penerapan tiga teknik triangulasi. Dalam hal ini, ketiga teknik triangulasi yang dipakai oleh peneliti adalah triangulasi sumber data, triangulasi metode (teknik) dan triangulasi teori.

- 1) **Triangulasi sumber data**, di mana peneliti mengecek data yang diperoleh melalui penelusuran dan pengamatan terhadap beberapa sumber internet. Di dalam proses pengamatan tersebut, peneliti menerapkan model pengamatan partisipatif yang diperkuat dengan cara penulisan dokumen, catatan, dan gambar sehingga peneliti mendapatkan keluasan pengetahuan dan informasi dari sumber-sumber data yang telah ditelusuri tersebut berdasarkan daftar domain (tabel 1.1) sebagai pijakan pengkodean data spesifik. Data yang diperoleh dari sumber internet tertentu kemudian dibandingkan serta dicek kembali dengan data dari sumber internet yang lain, sehingga peneliti memperoleh derajat

kepercayaan (kredibilitas) suatu informasi melalui alat dan waktu yang berbeda.

- 2) **Triangulasi Metode (Teknik)**, di mana peneliti melakukan perbandingan sumber-sumber yang diperoleh dari internet dari teknik dokumentasi dan observasi online dengan teknik yang lain seperti audio visual. Data yang diperoleh peneliti berupa *files* tekstual kemudian dibandingkan dan dicek kembali kepastiannya (*confirmability*) dengan pengamatan partisipatif terhadap video-video data yang tersebar di media sosial, utamanya kanal Youtube yang resmi (*official group*). Tentu saja, video-video tersebut dipilih yang sesuai dengan proses dan *setting* yang menggambarkan subjek penelitian yang berafiliasi dengan GNPf-MUI (*thick description*).
- 3) **Triangulasi Teori**, di mana setelah memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan, peneliti membandingkan informasi tersebut dengan teori yang digunakan sebagai perspektif penelitian agar peneliti mendapatkan informasi yang relevan dan menghindari kemungkinan-kemungkinan terjadinya bias subyektivitas peneliti atas temuan proposisional yang sudah dihasilkan.

6. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan menghasilkan skema sistematika pembahasan sebagaimana berikut ini:

BAB I : Pendahuluan, memuat tentang latar belakang dan fokus masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, studi

terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

- BAB II** : Gambaran Umum Pilkada DKI Jakarta 2017: Tim Pemenangan Pasangan Calon dan GNPF-MUI dalam Tinjauan Teoritis Komodifikasi Agama. Mulai dari formula pemilihan PILKADA di DKI Jakarta dan dinamika pelaksanaan PILKADA DKI Jakarta 2017 Putaran Pertama hingga Putaran kedua serta terjadinya peristiwa Surat al-Maidah di Pulau Pramuka hingga kemunculan gerakan politik Islam GNPF-MUI. Di akhir, pembahasan konsep komodifikasi dan keterkaitannya dengan PILKADA DKI Jakarta 2017.
- BAB III** : Proses Kemunculan dan bentuk-bentuk komodifikasi agama yang dilakukan oleh GNPF-MUI dan Tim Pemenangan di PILKADA DKI Jakarta 2017 mulai dari pembahasan proses munculnya komodifikasi agama hingga bentuk komodifikasinya baik yang dilakukan oleh GNPF-MUI dan tim pemenangan pasangan calon di PILKADA tersebut.
- BAB IV** : Makna dan motif Komodifikasi Agama Kelompok GNPF-MUI dan Tim Pemenangan Anies-Sandi di PILKADA DKI Jakarta 2017 serta implikasinya di dalam PILKADA.
- BAB V** : Penutup, memuat tentang kesimpulan, implikasi teoritis, keterbatasan studi dan rekomendasi.

BAB II

**GAMBARAN UMUM PILKADA DKI JAKARTA 2017: TIM
PEMENANGAN PASANGAN CALON DAN GNPF-MUI DALAM
TINJAUAN KOMODIFIKASI AGAMA**

A. Formula Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta

Pasca reformasi, Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah atau yang lebih dikenal dengan istilah desentralisasi yang sebenarnya bertujuan untuk mengembalikan proses pembangunan dan pengembangan daerah kepada pemerintah daerah setempat dalam konteks kewenangan dalam mengatur serta mengurus urusan daerahnya sendiri. Kendati demikian, untuk urusan pemilihan kepala daerah, sistem desentralisasi tersebut tidak lantas menyamaratakan ketentuan dan mekanisme pemilihan untuk semua daerah di Republik Indonesia.

Di dalam ketentuan dan mekanisme pemilihan, Indonesia mempunyai dua macam desentralisasi yaitu desentralisasi simetris dan asimetris. Desentralisasi simetris dapat dipahami sebagai sebuah pemberlakuan yang sama dan seragam bagi daerah-daerah yang bukan termasuk kategori daerah khusus sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sebaliknya, desentralisasi asimetris adalah kontra konsep atas desentralisasi simetris di mana istilah asimetris lebih ditujukan bagi daerah-daerah yang khusus dan mendapatkan perlakuan khusus di dalam pelaksanaan otonomi kedaerahannya.

Di antara daerah khusus tersebut adalah Provinsi Aceh, Papua, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta¹⁴⁵.

Pengkhususan keempat daerah tersebut seperti desentralisasi politik, ekonomi, fiskal dan administrasi. Termasuk untuk urusan administrasi dan formula pemilihan kepala daerahnya sebagaimana diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Papua dan Papua Barat.

Misal dalam mekanisme pencalonannya, daerah Aceh, Papua dan Yogyakarta mempunyai pengaturan khusus yang berbeda satu sama lainnya. Daerah Aceh mensyaratkan para calon gubernur dan wakilnya dengan syarat fasih membaca al-Qur'an melalui tes baca Qur'an. Kemudian partai lokalnya boleh mengajukan calon. Daerah Papua mengharuskan calon gubernur dan wakilnya berasal dari orang Papua Asli atau dinyatakan sebagai orang Papua Asli oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Untuk daerah Yogyakarta, calon gubernur dan wakil gubernur harus dari seorang Sultan Hamengku Buwono dan dari Pakualam dengan mekanisme pencalonan yang hanya ditetapkan oleh DPRD Yogyakarta dan diusulkan kepada Presiden RI agar disahkan dan dilantik.

Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, mekanisme pencalonan Kepala Daerah mengikuti aturan yang ada di dalam Undang-undang PILKADA pada

¹⁴⁵ Gunawan A. Tauda. Desain Desentralisasi Asimetris dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 1 Edisi 4 November 2018. Ali Muhammad Johan C. Sistem Pemilihan Kepala Daerah pada Daerah yang Memberlakukan Desentralisasi Asimetris. *Al-Qisth Law Review*. Vol. 5 No. 1 2021.

umumnya hanya saja khusus pembahasan formula pemilihan, DKI Jakarta mempunyai formula tersendiri yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Formula pemilihan di PILKADA DKI Jakarta adalah pasangan calon yang berhak sebagai pemenang adalah pasang calon yang mampu memperoleh suara sah yang lebih dari 50% suara sah (>50%) atau yang disebut dengan peraih suara terbanyak mayoritas. Namun, apabila di dalam pelaksanaan PILKADA di DKI Jakarta tersebut tidak terdapat pasangan calon yang memperoleh suara pemilih lebih dari 50% (>50%) suara sah, maka pelaksanaan PILKADA-nya akan digelar dengan sistem dua kali putaran (putaran kedua) yang diikuti oleh peserta pasangan calon yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua. Selanjutnya, pada putaran kedua nantinya yang dianggap sebagai pemenang PILKADA di DKI Jakarta adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak mayoritas dengan jumlah suara yang melebihi 50% suara sah (>50%).

Formula dua kali putaran (Putaran Kedua) secara khusus diperuntukkan bagi Pemilihan Kepala Daerah di wilayah DKI Jakarta saja. Bukan daerah lainnya. Kekhususan ini karena adanya aturan Undang-undang Kekhususan No. 29 Tahun 2007 yang mengistimewakan keterpilihan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia di mana calon gubernur dan wakil gubernurnya dapat dinyatakan menang mutlak apabila mereka memperoleh dukungan suara sah dari pemilih sebanyak lebih dari 50% suara. Sebaliknya, jika tidak sampai ambang batas perolehan suara tersebut maka PILKADA DKI Jakarta dapat dilakukan dengan sistem putaran kedua yang diikuti oleh calon peraih suara terbanyak pertama dan

kedua di putaran pertama. Ketentuan ini secara khusus diatur di dalam Undang-undang No. 29 Tahun 2007 Pasal 11 ayat 1, 2 dan 3.

Oleh karenanya, secara historis, pelaksanaan PILKADA DKI Jakarta sudah dua kali dilakukan dengan menggunakan sistem dua putaran. Yaitu, PILKADA DKI Jakarta tahun 2012 dan PILKADA DKI Jakarta tahun 2017. Di saat PILKADA DKI Jakarta 2012, KPU mensyaratkan bagi kandidat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta adanya dukungan minimal 16 kursi dari partai politik atau gabungan partai politik yang ada di DPRD DKI Jakarta.¹⁴⁶ Untuk persyaratan calon dari jalur perseorangan, bakal calon gubernur dan wakil gubernur PILKADA DKI Jakarta 2012 harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4% dari jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta sebanyak 10.183.498 orang atau setara dengan jumlah 407.340 orang yang tersebar di lebih dari 50% (>50%) dari jumlah kabupaten dan kotamadya yang ada di DKI Jakarta atau minimal tersebar di 4 Kabupaten/Kota.¹⁴⁷

Proses pemilihannya pun berlangsung cukup kompetitif dikarenakan diikuti oleh 6 pasangan calon di mana 2 pasangan calon di antaranya adalah jalur perseorangan (independen). Pasangan calon (1) Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (petahana) didukung oleh Demokrat, PAN, HANURA, PKB, PBB, PKNU dan PMB (Partai Matahari Bangsa). Pasangan calon (2) Hendarji Supandji-A. Riza

¹⁴⁶ KPU DKI Jakarta, NOMOR: 05/Kpts/KPU-Prov-010/2011 Tentang Jumlah Kursi Dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah Untuk Calon Yang Diajukan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012. Diunduh Dari <https://jdih.kpu.go.id/Dkijakarta/Detailkepkpud-6e4a545870544e45> Pada Tanggal 16 Januari 2020.

¹⁴⁷ KPU DKI Jakarta, NOMOR: 04/Kpts/KPU-Prov-010/2011 Tentang Persyaratan Dukungan Dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota JAKARTA TAHUN 2012. Di unduh dari https://jdih.kpu.go.id/dkijakarta/data/data_kepkpud/04-KEP-DUKUNGAN%20PERSEORANGAN.pdf pada tanggal 16 Januari 2020.

Patria yang merupakan dari jalur independen. Pasangan calon (3) Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama didukung oleh PDI-P dan GERINDRA. Pasangan calon (4) Hidayat Nurwahid-Didik J. Rachbini didukung oleh PKS. Pasangan calon (5) Faisal B. Batubara-Biem Benjamin juga merupakan dari jalur independen. Dan pasangan calon (6) Alex Noerdin-Nono Sampono didukung oleh GOLKAR, PPP, dan PDS (Partai Damai Sejahtera).

PILKADA ini digelar dengan sistem dua putaran karena pada Putaran Pertama tidak ada pasangan calon yang memenangkan suara yang melebihi 50% sehingga harus dilanjutkan dengan sistem Putaran Kedua yang diikuti oleh dua pasangan calon dengan suara terbanyak yaitu Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (42,60%) dan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (34,05%). Di Putaran Kedua, pasangan calon Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama menang dengan total suara pemilih yang diraih sebesar 2.472.130 orang atau 53,82 % suara. Sedangkan pasangan calon dari Petahana yaitu Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli harus menelan kekalahan dengan total suara yang diraih sebesar 2.120.815 pemilih atau 46,18% suara¹⁴⁸.

PILKADA DKI Jakarta 2017 sedikit berbeda di dalam mekanisme aturan pencalonannya di mana KPU memberikan syarat baru kepada masing-masing pasangan calon dengan keharusan perolehan dukungan dan rekomendasi dari sedikitnya 22 kursi atau setara dengan 20% dari partai politik atau gabungan partai politik yang duduk di kursi DPRD DKI Jakarta. Selain itu, KPU juga membuka

¹⁴⁸ Indra Pahlevi, *Pemilukada DKI Jakarta Putaran Kedua. Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*. Vol. IV, No. 14/II/P3DI/Juli/2012.

pencalonan dari jalur perseorangan atau independen dengan syarat calon perseorangan tersebut harus mendapatkan dukungan sebesar 7,5 % dari jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) PILKADA DKI Jakarta 2017 yang ada sebanyak 7.070.475 orang atau jika dihitung secara persentase maka ditemukan sebesar 530.000 orang yang dibuktikan dengan pengumpulan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana diatur di dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di mana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah termasuk provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 jiwa sampai dengan 12.000.000 yang ketentuannya harus didukung minimal 7,5% nya¹⁴⁹.

B. PILKADA DKI Jakarta 2017

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) DKI Jakarta 2017 adalah bagian dari pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang diadakan secara serentak sebagaimana termaktub di dalam UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomoer 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang¹⁵⁰.

¹⁴⁹ KPU DKI Jakarta, PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Di unduh dari https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%203%202017_UPLOAD.pdf pada tanggal 20 Februari 2020.

¹⁵⁰ UU. No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomoer 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang. Diunduh dari <http://perludem.org/2017/11/30/undang-undang-tentang-pemilihan-kepala-daerahpilkada/> pada tanggal 03 Mei 2018.

Secara teknis, UU No. 8 Tahun 2015 ini terbagi menjadi tiga gelombang. PILKADA serentak gelombang pertama diadakan pada bulan Desember 2015 yang diikuti oleh 269 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 36 Kotamadya dan 224 Kabupaten. Pilkada serentak gelombang kedua diadakan pada bulan Februari 2017 dengan jumlah peserta PILKADA 101 daerah meliputi 7 Provinsi, 76 Kabupaten dan 18 Kotamadya. Sedangkan PILKADA serentak gelombang ketiga dihelat pada bulan Juni 2018 dengan peserta yang berjumlah 171 daerah meliputi 17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kotamadya¹⁵¹. Dan PILKADA DKI Jakarta adalah termasuk dari PILKADA serentak gelombang kedua.

Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai daerah yang memiliki jumlah penduduk terbesar pertama di Indonesia di mana jumlah penduduknya hampir menyentuh angka 10 juta lebih penduduk jiwa¹⁵². Pada saat menjelang PILKADA DKI Jakarta 2017, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta melakukan rekapitulasi dan penetapan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada sekitar 7.132.865 jiwa dengan total 13.607 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 5 Kotamadya (Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat) dan 1 Kabupaten (Kepulauan Seribu).

PILKADA DKI Jakarta 2017 sedikit berbeda dengan sebelumnya, PILKADA DKI Jakarta 2012 di mana PILKADA yang terakhir disebutkan ini diikuti oleh 6 peserta pasangan calon dengan jumlah DPT 6.996.951 orang dan

¹⁵¹ Muhammad Chabibi, *Pertukaran Politik Calon Tunggal Dalam Pilkada* (Depok: Gemala, 2020), 3-4.

¹⁵² BPS, Dokumen Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta 2015. <https://jakarta.bps.go.id/statictable/2017/01/30/137/jumlah-penduduk-dan-rasio-jenis-kelamin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-2015.html> diakses tanggal 06 Mei 2018.

jumlah TPS yang jauh lebih banyak dari pada PILKADA DKI Jakarta 2017 yaitu 15.059. Sementara PILKADA DKI Jakarta 2017 diikuti oleh 3 peserta pasangan calon namun dengan jumlah tingkat partisipasi yang jauh lebih banyak yaitu 78% dibanding PILKADA sebelumnya yang hanya mencapai 68%.¹⁵³ Meskipun demikian, terdapat kesamaan di antara keduanya di mana sama-sama dilakukan dalam dua putaran.

Di sini, sesuai formula pemilihan dari KPU bahwa pencalonan hanya dapat dilakukan jika memenuhi ambang batas 20% atau setara dengan 22 kursi dari partai politik atau gabungan antar-partai. Faktanya, hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) saja yang memenuhi persyaratan tersebut dengan jumlah kursi yang dimiliki sebesar 28 kursi di DPRD DKI Jakarta, sehingga PDI-P dapat mengajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari partainya sendiri. Sementara partai politik yang lain yang belum memenuhi ambang batas pencalonan 20% atau 22 kursi tersebut, harus melakukan gabungan antar-partai seperti Partai Gerindra yang berjumlah 15 kursi, PKS dengan 11 kursi sehingga total jumlah perolehan kursi mereka adalah 26 kursi di DPRD DKI Jakarta agar dapat mengajukan calon yang mereka inginkan. Kemudian, jumlah kursi partai lainnya adalah sebagai berikut partai Demokrat dengan 10 kursi, PPP dengan 10 kursi, Hanura juga 10 kursi, GOLKAR 9 kursi, PKB 6 kursi, NASDEM 5 kursi dan PAN 2 kursi.

¹⁵³ Tim Hukum dan Hupmas KPU Provinsi DKI Jakarta, *Data dan Infografik PILKADA Jakarta 2017*, (Jakarta Pusat: KPU Provinsi DKI Jakarta, 2017). 24. Diunduh dari https://jakarta.kpu.go.id/file_pilkada pada 06 Mei 2018.

Kendati demikian, PDI-Perjuangan akhirnya mencalonkan kembali gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selaku petahana sebagai calon gubernur di PILKADA DKI 2017 yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat yang didukung juga oleh GOLKAR, (9 kursi) HANURA (10 kursi), dan NASDEM (5 kursi) sehingga apabila kursi antar-partai tersebut digabungkan menjadi sebesar 52 kursi. Pasangan calon lainnya seperti Agus Harimurti Yudoyono dan Sylviana Murni didukung oleh 28 kursi parlemen DKI Jakarta dari partai gabungan yang terdiri dari Demokrat (10 kursi), PPP (10 kursi), PKB (6 kursi) dan PAN (2 kursi). Sedangkan, pasangan calon Anies Baswedan dan Sandiaga Uno didukung oleh 26 kursi dari gabungan dua partai, yaitu GERINDRA (15 kursi) dan PKS (11 kursi).

1. PILKADA DKI JAKARTA 2017: PUTARAN PERTAMA

Pada tanggal 24 Oktober 2016, KPU DKI Jakarta menetapkan pelaksanaan PILKADA DKI Jakarta yang nanti dihelat pada tanggal 15 Februari 2017, diikuti oleh tiga pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni (pasangan urutan satu), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat (pasangan urutan dua dan sekaligus petahana), dan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno (pasangan urutan ketiga). Pasangan Agus-Sylviana didukung oleh Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Pasangan nomor urutan dua atau Ahok-Djarot mendapat dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Sementara pasangan Anies-Sandiaga didukung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Secara umum, total kursi di DPRD Jakarta adalah 106 kursi di mana Pasangan Agus-Sylviana memperoleh dukungan 28 kursi dari Demokrat (10 kursi), PPP (10 kursi), PKB (6 kursi) dan PAN (2 kursi). Pasangan Ahok-Djarot memperoleh 52 kursi dari PDI Perjuangan (28 kursi), Hanura (10 kursi), Golkar (9 kursi) dan Nasdem (5 kursi). Sedangkan pasangan Anies-Sandiaga mencapai 26 kursi yang meliputi Gerindra (15 kursi) dan PKS (11) kursi di mana hal ini berarti Anies-Sandiaga telah melewati syarat batas minimal untuk mengusung calon dengan total batas minimal 22 kursi.¹⁵⁴

Pasangan nomor urut satu; Agus-Sylvi mempunyai visi “Menuju Jakarta tahun 2022 yang lebih maju, aman, adil dan sejahtera” dengan misi untuk mewujudkan Jakarta yang maju, yang aman, yang adil, yang sejahtera, “Jakarta Hijau (*Green Jakarta*) yang lingkungannya semakin baik, yang nyaman dan bermartabat. Jargon politik Agus-Sylvi mengangkat tema “Jakarta untuk Rakyat”. Agus yang mempunyai latar belakang tentara, sedangkan Sylvi adalah seorang birokrat di Jakarta, mereka selalu menjadikan baju seragam “*tacticool*” sebagai identitas kampanye politiknya. Baju *tacticool* merupakan tren baju *tactical* yang identik dengan seragam prajurit militer yang berwarna hitam¹⁵⁵. Penggunaan seragam ala *tactical* militer ini diharapkan dapat menumbuhkan jiwa ksatria, selain juga untuk menambah “modis” dan elegan bagi penggunanya.

Di era digital, kampanye politik melalui media sosial dan internet kerap dilakukan oleh para calon dan politisi Indonesia. Termasuk, kedua pasangan Agus-

¹⁵⁴ <https://news.detik.com/berita/d-3304708/peta-kekuatan-parpol-pendukung-ahok-agus-yudhoyono-dan-sandiaga> diakses pada 05 Mei 2018.

¹⁵⁵ <https://www.merdeka.com/politik/ini-seragam-tacticool-ala-agus-yudhoyono-di-pilgub-dki.html> diakses pada 02 Juni 2018.

Sylvi juga memanfaatkan peran media sosial sebagai alat daya tarik simpati masyarakat terhadap rekognisi pencalonan dirinya. Dalam media sosial, Agus-Sylvi mempunyai akun resmi yang secara spesial dibuat untuk kontestasi PILKADA DKI Jakarta 2017, mulai dari Facebook dengan akun resminya Agus Sylvi For DKI 1, Twitter dengan akun resminya @AgusSylviDKI dan Instagram dengan akun resminya AgusSylvyForDKI1.

Pasangan nomor urut dua; Ahok-Djarot mempunyai visi “Jakarta sebagai etalase kota Indonesia yang modern, tertata rapi, manusiawi dan fokus pada pembangunan manusia yang seutuhnya dengan kepemimpinan yang bersih, transparan dan profesional”. Misinya adalah mewujudkan pemerintahan yang bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme); menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga; menciptakan SDM yang tangguh lahir dan batin, kompeten dan berdaya saing global; menata kota sesuai perubahan zaman untuk mendukung kemajuan ekonomi, keberlangsungan lingkungan dan kehidupan sosial budaya warga; membangun kehidupan kota yang berbasis teknologi dan berinfrastruktur kelas dunia.

Ahok-Djarot mengusung jargon “kerja keras, kerja hebat”, “kerja keras, bernyali”, “kerja keras, bernyali dan ogah pencitraan”, “kerja nyata” dan “Badja : terbukti, teruji” serta simbol angka dan dua jari yang berarti dua periode. Keduanya dalam berkampanye, menggunakan baju khas yang bermotifkan kotak-kotak dengan kombinasi warna hitam, merah dan putih. Tren baju kotak-kotak dalam kampanye sebenarnya pernah digunakan oleh pasangan calon Joko Widodo dan Ahok pada PILKADA DKI Jakarta 2012 dengan motif kotak-kotak yang lebih kecil

dari pada yang digunakan oleh Ahok-Djarot. Namun, tujuan filosofisnya tetaplah sama yaitu ingin menunjukkan personalitas yang suka bekerja. Kombinasi warnanya pun mempunyai arti bahwa merah disimbolkan sebagai pemimpin yang berani, sedangkan hitam sebagai kesiapan pemimpin untuk turun ke lapangan dalam menjalankan program pembangunan dan merakyat.¹⁵⁶

Ahok-Djarot termasuk dua pasangan calon yang memanfaatkan media sebagai jalan hidup berkampanye pada PILKADA, di mana mereka mempunyai akun-akun resmi dalam media sosial dan internet seperti Facebook dengan akun Ahok Djarot, Twitter @AhokDjarot, Instagram dengan akun resmi ahokdjarot dan situs laman www.ahokdjarot.id.

Pasangan nomor urut tiga; Anies-Sandi memiliki visi “Jakarta sebagai kota yang maju dan beradab dengan seluruh warga merasakan keadilan dan kesejahteraan” di mana misi yang diusung adalah membangun manusia Jakarta menjadi warga yang berdaya dengan menghadirkan kepemimpinan humanis serta mengayomi, penggerak birokrasi yang efektif, menjaga stabilitas dan keterjangkauan harga bahan pokok, membangun sektor kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan menyelesaikan masalah-masalah sosial; membangun lingkungan kota Jakarta secara berkelanjutan dengan perencanaan yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan sosial; membangun kesejahteraan dan penanggulangan masalah mobilitas warga kota.

¹⁵⁶ <https://jakarta.bisnis.com/read/20161109/77/600786/makna-baju-kotak-kotak-ahok-djarot> diakses pada 02 Juni 2021.

Dalam kampanyenya, Anies-Sandi memiliki jargon “Tuntas Ikhlas untuk Jakarta”, “salam bersama”, “maju kotanya, bahagia warganya” dan “coblos pecinya”. Baju seragam yang digunakan oleh keduanya ada perbedaan pada saat PILKADA DKI Jakarta 2017 putaran pertama dan putaran kedua. Pada saat putaran pertama, keduanya solid menggunakan baju kemeja putih dan bercelana coklat, sementara putaran kedua mereka menggunakan baju kemeja biru langit, bercelana coklat dan menggunakan peci hitam. Baju kemeja biru langit diartikan sebagai simbol membangun persatuan.¹⁵⁷ Akun resmi media sosial Anies-Sandi dalam PILKADA DKI Jakarta adalah Facebook Anies Sandi #jakartamajubersama, di Twitter mereka mempunyai 5 akun resmi seperti @jktmajubersama, @aniesbaswedan, @Suaraanies, @Relawananies dan @sandiuno, dan media Instagram dengan akun jakartamajubersama, relawananies, aniesbaswedan dan sandiuno.

Secara finansial, para pasangan calon gubernur telah menyiapkan anggarannya untuk kampanye di putaran pertama. Berdasarkan data yang didapatkan, peneliti merangkum anggaran kampanye putaran pertama PILKADA DKI Jakarta 2017 sebagaimana berikut ini:

¹⁵⁷ <https://pilkada.tempo.co/read/865525/makna-di-balik-baju-biru-anis-sandi-saat-debat-pilkada-dki/full&view=ok> diakses pada 02 Mei 2018.

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur Pilkada DKI Jakarta

Agus-Sylvi		Anies-Sandi	
Penerimaan		Penerimaan	
Asal Dana		Asal Sumbangan	
• Pasangan Calon	Rp430 juta	• Pasangan Calon	Rp63.250.000.000
• Pampok/gabungan pampok	Rp3 miliar	• Pampok/Gabungan pampok	Rp 1.100.000.000
• Sumbangan (pihak lain perorangan, kelompok, badan hukum swasta)	Rp65.537.750.000	• Sumbangan pihak lain badan Hukum Swasta	Rp 907.000.000
Total	Rp68.967.750.000	• Lain-lain	Rp 15.454.163
Pengeluaran		Pengeluaran	
• Pengeluaran Operasional (rapat, tatap muka, produksi iklan, dan lain-lain)	Rp61.348.729.291	• Pengeluaran operasional (rapat, tatap muka, produksi iklan, dan lain-lain)	Rp62.763.272.148
• Pengeluaran modal	Rp 7.604.732.760	• Pengeluaran modal (pembelian peralatan)	Rp 1.956.384.555
Total	Rp68.953.462.051	Total	Rp64.719.656.703
Saldo per 11 Februari 2017	Rp14.287.949	Saldo per 11 Februari 2017	Rp553.297.460

Basuki-Djarot		Audit Dana Kampanye	
Penerimaan		Pasangan Calon	Kantor Akuntan Publik
Asal dana		Agus-Sylvi	Drs Abror
• Pasangan Calon	Rp 1.000.000	Basuki-Djarot	Richard Risambessy & rekan
• Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	Rp42.907.689.780	Anies-Sandi	Junaedi, Chairul dan Subyakto
• Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	Rp15.487.500.000		
• Uncollected form	Rp 1.772.030.825		
• Penerimaan lain-lain (bank)	Rp 22.139.420		
Total	Rp60.190.360.025		
Pengeluaran			
• Pengeluaran Operasional (rapat, tatap muka, produksi iklan, dan lain-lain)	Rp53.300.591.113		
• Pengeluaran Modal	Rp 396.370.000		
Total Pengeluaran	Rp53.696.961.113		
Saldo per 10 Februari 2017	Rp6.493.398.912		

Ketentuan Audit (PKPU No 8/2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pilkada)		
▶ Pasal 45	Kantor Akuntan Publik (KAP) wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 hari terhitung sejak KAP menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari KPU.	▶ Pasal 48
		KPU menyampaikan hasil audit dana kampanye kepada pasangan calon paling lambat tiga hari setelah menerima hasil audit dari KAP.

Sumber: KPU DKI Jakarta

Gambar. 2.1 Pemasukan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Putaran Pertama
Sumber: KPUjakarta.go.id dan Tirto.id

Berdasarkan data yang dihimpun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menyiapkan kebutuhan logistik PILKADA DKI Jakarta 2017 putaran pertama dengan jumlah 7.294.619 surat suara, 13.023 Tempat Pemungutan Suara (TPS), 39.069 Bilik Suara, 26.046 tinta, 247.437 Segel KPU, 26.046 formulir, 39.069 hologram dan alat coblos. Dengan rincian TPS yang dibagi menjadi 5 daerah yaitu Jakarta Timur 3.690, Jakarta Utara 2.150, Jakarta Selatan 2.973, Jakarta Barat 2.934, dan Kepulauan Seribu 39.¹⁵⁸

Dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) 7.108.589 serta tingkat partisipasi politik 75.75%, PILKADA DKI Jakarta putaran pertama menghasilkan perolehan suara sebagai berikut¹⁵⁹:

¹⁵⁸ KPU DKI Jakarta, *Data dan Infografik PILKADA DKI Jakarta 2017*, www.kpujakarta.go.id diakses tanggal 11 Agustus 2018.

¹⁵⁹ Ibid.,.

Tabel 2.1 Perolehan Suara Putaran Pertama

No	Paslon	Suara	Persentase
1	Agus-Sylvi	937.995	17.05%
2	Ahok-Djarot	2.364.577	42.99%
3	Anies-Sandi	2.197.333	39.95%

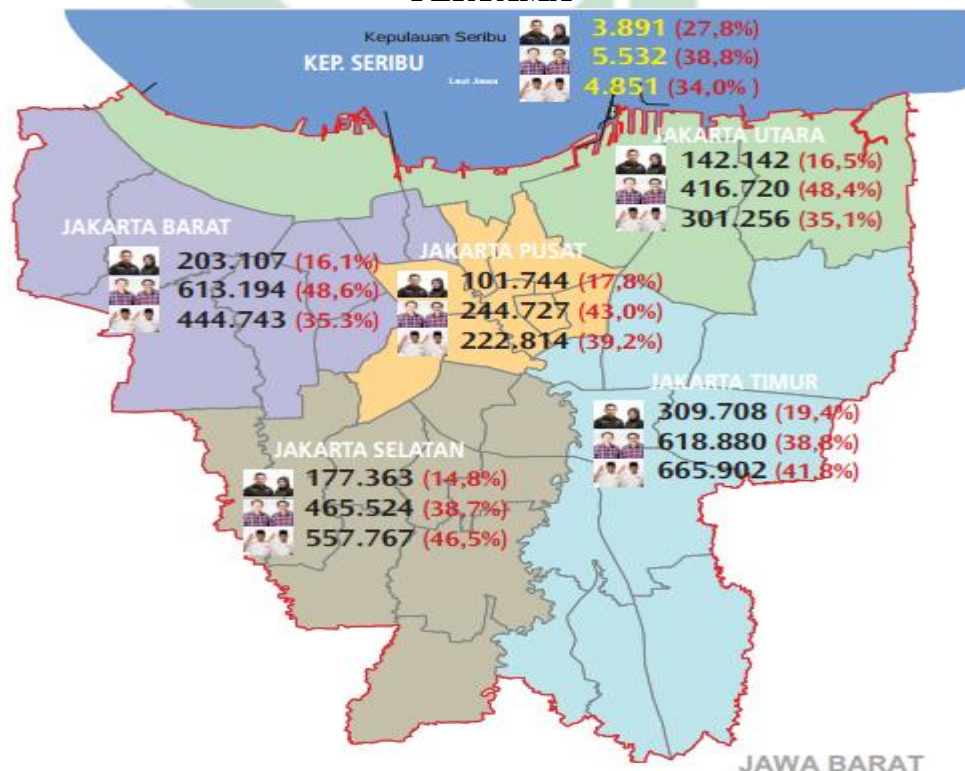
Tabel 2.2 Data Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih

Keterangan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
Pemilih	3.676.453	3.679.973	7.356.426
Pengguna hak pilih	2.698.089	2.866.224	5.564.313

Tabel 2.3 Data Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah Putaran Pertama

suara sah	5.465.392
suara tidak sah	68.644
total suara	5.525.649

PETA SEBARAN SUARA PILKADA DKI JAKARTA 2017 PUTARAN PERTAMA



Gambar. 2.2 Peta Sebaran Suara PILKADA DKI Jakarta 2017 Putaran Pertama
 Sumber: www.kpujakarta.or.id

Hasil rekapitulasi perolehan suara PILKADA DKI JAKARTA 2017 Putaran Pertama menunjukkan bahwa pasangan calon Ahok-Djarot memimpin dengan persentase jumlah suara 42.99% disusul oleh pasangan calon Anies-Sandi dengan perolehan suara sebesar 39.95%. Hal ini berarti, pasangan calon belum mencapai persentase suara 50% sehingga PILKADA DKI Jakarta harus dilanjutkan dengan sistem PILKADA Putaran Kedua karena mengacu pada Pasal 36 ayat 1 dan 2 dalam Peraturan KPU nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat..

2. PILKADA DKI JAKARTA 2017: PUTARAN KEDUA

Pada Putaran Kedua, KPU DKI Jakarta menambah kuota Daftar Pemilih Tetap dan segala kebutuhan logistik untuk memenuhi eskpektasi keseruan dan ketatnya kontestasi PILKADA DKI 2017. Misalnya, Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang semula berjumlah 13.023, pada putaran kedua ditambahkan sebelas sehingga menjadi 13.034 TPS yang tersebar ke enam wilayah DKI Jakarta. Daftar Pemilih tetap pun bertambah menjadi 7.218.280 orang dengan persiapan jumlah surat suara 7.405.106.

Tahapan PILKADA Putaran Kedua diadakan pada tanggal 19 April 2017 dengan harapan adanya fokus kampanye pada penajaman visi, misi dan program Pasangan Calon baik dari Ahok-Djarot dan Anies-Sandiaga sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU No. 6 Tahun 2016. Dalam hal ini, baik tim pemenangan Pasangan Calon Ahok-Djarot dan Anies-Sandi mempersiapkan anggaran

kampanye yang sedikit berbeda dengan Putaran Pertama. Adapun data anggaran kampanye kedua Pasangan Calon tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.4 Dana Kampanye PASLON Ahok-Djarot Putaran Kedua

NO	Jenis	Sumber Dana	Keterangan	Nominal
1	Pemasukan Dana	Donatur perorangan		10.100.000.000
		Badan Hukum Swasta	50 Perusahaan	17.600.000.000
		Sumbangan non-formulir		103.000.000
		Saldo Dana Kampanye P1		4.600.000.000
	Total Pemasukan			32.403.000.000
2	Pengeluaran	Pertemuan Terbatas		11.400.000.000
		Operasional Posko		8.750.000.000
		penyebaran Bahan Kampanye		6.100.000.000
		honor Tenaga Kerja		2.700.000.000
		Kegiatan Lain	Konsolidasi, Koordinasi dan Pelatihan Relawan, Survei	2.800.000.000
	Total Pengeluaran			31.750.000.000
Saldo			650.000.000	

Data diolah oleh peneliti dari berbagai sumber¹⁶⁰.

Tabel. 2.5 Dana Kampanye PASLON Anies-Sandi Putaran Kedua

NO	Jenis	Sumber Dana	Keterangan	Nominal
1	Pemasukan Dana	Donatur	Sandiaga Uno	16.000.000.000
		Badan Hukum Swasta		1.500.000.000
		Saldo Dana Kampanye P1		553.000.000
	Total Pemasukan			18.053.000.000
2	Pengeluaran	Penyebaran Bahan Kampanye		4.000.000.000
		Iklan		250.000.000
		Pertemuan Tatap Muka		1.000.000.000
		Pertemuan Terbatas		50.000.000
		Peralatan Kampanye		10.000.000
		Dana Operasional	transportasi, aplikasi dll	830.000.000
		Kegiatan Lain	Konsolidasi, Koordinasi, Pelatihan Relawan, Survei	10.000.000.000
	Total Pengeluaran			17.900.000.000
Saldo			153.000.000	

Data diolah oleh peneliti dari berbagai sumber¹⁶¹.

¹⁶⁰ <https://jakarta.kpu.go.id/>, <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/04/16/ini-daftar-pengeluaran-biaya-kampanye-ahok-djarot-putaran-kedua-pilgub-dki>, <https://tirto.id/timses-ahok-djarot-laporkan-dana-kampanye-putaran-ii-ke-kpu-cmRg> diakses pada tanggal 13 Juni 2018.

¹⁶¹ <https://jakarta.kpu.go.id/>, <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/04/16/11153141/anies-sandi.habiskan.rp.17.9.miliar.pada.kampanye.putaran.kedua>, <http://jakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/04/Warta-Kota-2-1.pdf> diakses pada tanggal 13 Juni 2018.

Dana kampanye yang digunakan pada Putaran Kedua terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari kedua Pasangan Calon. Misalnya, Pasangan Calon Anies-Sandi menggunakan dana kampanye pada Putaran Pertama jauh lebih banyak dari pada Pasangan Calon Ahok-Djarot (yaitu 64.7 Miliar Rupiah berbanding dengan 53.6 Miliar Rupiah), namun kali ini Pasangan Calon Ahok-Djarot menghabiskan dana kampanye untuk Putaran Kedua jauh lebih banyak dari pada Pasangan Calon Anies-Sandi (yaitu 31.7 Miliar Rupiah berbanding dengan 17,9 Miliar Rupiah).

Penganggaran dana kampanye tidak dapat terlepas dari rangkaian rencana dan strategi tim pemenangan (Tim Sukses) untuk melakukan maksimalisasi perolehan suara masyarakat melalui proses kampanye politik di dunia nyata maupun dunia maya. Hal ini terlihat ketika tim pemenangan baik dari Ahok-Djarot dan Anies-Sandi berupaya untuk masuk ke dalam suara masyarakat yang memilih Agus-Sylvi pada Putaran Pertama. Suara masyarakat tersebut berjumlah 937.955 atau sekitar 17.05% yang tersebar ke seluruh wilayah DKI Jakarta. Selain itu, terdapat sekitar 1 juta masyarakat pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan terdapat kendala administrasi dari data logistik KPU DKI Jakarta dan masyarakat yang enggan datang ke TPS karena terprovokasi pada saat pemilihan Putaran Pertama¹⁶². Maksimalisasi suara dari tiga kelompok pemilih tersebut adalah sangat penting dan menguntungkan terutama suara pemilih Agus-

¹⁶² <https://www.liputan6.com/pilkada/read/2877973/strategi-partai-pengusung-ahok-djarot-hadapi-putaran-dua> diakses pada tanggal 15 Juni 2018

Sylvi bagi kedua Pasangan Calon terlebih lagi *margin* perolehan suara keduanya tidak terlalu jauh di Putaran Pertama.

Strategi-strategi politik pun telah dibentuk dan disusun secara sistematis dari Tim Pemenangan Ahok-Djarot ataupun Anies-Sandi pada Putaran Kedua. Secara umum strategi politik pada Putaran Kedua adalah kampanye politik. Strategi kampanye politik dilakukan dengan cara “*party to party*”, yaitu komunikasi secara intensif dilakukan antar partai politik pengusung Pasangan Calon dengan partai-partai pendukung lawan Pasangan Calon yang kalah. Berkaitan dengan ini, komunikasi *party to party* lebih sering dilakukan oleh para tokoh elite partai seperti Prabowo Subianto (Ketum Gerindra), Sohibul Iman (Ketum PKS) dan Hasto Kristiyanto (Sekjen PDI Perjuangan) dengan cara lobi-lobi politik kepada partai politik yang berkoalisi dalam mendukung Agus-Sylvi beserta kelompok-kelompok relawan pendukungnya.

Implikasinya, partai politik pendukung Agus-Sylvi seperti Demokrat, PKB, PPP, PAN dan PERINDO sama-sama mempunyai pernyataan sikap yang berbeda-beda setelah Agus-Sylvi tidak lolos PILKADA Putaran Pertama. Misal, Demokrat memberikan pernyataan dan sikap politik tentang kebebasan hak pilih kepada pendukung loyalnya di Putaran Kedua. Sementara PKB, dan PPP lebih mengambil sikap politik secara institusional kepartaian untuk mendukung Pasangan Calon Ahok-Djarot sedangkan PAN dan PERINDO mendukung Pasangan Calon Anies-Sandi di Putaran Kedua.

Di samping itu, komunikasi politik dapat mempengaruhi kelompok relawan pendukung setia Agus-Sylvi mengalihkan preferensi suara politik ke Pasangan

Calon lainnya. Setidaknya terdapat delapan kelompok relawan yang notabene adalah orang-orang Demokrat melakukan migrasi dukungan kepada Pasangan Calon Ahok-Djarot. Diantaranya adalah Relawan GERASI (Gerakan Relawan Agus-Sylvi). GERASI diisi oleh sejumlah politisi Demokrat DKI Jakarta seperti Carel Ticalu, Efendi, Surya Kusumanegara, dan Sekretaris Dewan Pembina Pusat Partai Demokrat Adjeng Ratna Suminar¹⁶³. Kemudian, Relawan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dari Jakarta Pusat yang berjumlah sekitar 1.600 orang, kelompok BINA Jakarta Se-Jakarta Timur, BATAS (Barisan Teman Agus-Sylvi), BARA (Barisan Relawan Agus-Sylvi), BAJA (Barisan Anak Jakarta), KOMPAS (Komunitas Pendukung Agus-Sylvi) dan FKPBM (Forum Kerukunan Pemuda Bugis Makassar).

Komunitas pendukung Agus-Sylvi juga ada yang memberikan dukungan politik kepada Pasangan Calon Anies-Sandi. Contohnya adalah Barisan Betawi Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni (BABE ASLI)¹⁶⁴, Barisan Muda Demokrat, Lembaga Komunitas Kemayoran Jakarta Pusat (LMK), Komunitas pemenangan Agus-Sylvi Patal Senayan, Agus Fans Club (AFC) Jakarta Selatan, Pengurus Anak Cabang (PAC) Demokrat Pesangrahan, Komite Nasional Masyarakat Indonesia (KMNI), Forum Tokoh Agama Masyarakat Jakarta Selatan, Relawan Agus-Sylvi for Anies-Sandi, bahkan Ketua Tim Pemengangan Agus-Sylvi yang bernama Nachrowi Ramli memberikan dukungannya kepada Anies-Sandi¹⁶⁵.

¹⁶³ Ibid.,

¹⁶⁴ Komunitas Babe Asli mempunyai jaringan 3000 pendukung Agus-Sylvi di Putaran Pertama. <https://metro.sindonews.com/berita/1192122/171/babe-asli-akan-kerahkan-ribuan-relawan-agus-sylvi-dukung-anies-sandi>

¹⁶⁵ <https://www.merdeka.com/politik/nachrowi-akui-banyak-relawan-agus-sylvi-berbelok-dukung-anies-sandi.html>

Strategi kedua yang dilakukan oleh kedua Pasangan Calon tersebut adalah kampanye politik di level masyarakat yang paling bawah. Masing-masing tim pemenangan dari kedua Pasangan Calon mempunyai strategi tersendiri dalam mengaplikasikan strategi kampanye di lapangan seperti metode *canvassing* dari pihak Ahok-Djarot dan metode *focusing on grassroot* dari pihak Anies-Djarot. Dua metode tersebut memiliki kesamaan dalam hal menjaring para pemilih sebanyak-banyaknya melalui penyampaian visi-misi, program dan jalinan hubungan yang dekat antara calon dan para pemilih dengan langsung mendatangi konstituen di tingkat paling bawah.

Akhirnya, dengan tingkat partisipasi masyarakat 78% dan KPU DKI Jakarta menganggapnya sebagai tingkat partisipasi tertinggi secara nasional, PILKADA DKI Jakarta 2017 Putaran Kedua menghasilkan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana berikut ini¹⁶⁶:

Tabel. 2.6 Hasil Perolehan Suara Putaran Kedua

Paslon	Suara	Persentase
Ahok-Djarot	2.350.366	42.04%
Anies-Sandi	3.240.987	57.96%

Tabel. 2.7 Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Putaran Kedua

Keterangan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
Pemilih	3.664.731	3.670.742	7.335.473
Pengguna hak pilih	2.743.037	2.906.391	5.649.428

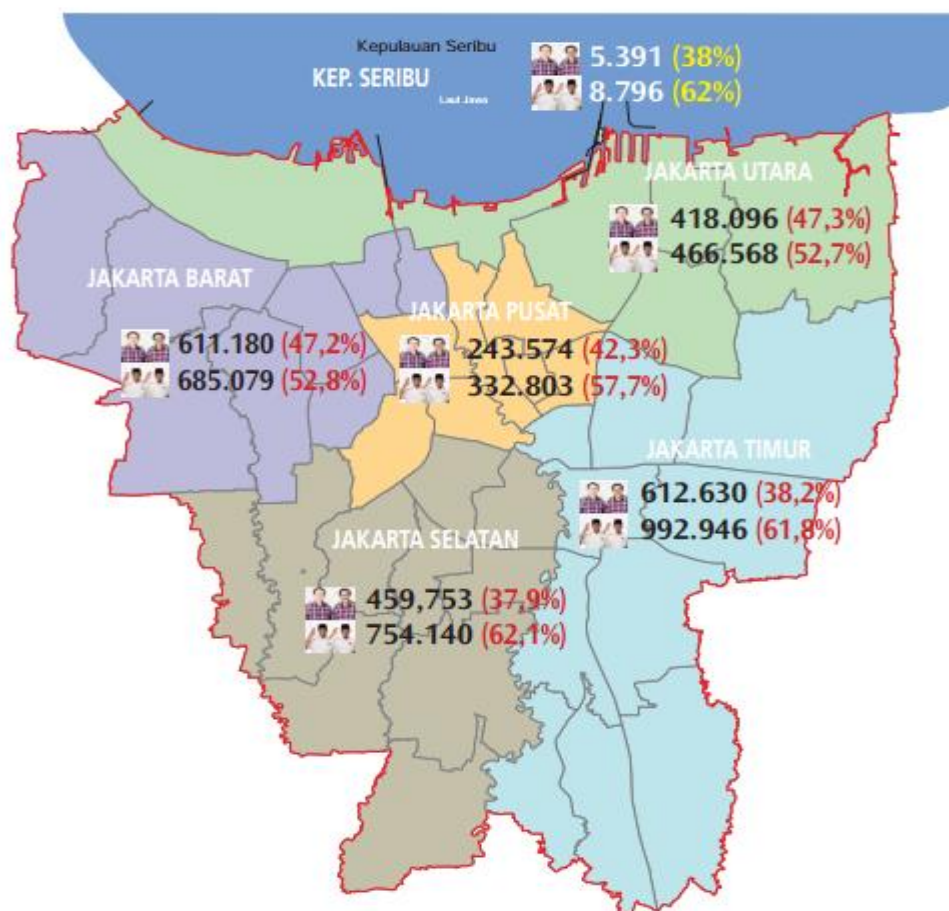
Tabel. 2.8 Surat Suara Sah dan Tidak Sah Putaran Kedua

suara sah	5.591.353
suara tidak sah	58.075
total suara	5.649.428

¹⁶⁶ Ibid.

Rekapitulasi perolehan suara Putaran Kedua menunjukkan bahwa pasangan calon Anies-Sandi mampu mengalahkan pasangan calon Ahok-Djarot dengan unggul 58% suara berbanding dengan 42% suara dari total suara sebanyak 5.649.428 pemilih. Dari hasil tersebut, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dengan apa yang terjadi pada Putaran Pertama di mana suara Ahok-Djarot 43% unggul di atas suara Anies-Sandi 40%. Artinya, ada penambahan suara yang masuk ke dalam kantong suara Anies-Sandi sebanyak 18%. Sementara terdapat penurunan suara Ahok-Djarot sebanyak 1%.

Berikut adalah sebaran suara Putaran Kedua di seluruh wilayah Jakarta:



Sumber. www.KPUjakarta.org

Gambar. 2.3. Peta Sebaran Suara PILKADA DKI Jakarta Putaran Kedua

Dari sebaran suara di atas, menunjukkan bahwa wilayah Jakarta Timur yang dianggap sebagai wilayah *swing voters* (kelompok pemilih yang masih abu-abu) dan menjadi perebutan bagi tim pemenangan masing-masing kedua pasangan calon, ternyata mampu dikuasai oleh pasangan calon Anies-Sandi, di mana suaranya pada Putaran Pertama adalah 665.902 (41,8%) dan suara Ahok-Djarot 618.880 (38,8%), pada Putaran Kedua, Anies-Sandi mampu memperoleh tambahan suara dari suara pemilih Agus-Sylvi sehingga menjadi 992.946 (62,8%). Sebaliknya, suara Ahok-Djarot turun menjadi 612.630 di mana hal ini berarti mereka kehilangan suara sebesar 6.250 pemilih.

Dari hasil dua rekapitulasi antara Putaran Pertama dan Kedua, muncul asumsi-asumsi tentang keberhasilan pasangan Anies-Sandi dalam mengalahkan kekuatan suara dan politik *incumbent* dari pasangan Ahok-Djarot. Apakah karena model kampanye yang dilakukan ataupun diunggulkan dalam situasi yang tidak sama dengan pasangan Ahok-Djarot dalam kasus tuduhan penistaan agama. Untuk itu, peneliti akan menjelaskan tentang permasalahan primordial yang terjadi di tengah-tengah pelaksanaan PILKADA DKI Jakarta 2017 yaitu masalah tuduhan penistaan agama terhadap Ahok di kunjungannya di Pulau Pramuka, Kabupaten Kepulauan Seribu dan berakibat pada munculnya gerakan politik Islam yang dimobilisasi oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI).

3. TIM PEMENANGAN PASANGAN CALON DALAM PILKADA DKI JAKARTA 2017

Agus Harimurti-Sylviana sebagai pasangan calon nomor urut pertama mendaftarkan susunan tim pemenangannya ke kantor KPU DKI Jakarta pada tanggal 04 Oktober 2016 dengan menunjuk Nachrowi Ramli sebagai ketua tim pemenangannya yang juga sekaligus dia adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat untuk wilayah DKI Jakarta. Dalam jajarannya, Nachrowi Ramli didampingi oleh Abdul Aziz dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hasbiallah Ilyas dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Eko Patrio dari Partai Amanat Nasional (PAN). Yang cukup mengejutkan, bagian tim kampanye Agus-Sylvi dipimpin oleh seorang profesional di bidang media dan pertelevisian yaitu Wisnu Wardhana. Berikut ini adalah susunan tim pemenangan Agus-Sylvi:

Ketua Tim Pemenangan Agus-Sylvi	: Nachrowi Ramli (Demokrat)
	: Abdul Aziz (PKB)
	: Hasbiallah Ilyas (PPP)
	: Eko Patrio (PAN)
Sekretaris	: Vike Very Ponto
Wakil Sekretaris	: H. Mualif
	: Ichwan Zayadi
	: Husen
	: Raja Mantan Purba
Bendahara	: Gatot M. Suwondo
Wakil Bendahara	: Dedi Kurniyawan
	: Moch. Fauzi
	: Arianto
	: Erick Herlambang
Bidang Kampanye	: Wishnu Wardana

	: Rudi Kadarisman
	: Mujahid Sahal
	: Abdul Aziz
	: Arie Kelik Waluyo
	: Donny Kesuma
	: Dedi Apriyadi
Bidang Relawan	: M. Rifa'i Darus
	: Matnoor
	: Ahmad M
	: Johan M
	: Ichwan
	: Nur Hafizah
Bidang Hukum dan Advokasi	: Didi Irawadi Syamsudin
Wakil Ketua	: Sanusi Maruf
	: Fauzi Thalib
	: KPA. Ferry Firman
	: R. Faisal
Bidang Logistik	: Anton Sukartono
Wakil Ketua	: Sugeng Siswanto
	: Sukamta Wijaya
	: Helmi Azwary
	: Susilo S
	: Eka Putra
Bidang Saksi	: Partoyo
Wakil Ketua	: Nasri Samad
	: Ah. Fadli
	: Boy. Ade Muhammad
	: Krisna Salmun
	: Lazarus Simon
Bidang Media	: Imelda Sari
Wakil Ketua	: Dudi Franandes

	: Priyo Pamungkas
	: Oman Rakinda
	: Husni Thamrin
Juru Bicara	: Rico Rustombi
	: Ikhsan Modjo
	: Rachland Nasidik (Demokrat)
Bidang Liason Office dan Protokol	: Anis Fauzan
	: Bambang Nurcahyadin
	: Wahyudi
	: Encer Ishak
	: Panji Purboyo
	: Tumi Rahmat Setiawan
	: Subhan Sanusi
	: Hendra Gunawan

Sebagai *incumbent*, Pasangan calon nomor urut dua; Ahok-Djarot mendapatkan keuntungan politik tersendiri dari pada pasangan calon lainnya. Di saat pra-kampanye bergulir, pasangan calon Ahok-Djarot sudah dikenal oleh masyarakat baik secara *image* dan program kerja yang dilakukannya selama menjabat sebagai Gubernur dan Wakil gubernur di pemerintahannya. Hal ini menjadi modal utama kedua pasangan calon karena tanpa harus melakukan sosialisasi diri dan program serta mencari dukungan politik kepada partai politik lainnya. Meskipun demikian, dalam menyongsong perebutan kursi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, pasangan calon Ahok-Djarot tetap memilih dan menentukan tim pemenangannya untuk memperkuat jaringan suara dan kepercayaan publik hingga tingkat bawah. Adapun susunan tim pemenangan Ahok-Djarot adalah sebagai berikut:

Dewan Pengarah	: Ahmad Basarah
----------------	-----------------

	: Eriko Sutarduga
	: Jeffri Darmadi
	: Effendi Choirie (Gus Choi)
	: Dadan Rusdiana
	: Agun Gunanjar
	: Fayakhun Andriadi
	: Gatot Sudriyanto
Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot	: Prasetyo Edi Marsudi (PDI-P)
Wakil Ketua	: M. Sangaji
	: Bambang Waluyo Wahab
	: Wibi Andrino
	: Dono Prasetyo
Sekretaris	: TB Ace Hasan Syadzili
Wakil Sekretaris	: Yuke Yurike
	: Abdul Canter
	: Virgie Baker
	: Michael Umbas
Bendahara	: Charles Honoris
Wakil Bendahara	: Nadya
	: Baskara Sukarya
	: Anies Hasan
	: Joice Triatman
	: Manuhara Siahaan
Bidang Sumber Daya dan Kreatif	: Arya Bima
	: Soelchan Effendi
	: Mutiara Indah
	: Jhony Putra
	: Franc Tumanggor
Bidang Data dan Informasi	: Eva Sundari
	: Muhammad Omar Syarif
	: Honey annisa

	: M. Pradana
	: Hariadi
	: Kamilus Elu
	: Irvan Habibi Pulungan
Bidang Perlengkapan & Rumah Tangga	: Mahmudin Muslim
	: Dr. Budi Suprapti
	: Budi Kurniawan
	: Haritz Rahman
	: Agus Lomboan
	: Rendy Rizki
	: Sulistyani
	: Yovita Octaviani
Bidang Kampanye & Sosialisasi	: Merry Hotma
	: Nurmansyah Tanjung
	: Basri Baco
	: Slamet N Riyadi
	: Syarifuddin
	: Dr. Mulawarman Hanase
	: Bestari Barus
	: Guntur Romli
Bidang Penggalangan Massa	: Arif Wibowo
	: Samsir Rambe
	: Andien Bachtiar
	: Hasan Basri
	: Rendy Reinhart
Bidang Media	: Martin Manurung
	: Charles Malkiansyah
	: Afriadi Rosdi
	: Gaya Kartasmita
	: Clara Tampubolon
Bidang Hukum dan Advokasi	: Pantas Nainggolan

	: DR. Tomi Sihotang
	: Sirra Prayuna
	: Taufik Basri
	: Gelora Tarigan
	: Rian Ernest
	: Abdul Qodir
	: M. Jaya Butarbutar
	: Jamaluddin Lamanda
	: Andana Marpaung
	: Hilman Panjaitan
Bidang Khusus	: Masinton Pasaribu
	: DR. Tonny Tjahja Rimbawan
	: Jamaluddin Kainubun
	: Latifah al-Anshori
	: Dipo Nusantara
Juru Bicara	: Ahmad Basarah
	: Komaruddin Watubun
	: Eriko Sutarduga
	: Sarifuddin Sudding
	: Miryam Yani
	: Very Yonnevil
	: Dr. Donny Tjahja Rimbawan
	: Taufik Basari
	: Sophia Latjuba
	: Ansy Lema
	: Nevi Ervina
	: Jerry Sambuaga
	: Ruhut Sitompul
	: Raja Juli Antoni
Bidang Keamanan	: Audi Tambunan
	: Isyak Syah

: M. Ichsan
 : Umar Oetenan
 : Anwar Sjani
 : Alexander BS

Pasangan calon Anies Baswedan-Sandiaga Uno mempunyai tim pemenangan yang baru dibentuk pada tanggal 29 September 2016 di daerah Menara Karya Kuningan Jakarta Selatan. Dalam satu dekade terakhir pasca kekalahan Prabowo Subianto di bursa calon Presiden 2014, pimpinan partai politik GERINDRA dan PKS memiliki hubungan yang harmonis dalam menyambut persiapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017, sehingga hubungan tersebut menentukan orang-orang yang dipilih sebagai tim pemenangan Anies-Sandi. Seperti Mardani Ali Sera sebagai Ketua tim pemenangan dan Edhi Prabowo sebagai Wakilnya. Namun, terdapat Boy Sadikin yang merupakan kader PDI Perjuangan tapi mengundurkan diri juga dilibatkan sebagai ketua relawan. Berikut ini adalah susunan Tim Pemenangan Pasangan Calon Anies-Sandi:

Ketua Tim Pemenangan : Mardani Ali Sera (PKS)
 Wakil Ketua : Edhi Prabowo (GERINDRA)
 : Syakir (PKS)
 Ketua Relawan : Boy Sadikin
 Sekretaris : Syarif (GERINDRA)
 : Iis Sumirat (PKS)
 : Agung Yulianto (PKS)
 Bendahara : Satrio Dimas Adityo (GERINDRA)
 : Nasrullah (PKS)
 : Novita Dewi (Relawan Sandi)
 Bidang Teritori Jaringan : Chaerudin (PKS)

	: Arif Rahman (GERINDRA)
Bidang Logistik	: Husni Thamrin (GERINDRA)
	: Karyatin (PKS)
Bidang Media	: Hartono (PKS)
	: Hilman Yusak (GERINDRA)

C. KASUS PENISTAAN AGAMA DAN GERAKAN POLITIK ISLAM DI TENGAH PILKADA DKI JAKARTA 2017

Pasangan Ahok-Djarot diprediksi mampu memenangkan kontestasi tersebut, dikarenakan Ahok adalah gubernur petahana yang telah menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta dengan angka kepuasan masyarakat atas kinerjanya yang cukup gemilang. Rata-rata hampir semua lembaga survei seperti SMRC (Saiful Mujani Research Center)¹⁶⁷, LSI (Lembaga Survei Indonesia)¹⁶⁸ dan Populi Center¹⁶⁹ menyatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat Jakarta atas kinerja Ahok selama memimpin Jakarta di atas 70%. Namun, hal ini justru berbalik arah di mana pada faktanya, calon para pemilih yang menilai puas atas kinerja Ahok selaku Gubernur tidak berkeinginan untuk memilihnya di dalam PILKADA DKI Jakarta 2017 tersebut dikarenakan masalah perbedaan identitas agama dan keterlibatannya dalam kasus penistaan agama¹⁷⁰ yang terjadi di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

¹⁶⁷ <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/20/20290451/survei.smrc.75.persen.warga.dki.puas.dengan.kinerja.ahok> diakses pada 05 Mei 2018.

¹⁶⁸ <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/15/18593571/survei.lsi.74.persen.warga.puas.dengan.kinerja.ahok> diakses pada 05 Mei 2018.

¹⁶⁹ <https://news.detik.com/berita/d-3286869/populi-center-743-warga-jakarta-puas-kinerja-ahok> diakses pada 5 Mei 2018.

¹⁷⁰ Marcus Mietzner dan Burhanuddin Muhtadi, Ahok's Satisfied Non-Voters: an Anatomy, New Mandala, 2017. Diunduh dan diakses dari <https://www.newmandala.org/ahoks-satisfied-non-voters-anatomy/> pada tanggal 13 April 2018

1. Surat al-Maidah 51: Peristiwa Pulau Pramuka dan Unggahan Pernyataan Provokatif di Facebook

Kurang lebih selama sepuluh bulan proses sosialisasi PILKADA DKI Jakarta putaran pertama (30 April 2016 – 14 Februari 2017) berlangsung dengan atmosfer yang panas. Perhelatan PILKADA diselimuti oleh kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok, Gubernur DKI Jakarta waktu itu yang kembali maju lagi sebagai calon Gubernur untuk kedua kalinya. Pidatonya yang disampaikan di depan masyarakat Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 bahwa adanya sejumlah pihak dari lawan politiknya yang memerintahkan masyarakat pemilih Muslim agar tidak memilih dirinya dalam PILKADA dengan menggunakan (dalam bahasa Ahok “pakai”) surat al-Maidah ayat 51. Berikut penggalan pernyataannya:

Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu gak bisa pilih saya, ya ntar dibohongin pake surat al-Maidah surat 51 macam-macam gitu lho. Itu hak Bapak Ibu ya..., Jadi kalo Bapak Ibu, perasaan, gak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, gak papa. Karena inikan panggilan pribadi Bapak Ibu, program ini jalan saja. Ya jadi Bapak Ibu gak usah merasa gak enak, dalam nuraninya gak bisa pilih ahok, gak suka ama Ahok, tapi pogramnya , gue kalo terima, gue gak enak dong ama dia, gue utang budi. Jangan...kalo bapak Ibu punya perasaan gak enak. ...

Ini semua adalah hak Bapak Ibu sebagai warga DKI. Kebetulan saya gubernur mempunyai program ini. Jadi tidak ada hubungannya dengan perasaan Bapak Ibu mau pilih saya. Ya, saya kita itu. Kalo yang benci sama saya, jangan emosi, terus dicolok waktu pemilihan, colok foto saya. Wah..jadi kepilih lagi saya (hadiri tertawa). Jadi kalau benci sama saya, coloknya mesti berkali-kali baru batal. Pi kalo sekali, eh kepilih lagi lu gua...¹⁷¹

¹⁷¹ Potongan Transkrip pidato Ahok di Kepulauan Seribu dari video lengkapnya <https://www.youtube.com/watch?v=MNdJv3ZAqQE> diunduh pada 18 Juni 2018.

Pernyataan ini terekam dalam video saat kunjungan Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta ke Pulau Pramuka, Kabupaten Kepulauan Seribu dengan tema sosialisasi program budi daya ikan Kerapu seraya Ahok melakukan dialog terbuka dengan masyarakat setempat. Dalam dialog terbuka tersebut, Ahok melihat beberapa *audiens* dari kalangan perempuan (ibu-ibu) tidak bergairah dan antusias dengan program yang ditawarkan. Padahal program itu sangat baik dan relevan dengan kehidupan masyarakat Pulau Pramuka yang dekat dengan laut seperti program budidaya ikan Kerapu dengan bantuan langsung dari Pemerintah Provinsi berupa bibit ikan Kerapu dan pembiayaan modal secara gratis.

Ahok berpikir bahwa tidak adanya gairah dan antusias pada sebagian audiens dari ibu-ibu mengingatkannya pada peristiwa kampanye di PILKADA Belitung tahun 2007 silam di mana Ahok menerima sikap dingin dari seorang ibu yang meminta maaf kepadanya karena tidak dapat memilih Ahok dalam pemilihan dikarenakan takut menjadi seorang Murtad yang dibuktikan dengan selebaran yang isinya memuat surat al-Maidah ayat 51 tentang seruan untuk tidak memilih calon Gubernur non-Muslim. Pikiran ini mendasari Ahok dalam pemberian pernyataan kepada masyarakat Pulau Pramuka yang disangka ada kesamaan sikap dalam penolakan bantuan program bibit Ikan Kerapu dan pembiayaan modal dalam bentuk gratis. Akhirnya, pernyataan ini terlintas begitu saja dengan menyinggung adanya orang yang dapat membohongi masyarakat Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu dengan memakai surat al-Maidah ayat 51 karena Gubernurnya adalah seorang pemeluk agama Kristen (Non-Muslim).

Pernyataan tersebut sebenarnya diunggah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Youtube resminya (28 September 2016) dan tidaklah menjadi permasalahan yang besar di media, hingga kemudian video tersebut yang sebenarnya berdurasi 40 menit, namun diedit menjadi 30 detik dan kata “pakai” dipotong sehingga menyebabkan viral di dunia maya dan menimbulkan kontroversial (pro dan kontra) dari sejumlah pihak baik dari kalangan elite maupun masyarakat. Video editan tersebut diunggah oleh Buni Yani di laman Facebook-nya pada tanggal 6 Oktober 2016 atau selang sembilan hari pasca pidato tersebut di Kepulauan Seribu. Pada saat yang sama, tanggal 6 Oktober 2016 tersebut adalah satu hari setelah Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta melakukan verifikasi pasangan calon Gubernur.



Gambar. 2.4. Tampilan Posting Penistaan Agama yang Dituduhkan Kepada Ahok di Beranda Facebook Buni Yani

Buni Yani merupakan pemilik akun Facebook yang mengunggah video pidato kunjungan kerja Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu dengan durasi waktu 30 detik. Kendati dia adalah seorang peneliti di *Faculty of Social and Behavioral Sciences, Institute of Cultural Anthropology and Development Sociology*, Leiden University dan mantan seorang Jurnalis di VOA Amerika Serikat¹⁷², dia telah melakukan penambahan, pengurangan dan perubahan pada tulisan yang dipublikasikan (*posting-status*) di Beranda Facebooknya dengan kalimat “*Penistaan Terhadap Agama?, Bapak Ibu (pemilih Muslim)...dibohongi Surat al-Maidah 51...(dan)...masuk neraka (juga Bapak Ibu) dibodohi*”, *Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini.*

Buni Yani memandang pernyataan di dalam potongan video tersebut adalah sesuatu yang tidak etis dilakukan oleh seorang pejabat publik berseragam dinas (Gubernur Ahok) dalam kunjungan kerja sosialisasi budidaya Ikan Kerapu. Kemudian, Buni Yani melakukan unggahan video itu dengan tujuan ingin mendapatkan konfirmasi dari teman-temannya di Facebook melalui diskusi daring¹⁷³. Sebaliknya, diskusi tersebut justru menimbulkan polarisasi pendapat yang terdapat di dalam kolom komentar Facebooknya. Polarisasi pendapat mengarah kepada pro dan kontra dari sekian pengikut akun Facebook Buni Yani hingga kemudian menciptakan suasana yang gaduh di kalangan masyarakat siber.

Dalam kurun waktu satu hari sejak tanggal *upload* 6 Oktober 2016, jumlah penonton (*veiwers*) mencapai 105.000 orang dan 1.100 komentar yang hampir

¹⁷² <https://www.medcom.id/profile/buni-yani> diakses pada 19 Juni 2018.

¹⁷³ , <https://www.tribunnews.com/regional/2017/09/26/alasan-buni-yani-upload-video-ahok-di-facebook-saya-melihat-sesuatu-tidak-etis> diakses pada 19 Juni 2018.

semuanya memandang potongan video pidato Gubernur Basuko Tjahya Purnama (Ahok) tersebut dapat menimbulkan kontroversi dan kegaduhan di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Dari kejadian tersebut, sejumlah relawan Ahok-Djarot tergerak untuk melaporkan Buni Yani yang dianggap sengaja mengunggah video tersebut dengan perubahan keaslian video serta memberikan informasi yang dapat menyebabkan kegaduhan dan provokasi kepada masyarakat di dunia maya (*Facebook*) melalui tulisan pernyataan yang tertera di laman beranda Facebook-nya dengan tidak mencantumkan kata “*pakai*” yang ada diantara kata “*dibohongi*” dan “*surat al-Maidah*”. Relawan tersebut adalah Kotak Adja (Komunitas Advokat Muda Ahok-Djarot), melaporkan Buni Yani kepada Polda Metro Jaya, Jakarta yang dianggap melanggar Tindak Pidana dengan sangkaan melanggar Pasal 28 Ayat 2 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 ITE Jo Pasal 45 Ayat 2 Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun atau denda 1 Miliar Rupiah.

Relawan Kotak Adja memandang Buni Yani sengaja melakukan pencemaran nama baik Gubernur Ahok dengan potongan video yang diunggahnya di laman Facebooknya, padahal pada tanggal unggahan yang sama (6 Oktober 2016), video tersebut telah diunggah juga di dalam Kanal resmi Pemprov DKI Jakarta dengan durasi yang utuh sebanyak 1 jam lebih 46 menit dengan judul “*Begini Bahagiannya Dialog Gub Ahok dgn Masyarakat Pulau Seribu*” yang berkontradiksi dengan pernyataan Buni Yani di status Facebooknya dengan tulisan “*Penistaan terhadap Agama?*”. Implikasinya adalah kegaduhan dan ketegangan terjadi setelah masyarakat Muslim di dunia maya membaca pernyataan status

(postingan status) di Facebook Buni Yani. Selanjutnya, Gubernur Ahok melakukan klarifikasi yang ditampilkan di dalam akun Instagramnya @basukibtp dan mendapatkan tanggapan 1000 komentar yang mengarah kepada pro dan kontra. Adapun tulisan klarifikasinya adalah sebagai berikut:

Saat ini banyak beredar pernyataan saya dalam rekaman video seolah saya melecehkan ayat suci al-Qur'an surat al-Maidah ayat 51, pada acara pertemuan saya dengan warga Pulau Seribu. Berkenaan dengan itu, saya ingin menyampaikan pernyataan saya secara utuh melalui video yang merekam lengkap pernyataan saya tanpa dipotong. Saya tidak berniat melecehkan ayat suci al-Qur'an, tetapi saya tidak suka mempolitisasi ayat-ayat suci, baik itu al-Qur'an, al-Kitab maupun kitab lainnya. silahkan tonton video lengkapnya di Youtube Pemprov DKI, terutama pada menit ke 23:40 sampai 25:35. Terimakasih, Salam Basuki Tjahaja Purnama.

Pada hari itu juga (7 Oktober 2016), Habib Novel Chaidir Hasan selaku Sekretaris Jenderal Front Persatuan Indonesia (Sekjen DPP FPI) melaporkan Gubernur Ahok kepada Bareskrim Polri atas tuduhan penistaan agama dengan nomor laporan 1010/X/2016 berdasarkan pada Pasal 156 a KUHP Jo Pasal 28 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dengan ancaman lima tahun penjara.¹⁷⁴ Selain itu, sejumlah laporan juga dilakukan oleh beberapa organisasi keislaman di daerah seperti Majelis Ulama Indonesia Sumatra Selatan, Forum Anti Penistaan Agama (FUPA) yang terdiri dari Ikatan Alumni Universitas

¹⁷⁴ https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/10/161007_indonesia_ahok_laporan diakses pada 19 Juni 2018.

Muhammadiyah se-Nusantara (KAUMAN), Ikatan Alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera se-Jabodetabek (IKA UMSU), Ikatan Alumni Universitas Muhammadiyah Jakarta (IKALUM UMJ), dan Yayasan Lembaga Advokasi Konsumen Muslim Indonesia (LAKMI) dan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dengan Nomor Laporan TBL/4868/X/2016/PMJ/Dit Reskrim¹⁷⁵.

Sehubungan dengan PILKADA DKI Jakarta, komunitas Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan tindakan Ahok tersebut kepada BAWASLU Jakarta pada tanggal yang sama 7 Oktober 2016 (atau bertepatan dengan hari Jum'at) di mana mereka beralasan bahwa video Ahok yang notabene adalah bukan seorang Muslim yang melakukan penafsiran terhadap Surat al-Maidah ayat 51 di hadapan masyarakat Kepulauan Seribu sudah beredar di Youtube dan menjadi pembahasan viral di media sosial. Selain itu, komunitas ACTA juga melihat adanya pelanggaran kampanye yang dilakukan Ahok dalam pidato tersebut di mana terdapat unsur kampanye di luar jadwal kampanye yang ditentukan oleh Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta. Unsur kampanye tersebut misalnya adalah subsidi tiket kapan, menjamin kualitas beras Rakyat Miskin (RASKIN) dan pembangunan *storage* (terminal penyimpanan ikan).¹⁷⁶

Dalam rentang waktu seminggu, sejumlah komunitas Muslim di berbagai daerah melaporkan adanya kasus penistaan agama kepada Kepolisian Republik Indonesia yang terdapat pada pidato Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

¹⁷⁵ <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/07/19203041/ahok.dilaporkan.dua.organisasi.ke.polda.metro.jaya.?page=all> diakses pada 18 Juni 2018.

¹⁷⁶ <https://metro.tempo.co/read/810543/acta-laporkan-ahok-ke-bawaslu/full&view=ok>

Bahkan Kepolisian Republik Indonesia telah mencatat ada 14 laporan yang telah masuk dengan kasus dan terlapor yang sama. Dari banyaknya laporan ini, Ahok melakukan klarifikasi pada tanggal 10 Oktober 2016 dan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi di antara umat Islam akibat dari pernyataannya tentang penggunaan sejumlah pihak terhadap surat al-Maidah ayat 51 untuk tidak memilih pemimpin non-Muslim. Di dalam pernyataannya, Ahok tidak bermaksud untuk menistakan agama serta menyinggung umat Islam.

Selang satu hari dari klarifikasi dan permohonan maaf Ahok (11 Oktober 2016), Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang bertajuk “pendapat dan pernyataan sikap keagamaan MUI” yang meliputi 5 pernyataan sikap keagamaan serta 5 pernyataan rekomendasi. Lima pernyataan sikap tersebut berisikan bahwa :

- 1) surat al-Maidah ayat 51 merupakan dalil bagi umat Muslim untuk tidak memilih pemimpin dari non-Muslim;
- 2) seruan kepada ulama untuk menyampaikan isi surat al-Maidah ayat 51 tersebut agar memilih pemimpin muslim adalah wajib;
- 3) panduan memilih pemimpin Muslim harus diyakini kebenarannya;
- 4) menganggap kandungan isi Surat al-Maidah ayat 51 sebagai kebohongan adalah termasuk penodaan al-Qur'an dan hukumnya haram;
- 5) menganggap ulama yang menyatakan kandungan isi Surat al-Maidah ayat 51 sebagai dalil larangan memilih pemimpin non-Muslim adalah bohong, termasuk penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.

Adapun lima pernyataan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) pemerintah dan masyarakat harus menjaga keharmonisan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara
- 2) pemerintah harus menindak siapapun yang melakukan penodaan dan penistaan terhadap al-Qur'an dan agama Islam sehingga tidak melakukan pembiaran
- 3) seruan kepada aparat penegak hukum agar segera menindak tegas kepada orang yang telah melakukan perbuatan tersebut sesuai proses undang-undang yang berlaku
- 4) seruan kepada aparat penegak hukum agar proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat
- 5) masyarakat diminta untuk tetap tenang, tidak melakukan aksi main hakim sendiri, menyerahkan penanganan kepada aparat penegak hukum dan tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang.

Surat pernyataan sikap keagamaan MUI dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 2016 dan ditandatangani oleh KH. Ma'ruf Amin sebagai Ketua Umum dan DR. H. Anwar Abbas, MM, M.Ag sebagai Sekretaris Jenderal. Surat ini merupakan respons terhadap kegaduhan dan tekanan-tekanan dari sejumlah aliansi keagamaan dan masyarakat Muslim atas pernyataan Gubernur DKI Jakarta Ahok dalam pidato kedinasan di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Respons ini

sebenarnya bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dan ketenangan di antara masyarakat Muslim agar tidak sampai melakukan tindakan anarkis dan vandalisme di Jakarta. Selain itu, ia menegaskan pemerintah serta aparat penegak hukum agar segera memproses segala tindakan penistaan terhadap agama.



Sumber: www.news.detik.com

Gambar. 2.5 Surat Pernyataan Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI
Kendati tujuan surat pernyataan pendapat dan sikap keagamaan tersebut

bertujuan baik. Namun belum tentu memberikan dampak yang baik pula. Hal ini terlihat secara konten dari isi kandungan yang terdapat di dalamnya bahwa MUI sebagai majelis keagamaan yang dipimpin oleh sejumlah pimpinan ulama-ulama

atau tokoh agama Islam memberikan pandangannya tidak hanya secara murni mengarah kepada persoalan tuduhan penistaan agama saja yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Ahok. Namun, secara implisit ia memberikan pandangan tentang pemilihan pemimpin yang direkomendasikannya yaitu pemimpin yang Muslim.

Selain itu, MUI memberikan sikap keagamaan atas pernyataan Ahok dalam pidatonya tentang kutipan surat al-Maidah ayat 51 bahwa pernyataan Ahok yang berbunyi “...jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al-Maidah ayat 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu. Jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya...” adalah masuk dalam kategori menghina al-Qur’an serta menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.

Melihat adanya pernyataan sikap keagamaan dan pendapat MUI tersebut, beberapa organisasi dan kelompok keislaman berusaha untuk melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum dari aparat sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh MUI. Pada tanggal 14 Oktober 2016, dengan cara berdemonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta yang dipimpin dan dikomando oleh kelompok Front Pembela Islam (FPI) melalui mobilisasi massa Islam yang berjumlah ribuan. Aksi demonstrasi ini dilakukan pada hari Jum’at dan mayoritas para demonstran bergerak menuju Balai Kota Jakarta setelah melaksanakan shalat Jum’at di Masjid Istiqlal. Dalam kesempatan kali ini, beberapa politisi seperti Amien Rais dan Habiburrakhman turut berpartisipasi dalam aksi demonstrasi ini

serta mendesak aparat penegak hukum agar sesegera mungkin melakukan penindakan atas dugaan kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur DKI Ahok yang sekaligus salah satu pasangan calon Gubernur dari *incumbent*. Pimpinan Kepolisian dan Tentara Negara Indonesia (TNI) melalui Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Iriawan dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksana melakukan upaya untuk mencegah dan menenangkan aksi para demonstran agar tidak melakukan aksi anarkis serta berjanji untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

Aksi demonstrasi tersebut (aksi 14 Oktober 2016) adalah aksi demonstrasi pertama yang dilakukan oleh kelompok Islam yang dimotori oleh ketua umum FPI Habib Riziq Shihab dan ditemani oleh politisi Amin Rais dengan mengangkat tajuk “Aksi Bela Islam” melalui mobilisasi masyarakat Islam untuk menolak Gubernur Ahok (anti-Ahok) dan meminta aparat penegak hukum untuk memidanakannya karena ia dituduh telah melakukan penistaan agama melalui pengutipan Surat al-Maidah ayat 51 di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Aksi 14 Oktober 2016. Dan aksi tersebut pula yang menjadi cikal bakal dari kemunculan aksi-aksi demonstrasi berikutnya dengan sebutan Aksi Bela Islam yang berjilid-jilid.

Pada tanggal 13 Desember 2016, Gubernur Ahok mendapatkan proses persidangannya pertama kali di Pengadilan Negeri, Jakarta Utara atas kasus tuduhan penistaan agama di hadapan masyarakat Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Dalam nota keberatan atas tuduhan penistaan agama, Gubernur Ahok membantah bahwa ia telah melakukan penafsiran atas Surah al-Maidah ayat 51 dan tidak pernah bermaksud untuk menistakan agama Islam serta para Ulama'nya.

Sepanjang persidangan, saksi-saksi telah didatangkan untuk memberikan keterangan baik dari saksi pelapor dan terlapor. Saksi pelapor yang difasilitasi oleh Jaksa Penuntut Umum seperti Habib Novel Chaidir Bamukmin, Gus Joy Setiawan, Habib Muchsin dan Syamsu Hilal memberikan keterangan bahwa Gubernur Ahok telah melakukan penyerangan terhadap agama Islam secara sengaja dan penistaan agama dalam pidatonya tersebut bahkan Habib Novel Bamukmin menegaskan bahwa dia mendapatkan banyak telpon dan sms laporan atas penistaan agama dari masyarakat Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Namun, ketika tim pengacara dari Gubernur Ahok meminta untuk menunjukkan bukti-buktinya, Habib Novel Bamukmin menyatakan kalau bukti-bukti telpon dan SMS tersebut telah terhapus.¹⁷⁷ Dari sekian pernyataan saksi pelapor yang didatangkan Jaksa Penuntut Umum, hampir semuanya mengarah pada poin penyerangan terhadap personalitas Ahok sebagai penista agama, penista ulama, penista al-Qur'an dan pemecah belah bangsa di mana para saksi tersebut hanya melihat kalimat pernyataan Gubernur Ahok yang telah diedit oleh Buni Yani tanpa mendengarkan pidato Gubernur Ahok secara utuh.

Proses persidangan Gubernur Ahok dalam kasus tuduhan penistaan agama berakhir pada dakwaan Kejaksaan Agung, bahwa ia telah melakukan pelanggaran Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP. Pasal 156 KUHP yang berbunyi "Barangsiapa di muka umum menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam

¹⁷⁷ <https://www.merdeka.com/peristiwa/ahok-minta-polisi-usut-telepon-habib-novel-pada-tanggal-27-september.html> diakses pada 03 Juli 2018

dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara”. Sedangkan Pasal 156a KUHP berbunyi “ dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, a; yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalaghunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, b; dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁷⁸ Kemudian, dakwaan tersebut berujung pada pengambilan keputusan persidangan atas Gubernur Ahok dengan penjatuhan hukuman yang semula pidana 2 tahun penjara kemudian berubah menjadi penjara satu tahun dengan masa percobaan dua tahun.

Di lain pihak, Buni Yani sebagai orang yang telah melakukan unggahan video pidato Ahok di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu mendapatkan panggilan dari Polisi Daerah Metro Jaya berdasarkan pada laporan aliansi Kotak Adja atas tuduhan pelanggaran Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik karena dengan sengaja meng-edit video dan menulis pernyataan yang mengandung provokasi di laman Facebook-nya. Kemudian, Polda Metro Jaya melihat adanya hasil pemeriksaan dan penyelidikan yang

¹⁷⁸ <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/80139/ahok-hanya-disangkakan-pasal-156-dan-156a> diakses pada 30 Juli 2017.

mengintisarkan bahwa unggahan Buni Yani tersebut ada indikasi pengasutan yang dapat menyebabkan tindakan SARA (suku, agama, ras dan antar golongan).

Penyidik dari Kepolisian Daerah Metro Jaya melihat adanya bukti-bukti perbuatan yang mengarah kepada kalimat-kalimat yang mengandung provokatif (penghasutan) serta pencemaran nama baik. Mereka mencatat setidaknya ada tiga kalimat yang ditulis Buni Yani di dalam laman Facebooknya seperti “PENISTAAN TERHADAP AGAMA?”, “Bapak-Ibu (Pemilih Muslim)...dibohongi Surat al-Maidah 51”...(dan) “masuk neraka” (juga Bapak-Ibu) dibodohi”, dan kalimat “Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini”. Berdasarkan ketiga bukti kalimat pernyataan tersebut, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Buni Yani selaku pengunggah video dan pemilih status Facebook sebagai tersangka.

Berkenaan dengan pengutipan Surat al-Maidah 51 di Pulau Pramuka dan unggahan pemotongan video tersebut, “main lapor-melapor” sudah tidak dapat dibendung lagi dan semakin menjadi polemik serta politis. Pihak pendukung Ahok dalam hal ini, Kotak Adja (Komunitas Advokat Muda Ahok-Djarot) melaporkan Buni Yani kepada kepolisian sebagai pengunggah video, penyebar fitnah dan pelaku pemotongan video (edit) dari durasi asli 1 jam 48 menit menjadi 31 detik dengan pernyataan (statuts) yang sensitif. Pada saat yang sama, Buni Yani (pihak yang terlapor) didukung oleh Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) dan tidak menerima atas laporan yang diadukan oleh komunitas Kotak Adja dengan cara melaporkan balik komunitas ini kepada kepolisian karena dianggap telah melakukan pencemaran nama baik. Sebelumnya, Gubernur Ahok dilaporkan oleh

kelompok yang mengatasnamakan dirinya dengan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA).

Dari hasil persidangan Buni Yani, dia terbukti bersalah dengan dakwaan melanggar pasal 28 ayat (2) dan pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di mana dia terbukti mengubah suatu pesan, mengunggah satu isi dan naskah pemberitaan yang menimbulkan satu perasaan permusuhan atau kebencian kepada satu kelompok suku, agama, rasa tertentu. Buni Yani dihukum pidana dengan hukuman penjara selama satu tahun setengah (18 bulan) melalui Pengadilan Negeri Bandung.

Dengan demikian, persoalan Surat al-Maidah ayat 51 yang berakibat pada polemik dan kegaduhan di antara masyarakat Jakarta khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, berawal dari dua sumber masalah utama, yaitu masalah pengutipan surat al-Maidah ayat 51 di kegiatan kunjungan kedinasan di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu dan masalah pemotongan video serta upaya memantik “kegaduhan” dengan penulisan pesan di unggahan laman media sosial. Artinya, apa yang dilakukan oleh Gubernur Ahok di Pulau Pramuka adalah pernyataan kontroversial yang dapat membuat orang terprovokasi, sedangkan yang dilakukan oleh Buni Yani, pengunggah video adalah tindakan pencemaran nama baik yang dapat pula memprovokasi orang.

2. Genealogi GNPF-MUI

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa – Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) merupakan salah satu bentuk organisasi gerakan yang terlahir dari hasil kumpulan kelompok masyarakat Islam yang menolak pernyataan Gubernur Ahok

dalam pengutipan Surat al-Maidah ayat 51 di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Menurut Arie Pamungkas dan Octaviani yang berafiliasi dengan GNPF-MUI adalah Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Forum Umat Islam (FUI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Tarbiyah/PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Secara struktural, GNPF-MUI memang bukan lahir dari rahim organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI)¹⁷⁹. Namun, terdapat orang-orang penting di dalam struktur MUI menjadi bagian dari GNPF-MUI, seperti Bachtiar Nashir sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI dan Zaitun Rasmin sebagai Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Ukhuwah Islamiyah. Puncaknya adalah GNPF-MUI muncul sebagai organisasi gerakan yang bertujuan untuk mengawal fatwa MUI tentang pernyataan Gubernur Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu yang dianggap sebagai aktor dalam penistaan terhadap Islam dan ulama'nya. Pengawalan ini bersifat spontanitas setelah keluarnya Surat Pernyataan Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KH. Ma'ruf Amin pada tanggal 11 Oktober 2016 hingga berlanjut menjadi sebuah gerakan yang memobilisasi masyarakat Islam untuk berunjuk rasa kepada pemerintah dan kepolisian agar segera melakukan penindakan atas dugaan penistaan agama tersebut.

¹⁷⁹ Pernyataan Ketua MUI 2015-2020 KH. Ma'ruf Amin bahwa GNPF-MUI bukanlah bagian dari MUI di dalam kesaksian beliau di persidangan Ahok di Auditorium Kementerian Pertanian (KEMENTAN) Jakarta Selatan pada tanggal 31 Januari 2017. <https://news.detik.com/berita/d-3409988/maruf-amin-gnpf-bukan-bagian-mui> diakses pada tanggal 11 Agustus 2017.

Dalam sejumlah riset, Bachtiar Nashir dianggap sebagai pendiri dari gerakan GNPF-MUI karena dia menjabat sebagai ketuanya¹⁸⁰. Hal ini berbeda dengan hasil penelusuran peneliti yang melihat sejumlah media berita menyatakan bahwa Habib Riziq Shihab dan Muhammad al-Khaththath lah yang menjadi pengagasnya¹⁸¹. Kendati demikian, baik Bachtiar Nashir maupun Habib Riziq Shihab dapat dikatakan sebagai pelopor utama akan kelahiran “gen” gerakan sosial yang merepresentasikan dua kelompok besarnya; yaitu Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) dan Front Pembela Islam (FPI).

GNPF-MUI adalah kelompok gabungan dari dua kekuatan poros Islam FPI dan MIUMI di mana sebelum kejadian peristiwa pengutipan Surat al-Maidah 51 di Pulau Pramuka, telah seringkali menyatakan penolakannya terhadap Jakarta yang dipimpin oleh Gubernur Non-Muslim. Di kala itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menang dalam Pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2014 sehingga wakil Gubernurnya yaitu Ahok secara konstitusional naik untuk menggantikan posisinya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Adanya aksi penolakan tersebut terbukti dari masifnya gerakan-gerakan yang direpresentasikan oleh dua kekuatan kelompok FPI dan MIUMI yang melebur dengan nama kelompok GMJ (Gubernur Muslim Jakarta) dan MPJ (Majelis Pelayan Jakarta).

Kelompok Islam-keras FPI telah begitu lama menolak keberadaan Ahok yang mendampingi Joko Widodo sejak Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta

¹⁸⁰ Kusumo and Hurriyah, “Populisme Islam Di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela Islam Oleh GNPF-MUI Tahun 2016-2017.” *Jurnal Politik* 4, no. 1 (2019); Abdulloh Fuadi and Tasmin Tasmin, “Gerakan Sosial Baru Di Ruang Publik Virtual,” *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 1 (2019): 48–60.

¹⁸¹ <https://tirto.id/kabar-makar-dan-pemakzulan-selimuti-gnpf-mui-b6w1> diakses pada 13 Agustus 2018

2012. Hal ini sesuai dengan pernyataan Juru Bicara FPI kala itu, Slamet Ma'arif dan Gubernur Ahok sendiri bahwa:

Sejak Pilkada 2012 kita sudah memberikan peringatan kepada umat Islam, termasuk kepada politikus-politikus kita untuk tidak mencalonkan Ahok sebagai Wakil Gubernur karena ada peluang untuk menjadi Gubernur. Ketika bergulir wacana menjadi Gubernur, kita pun melakukan perlawanan baik perlawanan secara politik dan perlawanan massa. Malah seminggu sekali kita turun, setiap hari Jum'at (demo) di depan DPRD DKI Jakarta.¹⁸²

Sudah biasa kan demo. Dulu juga begitu. Waktu (saya) baru dilantik juga sama dulu. GMJ kan? Dari dulu GMJ juga begitu setiap jum;at. Sampai bosan akhirnya kan.¹⁸³

Pada akhir Oktober 2014, ketua GMJ, KH. Fahrurrozi Ishaq mengajak organisasi-organisasi masyarakat Islam lainnya seperti FPI, FUI, Persatuan Islam, Dewan Dakwah, dan berbagai Majelis Taklim Jakarta untuk menemui Wakil Ketua DPR RI yang saat itu adalah Fadli Zon dari Fraksi Partai GERINDRA. Pertemuan ini menjadi pijakan dalam langkah-langkah strategis GMJ untuk meningkatkan semangat para pendemo kepada plt. Gubernur Ahok yang sudah dianggap melecehkan agama Islam pada waktu itu. Problemnnya adalah Ahok dituduh melarang masyarakat Islam Jakarta dalam pemotongan hewan kurban di saat hari raya Idul Adha 1435 H/2014¹⁸⁴.

Tidak sampai di situ, Plt. Gubernur Ahok juga dianggap sebagai penguasa yang semena-mena (zalim) terhadap masyarakat Islam seperti pembatasan penjual

¹⁸² Wawancara dengan Slamet Ma'arif, 28 Oktober 2017. Dikutip dari Kusumo and Hurriyah, "Populisme Islam Di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela Islam Oleh GNPF-MUI Tahun 2016-2017." *Jurnal Politik* 4, no. 1 (2019)

¹⁸³ Pernyataan Ahok dalam Ahok anggap sudah biasa didemo Gerakan Muslim Jakarta, sampai bosan. <https://www.merdeka.com/peristiwa/ahok-anggap-sudah-biasa-didemo-gerakan-muslim-jakarta-sampai-bosan.html> Diakses pada 14 Agustus 2018.

¹⁸⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20140924190605-20-4298/ahok-fitnah-fpi-yang-kurang-cerdas> diakses pada 18 Agustus 2018.

hewan kurban di jalan Tanah Abang, larangan jualan hewan kurban di jalan trotoar, larangan pemotongan hewan di sekolah-sekolah SD, bahkan pengurangan jatah bantuan ke masjid dan majelis taklim (dari jatah 1000 mesjid ke 300, dari 900 majelis ke 80). Fitnah-fitnah pelecehan agama Islam kepada Ahok berawal dari keluarnya surat Instruksi Gubernur Nomer 67 Tahun 2014 tentang Pengendalian Penampungan dan Pemotongan Hewan Dalam Rangka Menyambut Idul Fitri dan Idul Adha Tahun 2014/1435 H yang ditandatangani oleh Plt. Gubernur Ahok pada tanggal 17 Juli 2014¹⁸⁵.

Surat tersebut berbicara tentang bagaimana pemotongan hewan kurban dan penjualan itu dapat dikendalikan dan diawasi langsung oleh pemerintah yang terkait -meliputi pengecekan kesehatan hewan, penampungan tempat lokasi hewan yang tersentral-resmi, penertiban penjual hewan kurban di sentra-sentra publik, dan pelayanan kebersihan pra dan pasca pemotongan- melalui satu koordinasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Instruksi ini ditujukan kepada para Walikota dan Kabupaten Kepulauan Seribu, Dinas Kelautan dan Pertanian, Dinas Kebersihan, Dinas Pendidikan, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

Beberapa kali FPI maupun GMJ mencoba untuk menjegal Ahok dalam kepemimpinan Jakarta. Hampir tiap hari Jum'at, mereka melakukan demonstrasi dan penyebaran berita yang tidak benar terhadap pribadi Ahok sendiri yang cukup sentimentil. Bukan itu saja, mereka juga memaksakan kehendak sentimennya

185

https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/INSGUB_NO_67_TAHUN_20141.pdf
diakses pada 18 Agustus 2018.

kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Ahok ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Ahok juga beberapa kali ditentang dan didemo karena permasalahan legalitas reklamasi pulau di Jakarta Utara.

Lebih ironis lagi, ketika mendekati pelantikan Plt. Gubernur Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta secara resmi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Presiden Joko Widodo yang terpilih saat itu, FPI melakukan penyebaran maklumat kepada anggotanya, para habaib, kiai ORMAS Islam, ORMAS Betawi, Pondok Pesantren, Majelis Taklim, mahasiswa Islam dan semua umat Islam Jakarta agar menolak Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di samping itu, FPI menyerukan pemilihan gubernur yang baru melalui proses pemilihan terbatas DPRD DKI Jakarta atau kalau tertolak maka melalui proses referendum rakyat Islam Jakarta.

Kelompok FPI juga seringkali mengadakan perkumpulan untuk menggalang sekaligus memobilisasi massa Islam di markas besarnya di Petamburan Jakarta guna mengikuti penolakan terhadap Ahok sebagai Gubernur dengan cara berunjuk rasa di depan Balai kota dan gedung DPRD DKI Jakarta. Namun, keinginan untuk menolak dan mengganti Ahok sebagai Gubernur pengganti Joko Widodo tidak membuahkan hasil, sehingga mereka melakukan pengambilan keputusan yang sedikit aneh, yaitu mengangkat ketua GMJ, Fachrur Rozi sebagai Gubernur DKI Jakarta Tandingan. Mereka melantik dan mengikrarkannya di depan gedung Balai Kota dengan anggapan yang mereka lakukan sebagai referendum rakyat Islam Jakarta.

Berbeda dengan GMJ dan FPI yang bergerak pada mobilisasi massa dan aksi demonstrasi bahkan di setiap hari Jum'at, MPJ (Majelis Pelayan Jakarta) beserta MIUMI bergerak di pengkajian dan pengajian di majlis taklim dan ceramah-ceramah di Masjid. Beberapa aktor dalam kemunculan MPJ seperti Bachtiar Nashir dan Zaitun Rasmin meresahkan soal kepemimpinan Jakarta yang dipimpin oleh seorang Non-Muslim yaitu Ahok, sementara mayoritas penduduk Jakarta adalah Muslim. Keduanya mencoba membuat diskusi-diskusi keagamaan yang membahas soal potensi Jakarta dipimpin oleh orang yang bukan Muslim¹⁸⁶. Ini lah awal kemunculan MPJ yang sejak awal sudah mempunyai pandangan “menolak” Ahok sebagai Plt. Gubernur maupun Gubernur resmi Jakarta dan beberapa kali melakukan diskusi dan ceramah keagamaan agar umat Islam lebih memilih pemimpin yang seagama yang dilakukannya di masjid-masjid.

Dua kekuatan kelompok Islam GMJ dan MPJ atau pun FPI dan MIUMI mampu membuat gerakan-gerakan yang saling memperkuat satu sama lain. Pada satu sisi, kekuatan GMJ dan FPI di sektor aksi penggalangan dan mobilisasi massa Islam untuk berhadapan secara fisik dengan cara berdemonstrasi di jalan-jalan ataupun di depan gedung pemerintahan. Dan di sisi yang lain, kekuatan MPJ dan MIUMI dilakukan dengan cara membuat kajian dan diskusi keagamaan di sektor edukasi dan dakwah terhadap masyarakat Islam agar memilih pemimpin Muslim dan menolak pemimpin non-Muslim. Maka, secara tidak langsung, kedua kekuatan tersebut baru mendapatkan tempat untuk bersatu lantaran adanya Surat

¹⁸⁶ Kusumo and Hurriyah, “Populisme Islam Di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela Islam Oleh GNPf-MUI Tahun 2016-2017.” *Jurnal Politik* 4, no. 1 (2019)

Pendapat dan Sikap Keagamaan dari MUI sehingga mereka menemukan sebuah *platform* gerakan politik Islam dengan nama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI).

GNPF-MUI inilah yang menjadi aktor dari segala aksi demonstrasi yang mengatasnamakan “Aksi Bela Islam” terjadi di beberapa daerah Ibu Kota DKI Jakarta dan di luar daerah Jakarta. Selain itu, GNPF-MUI juga dapat mengumpulkan kantong-kantong dukungan dari berbagai organisasi masyarakat Islam (ORMAS Islam) dari berbagai kalangan dan aliran keislaman. Seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Format Umat Islam (FUI), Wahdah Islamiyah, al-Irsyad, Tarbiyah-PKS, Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FS-LDK), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), Komite untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Persaudaraan Muslim Indonesia (PARMUSI), Persatuan Tarbiyah Tarbiyah Islam (PERTI), Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI)¹⁸⁷, al-Ijtihadiyah, dan Hidayatullah¹⁸⁸. Walaupun begitu, dua ORMAS besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sama-sama tidak memberikan instruksi, apalagi menyarankan para jama’ahnya untuk ikut dalam aksi-aksi demonstrasi tersebut. Namun, pimpinan dua Ormas tersebut juga tidak melarang anggotanya kalau ada yang mau

¹⁸⁷ LPPI adalah suatu lembaga yang secara khusus melakukan pengkajian tentang aliran-aliran dan pemikiran-pemikiran yang dianggap sesat dan liberal dengan tujuan untuk meng-*counter* nya. Hasil penelitian dan pengkajian lembaga ini dipublikasikan dalam bentuk buku dan tulisan artikel. Tiar Anwar Bachtiar, *Pertarungan Pemikiran Islam di Indonesia: Kritik-kritik terhadap Islam Liberal dari HM. Rasjidi Sampai INSIST*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017). 140.

¹⁸⁸ <https://tirto.id/mereka-yang-bersatu-dan-berseteru-dalam-aksi-bela-islam-ii-b1NY> diakses pada 18 Agustus 2018.

mengikutinya, hanya saja tidak boleh menggunakan segala atribut resmi baik dari NU maupun Muhammadiyah.

Adapun struktur kepengurusan GNPf-MUI adalah sebagai berikut:

Dewan Pembina GNPf-MUI	: Habib Rizieq Shihab (FPI)
Ketua GNPf-MUI	: Bachtiar Nashir (MIUMI/MUI)
Wakil Ketua I	: Misbachul Anam (FPI)
Wakil Ketua II	: Zaitun Rasmin (Wahdah Islamiyah/MUI)
Sekretaris Jenderal	: Muhammad al-Khattath (FUI/mantan FPI)
Bendahara	: Luthfi Hakim
Panglima Lapangan	: Munarman (FPI)
Bidang Media Center	: Erick Yusuf
Bidang Advokasi	: Kapitra Ampera

D. Konsep Komodifikasi Agama dan Keterkaitannya dengan Politik

Tren penggunaan agama secara perumpamaan dan naratif yang dilakukan oleh masyarakat dengan bertujuan menarik pengaruh sesama dapat dianggap sebagai komodifikasi agama.¹⁸⁹ Istilah komodifikasi agama dapat pula diistilahkan dengan “*religious markets*”,¹⁹⁰ “*religious monopolies*”¹⁹¹, *religious*

¹⁸⁹ Greg Fealy, “Consuming Islam: Commodified Religion and Aspirational Pietism in Contemporary Indonesia” dalam Greg Fealy and Sally White (ed.), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia* (Singapore: ISAS, 2008). Gareth Barkin, Commercial Islam in Indonesia: How Television Producers Mediate Religiosity Among National Audiences. *International Journal of Asian Studies*, 11, 1 (2014), pp. 1-24.

¹⁹⁰ Farish A. Noor. When Religion Becomes a Comodity. <https://www.straitstimes.com/opinion/when-religion-becomes-a-commodity>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2019.

¹⁹¹ Shima Baradaran, Brett G. Scharffs, dan Elizabeth A. Sewell. Religious Monopolies and the Commodification of Religion, *Pepperdine Law Review*. Vol. 32. L. Rev. 4 (2005).

*consumerism*¹⁹², “*market Islam*”,¹⁹³ dan “*commercial Islam*”¹⁹⁴. Tren penggunaan agama mempunyai relasi kuat dengan tindakan manusia yang ada di dalam budaya sosial-politik yang populer. Kecenderungan masyarakat pada model kehidupan yang terkait dengan budaya religiusitas adalah cerminan dari budaya populer itu sendiri. Bahwa religiusitas selalu dibutuhkan, diproduksi dan dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan manusia selayaknya komoditas yang senantiasa diproduksi oleh sebuah mesin industri.

Secara terminologis, Chris Barker mengartikan komodifikasi sebagai proses yang diasosiasikan dengan kapitalisme di mana objek kualitas dan tanda dijadikan komoditas, di mana komoditas adalah segala sesuatu yang tujuan utamanya adalah untuk dijual di pasar¹⁹⁵. Bagi Baudrillard, ia merupakan objek dalam masyarakat konsumen¹⁹⁶ tidak lagi dibeli demi nilai-guna, melainkan sebagai komoditas-tanda dalam suatu masyarakat yang ditandai oleh komodifikasi yang semakin meningkat.

¹⁹² Featherstone, *Consumer Culture and Postmodernism*. (London: Sage Publication, 1991), 126. Roof, W. C. *Spiritual Marketplace: Baby Boomers and the Remaking of American Religion*. (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1999).

¹⁹³ D. Rudnyckyj, Market Islam in Indonesia. *Journal of The Royal Anthropological Institute*. 15 (2009), pp. 183-201.

¹⁹⁴ Gareth Barkin, Commercial Islam in Indonesia: How Television Producers Mediate Religiosity among National Audiences. *International Journal of Asian Studies*, 11, 1 (2014), pp. 1-24.

¹⁹⁵ Chris Barker, *Cultural Studies: Teori dan Praktik* (Bantul: Kreasi Wacana, 2004), 412. Lihat pula, Yasraf A. Piliang, *Dunia Yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan* (Bandung: Jalasutra, 2006).

¹⁹⁶ Dalam pandangan Sklair (2002:62) sebagaimana dikutip oleh Bryan S. Turner bahwa masyarakat konsumen terlibat dalam aliran konsumerisme mengasumsikan makna kehidupan manusia harus ditemukan dalam benda-benda yang ia miliki. Artinya, ketika manusia berkonsumsi berarti ia telah hidup sepenuhnya dan agar bisa hidup terus maka ia harus terus mengonsumsi. Bagi Andrew Heywood, konsumerisme merupakan fenomena psikis dan sosial di mana kebahagiaan pribadi disetarakan dengan konsumsi kepemilikan materi. Bryan S. Turner, *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 566. Lihat pula, Andrew Heywood, *Ideologi Politik: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 276.

Bahkan objek tersebut tidak lagi memiliki nilai esensial, melainkan pertukaran simbolis yang diproseskan dalam komoditas kultural tersebut.¹⁹⁷

Apabila komodifikasi dikaitkan dengan agama, Greg Fealy menjelaskan bahwa ia merupakan aktivitas menjual Islam di mana aktivitas kepercayaan dan ibadah diposisikan sebagai sesuatu yang bisa dijual untuk tujuan ekonomi¹⁹⁸. Menurut Kitiarsa, komodifikasi agama diartikan sebagai proses memasukkan agama ke dalam pasar dan mengubah sakralitas agama menjadi sesuatu yang dapat dipertukarkan.¹⁹⁹

Istilah komodifikasi agama berbeda dengan politisasi agama. Politisasi merupakan sebuah konsep yang sangat penting dalam propaganda dan politik.²⁰⁰ Baik kelompok sosial, lembaga pemerintah, industri, serikat pekerja, gerakan dan organisasi sosial bahkan agama sekalipun dapat dibentuk secara kamufase sebagai propaganda yang bersifat politis. Di negara demokrasi, politisasi agama dapat dijadikan sebagai model untuk memenangkan pemilihan umum yang dapat dianggap sebagai salah satu penyalahgunaan dalam keimanan spiritual.²⁰¹ Hal ini semakin diperkuat dengan munculnya politisasi agama (*the politicization of religion*) yang bertransformasi menjadi partai agama di ranah politik nasional

¹⁹⁷ Chris Barker, *Cultural Studies: Teori dan Praktik....*, 116.

¹⁹⁸ Greg Fealy, "Consuming Islam: Commodified Religion and Aspirational Pietism in Contemporary Indonesia" dalam Greg Fealy and Sally White (ed.), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia* (Singapore: ISAS, 2008).

¹⁹⁹ Pattana Kitiarsa, *Religious Commodification in Asia: Marketing Goods* (London: Routledge, 2008).

²⁰⁰ Anthony R. Brunello, The Effects of Politicization and Moralism in Religion and Public Thought. *Journal of Social Science for Policy Implications*, Vol. 2, No. 2, pp. 295-322, June 2014.

²⁰¹ Ibid.,

dengan klaim untuk mewakili kepentingan kelompok-kelompok agama dan berusaha untuk membangun partai keagamaan.²⁰²

Akh. Muzakki (2010) berpandangan bahwa agama Islam sebagai agama yang paling banyak dipeluk oleh orang Indonesia mempunyai simbol dan ritual bukan hanya mengandung komodifikasi saja akan tetapi juga dapat ditarik ke arah politisasi. Untuk kepentingan komodifikasi, simbol dan ritual Islam dapat dijual menjadi komoditas yang mempunyai nilai ekonomis. Bersamaan dengan itu, untuk kepentingan politisasi, simbol dan ritual tersebut bukan lagi untuk komersialisasi akan tetapi politisasi atas obyek (simbol dan atau ritual) demi kepentingan kekuasaan yang bersifat politis²⁰³.

Di samping itu, komodifikasi agama bukan satu-satunya fenomena yang muncul untuk mendapatkan uang atau untuk urusan komersialisasi saja (orientasi ekonomi). Melainkan, selain menjual produk, ternyata ia juga menjual ideologi sehingga pada satu sisi, ia memerlukan ideologisasi komoditas dan komoditisasi agama di sisi yang lain.²⁰⁴ Oleh karenanya, riset ini difokuskan pada komodifikasi agama pada pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dan bukan pada politisasi agama dengan alasan bahwa komodifikasi agama merupakan proses tindakan manusia untuk menjadikan segala hal yang berkaitan dengan agama sebagai komoditas yang dipertukarkan secara simbolis melalui menjual simbol agama dan

²⁰² Ates Altinordu, *The Politicization of Religion: Political Catholicism and Political Islam in Comparative Perspective. Politics and Society*, 38 (4) 517-551, Sage Publications 2010.

²⁰³ Akh. Muzakki, "Islamisme dan Politisasi Agama Model PKS dalam PILPRES 2009", *Islamica*, Vol. 5, No. 1, September 2010.

²⁰⁴ Lukens-Bull, "Commodification of Religion and the reification of commodities", dalam *Religious Commodification in Asia: Marketing Goods*, ed. P. Kitiarsa (London: Routledge, 2008), 220-234.

menjual ideologi politik agama dengan tujuan memonopoli politik tertentu. Sedangkan politisasi agama lebih dipahami sebagai proses pelibatan agama atau penarikan agama ke dalam propaganda perpolitikan. Ini berarti politisasi agama muncul setelah adanya komodifikasi agama yang telah berlangsung sebelumnya sehingga pada satu sisi, agama berlangsung sebagai komoditas ekonomi dan pada sisi yang lain sebagai ideologisasi politik.

Komodifikasi agama terjadi disebabkan oleh adanya gesekan (*friction*) antara kapitalisme global dengan institusi dan kepercayaan keagamaan²⁰⁵. Ada tiga karakteristik yang menandai komodifikasi agama yaitu penyajian komoditas-komoditas berbentuk atribut religi, ada motif keuntungan dalam industri kultural dan intervensi institusi agama.²⁰⁶ Karakteristik komodifikasi dalam agama tersebut setidaknya tampil dalam ruang-ruang “*new media*” baik internet dan media sosial.

Di Pilkada DKI Jakarta 2017, komodifikasi agama menjadi semakin politis, dan masif berdasarkan pada tiga alasan utama; *alasan pertama*, meningkatnya komodifikasi agama yang mengarah kepada tindakan-tindakan radikal. Hal ini diperkuat oleh data hasil survei Wahid Institute yang dilakukan kepada 1.520 responden dengan metode Multi Stage Random Sampling yang menyimpulkan bahwa 0,4 persen pernah bertindak radikal dan 7,7 persen bersedia bertindak radikal.²⁰⁷

²⁰⁵ Pattana Kitiarsa, Menuju Sosiologi Komodifikasi Agama, dalam *The New Blackwell Companion to The Sociology of Religion*, ed. B.S. Turner, 2010. Terj. Daryatmo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 984.

²⁰⁶ Naili Ni'matul Illiyun, Commodification of Religion. *Jurnal Penelitian*, Vol. 15 No. 2 (2018). 94.

²⁰⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170814172156-20-234701/survei-wahid-institute-11-juta-orang-mau-bertindak-radikal> diakses pada tanggal 11 Oktober 2018

Selanjutnya, Survei *Atma Jaya Institute of Public Policy* menemukan bahwa 45% penggunaan isu agama dalam agenda politik menjadi alasan nomor satu dalam penilaian kualitas demokrasi Indonesia yang buruk. Survei ini dilakukan kepada 1.388 responden dari kalangan muda yang ada di sekitar Jabodetabek, Bandung dan Surabaya.²⁰⁸ *Setara Institute* mencatat penggunaan agama sebagai instrumen politik dan politik kekuasaan dalam Pilkada marak terjadi sejak bulan Februari 2018. Penggunaan agama secara politis ini dapat dilakukan oleh dua bentuk, yaitu bentuk kampanye untuk tidak memilih calon pemimpin yang beda agama dan bentuk kampanye hitam.²⁰⁹

Dari hasil survei tersebut, dapat dipahami bahwa agama bukan hanya merupakan suatu afinitas. Ia bukan pula hanya sebagai identitas dalam diri tiap-tiap manusia. Ia lebih jauh dipahami dari dua proposisi tersebut, di mana ia adalah sesuatu yang dipahami dan dijalankan oleh orang-orang untuk domain privat sekaligus publik²¹⁰. Bahkan, dalam konteks sekarang ini, agama menjadi sebuah komoditas yang selalu di produksi di dalam kontestasi politik. Baik para elit politik maupun para pemilih dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum di era reformasi berpikir bahwa agama dan politik adalah sama-sama relevan digunakan pada ranah privat maupun publik. Dari sini, elit politik mengembangkan tema kampanye dengan penggunaan citra dan basis isu keagamaan untuk membangun

²⁰⁸ <https://nasional.tempo.co/read/1180478/survei-atma-jaya-sebut-politisasi-agama-perburuk-demokrasi> diakses pada tanggal 25 Februari 2019

²⁰⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/21/00005431/setara-institute-politisasi-agama-dalam-pilkada-2018-lewat-rekayasa-fakta> diakses pada tanggal 20 Februari 2019

²¹⁰ Jytte Klausen, "The Re-Politization of Religion in Europe: The Next Ten Years," *Journal of Perspectives on Politics*, Vol. 03, No. 3 (September, 2005), 554-557.

koalisi dan jaringan sosio-politik walaupun pada sebagian waktu, kampanye tersebut didasarkan pada seruan-seruan keagamaan.

Alasan kedua, yaitu agama dipandang sebagai identitas keagamaan yang mutlak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga ketika kontestasi politik itu digelar maka identitas tersebut dijadikan sebagai basis komoditas atas preferensi pemilih dalam pemilihan calon pemimpin (*political marketshare*). Sepanjang perhelatan Pilkada DKI Jakarta 2017, komodifikasi agama seringkali dimanfaatkan sebagai ajang strategi perolehan suara dan mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Tak ayal kemudian, muncul penggunaan simbol-simbol agama khususnya Islam dalam proses kampanye politik baik di media sosial maupun kehidupan nyata guna memberikan pengaruh kekuatan politik terhadap masyarakat religius. Misal komodifikasi agama yang kerap kali dipraktikkan di Pilkada DKI Jakarta 2017 adalah menjual ayat 51 Surat al-Maidah sebagai dalil sah untuk tidak memilih pemimpin non-Muslim, fatwa MUI, menyajikan atribut atau simbol agama seperti ulama', baju gamis, masjid, ibadah shalat Jum'at dan khotbahnya hingga tutur-wicara yang bernuansa agama dalam ruang-ruang media sosial.

Dalam konteks agama, Geertz (1973) mendefinisikannya sebagai sebuah sistem simbol yang bertindak untuk menciptakan suasana hati dan motivasi yang kuat, universal dan tahan lama pada manusia dengan memformulasikan segala konsepsi mengenai tatanan umum serta mengarahkan konsepsi-konsepsi tersebut dalam hati sebagai motivasi yang tampak pada kehidupan manusia yang realistik.²¹¹ Berkaitan dengan politik, agama mendapatkan kekuatan yang terus bertahan

²¹¹ Clifford Geertz. *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic, 1973), 90.

dengan pemaknaan serta pemahaman yang didasari oleh keyakinan yang sakral bagi pemeluknya. Dalam hal ini, Emile Durkheim berpendapat bahwa kekuatan keagamaan hanyalah berupa sentimen-sentimen yang diinspirasikan oleh sekelompok agamawan kepada anggotanya (jama'ah) akan tetapi sentimen tersebut diproyeksikan dan dimanifestasikan pada luar kesadaran yang mereka alami²¹².

Kekuatan ini menjadi norma sosial keagamaan yang dapat memperkuat serta mendukung signifikansi moralitas dalam kecenderungan politik sesuai dengan sakralitas keyakinan dan pemahaman pemeluknya. Dan bentuk sakralitas tersebut dapat berupa doktrin-doktrin religius-politik, sentimen identitas politik, serta intruksi religius-politik. Hegemoni sakralitas ini dapat mempengaruhi cara pandang dan perilaku politik seseorang sehingga Hoge (1974) berpendapat bahwa agama-agama memerinci tindakan apa yang harus diambil dan keyakinan-keyakinan keagamaan menciptakan kewajiban untuk bertindak²¹³.

David C. Legee menganggap agama merupakan salah satu pemotivasi manusia yang paling berbahaya dalam perilaku manusia terutama konteks politik. Hal itu terjadi karena agama merupakan memori kolektif, dan politik merupakan tindakan kolektif. Keduanya adalah sumber identitas, norma-norma dan batas-batas.²¹⁴ Melebihi dari itu, Kuntowijoyo bahkan menganggap agama khususnya Islam sebagai komunitas (*ummat*) tersendiri yang mempunyai pemahaman, kepentingan dan tujuan-tujuan politik sendiri. Selain itu, Islam juga merupakan sebuah kolektivitas, bukan persoalan individual di mana Islam mempunyai

²¹² Emile Durkheim. *The Elementary Forms of Religious Life* (New York: Free Press, 1965), 261.

²¹³ Dean Hoge, *Commitment on Campus* (Philadelphia: Westminster Press, 1974), 92.

²¹⁴ David C. Legee & Lyman A. Kellstedt, *Agama dalam Politik Amerika* (Jakarta: Yayasan Obor: 1993), 22.

kesadaran, struktur dan mampu melakukan aksi bersama.²¹⁵ Dalam konteks ini, agama dipahami sebagai suatu sumber stabilitas dan perubahan politik bahkan muncul pemahaman radikal yang menyebut agama sebagai negara dan sebaliknya negara adalah manifestasi dari pengamalan agama.

Dalam konteks hubungan agama dan politik, ada disparitas peranan agama terhadap budaya politik dalam kontribusi agama secara normatif bagi kedewasaan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi secara substansial.²¹⁶ Lebih ironi lagi, apabila agama dipahami sebagai publik maka ia memainkan peran penentu dalam batas-batas yang diperebutkan antara wilayah privat dan publik di dunia modern.²¹⁷ Dengan demikian, penggunaan agama sebagai komoditas publik melalui kegiatan Pilkada dapat memberikan sebuah penegasan terhadap kesetiaan-kesetiaan primordialisme politik atau bisa pula disebut sebagai pengejawantahan dari politik partisan.²¹⁸

Alasan ketiga adalah munculnya kekuatan dari gerakan politik keagamaan berbasis ideologi Islamis di dalam perhelatan Pilkada DKI Jakarta 2017. Fenomena komodifikasi agama di era ini, tercermin ketika partisipasi politik gerakan ini dilakukan tanpa mengedepankan prinsip toleransi dan etika dalam mendukung elit politik yang menjadi panutannya. Akibatnya, menurut Saiful Mujani dalam harian Kompas yang berjudul *De-aliranisasi politik* bahwa kehidupan politik semacam ini

²¹⁵ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1997), 27.

²¹⁶ Masdar Hilmy, *Islam, Politik dan Demokrasi* (Surabaya: Imtiyar, 2014), 146.

²¹⁷ Jose Casanova, *Agama Publik di Dunia Modern* (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), 60-61. Lihat pula, Bahtiar Effendy, *Re-Politisasi Islam: Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?* (Bandung: Mizan, 2000), 15-20.

²¹⁸ Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2002), 79-80.

menjadi tidak wajar, irrasional, *uncivilized* bahkan seringkali bertentangan dengan kaidah-kaidah demokrasi itu sendiri.²¹⁹ Bahkan menurut Clifford Geertz (1981) pelibatan agama di dalam kampanye politik terkadang dipahami sebagai alat untuk memecah belah umat dan memecah belah persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia²²⁰.

Membaca proposisi tersebut, komodifikasi agama dalam penyelenggaraan Pilkada di Jakarta dapat mengancam disintegrasi bangsa. Pemahaman demikian seringkali keluar dari elit politik dan tokoh gerakan Aksi Bela Islam yang berlatar belakang religius. Dalam hal ini, Akhmad Muzakki (2008) melihat komodifikasi agama secara signifikan melibatkan dua masalah utamanya yaitu, produksi komoditas yang mengandung religius serta menjadikan ideologi religiusitas sebagai komoditas²²¹. Bahkan, penelitian Siti Faridah dan Jerico Mathias (2018) menegaskan bahwa praktik penggunaan agama secara politis muncul dari golongan-golongan garis keras yang memanfaatkan ruang publik untuk memicu keadaan menjadi genting akibat gesekan antar ideologi²²². Akan tetapi dalam pemahaman konteks politik, penggunaan agama dapat diartikan sebagai alat politik

²¹⁹ Harian Kompas yang berjudul *De-aliranisasi Politik*, Kompas, 24 April 2001.

²²⁰ Clifford Geertz menegaskan bahwa agama sesekali memiliki peran untuk mengintegrasikan dan menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat akan tetapi juga sesekali memiliki peranan memecah. Clifford Geertz, *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1981), 475.

²²¹ Akhmad Muzakki, *Islam as A Symbolic Commodity: Transmitting and Consuming Islam Through Public Sermons in Indonesia*, di dalam buku Pattana Kitiarsa, *Religious Commodification in Asia*, (New York: Routledge, 2008), 233.

²²² Siti Faridah dan Jerico Mathias, *Politisasi Agama Pemecah Keutuhan Bangsa dalam Pemilu*. Jurnal yang disampaikan pada Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018.

yang digunakan untuk suatu kelompok atau negara untuk kepentingan tertentu²²³, termasuk pembelahan suara di antara para kontestan politik dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Kendati analisis tersebut berbeda, di dalam penggunaan agama secara politis memberikan sebuah informasi tentang terjadinya sebuah pergeseran orientasi pemeluk agama dalam hal Pilkada dari perilaku keagamaan menjadi perilaku politik. Bahkan, budaya keagamaan terkadang bergeser menjadi budaya politik parokial²²⁴ yang tidak dapat diidentifikasi melalui adanya perbedaan struktural antara yang religius dan yang politis²²⁵. Terkadang, demi menjaga stabilitas kelompok agama tertentu, hukum agama digunakan hingga pada ranah sistem sosial dan perilaku politik yang sesuai dengan ajaran agama Islam sebagaimana diuraikan oleh beberapa pemuka agama.²²⁶ Kenyataan tersebut dipertegas oleh Jacques Waardenburg bahwa dalam konteks sekarang, penggunaan ideologi berbasis Islam adalah salah satu bentuk penggunaan elemen-elemen Islam

²²³ Marzena Romanowska, "Religious Offence as a Political Tool: The Role of Religion in the Limitation of Freedom of Expression" (Tesis – Institut Europeen des Hautes Etudes Internationales, 2007).

²²⁴ Budaya politik parokial merupakan salah satu budaya politik selain subjek dan partisipan. Budaya politik adalah orientasi psikologis terhadap objek sosial atau sebagai sikap terhadap sistem politik dan terhadap diri sebagai seorang aktor politik. Orientasi ini termasuk pengetahuan atau kepercayaan, perasaan atau afeksi dan evaluasi atau penilaian terhadap sebuah sistem politik secara umum, atau terhadap *input* dan *output* politik atau terhadap peran seseorang dalam sistem politik. Seperti dikatakan sebelumnya budaya politik ada tiga; parokial, subjek dan partisipan. Budaya politik parokial adalah kebiasaan orang dalam berpolitik cenderung bersikap apatis atau bisa karena terasing dari sistem politik. budaya politik subjek adalah kebiasaan orang dalam berpolitik cenderung bersikap aktif pada pada aspek *output* dari politik dan bersikap pasif pada aspek *input* politik. Sementara budaya politik partisipan adalah kebiasaan orang dalam berpolitik yang memiliki kecenderungan partisipatif dalam aspek *output* dan *input* politik. Lihat, Gabriel Almond and Sidney Verba. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations* (Princeton: Princeton University Press, 1963).

²²⁵ Saiful Mujani. *Muslim Moderat: Islam, Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 4.

²²⁶ Maurus Reinkowski and Sofia Saadeh, "a Nation Divided: Lebanese Conventionalism", dalam *Citizenship and Ethnic Conflict: challenging The Nation-State*, ed. Haldun Gulalp (London: Routledge, 2006), 107.

yang paling cocok untuk tujuan politik sehingga ada korelasi yang jelas antara ideologisasi dan politisasi Islam.²²⁷

Dari penjelasan tiga alasan menguatnya komodifikasi agama di Pilkada DKI Jakarta 2017 di atas, maka secara garis besar, peneliti melihat selain kelompok gerakan Islam GNPf-MUI, terdapat tim pemenangan pasangan calon yang turut andil di dalam memainkan peranan sebagai motor dalam tindakan-tindakan komodifikasi agama sebagai komoditas yang disajikan dalam Pilkada serta tindakan ideologisasi politik keagamaan yang terus menerus diproduksi dalam bentuk atribut dan slogan agama Islam secara masif baik di ruang realita sosial dan ruang media sosial dengan tujuan utamanya adalah monopoli politik yang sesuai mereka inginkan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²²⁷ Jacques Waardenburg, *Islam: Historical, Social and Political Perspectives* (Berlin: Walter De Gruyter, 2002), 70.

BAB III

PROSES KEMUNCULAN DAN BENTUK KOMODIFIKASI AGAMA GNPF-MUI DAN TIM PEMENANGAN PASANGAN CALON DALAM PILKADA DKI JAKARTA 2017

A. Proses Kemunculan Komodifikasi Agama dalam PILKADA DKI Jakarta 2017

Secara genealogi, komodifikasi agama tidak dapat lepas dari hubungan organisasi-organisasi masyarakat Islam dengan penguasaannya terhadap kajian dan pengetahuan keagamaan itu sendiri. Pewarisan sifat agama yang konon terus-menerus dijadikan sebagai komoditas yang dibutuhkan oleh setiap umat Islam dalam kehidupan sehari-hari adalah sebuah bukti akan adanya relasi antara kedua hal tersebut.

Relasi ORMAS Islam dengan kuasa atas pengetahuan keagamaan mempunyai tempat yang istimewa ketika ia dihadapkan dengan urusan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. *Saking* istimewanya, penggunaan agama untuk urusan Pemilu tersebut terkadang tidak melihat unsur halal dan haram, boleh dan tidak boleh, etis atau tidak etis dan unsur arif dan tidak arifnya di dalam penggunaan agama tersebut demi tujuan dan agenda politik.

Tak ayal kemudian, penggunaan agama dalam konteks politik Pemilihan Umum sering terjadi sehingga marak beredarnya kutipan-kutipan ayat al-Qur'an ataupun Hadis Nabawi yang dipergunakan untuk mendukung pasangan calon tertentu atau bahkan untuk menyerang pasangan calon yang lain (kompetitor). Lebih ironisnya lagi, saling kutip ayat atau hadis ini tidak hanya untuk antar-

pasangan calon yang sama-sama Muslim akan tetapi juga untuk pasangan calon yang non-Muslim sehingga *problem* yang terakhir disebutkan tadi, menyebabkan masalah-masalah anti-toleransi dalam kehidupan sosial-politik seperti marginalisasi dan *stereotyping* terhadap pasangan calon di mana hal tersebut bukan karena berakar pada kutipan ayat dan hadisnya melainkan karena akar sentimentil sosial-kultural dengan melihat sisi perbedaan agama dan ras keturunan.

Berkaitan dengan proses komodifikasi agama tersebut yang terjadi di Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017, peneliti membaginya dalam tiga fase sebagai berikut:

1. Fase Friksi

Dalam kasus PILKADA DKI Jakarta 2017, ORMAS Islam yang tergabung di dalam GNPF-MUI adalah para aktor tokoh ulama yang mayoritas mereka tidak mempunyai hubungan harmonis dengan Ahok. Ketidakharmonisan dalam hubungan tersebut terlihat sejak Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta tahun 2012²²⁸ di mana para aktor tokoh ulama ketika itu menjadi lawan yang saling berhadapan dengan pasangan calon Gubernur Joko Widodo-Ahok melawan Fauzi Bowo-Nachrowi sebagai Gubernur Petahana yang mereka dukung di Pemilihan Putaran Kedua.

²²⁸ Pada tahun 2011, PILKADA DKI Jakarta diikuti oleh 6 PASLON, yaitu Fauzi Bowo-Nachrowi (partai pengusung Partai Demokrat, PAN, HANURA, PKB, PBB, PMB dan PKNU), Hendarji Soepandji-Ahmad Riza Patria (jalur independen), Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (PDI-P dan GERINDRA), Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini (PKS), Faisal Basri-Biem Triani Benjamin (jalur independen), dan Alex Noerdin-Nono Sampono (GOLKAR, PPP, PKPB, Partai Patriot dan PNI Marhaenis). Pada putaran pertama, Joko Widodo-Ahok mampu menyaingi pasangan calon Fauzi Bowo-Nachrowi yang tampil sebagai petahana dengan perbandingan 43% (1.847.157 suara) dan 34 % (1.476.648 suara). Selanjutnya putaran kedua, perebutan suara juga masih tetap dimenangkan oleh pasangan calon Joko Widodo-Ahok dengan 54 % (2.472.130 suara) dan 46% (2.120.815 suara). Indra Pahlevi, PEMILUKADA DKI Jakarta Dua Putaran, *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, Vol. !V, No. 14/II/P3DI/Juli/2012.

Secara preferensial, suara pemilih Muslim pada PILKADA DKI Jakarta 2012 mengalami pembelahan suara (*electoral cleavage*) di mana menurut survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia bahwa masyarakat Muslim Jakarta terdapat 50% yang cenderung memilih Fauzi Bowo-Nachrowi ketimbang Jokowi-Ahok yang hanya dipilih sekitar 42% dari masyarakat Muslim Jakarta dengan kelas menengah. Selain itu, ada faktor etnis pemilih yang mempengaruhi penentuan sikap pemilih Muslim Jakarta di PILKADA DKI Jakarta 2012, yaitu etnis Betawi, Sunda, dan Minang yang condong kepada Fauzi Bowo-Nachrowi sebaliknya etnis Jawa, Tionghoa dan etnis lainnya yang lebih condong kepada Jokowi-Ahok.²²⁹

Di antara sejumlah pemilih Muslim tersebut, terdapat tokoh-tokoh ulama yang memberikan dukungan serta berkampanye untuk pasangan Fauzi-Nachrowi di PILKADA DKI Jakarta 2012 dan untuk pasangan Anies-Sandiaga di PILKADA DKI Jakarta 2017 seperti KH. Mahfudz Asirun (Rais Syuriah PWNU Jakarta), Fachrurrozi Ishaq²³⁰ (Ketua GMJ), Habib Salim al-Athas (Ketua FPI Jakarta) dan sejumlah tokoh agama dari PKS yang sebelumnya mendukung Nur Hidayat kemudian berganti untuk mendukung Fauzi-Nachrowi di PILKADA 2012.

KH. Mahfudz Asirun adalah seorang tokoh ulama yang berasal dari Betawi. Beliau mengasuh sebuah Pesantren di daerah Duri Kosambi, Cengkareng Jakarta Barat dengan nama Pondok Pesantren Mirqot Ilmiah al-Itqon Cengkareng. Beliau dianggap sebagai salah satu tokoh intelektual Ulama Betawi yang sentral di Era Reformasi hingga sekarang di mana beliau menjabat sebagai Rais Syuriah PWNU

²²⁹ <https://nasional.kontan.co.id/news/sikap-politik-muslim-jakarta-cenderung-sekuler> diakses pada 14 Agustus 2018

²³⁰ Fachrurrozi Ishaq adalah seorang tokoh ulama Betawi yang lahir pada tanggal 11 November 1954 di Kampung Kober Ulu, Jati negara Jakarta Timur.

Jakarta (Perwakilan Wilayah Nahdlatul Ulama) serta Penasihat MUI Jakarta Barat.²³¹

Berkaitan dengan pelaksanaan PILKADA DKI Jakarta 2017, KH. Mahfudz Asirun mengajak warga Nahdliyin Jakarta untuk melaksanakan hasil Keputusan Mukhtar NU ke-30 di Lirboyo, Kediri agar memilih pemimpin Muslim. Keputusan ini merupakan hasil ijtihad dan ijma' para tokoh kiai dan sesepuh kiai NU agar masyarakat Muslim Indonesia tidak memberikan kuasa atau mewakili segala urusan kenegaraan kepada orang non-Muslim kecuali dalam kondisi darurat.

Berdasarkan Hasil Keputusan Mukhtar tersebut, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta (PWNU Jakarta) melaksanakan sosialisasi kepada warga Nahdliyin Jakarta melalui acara Silaturahmi Akbar Ulama dan Kiai NU di kantor PWNU DKI Jakarta menjelang berakhirnya masa kampanye Putaran Kedua PILKADA DKI Jakarta 2017. Acara ini pun dihadiri oleh salah satu kandidat PILKADA yaitu Anies Baswedan. Secara tidak langsung, kegiatan acara tersebut sebenarnya berkontradiksi dengan apa yang diinstruksikan oleh PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) bahwa NU secara tegas mengambil sikap untuk ikut campur dalam dukung-mendukung dan kegiatan aksi-aksi demonstrasi anti-Ahok.

Namun demikian, pengurus PWNU Jakarta memandang perlu untuk dilakukan sosialisasi arahan dan panduan memilih pemimpin di PILKADA DKI Jakarta sesuai hasil Keputusan Mukhtar NU ke-30 di Lirboyo, Kediri. Hal ini sekaligus menjawab dari berbagai pertanyaan masyarakat perihal memilih

²³¹ Rakhmad Zailani Kiki, dkk, *Genealogi Intelektual Ulama Betawi: Melacak Jaringan Ulama Betawi dari Abad ke-19 Sampai Abad ke-21*, (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, 2018), 38.

pemimpin di antara dua pilihan; calon yang berlatarbelakang Muslim dan non-Muslim dengan kondisi yang normal.

Satu bulan sebelumnya, komunitas Kiai Muda NU yang notabene dari barisan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Anshor, mengadakan pertemuan diskusi ilmiah (*Bahtsul Masail*) yang bertajuk “Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia” di Kantor PP. GP. Anshor, Jakarta pada tanggal 12 Maret 2017. Dengan pendekatan kenegaraan dan hukum tata negara, Bahtsul Masail tersebut menghasilkan beberapa poin utama berkaitan dengan pelaksanaan PILKADA DKI Jakarta 2017, bahwa dalam bingkai konstitusi negara dan kesatuan negara Republik Indonesia, setiap warga negara Indonesia secara kebebasan individu boleh memilih calon pemimpinnya baik dari Muslim maupun non-Muslim.²³² Hal ini dilakukakan karena para kiai Muda NU melihat adanya benih-benih perpecahan umat Islam ketika sejumlah Masjid dan tempat Ibadah Islam lainnya memasang spanduk penolakannya untuk menshalatkan jenazah orang yang mendukung atau memilih pemimpin non-Muslim di PILKADA Jakarta. Dari adanya spanduk-spanduk tersebut meresahkan hati mereka untuk ikut berpartisipasi dalam menetralkan suasana pemilihan agar tidak sampai pada sikap intoleransi sesama umat Islam karena beda pilihan di PILKADA.

Berbeda dengan KH. Mahfudz Asirun yang cenderung lebih *soft* dalam pemberian arahan pilihan kepada masyarakat Muslim Jakarta, tokoh ulama Betawi lainnya, Fachrurrozi Ishaq memiliki hubungan yang sangat pelik dengan Ahok baik

²³² <https://santrinews.com/Nasional/7520/Bahtsul-Masail-Kiai-Muda-NU-Kepemimpinan-Non-Muslim-Sah-dan-Mengikat> diakses pada 15 Agustus 2018.

di masa PILKADA Jakarta 2012 dan 2017. Tokoh yang dianggap oleh Front Pembela Islam sebagai Gubernur Tandingan atas Ahok yang dilantik sebagai Gubernur setelah menggantikan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014. Dia menjadi ketua organisasi Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) sekaligus anggota Forum Umat Islam (FUI).

Sebelum perhelatan PILKADA DKI Jakarta 2017, Fachrurrozi Ishaq menjadi salah satu tokoh Ulama Betawi yang memberikan dukungannya secara masif kepada Fauzi Bowo-Nachrowi. Bahkan dia menyatakan penolakannya terhadap salah satu pasangan calon PILKADA DKI Jakarta 2017, Joko Widodo-Ahok dikarenakan Ahok berasal dari agama non-Islam. Sadar akan mempunyai pengaruh yang besar di daerah Jatinegara, khususnya bagi masyarakat Muslim di sana, Fachrurrozi Ishaq tiada henti-hentinya memberikan ceramah dan propagandanya baik Majelis Taklim dan acara-acara keagamaan lainnya agar senantiasa waspada kepada kepemimpinan Jakarta di tangan pemerintahan non-Muslim.

Namun sayangnya, pada tanggal 20 September 2012, calon Gubernur Jakarta dari petahana, Fauzi Bowo mengalami kekalahan dari pasangan calon Joko Widodo-Ahok dengan angka yang nyaris berdekatan, yaitu 46,18% (2.120.815 suara) berbanding dengan 53,82% (2.472.130 suara)²³³. Hal ini menambah kekecewaan tersendiri bagi Fachrurrozi Ishaq selaku pendukungnya sehingga dia langsung mengarahkan preferensi politiknya pada kontestasi pencalonan Presiden Republik Indonesia tahun 2014.

²³³ KPU DKI Jakarta, Hasil Rekapitulasi PILKADA DKI Jakarta 2012 Putaran Kedua.

Selain menjadi tokoh ulama Betawi, Fachrurrozi Ishaq juga merupakan seorang politisi yang aktif di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Syariah DPP PPP tahun 2011-2015 dan menjadi Pembina di Majelis Pimpinan Pusat Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musala Indonesia (MPP FAHMI TAMAMI) dengan Rhoma Irama sebagai ketuanya.

Pada 8 Januari 2012, Fachrurrozi Ishaq mendeklarasikan organisasi Islam di Jakarta dengan nama “Wadah Silaturahmi Asatidz Ulama” (WASIAT Ulama). Forum organisasi ini dibentuk atas dasar keinginan sejumlah para guru agama (*ustadz*) dan tokoh agama (*ulama*) di Jatinegara Jakarta Timur untuk merekomendasikan pemimpin yang baik. Puncaknya adalah pemilihan calon Presiden (pencapresan) Republik Indonesia tahun 2014 di mana organisasi ini secara mengejutkan merekomendasikan Rhoma Irama, seorang musisi dangdut menjadi calon presiden yang terbaik di antara kandidat lainnya karena umat Islam Indonesia lebih membutuhkan pemimpin Muslim yang nasionalis dari pada pemimpin nasionalis yang Muslim sehingga dapat menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.²³⁴

Kendati demikian, pencapresan Rhoma Irama oleh organisasi WASIAT Ulama yang dipimpin oleh Fachrurrozi hanya menjadi program kandidasi saja dan tidak dapat lolos dalam pencalonan presiden yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat dikarenakan kurangnya partai politik yang secara resmi

²³⁴ <https://www.merdeka.com/politik/ulama-capreskan-rhoma-karena-fans-nya-jutaan-dan-fanatik.html> diakses pada 19 Agustus 2018.

memberikan dukungannya. Pasca gagal kandidasi, Fachrurrozi dan Rhoma Irama sama-sama memberikan dukungannya kepada pasangan calon Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan mengatasnamakan dirinya sebagai organisasi WASIAT Ulama dan MPP-FAHMI TAMAMI hingga akhirnya mengalami kegagalan juga untuk memenangkan pasangan calon presiden yang didukungnya.

Tokoh ulama lainnya adalah ketua DPD Front Pembela Islam Jakarta, Habib Salim al-Attas yang dikenal dengan Habib Selon juga mempunyai hubungan yang tidak harmonis dengan Ahok. Ketidakharmonisan hubungan ini terlihat pasca Joko Widodo mengundurkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta karena pencapresan Republik Indonesia 2014 sehingga secara konstitusional, Ahok dapat menggantikan posisi Joko Widodo sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Jakarta hingga dirinya menjadi Gubernur secara resmi pada tanggal 19 November 2014.

Ketika Ahok menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Jakarta, FPI kerap kali melaksanakan aksi demonstrasi dan memobilisasi masyarakat Jakarta agar bersama-sama menolak kehadiran Ahok di pemerintahan DKI Jakarta. Alasan utamanya adalah sangat klasik di mana ia adalah orang non-Muslim. Platform FPI yang semula menasar pada persoalan moral di sendi-sendi kehidupan sosial dengan cara melakukan aksi sweeping (penindakan melalui penyisiran) terhadap perbuatan-perbuatan yang dianggap maksiat atas dalih penegakan "*amar ma'ruf nahi munkar*", kemudian bertransformasi pada permasalahan kinerja pemerintahan dan pembangunan. Ironisnya lagi, FPI mengaitkan kinerja pemerintahan dan pembangunan adalah sebuah tindakan yang tidak bermoral, apalagi diperkuat

dengan adanya pemimpin yang bukan dari kalangan Islam sehingga pemerintahannya dianggap sebagai kekuasaan bermotif kemaksiatan.

Ahok melihat adanya disparitas substansial antara kinerja pemerintahan dan moral (akhlak). Kinerja pemerintahan adalah urusan manajemen dan birokrasi sementara moral adalah urusan agama. Hal ini nampaknya memang menjadi prioritas pekerjaan utama Ahok setelah dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta 2014 dengan tujuan untuk memperbaiki sistem birokrasi yang reformatif²³⁵. Sebaliknya, FPI memandangnya sebagai pemerintahan sekuler yang dipimpin oleh seorang “kafir” dan menuduh Ahok sebagai orang yang lebih memprioritaskan perubahan Jakarta dan sumber daya manusianya dari sisi ekonomi dari pada sisi akhlaknya. Dia mengawali cita-cita politiknya tersebut dari pembenahan pelayanan Kartu Jakarta Sehat (KJS) bagi masyarakat yang sangat membutuhkan dari pada permasalahan pribadi pejabat perihal akhlak.

Dua sudut pandang yang berseberangan ditunjukkan oleh Ahok dan Habib Salim Al-Attas (Habib Selon) di mana Habib Salim al-Attas mengukur kemajuan sebuah daerah, bahkan negara dari segi perbaikan dan tatanan akhlak-nya. Adapun urusan kebutuhan sosial yang meliputi ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan adalah sepenuhnya urusan Tuhan. Sudut pandang tersebut kemudian mendapatkan sorotan serius dari Ahok dengan pernyataannya yang menyebutkan bahwa sebuah negara akan hancur apabila agama dicampuradukkan dengan politik.²³⁶ Urusan akhlak para pejabat pemerintah dapat ditata dan diatur melalui politik. Akan tetapi, prioritas

²³⁵ <https://www.voaindonesia.com/a/presidenokowiantik-ahok-jadi-gubernur-dki-jakarta/2526024.html> diakses pada tanggal 19 Agustus 2018.

²³⁶ <https://www.beritasatu.com/megapolitan/97775/ahok-selamatkan-nyawa-lebih-penting-dari-akhlak> diakses pada 19 Agustus 2018.

utama saat itu adalah pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat Jakarta seperti kesehatan dan ekonomi.

Tuduhan sekulerisme dalam kepemimpinan Ahok pasca menggantikan Joko Widodo berawal dari Surat Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 67 Tahun 2014 yang ditandatangani langsung oleh Ahok selaku Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur tentang Pengendalian Penampungan dan Pematangan Hewan dalam Rangka Menyambut Idul Fitri dan Idul Adha Tahun 2014/1435 H²³⁷ di mana FPI menyebutnya sebagai Undang-undang Larangan Menjual Hewan Kurban karena kerap kali petugas Pamong Praja DKI Jakarta melakukan *sweeping* dan pemindahan lapak jual beli hewan kurban di sepanjang trotoar jalan Jakarta. Sekalipun, Ahok memberikan klarifikasi bahwa peraturan larangan kegiatan penampungan dan penjualan hewan di jalur hijau, taman kota, trotoar dan fasilitas umum adalah bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan kota Jakarta, para aktivis FPI tidak menerimanya karena dianggap sebagai pelanggaran mutlak terhadap kegiatan tradisi masyarakat Islam.

Selain itu, kepemimpinan Ahok dalam pemerintahan DKI Jakarta dinilai sangat tidak bermoral dan arogan. Arogansi kepemimpinan tersebut terdapat pada gaya komunikasi Ahok yang terkesan *ceplas-ceplos* dan selalu menggunakan kata-kata yang menyindir keberadaan dan perilaku FPI di Jakarta seperti Ormas anarkis, sering berdemonstrasi, Ormas yang menakut-nakuti dan membuat kemacetan. Bukan itu saja, Ahok bahkan pernah menyampaikan rekomendasi agar Ormas FPI

²³⁷ Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 67 Tahun 2014 tentang Pengendalian Penampungan dan Pematangan Hewan dalam Menyambut Idul Fitri dan Idul Adha Tahun 2014/1435 H, diunduh dari https://jdih.jakarta.go.id/himpunan/produk_download/4023 diakses pada 19 Agustus 2018.

dibubarkan melalui Surat Permohonan Pembubaran Ormas Front Pembela Islam yang ditujukan langsung kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM.

Adapun isi surat rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

Sehubungan dengan keberadaan organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) di wilayah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini saya sampaikan hal sebagai berikut:

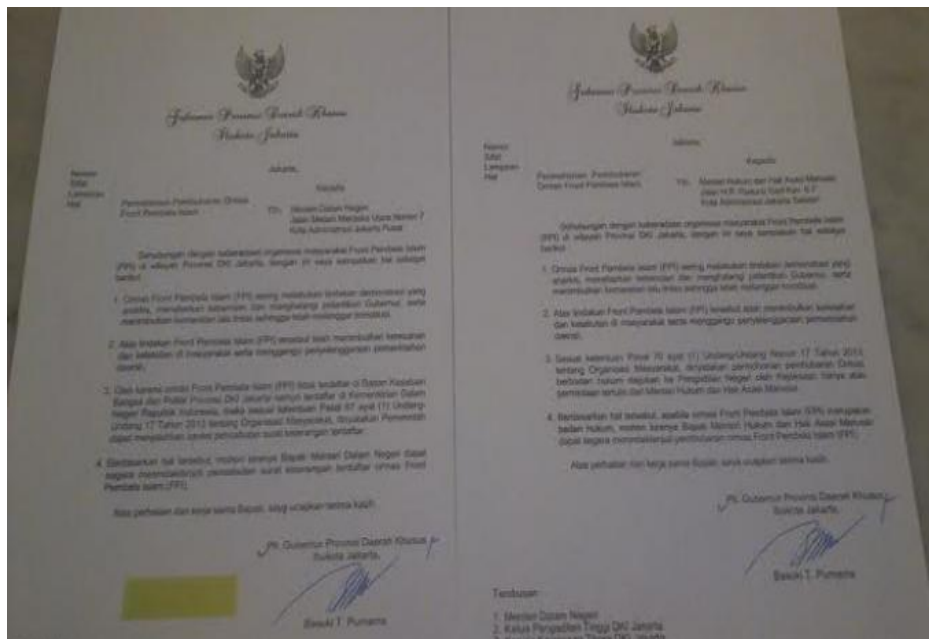
1. Ormas FPI sering melakukan tindakan demokrasi yang anarkis, menebarkan kebencian dan menghalangi pelantikan gubernur, serta menimbulkan kemacetan lalu lintas sehingga telah melanggar konstitusi
2. Atas tindakan Front Pembela Islam (FPI) tersebut telah menimbulkan keresahan dan ketakutan di masyarakat serta mengganggu penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Oleh karena FPI tidak terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, namun terdaftar di Kementerian Dalam Negeri RI, maka sesuai ketentuan Pasal 67 ayat 1 Undang-undang 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat dinyatakan pemerintah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar.
4. Berdasarkan hal tersebut, mohon kiranya Bapak Dalam Negeri dapat segera menindaklanjuti pencabutan surat keterangan terdaftar Ormas FPI.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Plt. Gubernur DKI Jakarta

(ditandatangani)

Basuki Tjahaja Purnama



Sumber. www.Tribunnews.com

Gambar. 3.1 Surat rekomendasi Ahok kepada Kemendagri dan Kemenkumham tentang Pembubaran FPI

Sikap saling menyerang satu sama lain antara FPI dan Ahok adalah bukti kuat akan adanya friksi yang menyebabkan hubungan keduanya sangat tidak harmonis. Terlebih lagi, DPD FPI Jakarta mengeluarkan maklumat yang disebarluaskan baik melalui media tradisional (*tabligh*) seperti ceramah dan pengajian di perkumpulan keagamaan hingga media lainnya seperti spanduk dan gambar *flyer* di media sosial yang secara jelas menunjukkan penolakan terhadap Ahok sebagai pemimpin Provinsi Jakarta dan wakil masyarakat Jakarta.



MAKLUMAT DPD - FPI DAN MADAR LPI DKI JAKARTA
Tentang
PENOLAKAN TERHADAP AHOK SEBAGAI GUBERNUR DKI JAKARTA

Mengingat :

1. Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Al-Ijma' yang melarang umat Islam untuk menjadikan orang di luar Islam sebagai pemimpin.
2. AD / ART FPI terkait Asasi Perjuangan FPI.
3. Fatwa DPP - FPI sejak berdirinya pada tahun 1998 yang mengharamkan umat Islam Indonesia untuk memilih, mengangkat dan menjadikan orang non Islam sebagai pemimpin di semua tingkatan pemerintahan, kecuali di wilayah minoritas muslim.

Memperhatikan :

1. Kemenangan Gubernur DKI Jakarta Jokowi sebagai Presiden RI periode 2014 2019, sehingga Wakil Gubernur Ahok akan naik menjadi Gubernur DKI.
2. Rapat DPD - FPI DKI Jakarta pada hari Ahad tanggal 19 Dzul Qa'dah 1435 H / 14 September 2014 M yang memutuskan untuk MENOLAK AHOK sebagai Gubernur DKI.
3. Masukan berbagai pihak baik dari internal mau pun eksternal organisasi terkait rencana kenaikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.
4. Ketidak harmonisan hubungan warga DKI Jakarta dengan Ahok selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Menimbang :

1. Agama Ahok yang bukan ISLAM.
2. Perilaku Ahok yang AROGAN, KASAR dan TIDAK BERMORAL.
3. Penolakan Umat Islam Jakarta terhadap kepemimpinan Ahok.

HARAP DIPERBANYAK & DISEBAR-LUASKAN SEBAGAI ANDIL PERJUANGAN ANDA

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Memutuskan :

1. Bahwa DPD - FPI DKI Jakarta **MENOLAK AHOK** menjadi Gubernur DKI.
2. Bahwa DPD - FPI DKI menyerukan agar Kemendagri dan DPRD DKI Jakarta tidak melantik Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta
3. Bahwa DPD - FPI DKI Jakarta menyerukan PILGUB Baru melalui DPRD DKI Jakarta atau REFERENDUM RAKYAT JAKARTA untuk penentuan menerima atau menolak AHOK sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Demikian Maklumat DPD - FPI DKI Jakarta dibuat semata-mata hanya untuk meninggikan Kalimat Allah SWT dan demi meraih Ridho-Nya. Semoga Maklumat ini bisa disebarluaskan kepada masyarakat luas agar bisa menjadi pegangan bagi umat Islam dalam bersikap untuk kepentingan agama, bangsa dan negara.

Hasbunallahu Wa Ni'mal Wakiil ... Ni'mal Maulaa wa Ni'man Nashir
Wa Laa Haula Wa Laa Quwwata illaa Billaahil 'Aliyil 'Azhiim

Jakarta, 20 Dzul Qa'dah 1435 H / 15 September 2014 M
Dewan Pimpinan Daerah - Front Pembela Islam
Markas Daerah - Laskar Pembela Islam
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Sumber: www.panjimas.com

Gambar 3.2 Selebaran (*flyer*) Maklumat DPD FPI Jakarta tentang Penolakan Ahok di Media Sosial

Selebaran Maklumat DPD FPI Jakarta atas penolakannya terhadap Ahok mengindikasikan adanya friksi di antara mereka sangat kuat. Alasan utama DPD FPI Jakarta menolak keberadaan Ahok di pemerintahan daerah Jakarta adalah Ahok bukanlah orang Muslim, Ahok dinilai oleh mereka bersikap arogansi dalam kepemimpinan serta klaim FPI atas penolakan masyarakat Islam Jakarta terhadap Ahok berdasarkan mayoritas penduduk warga Jakarta adalah Muslim atau sekitar 83% atau 8,3 juta jiwa²³⁸.

²³⁸ Data 2015 bersumber dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta Berdasarkan Agama 2014. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/09/06/83-persen-penduduk-dki-jakarta-beragama-islam> diakses pada 20 Agustus 2018.

Surat Maklumat DPD FPI Jakarta ini dikeluarkan pada tanggal 15 September 2014 di mana diunggah dan disebarluaskan secara resmi di media-media *online* yang dimiliki oleh FPI dengan judul yang sarat akan indikasi kebencian dan sentimen, yaitu “Maklumat Resmi FPI yang Menolak Ahok “Kristen” Jadi Gubernur DKI Jakarta”.²³⁹ Tambah ironisnya lagi, DPD FPI Jakarta menyarankan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) dan DPRD DKI Jakarta agar menolak Ahok untuk dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta yang resmi. Artinya, surat Maklumat DPD FPI Jakarta adalah lebih dulu keluar dan ditujukan kepada KEMENDAGRI dari pada Surat Rekomendasi Ahok tentang Pembubaran FPI yang tertanggal 10 Nopember 2014.

Friksi dengan tokoh ulama lainnya adalah penolakan Forum Umat Islam yang dipimpin oleh Muhammad al-Khaththath dan Hizbut Tahrir Indonesia terhadap Ahok. Muhammad al-Khaththath memandang keterpilihan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta adalah suatu hal yang tidak proporsional dalam Undang-undang. Alasannya adalah PILKADA Langsung merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh rakyat Jakarta Muslim untuk menentukan siapa yang berhak menjadi *Ulil Amri* (Pemegang Otoritas) di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan pada kedaulatan umat Islam Jakarta. Oleh karenanya, keterpilihan Ahok sebagai Gubernur bukanlah cerminan wakil dan tokoh masyarakat Jakarta, maka diperlukan referendum²⁴⁰. Di pihak yang sama, Hizbut Tahrir Indonesia memberikan dukungannya kepada ORMAS Islam dan sejumlah pihak yang menolak Ahok

²³⁹ <https://www.panjimas.com/news/2014/09/21/maklumat-resmi-fpi-yang-menolak-ahok-kristen-jadi-gubernur-dki-jakarta/> diakses 20 Agustus 2018.

²⁴⁰ <https://www.panjimas.com/news/2014/09/21/sekjen-fui-ahok-tak-pantas-posisikan-dirinya-sebagai-wakil-masyarakat-jakarta/> diakses 20 Agustus 2018.

sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan dalih yang hampir sama bahwa hukum mengangkat pemimpin dari non-Muslim adalah haram²⁴¹. Hanya saja, HTI tidak sampai melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta sebagaimana yang dilakukan oleh FPI, GMJ dan lainnya.

Penolakan lainnya muncul dari aliansi yang bersifat lokalistik yaitu Forum Betawi Bersatu (FBB) yang dipimpin oleh H. Endang Supardi dan Habib Azwar al-Adili dan Forum Betawi Rempug (FBR) yang dipimpin oleh Luthfi Hakim. Sebagai pimpinan FBB, H. Endang Supardi menganggap Ahok sebagai pihak yang mengganggu ketentraman warga Jakarta karena terlalu banyak bicara dan arogan dalam memimpin pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dengan pernyataan “*Ahok adalah satu-satunya Wakil Gubernur yang arogan di Indonesia*”.²⁴² Bahkan, Forum Betawi Bersatu ingin DPRD DKI Jakarta memecat Ahok sebagai Wakil Gubernur dan mengusirnya dari Ibu kota Jakarta yang disebarakan melalui spanduk-spanduk di sudut Ibu Kota Jakarta. Hal ini berbeda dengan FBB lainnya -Front Betawi Bersatu- (dengan pimpinan Amirullah) yang berseragam hitam-hitam dengan baret merah di kepalanya justru memberikan preferensi politiknya untuk Ahok yang dinilai cukup baik dalam kinerja dan bertugas memimpin pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.²⁴³ FBR juga mengenakan pakaian hitam khas Betawi tapi menolak keberadaan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta karena kebijakan Ahok

²⁴¹ <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2014/11/18/33412/hti-dukung-ormas-yang-tolak-ahok-sebagai-gubernur-dki-jakarta.html> diakses pada 21 Agustus 2018.

²⁴² <https://www.panjimas.com/news/2014/09/17/spanduk-bertuliskan-usir-ahok-dari-jakarta-kembali-terpasang-di-dprd-dki/> diakses 20 Agustus 2018

²⁴³ <https://news.detik.com/berita/d-3348338/dukung-ahok-front-betawi-bersatu-jangan-takut-pak> diakses 20 Agustus 2018.

dalam pengusuran warga yang kerap kali terjadi. Akibatnya, FBR ingin mengusur Ahok dari wilayah DKI Jakarta.

Di samping itu, Ahok juga mendapatkan penolakan dari Fahmi Salim dan Haikal Hasan, seorang ketua dan sekretaris Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Wilayah Jakarta. Namun, kali ini, kebijakan-kebijakan Ahok yang lebih mendapatkan sorotan mereka. MIUMI menyebarkan *link* yang berisikan petisi ulama muda Jakarta tentang Ahok yang berupa *tausyiah* kepada kaum Muslimin Jakarta di mana petisi tersebut telah ditandatangani oleh 791 pendukung (ulama muda). Alasan MIUMI menolak Ahok adalah adanya dugaan tentang kebijakan Ahok yang lebih mengutamakan tempat pelacuran sebagai sumber pendapatan daerah dari pada kerusakan moral yang dihasilkannya, melarang pemotongan hewan kurban di sekolah, melarang takbir keliling, sering menggunakan pemahaman agama sebagai bahan ejekan, dan berkata tidak santun.²⁴⁴

Ahok tidak hanya memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan para tokoh ulama akan tetapi ia juga berselisih pendapat dengan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta tentang Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah. Secara internal, Ahok adalah anggota kepartaian GERINDRA yang dipasangkan dengan Joko Widodo dari PDI Perjuangan pada PILKADA DKI Jakarta tahun 2012. Di kala itu, GERINDRA yang juga anggota dari Koalisi Merah Putih (KMP)²⁴⁵ untuk Pemilihan Presiden (PILPRES) tahun 2014

²⁴⁴ <https://nasional.republika.co.id/berita/nfbgmh/ustaz-miumi-buat-petisi-tolak-ahok> diakses pada 21 Agustus 2018.

²⁴⁵ Koalisi Merah Putih (KMP) adalah sekumpulan partai politik yang berkoalisi untuk mengusung pasangan calon Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dalam Pemilihan Presiden Republik

merekomendasikan agar Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara tidak langsung atau pemilihan kepala daerah hanya melalui anggota DPRD saja, tidak melalui pemilihan langsung oleh rakyat.

Ahok tampil cukup kontroversial di mana ia menolak Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah tersebut. Sebuah penolakan yang berkontradiksi dengan keputusan politik partai-nya (GERINDRA). Dalam hal ini, Ahok malah mengancam akan keluar dari partai GERINDRA apabila RUU (Rancangan Undang-undang) tersebut terealisasi²⁴⁶. Dia beralasan bahwa jika Pemilihan Kepala Daerah ditentukan berdasarkan pada pemilihan yang dilakukan oleh anggota DPRD maka kepala daerah hanya menjadi “sapi perah” dari segala keinginan dan tujuan politiknya para anggota dewan serta berpotensi akan terjadinya korupsi secara bersamaan antara eksekutif dan legislatif daerah. Karena pernyataan politik tersebut, Ahok mempunyai hubungan yang tidak harmonis (friksi) dengan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta khususnya dengan Ketua DPD GERINDRA Jakarta yang sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta 2014-2019 Muhammad Taufik dan Abraham Lunggana (H. Lulung) dari PPP DKI Jakarta.

Friksi yang bersifat politis antara Ahok dan mayoritas DPRD DKI Jakarta dilihat oleh DPD FPI Jakarta sebagai sebuah celah untuk melancarkan tuntutan politiknya agar Ahok ditolak untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta yang resmi dan dipecat dari Wakil Gubernur, bahkan secara ekstrim mereka menuntut untuk

Indonesia 2014-2019 yang terdiri dari partai GERINDRA, PAN, PPP, Partai Demokrat, PKS dan GOLKAR.

²⁴⁶ <https://nasional.tempo.co/read/605593/ahok-tolak-ruu-pilkada-mundur-saja-dari-gerindra/full&view=ok> diakses pada 20 Agustus 2018.

mengeluarkan Ahok dari Ibukota Jakarta.²⁴⁷ pada tanggal 24 September 2014, FPI Jakarta ramai-ramai mendatangi langsung ke gedung DPRD DKI Jakarta di mana pimpinan DPD FPI Jakarta saat itu Habib Salim al-Attas (Habib Selon), Jakfar Shodiq (Sekretaris Umum FPI Jakarta), dan sejumlah simpatisan FPI disambut oleh pimpinan DPRD DKI Jakarta seperti Prasetyo Edi Marsudi (Ketua DPRD DKI Jakarta/fraksi PDI Perjuangan), Muhammad Taufik (Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta/fraksi GERINDRA), Abraham Lunggana (Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta/fraksi PPP) dan Muhammad Ongen Sangaji (anggota DPRD DKI Jakarta/fraksi HANURA).

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh FPI di depan Gedung DPRD DKI Jakarta tersebut, tidak lantas menggugurkan penobatan Pelaksana Tugas Gubernur Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta yang menggantikan Joko Widodo secara konstitusional. Di dalam konstitusi, khususnya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa wakil kepala daerah secara otomatis naik jabatan menjadi kepala daerah apabila kepala daerah sebelumnya meninggal dunia atau mengundurkan diri.²⁴⁸ Hal ini sama juga tidak dapat membatalkan Ahok sebagai bagian dari pejabat eksekutif DKI Jakarta sebagaimana yang dituntutkan oleh FPI agar Ahok tidak menjadi pejabat apapun serta mengeluarkannya dari wilayah DKI Jakarta. Dengan demikian, Ahok yang semula adalah Wakil Gubernur kemudian menjadi Pelaksana Tugas Gubernur karena menggantikan posisi Gubernur Joko Widodo yang mengundurkan diri, secara

²⁴⁷ <https://www.panjimas.com/news/2014/09/18/fpi-tegaskan-tolak-ahok-jadi-gubernur-dki-jakarta-harga-mati/> diakses pada 20 Agustus 2018.

²⁴⁸ Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Diunduh dari <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf> diakses pada 20 Agustus 2018.

konstitusional dia tetap diangkat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang secara resmi pada 19 November 2014 melalui surat Keputusan Presiden Nomor 130/P/2014 tentang Pemberhentian Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur DKI Jakarta untuk Sisa Masa Jabatan 2012-2017, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

2. Fase Penguatan

Sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017, komodifikasi agama mengalami fase penguatan ketika sejumlah kelompok ORMAS Islam seperti FPI, GMJ, FUI, HTI, FBB, DDII dan MIUMI Jakarta²⁴⁹ secara kolektif menyatakan sikap politiknya yang bersifat mutlak atas penolakan terhadap Ahok sebagai pemimpin Ibu Kota Jakarta serta melakukan tindakan-tindakan komodifikasi agama yang mengarah kepada mobilisasi massa dalam demonstrasi anti-Ahok dengan proposisi-proposisi dalil yang diambil dari al-Qur'an. Aksi demonstrasi anti-Ahok ini menandai peningkatan intoleransi dan sentimen primordial terhadap keberadaan latar belakang Ahok yang tidak mencerminkan representasi pemimpin yang perhatian pada masyarakat pribumi.²⁵⁰

Indikasi dari tindakan komodifikasi tersebut ketika iklim kontestasi PILKADA memasuki masa pencalonan Gubernur yang dipersiapkan setahun sebelum pelaksanaan PILKADA DKI Jakarta 2017. Kelompok-kelompok ORMAS

²⁴⁹ Untuk daerah, terdapat komunitas kelompok Islam yang menyebutkan dirinya dengan al-Manar (Aliansi Masyarakat Nahi Munkar) Cirebon juga memberikan dukungannya kepada para tokoh ulama Jakarta (habaib, kiai dan muballigh) yang menolak Ahok berstatus Gubernur yang menggantikan Joko Widodo di tahun 2014 lantaran tidak bolehnya menjadikan seorang Non-Muslim sebagai pemimpin dengan mengutip Surat al-Maidah ayat 51 sebelum peristiwa pengutipan al-Maidah di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

²⁵⁰ Mietzner and Muhtadi, "The Mobilisation of Intolerance and Its Trajectories: Indonesian Muslims' Views of Religious Minorities and Ethnic Chinese." *Contentious Belonging*, no. Scherpen (2019): 155–174.

tersebut mengadakan pertemuan di Masjid Istiqlal pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 (9 hari sebelum pidato Ahok di Pulau Pramuka) dalam rangka pencarian serta kandidasi calon Gubernur DKI Jakarta yang sejalan dengan keinginan politik mereka dalam hal status agama di negeri mayoritas Muslim.

Pertemuan ini dipimpin oleh Habib Riziq Shihab (Imam Besar FPI), Bachtiar Nasir (Sekjen MIUMI Pusat), Didin Hafidudin (Ketua Dewan Syura Majelis Pelayan Jakarta), Amien Rais dan Hidayat Nur Wahid (anggota Majelis Syuro PKS), Zaitun Rasmin dan sejumlah tokoh ulama lainnya. Pertemuan tersebut menghasilkan seruan-seruan politik yang dinamakan dengan kesepakatan “Risalah Istiqlal” di mana rumusan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada partai politik dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 nanti. Risalah Istiqlal mencakup sembilan poin rumusan yang berisi sebagai berikut:

- 1) Permintaan kepada seluruh umat Islam untuk merapatkan barisan dalam memenangkan pemimpin Muslim yang baik.
- 2) Menyerukan kepada partai politik yang pro-rakyat agar berusaha maksimal untuk menyepakati satu calon pasangan Gubernur yang berasal dari kalangan Muslim.
- 3) Diserukan kepada seluruh umat Islam agar beramai-ramai menggunakan hak pilihnya di PILKADA DKI Jakarta 2017
- 4) Diserukan kepada seluruh umat Islam agar berpegang kukuh kepada agamanya dengan hanya memilih calon Muslim dan haram memilih non-Muslim dan haram pula untuk GOLPUT.

- 5) Diserukan kepada Muslimin untuk menolak, melawan, dan melaporkan segala bentuk suap, baik itu berbentuk *money politic* maupun serangan fajar.
- 6) Pentingnya partai politik yang pro-rakyat untuk memaksimalkan daya yang mereka miliki serta melibatkan seluruh potensi atau elemen umat untuk memenangkan pasangan CAGUB-CAWAGUB yang disepakati oleh umat.
- 7) Mengokohkan ukhuwah dan mewaspadaikan segala bentuk fitnah dan adu domba yang ditujukan kepada calon yang diusung oleh umat.
- 8) Mengingatkan kepada seluruh pengurus Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI, dan RT/RW yang ditugaskan sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk mengawal dan mengawasi jalannya PILKADA agar terwujud PILKADA DKI yang jujur dan adil.
- 9) mengimbau kepada partai yang semula mendukung calon non-Muslim untuk mencabut dukungannya. Apabila tidak mengindahkan imbauan ini, maka diserukan kepada umat untuk tidak memilih partai tersebut.²⁵¹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁵¹ <https://metro.tempo.co/read/805214/ulama-deklarasikan-9-risalah-istiqlal-haram-pilih-nonmuslim/full&view=ok> diakses pada 21 Agustus 2018.



Sumber: www.portal-islam.id

Gambar 3.3 Pamflet Risalah Istiqlal

Seruan-seruan politik di dalam Risalah Istiqlal itu dianggap sebagai kesepakatan antara ulama dan umat Islam (baca- *ijma'* dalam hukum Islam) yang bersifat mengatur hal-hal yang berkaitan dengan PILKADA DKI Jakarta 2017 sehingga ia menjadi sebuah pedoman politik bagi umat Islam dan partai politik dalam memilih pemimpin. Utamanya adalah terkait pemimpin yang Muslim di Jakarta dan Indonesia pada umumnya. Selain itu, ia pun mengatur para pemilih agar tidak memilih partai politik yang tidak mendukung agenda Risalah Istiqlal tersebut baik di pemilihan legislatif daerah maupun nasional.

Kemunculan Risalah Istiqlal tidak dapat dipisahkan dengan perilaku politik yang mempertimbangkan keuntungan (*benefit*) dan kerugian (*cost*) dalam setiap penentuan tindakannya.²⁵² Dan penentuan tindakan ini pun selalu berkelindan pada kepentingan-kepentingan politik di antara para perumus Risalah. Indikasinya adalah para pemilih diwajibkan secara mutlak untuk memilih pemimpin yang beriman dan menjauhi partai-partai politik yang menentangnya. Keuntungannya adalah para perumus yang condong pada partai politik tertentu akan mendapatkan surplus suara dalam pemilihan-pemilihan 2019 sehingga menjadi partai dominan dalam perolehan suara dan mengebiri dominasi partai politik PDI Perjuangan yang tampil sebagai partai pemenang di pemilihan legislatif sebelumnya.

Akhir dari Risalah Istiqlal ini adalah tindakan para tokoh ulama secara kolektif merekomendasikan pasangan calon yang mereka inginkan untuk kemudian ditawarkan kepada partai politik supaya dapat menjadi pemimpin suatu daerah bahkan nasional. Misalnya adalah Majelis Pelayan Jakarta (MPJ) membuat indikator-indikator pemimpin yang ideal dengan kategori beriman, jujur, adil, cerdas dan bertakwa kepada Allah sehingga menghasilkan tujuh kandidat gubernur Muslim yang direkomendasikannya seperti Adhyaksa Dault, Nurdin Abdullah, Sandiaga Uno, Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, Suyoto, Yusril Ihza Mahendra, dan Ustadz Yusuf Mansur²⁵³.

²⁵² Todd Landman, *Issues and Methods in Comparative Politics; An Introduction*, (London: Routledge, 2000), 136.

²⁵³ Aidulsyah and Mizuno, "The Entanglement between Anti-Liberalism and Conservatism: The Insists and Miumi Effect within the "212 Movement" in Indonesia." *Journal of Indonesian Islam* 14, no. 1 (2020): 1–25.

Dari nama-nama yang terjaring tersebut, Majelis Pelayan Jakarta (MPJ) dan Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah untuk Gubernur Muslim Jakarta (MTJB-GMJ) mengeluarkan pernyataan bahwa Yusril Ihza Mahendra direkomendasikan sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta yang mewakili Muslim Jakarta. Rekomendasi ini berdasarkan pada hasil *polling* yang dilakukan oleh mereka melalui penjaringan foto kopi KTP (Kartu Tanda Penduduk). Sementara Sandiaga Uno direkomendasikan sebagai bakal calon Wakil Gubernurnya dengan alasan bahwa kedua pasangan tersebut dianggap memenuhi kriteria Gubernur Muslim Jakarta yaitu sopan dan bertakwa di mana kriteria ini sangat kontradiksi dengan anggapan mereka terhadap Gubernur Ahok yang dinilai arogan dan bukan orang bertakwa (orang Muslim)²⁵⁴.

Bachtiar Nasir sebagai ketua MPJ sekaligus Pengawal Risalah Istiqlal (PERISAI) menyampaikan bahwa bakal pasangan calon Yusril-Sandiaga menjadi rekomendasi unggulan dengan alasan *pertama*; bahwa keduanya adalah representasi kepentingan umat yang sudah dijagokan sejak lama oleh MPJ dan GMJ. *Kedua*, keduanya telah melakukan pekerjaan penjaringan politik dan memiliki modal sosial. *Ketiga*, keduanya merupakan gabungan yang mempunyai angka elektabilitas yang paling tinggi di antara tujuh kandidat yang mereka rekomendasikan. *Keempat*, mereka dianggap sebagai lawan politik yang lebih baik melawan Gubernur Ahok di PILKADA DKI Jakarta 2017. *Kelima*, umat Islam akan bersatu memberikan dukungan kepada kedua calon tersebut.

²⁵⁴ <https://www.suara.com/news/2016/07/29/211740/mpj-dan-mtjb-gmj-klaim-yusril-calon-terkuat-gubernur-muslim?page=all> dan <https://www.republika.co.id/berita/odu836361/risalah-istiqlal-rekomendasikan-yusrilsandiaga-untuk-dki> diakses pada 25 Agustus 2018.

Kandidat calon Yusril-Sandi yang direkomendasikan oleh MPJ dan GMJ adalah wujud ketidakharmonisan hubungan antara ulama-ulama -yang berafiliasi dengan MPJ, GMJ dan FPI- dengan Gubernur DKI Jakarta Ahok di saat itu. Mereka menganggap kandidat calon Yusril-Sandi merupakan calon yang akan direkomendasikan kepada partai-partai politik yang berkoalisi dan menjadi partai non-pendukung Gubernur petahana dalam menjelang Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.

3. Fase Bangkit

Proses komodifikasi pada PILKADA DKI Jakarta 2017 mengalami kebangkitan khususnya ketika para penolak Gubernur Ahok dari aliansi ulama-ulama yang tergabung di dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI). Alasan utama dalam kemunculan GNPF-MUI ini adalah adanya Surat Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 2016. Lebih ironisnya lagi, Surat Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI tersebut dianggap oleh para penolak Ahok sebagai fatwa ulama Indonesia sehingga ia bukan hanya sekedar pendapat dan pernyataan sikap saja akan tetapi sudah menduduki posisi tertinggi secara otoritatif karena dianggap “Fatwa”.

Anggapan fatwa atas Surat Pendapat dan Pernyataan Sikap MUI inilah yang menyebabkan para tokoh ulama lainnya ikut menyuarakan keinginan politik keagamaannya kepada kepolisian Republik Indonesia agar memasukkan Gubernur Ahok di penjara karena tuduhan kasus penghinaan terhadap agama, al-Qur'an dan ulama. Ulama-ulama di GNPF-MUI melihat Surat Pendapat dan Pernyataan Sikap

MUI sebagai sesuatu yang bersifat mengikat (*binding*), memaksa dan universal bagi umat Islam sehingga mereka menganggapnya sebagai fatwa adalah sebuah kepantasan. Anggapan tersebut berarti menilai Surat Pendapat dan Pernyataan Sikap MUI sebagai hukum positif dalam sebuah negara. Ini tentu sangat berkontradiksi dengan keberadaan Surat Pendapat dan Pernyataan Sikap MUI tersebut dan kedudukan hukum positif sendiri di negara Indonesia.

Oleh karenanya, ada upaya para tokoh ulama yang kurang mempunyai hubungan tidak harmonis dengan Ahok sebelum peristiwa pengutipan Ayat 51 al-Maidah di Pulau Pramuka dalam memanfaatkan Surat Pendapat dan Pernyataan Sikap MUI tersebut untuk sebuah agenda politik dalam menstimulasi kehendak politik mereka agar menghentikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta yang pada tahun-tahun sebelumnya tidak berhasil. Hal ini cukup berasal dikarenakan Ketua Umum MUI pada saat itu, KH. Makruf Amin mengatakan bahwa “Fatwa MUI bukan peraturan perundangan sampai dilakukan positivisasi ke dalam hukum nasional”²⁵⁵. Namun, seperti kata pepatah “nasi sudah menjadi bubur”, Surat Pendapat dan Pernyataan Sikap diasumsikan secara massal sebagai fatwa yang bersifat terikat dan memaksa masyarakat Islam untuk menuntut aparat penegak hukum agar menindaklanjuti pelanggaran Ahok dalam tuduhan kasus penistaan terhadap agama, ulama dan al-Qur’an.

Pernyataan Sikap Keagamaan MUI menjadi obyek komodifikasi para tokoh ulama yang tergabung di dalam GNPF-MUI dengan melihat bagaimana Pernyataan Sikap Keagamaan MUI tersebut tidak hanya cukup sebagai klaim pendapat

²⁵⁵ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38647137> diakses pada 25 Agustus 2018.

kelembagaan saja akan tetapi harus menduduki level tertingginya yaitu sebagai fatwa yang agung dari otoritas tertinggi para ulama Indonesia. Fatwa adalah simbol keagamaan Islam yang bersifat mengikat kepada umat Islam secara moral. Oleh karenanya, tidak cukup kalau MUI hanya sekedar mengeluarkan Pernyataan Sikap Keagamaan kemudian berhenti tanpa ada dampak-dampak yang mengitarinya. Maka bagi GNPF-MUI menganggap perlu untuk menjadikan Pernyataan Sikap Keagamaan tersebut sebagai fatwa agar masyarakat Islam mudah mendukungnya dan menjalankan aksi yang diinginkan oleh mereka karena “fatwa” adalah sebuah komoditas yang paling mungkin untuk dipertukarkan.

Penggunaan fatwa MUI tentang Ahok yang sejatinya adalah Pernyataan Sikap Keagamaan MUI mengindikasikan adanya aktor-aktor ulama yang terdapat di dalam institusi keagamaan baik di dalam MUI maupun di luar MUI mengintervensi Pernyataan Sikap Keagamaan sebagai fatwa atas aktivitas keagamaan yang dipertukarkan bukan untuk orientasi uang (*economic orientation*) akan tetapi untuk ideologi “anti pemimpin-Kafir” yang harus dikonsumsi secara massal oleh masyarakat.

Tidak hanya sampai disitu, GNPF-MUI melakukan sejumlah aksi memobilisasi masyarakat Islam dengan dalih “*dakwah siyasah syar’iyah*” untuk mengawal fatwa MUI (Surat Pernyataan Sikap Keagamaan MUI) tersebut dengan menjalankan sejumlah aksi-aksi yang bertopik “Bela Agama”, “Bela Ulama” dan “Bela al-Qur’an” sebagaimana ketiga narasi tersebut menjadi poin besar di dalam Surat Pernyataan Sikap Keagamaan MUI. Sebagaimana dikatakan oleh Mancur Olson (1965) bahwa antara tindakan kolektif dan barang publik mempunyai

hubungan yang sangat erat²⁵⁶, maka fatwa MUI pada satu sisi telah menjadi barang publik yang ditawarkan kepada masyarakat Islam secara luas dan pada sisi yang lain menjadi sumber tindakan kolektif yang mendorong semua tokoh ulama seperti para habib, kiai, ustadz dan juru dakwah agar mengikuti dan mengawal fatwa MUI tersebut sampai aparat penegak hukum benar-benar menangkap Gubernur Ahok. Di samping itu, tindakan kolektif lainnya adalah GNPf-MUI memobilisasi masyarakat Islam secara luas agar menolak segala kepemimpinan dari jalur non-Muslim dan menjauhi partai politik yang berafiliasi untuk dukungan dan simpatisan pada calon pemimpin non-Muslim.

Pengawasan serta penggunaan Fatwa MUI (Surat Pernyataan Sikap Keagamaan MUI) yang dilakukan oleh kelompok GNPf-MUI lebih cenderung kepada gerakan utilitarian dalam keagamaan. Memaksimalkan kecerobohan Gubernur Ahok pada pidatonya yang mengutip Surat al-Maidah ayat 51 di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu dan fatwa MUI adalah tujuan politik yang paling bermanfaat dan berguna demi kepentingan etis dan ideologis. Faktor kepentingan etis dan ideologis inilah yang menyebabkan pemanfaatan fatwa MUI secara maksimal (*utility*) dalam proses PILKADA DKI Jakarta 2017 menjadi lebih dominan dari pada faktor ideologi politik, faktor keanggotaan partai politik dan faktor program kebijakan calon pemimpin.

GNPF-MUI senantiasa memproduksi Surat Pernyataan Sikap Keagamaan MUI secara kultural untuk dianggap sebagai fatwa secara publik, dapat memberikan

²⁵⁶ Mancur Olson, *The Logic of Collective Action...*

daya tarik tersendiri bagi sejumlah para tokoh ulama dan masyarakat Islam untuk berpartisipasi secara kolektif dalam setiap tindakan (aksi) yang diproduksi oleh mereka seperti serangkaian Aksi Bela Islam di berbagai waktu. Narasi agama seperti “Bela Islam”, “Bela Ulama” dan “Bela al-Qur’an” lagi-lagi menempati posisi industri kultural di mana GNPf-MUI adalah produsen sekaligus pemilik modal sosial-keagamaan. *Selective incentives* sebagaimana dalam teori Olson (1965) untuk masalah komodifikasi agama dalam konteks fatwa MUI tersebut muncul dari dorongan-dorongan stimulatif berupa emosi keagamaan masyarakat Islam dan keimanan yang diasosiasikan agar masyarakat Islam mau terlibat dalam tindakan kolektif (Aksi Bela Islam).

Tahun-tahun sebelumnya, GNPf-MUI tidak dapat menjegal Ahok mulai dari Wakil Gubernur, Pelaksana Tugas (Plt), Gubernur hingga menjadi calon Gubernur petahana di PILKADA DKI Jakarta 2017, namun setelah ada Surat Pernyataan Sikap Keagamaan MUI di bulan Oktober 2016, GNPf MUI mendapatkan ukuran yang sangat besar dalam keuntungan namun sangat kecil dalam biaya (*cost*). Biaya yang berkaitan dengan mobilisasi massa dalam aksi penolakannya terhadap keberadaan Ahok di DKI Jakarta seperti uang dan waktu tidaklah terlalu banyak untuk dihabiskan karena ikut mendompleng pada Surat Pernyataan Sikap Keagamaan MUI (fatwa MUI) yang secara tidak langsung menjegal Ahok. Inilah yang disebut *free ride* (pendompleng bebas) dalam pernyataan sikap keagamaan MUI tersebut di mana GNPf-MUI adalah pihak yang berjumlah sedikit dan berkepentingan secara pribadi tetapi mampu melakukan

pengorganisasian pengaruh secara masif atas fatwa MUI sebagai bahasan publik untuk memobilisasi sejumlah aksi kolektif.

B. Bentuk Komodifikasi Agama GNPF-MUI

GNPF-MUI menganggap dirinya sebagai sebuah aliansi gerakan yang menegakkan supremasi hukum, dan menegakkan keadilan di segala bidang²⁵⁷ berdasarkan pada hukum-hukum Islam yang tentu saja sesuai dengan nalar ideologi mereka. Luaran dari hukum Islam tersebut disampaikan melalui fatwa-fatwa sebagai simbol aktivitas hukum Islam untuk membatasi atau menerapkan segala aktivitas masyarakat, khususnya yang beragama Islam dengan produksi komoditas kultural yang sesuai nalar ideologi mereka seperti menyajikan atribut-atribut dan narasi-narasi agama dalam konstruksi realitas Pernyataan Sikap Keagamaan sebagai fatwa MUI.

Berikut ini adalah bentuk komodifikasi agama yang terjadi pada PILKADA DKI Jakarta 2017:

1. Komodifikasi Ayat-ayat Ideologis “Anti-Pemimpin Kafir”

Pengutipan ayat suci al-Qur’an sengaja dilakukan oleh para tokoh dan simpatisan GNPF-MUI agar dapat dipertukarkan dengan perubahan preferensi politik pemilih yang selama ini masih memberikan simpati maupun dukungan atas prestasi kepemimpinan calon gubernur dari petahana, yaitu Ahok, meskipun dirinya menjalani persidangan atas kasus penistaan agama di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

²⁵⁷ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38647137> diakses pada 25 Agustus 2018.

Berikut ini adalah ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi komoditas publik bagi segenap aktor dari tokoh agama yang berafiliasi dengan GNPF-MUI:

Tabel. 3.1 Tema Komodifikasi Ayat al-Qur'an di PILKADA DKI Jakarta 2017

NO	TEMA	SURAT
1	Ayat “wali” yang ditafsirkan sebagai pemimpin	QS: Ali Imran 28; Ali Imran 118; Ali Imran 149-150; an-Nisa 138-139; an-Nisa 141; an-Nisa 144; al-Maidah 51; Al-Maidah 57; al-Maidah 80-81; at-Taubah 23; at-Taubah 16; al-Mujadalah 14-15; al-Mumtahanah 1; al-Mumtahanah 13;
2	Ayat tentang Orang Munafik	An-Nisa 138-139; An-Nisa 140 dan 145
3	Ayat larangan shalat jenazah bagi munafik	At taubah 80 dan 84

Data diolah oleh peneliti dari sumber www.voa-islam.com²⁵⁸

Secara tekstual, ayat-ayat yang mereka pilih pada tabel 3.1 kolom pertama adalah ayat yang berkaitan dengan kata “*wâlî*” dan “*auliyâ*” secara general diartikan sebagai pemimpin sehingga mereka menjadikannya sebagai tafsiran yang berarti larangan untuk menjadikan (memilih) orang kafir sebagai pemimpin. Bahkan penggunaan ayat tersebut disebar-luaskan ke media sosial yang dianggapnya sebagai bagian dari dakwah keagamaan. Tidak menganggapnya sebagai kampanye politik. Sebagai contoh, munculnya bentuk gambar (*flyer*) di Instagram, Facebook dan Twitter dengan gaya perbandingan kuantitas di dalam al-qur'an antara ayat

²⁵⁸ Hasil penelusuran peneliti terhadap sejumlah ayat yang kerap kali dipakai untuk menolak pemimpin non-Muslim. Penelusuran ini diperkuat dengan keterangan yang ditulis di dalam artikel media Voa-islam.com seperti <https://www.voa-islam.com/read/aqidah/2016/10/11/46667/antara-ayat-haramkan-daging-babi-dan-pemimpin-kafir-lebih-banyak-mana/> dan <https://www.voa-islam.com/read/aqidah/2017/04/18/50091/memilih-pemimpin-kafir-itu-munafik/> diakses pada 25 Agustus 2018.

larangan pemimpin non-Muslim dan keharaman hewan babi jauh lebih banyak ayat larangan pemimpin non-Muslim dari pada ayat yang bercerita tentang keharaman babi.

**Perbandingan Jumlah Ayat Qur'an
TENTANG HARAMNYA
memilih Pemimpin KAFIR & Makan BABI**

	<p>Ayat Qur'an tentang Haramnya Makan BABI:</p>	<p>1) QS. 2:173 2) QS. 5:3 3) QS. 6:145 4) QS 16:115</p>
	<p>Ayat Qur'an tentang Haramnya Memilih Pemimpin KAFIR:</p>	<p>1) QS. 3:28 6) QS. 4:144 11) QS. 9:23 2) QS. 3:118 7) QS. 5:51 12) QS. 28.86 3) QS. 3:149-150 8) QS. 5:57 13) QS. 58:14-15 4) QS. 4:138-139 9) QS. 5:80-81 14) QS. 60:1 5) QS. 4:141 10) QS. 9:16 15) QS. 60:13</p>

Sumber: instagram gadhul_bashar

Gambar. 3.4 gambar flyer Perbandingan Jumlah Ayat Qur'an tentang Haramnya Memilih Pemimpin Kafir dan Makan Babi.

Untuk kolom yang kedua (pada tabel 3.1), mereka menggunakan Surat An-Nisa 138-139; dan Surat An-Nisa 140 dan 145 bermaksud untuk memberikan labelisasi kepada siapapun yang memberikan dukungan, pembelaan dan pilihan politiknya untuk Ahok (yang dituduh sebagai penista agama) dengan label “munafik”. Labelisasi munafik bagi pendukung maupun teman setia bagi calon gubernur Ahok berdasarkan pada alasan mereka yang menentang Ayat-ayat tersebut sehingga dijustifikasi sebagai orang yang keluar dari agama Islam (murtad) atau bahkan menjadi orang kafir.

Kedua ayat tersebut kemudian digandengkan dengan Surat At-taubah 80 dan 84 yang ditafsirkannya sebagai ayat yang melarang bagi orang-orang Muslim untuk menshalahkan serta mendoakan jenazah orang-orang munafik. Di sini sebenarnya, penggunaan ayat tentang labelisasi pendukung Ahok sebagai orang munafik serta dilarangnya untuk menshalahkan dan mendoakan jenazahnya adalah bukan persoalan tentang perihal keagamaan saja. Melainkan persoalan bagaimana para aktor GNPf-MUI dengan sadar berasumsi bahwa masih banyaknya orang-orang Muslim Jakarta yang notabene sebagai pemilih di PILKADA DKI Jakarta 2017 memilih serta memberikan dukungannya kepada calon gubernur petahana, Ahok.

Asumsi tersebut berdasarkan pada hasil PILKADA DKI Jakarta 2017 Putaran Kedua di mana melaju sebagai peserta PILKADA yang diikuti oleh dua pasangan calon yang mempunyai suara tertinggi, yaitu pasangan Ahok-Djarot (suara 43%) dan Anies-Sandi (suara 40%). Padahal, mereka (aktor GNPf-MUI) meyakini bahwa dengan adanya kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada pasangan calon Ahok-Djarot, maka pasangan Anies-Sandi yang mereka dukung akan memenangkan pemilihan secara mayoritas atau dengan suara lebih dari 50%. Namun, yang terjadi justru sebaliknya bahwa masih tingginya perolehan suara pasangan calon Ahok-Djarot dengan 43% di Putaran Pertama menyebabkan para aktor dan simpatisan GNPf-MUI melakukan peningkatan frekuensi komodifikasi agama melalui ayat-ayat tentang orang munafik selama perhelatan PILKADA DKI Jakarta 2017 pasca Putaran Pertama hingga Putaran Kedua.

Labelisasi orang munafik atas para pendukung dan sebagian masyarakat DKI Jakarta yang menamakan dirinya dengan “teman Ahok” tidak hanya sampai di situ,

di mana mereka memvonis mereka sebagai orang yang tidak patut untuk dishalatkan dan didoakan (tahlil) jenazah mereka karena dianggap telah keluar dari ketentuan yang mereka standarkan sebagai orang munafik yang keluar dari agama Islam. Tindakan tersebut tidak lepas dari hasrat mereka untuk memenangkan pasangan calon Anies-Sandi dengan mutlak di PILKADA DKI Jakarta 2017 Putaran Kedua.

Di sini, nampak jelas sekali bagaimana GNPf-MUI sebagai institusi keagamaan melakukan monopoli keagamaan (*religious monopolies*) guna keberhasilan hasrat politik kekuasaan bagi pasangan calon yang didukungnya. Mereka melihat bagaimana isu penistaan agama dengan tertuduh calon gubernur petahana Ahok tidak dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap penurunan angka suara pemilih untuk pasangan Ahok-Djarot atau peningkatan suara mayoritas untuk pasangan Anies-Sandi. Ketika isu penistaan agama belum menurunkan angka suara Ahok-Djarot dan meningkatkan angka suara Anies-Sandi maka labelisasi “munafik” dan pelarangan shalat jenazahnya dipilih sebagai strategi politik yang pantas untuk dipertukarkan (*exchanged*) dengan perubahan-perubahan perilaku politik mereka dari yang sebelumnya mendukung Ahok-Djarot bergeser menjadi pendukung Anies-Sandi atau yang sebelumnya mendukung pasangan calon yang kalah di Putaran Pertama yaitu Agus-Sylvi berubah secara *rational choice*-nya menjadi pemilih yang mendukung Anies-Sandi.

Dari sini, peneliti menemukan strategi marketing politik dengan menggandeng kerangka keagamaan (*religious frame*) di mana agama ketika ditarik ke dalam politik praktis, maka ia mengalami pergeseran dari ranah privat menjadi

ranah publik karena telah menjadi komoditas yang dipaksakan untuk dikonsumsi secara massal. Masyarakat pemilih sebagai market (*customer/consumer*) diarahkan preferensi dalam *rationale choice*-nya untuk memilih suatu produk tidak lagi berdasarkan pada kepuasan atau keinginan *market* terhadap kualitas produk tersebut. Melainkan berdasarkan pada keinginan para aktor yang berkuasa dalam praktik monopoli agama atas tafsiran politik mereka.

2. Masjid dalam Ruang Komoditas Politik

Penggunaan Masjid sebagai simbol tempat beribadah Islam tidak jarang dimanfaatkan oleh para tokoh ulama dari GNPF-MUI sebagai magnet untuk menarik simpati massa dari masyarakat Muslim Jakarta dan sekitarnya. Sebagai contoh, deklarasi Risalah Istiqlal yang diadakan di Masjid Istiqlal pada hari Minggu 18 September 2016 adalah cikal bakal dari lahirnya tindakan kolektif para tokoh ulama dari berbagai ORMAS Islam penentang Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta sebelum pelaksanaan PILKADA DKI Jakarta 2017.

Deklarasi tersebut dikemas secara rapi dalam acara “Silaturrahmi Akbar dan Doa untuk Kepemimpinan Ibu Kota Jakarta” yang diperkirakan dihadiri oleh umat Islam sekitar 20.000 orang.²⁵⁹ Doa bersama dan tausiah (pesan wasiat) tentang kepemimpinan dalam Islam merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh orang banyak di kala masyarakat Muslim Jakarta mempunyai rasa kebingungan mengenai pilihan politik di PILKADA DKI Jakarta 2017. Ini berarti, tausiah

²⁵⁹ <https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2016/09/18/ulama-dan-tokoh-islam-cetuskan-6-poin-risalah-istiqlal-terkait-pilgub-dki-2017/> diakses pada 28 Agustus 2018.

tentang kepemimpinan Muslim yang dipesankan melalui Risalah Istiqlal menjadi barang komoditas yang dibutuhkan oleh orang banyak sehingga ia bersifat publik.

Komoditas yang bersifat publik menjadi barang konsumsi publik yang tidak dapat dihindarkan karena dalam tausiah itu diperkuat dengan seruan-seruan politik. Dalam hal ini, Bachtiar Nasir menyangkal kalau ada politik praktis di dalam Masjid yang berbicara langsung agar memilih kandidat atau partai tertentu, akan tetapi apa yang dilakukannya adalah *dakwah siyasah syar'iyah* yang menjadi tugas para tokoh ulama untuk menyampaikannya kepada umat Islam²⁶⁰. *Dakwah siyasah syar'iyah* merupakan sebuah frase yang tidak semua orang memahaminya namun, ia berarti ajakan atau seruan politik yang bersifat syariat atau hukum yang mengatur. Seruan politik tersebut sengaja dibebankan kepada para tokoh ulama karena melihat dakwah sebagai tugas dari pada ulama dalam menyampaikan isi politik syariat tersebut kepada umat Islam. Akhirnya, isi politik syariat yang terumuskan di dalam Risalah Istiqlal menjadi materi konsumsi yang sudah dipersiapkan oleh mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan publik masyarakat Muslim Jakarta dengan imbalan yang dipertukarkan berupa suara dukungan (*electoral vote*) untuk kandidat atau partai yang mereka rekomendasikan.

Didin Hafiduddin sebagai ketua MPJ dan Hidayat Nur Wahid sebagai senior PKS menambahkan:

Kita doakan DKI dipimpin pemimpin baru. Pemimpin yang cinta umat. Bukan pemimpin kasar, arogan, suka menggusur rakyat. Di masjid ini kita berdoa. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita pemimpin yang terbaik. Berikan kami pemimpin yang tidak kasar dan arogan. Siapa pemimpin terbaik? Yaitu orang yang beriman.

²⁶⁰ Idem.

Masjid Istiqlal artinya masjid yang menghadirkan kemerdekaan. Adalah masjid yang membela kaum lemah, menghadirkan kesejahteraan.²⁶¹

Penggunaan Masjid sebagai simbol penggalangan kekuatan dalam tubuh keorganisasian GNPf-MUI dapat diketahui dari seringnya para aktor GNPf-MUI mengadakan kegiatan-kegiatan yang diawali dari rumah ibadah Islam tersebut. Kegiatan yang melibatkan banyak massa Islam dapat memompa semangat dan barisan pergerakan sebelum melakukan aksinya untuk berdemonstrasi atau menyebarkan propaganda yang mereka agendakan agar tertancap di setiap benak masyarakat Islam di Jakarta.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masjid adalah bagian dari Islam. Ibadah orang Islam bertempat di Masjid. Dan identitas orang beribadah di Masjid adalah berpakaian putih dan bersongkok hitam atau berpeci putih sehingga masjid menjadi ruang komodifikasi GNPf-MUI untuk dapat mengajak masyarakat Islam di dalam Masjid supaya mengikuti pertukaran gagasan dan informasi berkaitan dengan larangan kepemimpinan non-Muslim dengan pilihan-pilihan politik di Tempat Pemungutan Suara (tempat coblosan).

Adanya larangan pemimpin non-Muslim dan tuduhan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu menjadi alasan yang rasional yang makin diproduksi oleh para aktor GNPf-MUI sebagai agenda dan propaganda ideologi politik bahwa agama adalah alasan utamanya. Kendati ideologi semaca ini boleh dikatakan sebagai ideologi konservatisme dalam politik, mereka memandang agenda dan propaganda tersebut

²⁶¹ Ibid.

tidak boleh stagnan atau berjalan di tempat. Ia harus bergerak dinamis dengan cara gerakan dakwah “bela qur’an”, “bela Islam” dan “bela ulama” yang memaksa para tokoh ulama lainnya seperti ustadz dan penceramah di kampung-kampung atau mejelis-mejelis agar turun ke bawah dalam penyebarannya kepada masyarakat Islam lainnya di masjid-masjid yang ada di sekitar DKI Jakarta.

Hal ini sejalan dengan ajakan Habib Idrus Hasyim Alatas (Pimpinan Yayasan As-Sa’adah Jakarta) kepada para Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan Pengurus Majelis Taklim se-Jakarta agar mengikuti perjuangan dakwah para Ulama yang tergabung di dalam komunitas GMJ dalam penolakan terhadap Gubernur Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Bahkan penggunaan Masjid dan Majelis Taklim sebagai sarana aksi penolakannya dipropagandakan sebagai gerakan *fi sabilillah*. Pernyataan Habib Idrus berbunyi “*jika si Ahok mulai sara, bukan kita. Kalau dulu ada Aceng Fikri yang lengser karena tekanan media sekuler, maka kita punya masjid dan majelis taklim. Karena itu kita manfaatkan untuk gerakan fi sabilillah ini*”.²⁶²

3. Gerakan Subuh Berjemaah

Proses PILKADA DKI Jakarta 2017 bukan saja memunculkan proses-proses politik dan persaingan dalam perebutan kursi politik sebagai kepala dan wakil kepala daerah di DKI Jakarta, namun ada sisi menarik yang tak lazim semenjak kasus tuduhan Ahok atas pelanggaran penistaan agama melalui

²⁶² <https://www.nahimunkar.org/miumi-jakarta-ulama-tolak-ahok-kite-ikut-aje/> diakses pada 25 Agustus 2018.

pengutipan Surat al-Maidah 51 di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu, yaitu munculnya Gerakan Shalat Subuh Berjemaah.

Gerakan ini digagas oleh salah satu anggota GNPf-MUI (Muhammad al-Khaththath) yang muncul di sela-sela waktu pasca Aksi Bela Islam II atau aksi yang dikenal dengan Aksi 411 (04 Nopember 2016) dan menjelang Aksi Bela Islam III (Aksi 212) di Monumen Nasional (MONAS) Jakarta. Kemudian GNPf-MUI melihat Gerakan Shalat Subuh Berjemaah ternyata memiliki daya pikat tersendiri pasca aksi 212 sehingga ia dijadikan sebuah program GNPf-MUI yang pada mulanya berskala regional (DKI Jakarta) hingga ke depannya menjadi program nasional yang dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.

Gagasan Gerakan Shalat Subuh Berjemaah muncul bersamaan dengan gerakan-gerakan aksi ajakan lainnya seperti ajakan aksi lempar jumroh, aksi boikot stasiun TV, aksi boikot roti dan minimarket dan lain-lain. Akan tetapi GNPf-MUI melihat gerakan Shalat Subuh Berjemaah menempati posisi yang paling penting dan viral sehingga mereka memilih gerakan ini untuk didahulukan sebagai program. Adapun gagasan gerakan aksi ajakan lainnya bersifat bebas saja dan bergantung kepada permintaan umat Islam pengikut GNPf-MUI sendiri dalam menjalankan aksinya (berdasarkan gagasan aksi yang viral).

Menurut Bachtiar Nasir selaku Ketua GNPf-MUI, tujuan gerakan Shalat Subuh Berjemaah adalah untuk menjaga spirit 212 di mana spirit 212 tidak hanya sebatas artifisial saja, unjuk rasa dan menarik massa dalam jumlah yang besar. Akan tetapi substansi sosial dapat diukur dari jamaah subuhnya dan kualitas orang baik dapat dilihat dari subuhnya. Selain itu, gerakan ini bertujuan untuk menunjukkan

revolusi yang sudah dijalankan oleh komunitas Islam selama ini. Revolusinya dengan cara damai dan apa yang menjadi tonggak dari revolusi tersebut adalah Shalat Subuh Berjamaah.²⁶³ Penegasan banyaknya jemaah pada shalat Subuh di masjid dengan jumlah yang sama atau melebihi shalat Jum'at adalah indikasi kemenangan kaum Muslimin²⁶⁴.

Gerakan Shalat Subuh Berjamaah diserukan kepada masjid-masjid DKI Jakarta dan seluruh daerah di Indonesia di mana kemunculan gerakan ini dimulai dari konferensi pers GNPf-MUI yang dilaksanakan di Masjid PUSDAI (Pusat Dakwa Islam) Bandung sebagai basis dan markas para petinggi GNPf-MUI pada tanggal 12 Desember 2016 dengan agenda acara konsolidasi Spirit 212 yang juga turut mengundang masyarakat Bandung Jawa Barat.



Gambar. 3.5 Gambar Flyer Undangan Subuh Berjamaah Nasional

²⁶³ <https://www.panjimas.com/news/2016/12/13/gnpf-mui-sebut-gerakan-shalat-subuh-menjadi-titik-tonggak-revolusi-damai/> diakses 26 Agustus 2018.

²⁶⁴ <https://www.tarbawia.com/2016/12/foto-jamaah-subuh-1212-meluber-dan.html> diakses 26 Agustus 2018.

Pasca pelaksanaan Aksi 212 tersebut atau lebih tepatnya tanggal 12 Desember 2016, setidaknya peneliti menemukan 136 Masjid yang tersebar di seluruh daerah luar DKI Jakarta yang melaksanakan dan mengikuti program gerakan Shalat Subuh Berjemaah yang diprakarsai oleh GNPf-MUI tersebut. Adapun nama-nama Masjid tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.2 *Data Rekapitulasi Masjid Pelaksana Subuh Berjamaah Nasional Spirit 212*

REKAPITULASI SUBUH BERJAMAAH 12/12/16			
No	Provinsi	Kota/Kabupaten	Masjid
1.	Bangka Belitung	Bangka Belitung	Masjid Agung Bangka
2.	Bangka Belitung	Pangkal Pinang	Masjid Al Fitrah
3.	Bangka Belitung	Pangkal Pinang	Masjid Sabilul Muhtadin
4.	Bangka Belitung	Sungailiat	Masjid Baitul Ummah
5.	Banten	Rangkas Bitung	Masjid Agung Al-A'raf, Rangkasbitung
6.	Banten	Tangerang	Masjid Al-Muttaqin, Cibodas Baru
7.	Banten	Tangerang	Masjid AL Kautsar
8.	Banten	Tangerang	Masjid An-Nabawi Banjar Wijaya
9.	Banten	Tangerang	Masjid Al- Kautsar
10.	Banten	Tangerang	Masjid Al-Muttaqin, Karawaci
11.	Banten	Ciledug	Masjid Al Ikhlas
12.	Banten	Tangerang Selatan	Masjid Jabar Rahmah, Villa Dago Pamulang
13.	Banten	Tangerang Selatan	Masjid Al-Ikhlas, Vila Dago Tol Ciputat
14.	Banten	Tangerang Selatan	Masjid Jami Al-Ikhlas, Rempoa
15.	Banten	Tangerang Selatan	Masjid Al-Aqsha Delatinos - BSD City Serpong
16.	Banten	Tangerang Selatan	Masjid Jami AL Ikhlas Pondok Cabe 1
17.	Banten	Tangerang Selatan	Masjid Graha Hijau 2 Ciputat
18.	Banten	Tangerang Selatan	Masjid Arrahman Bintaro Jaya
19.	Banten	Serang	Masjid Al Muhajirin
20.	DIY Jogjakarta	Bantul	Lapangan RT 2 Dus Kaligatuk Kel.Srimulyo Ke.Piyungan
21.	DIY Jogjakarta	Sleman	Masjid Al Amien Sambisari Condong Catur
22.	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	Masjid Sunda Kelapa
23.	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	

24.	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	AQL Islamic Center
25.	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	Masjid Al-Birru, Jagakarsa
26.	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	Masjid Al-Hikmah, Keb. Lama
27.	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	Masjid Darul Falah, Petukangan Utara
28.	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	Masjid AL Falah Manggarai
29.	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	Mushollah At-Taubah Srengseng
30.	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	Masjid Al-Ikhlash - Jatipadang, Pasar Minggu
31.	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	Masjid AL Falah Mampang Prapatan
32.	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	Masjid At-Taqwa Jl. Bangka
33.	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	Masjid Nurul Huda Mampang Prapatan
34.	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	Masjid Al Istiqomah Pejaten
35.	DKI Jakarta	Jakarta Timur	Masjid Al-Ittihad, Bukti Permai Cibubur
36.	DKI Jakarta	Jakarta Timur	Masjid Jami' Darussalam, Kelapa Dua Wetan
37.	DKI Jakarta	Jakarta Timur	Masjid Al Asri Akbar
38.	DKI Jakarta	Jakarta Timur	Musholah Baiturrahim, Kelapa Dua Wetan
39.	DKI Jakarta	Jakarta Timur	Masjid Al Iman Cipinang
40.	DKI Jakarta	Jakarta Timur	Masjid Asy Syakirin Pondok Bambu
41.	DKI Jakarta	Jakarta Timur	Masjid An Nikmah Tajur
42.	DKI Jakarta	Jakarta Timur	Masjid Taman Duren Sawit
43.	DKI Jakarta	Jakarta Utara	Masjid Al-Amanah, Sunter
44.	DKI Jakarta	Jakarta Utara	Masjid Jami' Al Intizom, Semper Barat
45.	DKI Jakarta	Jakarta Barat	Mushollah AL Furqon Kembangan Utara
46.	Gorontalo	Kota Gorontalo	Masjid Al-Irsyad
47.	Jambi	Jambi	Masjid Nurdin Hasanah
48.	Jawa Barat	Bogor	Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur
49.	Jawa Barat	Bogor	Masjid Mahabbaturrasul Kedunghalang
50.	Jawa Barat	Bandung	Masjid Nurul Hidayah, Arcamanik
51.	Jawa Barat	Bandung	Masjid PUSDAI
52.	Jawa Barat	Bekasi	Islamic Center, Bekasi
53.	Jawa Barat	Bekasi	Masjid Al-Azhar, Jakapermai
54.	Jawa Barat	Bekasi	Mushollah Al Barkah
55.	Jawa Barat	Bekasi	Masjid Husnul Khatimah, Jati Asih
56.	Jawa Barat	Bekasi	Masjid Baitul Jabbar KOMP. Jati Bening Estate
57.	Jawa Barat	Bekasi Utara	Masjid Jami Al Abror Kp. Rawa Bambu
58.	Jawa Barat	Bogor	Masjid Al-Falah
59.	Jawa Barat	Bogor	Masjid Jami' Baiturrahim, Pengasian Gunung Sindur, Bojonggede
60.	Jawa Barat	Bogor	Masjid Abu Bakar Ash Shiddiq Tajur
61.	Jawa Barat	Bogor	Masjid Andalusia Islamic Center, Sentul City

62.	Jawa Barat	Bogor	Masjid Darussalam Yasmin Ciomas
63.	Jawa Barat	Cimahi	Masjid Al-Furqaan PCI 1
64.	Jawa Barat	Cirebon	Masjid Raya At-Taqwa
65.	Jawa Barat	Depok	Masjid Balaikota Depok
66.	Jawa Barat	Depok	Masjid Fatimah Azzahra Bukit Rivaria
67.	Jawa Barat	Depok	Masjid Mukhlisin Sawangan
68.	Jawa Barat	Garut	Masjid Agung Garut
69.	Jawa Barat	Karawang	Masjid Al-Ghammar
70.	Jawa Barat	Karawang	Masjid Jami' Al-Ghamar
71.	Jawa Barat	Karawang	Masjid Jami' Aliyah
72.	Jawa Barat	Tasikmalaya	Masjid Agung Kota Tasikmalaya
73.	Jawa Barat	Sukabumi	Masjid Agung Kota Sukabumi
74.	Jawa Barat	Sentul City	Masjid Hishoh Abdurrahman Al-Majid Taman Victoria
75.	Jawa Tengah	Boyolali	Masjid Agung Boyolali, Komplek Kabupaten Lama
76.	Jawa Tengah	Cilacap	Masjid Agung Darussalam
77.	Jawa Tengah	Magelang	Masjid Daarul 'Ulum Borobudur
78.	Jawa Tengah	Semarang	Masjid Kampus UNDIP
79.	Jawa Tengah	Solo	Masjid Nurul Iman, Kalitan
80.	Jawa Tengah	Solo	Masjid Muhammadiyah, Kepatihan Kulon
81.	Jawa Tengah	Solo	Masjid MUI Semanggi
82.	Jawa Tengah	Banjarnegara	Masjid Ash Shiddieq
83.	Jawa Tengah	Banyuwangi	Masjid Al Hilal
84.	Jawa Tengah	Lamongan	Masjid At-Taqwa Paciran
85.	Jawa Tengah	Sukoharjo	Masjid Baiturrahman Wonorejo
86.	Jawa Tengah	Wonogiri	Masjid Balai Muhammadiyah
87.	Jawa Tengah	Pemalang	Masjid Baitussalim
88.	Jawa Tengah	Tegal	Masjid Islamic Center Baitussalam, Slawi
89.	Jawa Timur	Magetan	Masjid Agung Baitussalam
90.	Jawa Timur	Malang	Masjid Manarul Islam, Sawojajar
91.	Jawa Timur	Malang	Masjid Al-Waqar, Perum Bukit Permata Hijau Tlogomas
92.	Jawa Timur	Malang	Masjid Al Muhajirin, Jl. Cengkeh
93.	Jawa Timur	Mojokerto	Masjid Al-Hidayah
94.	Jawa Timur	Ponorogo	Masjid Al-Manar UNMUH
95.	Jawa Timur	Sidoarjo	Masjid At-Taqwa Taman Pondok Legi III, Pepelegi
96.	Jawa Timur	Surabaya	Masjid Al-Madani, Pakuwon City
97.	Jawa Timur	Surabaya	Masjid AL-Falah
98.	Jawa Timur	Surabaya	Masjid Baiturrazaq, Citraland

99.	Jawa Timur	Surabaya	Masjid Muhammadiyah Sudirman
100.	Jawa Timur	Surabaya	Masjid Mujahidin Perak Barat
101.	Jawa Timur	Surabaya	Masjid Manarul Ilmi ITS
102.	Jawa Timur	Surabaya	Masjid Al Ikhlas Tanjung Sadari
103.	Jawa Timur	Surabaya	Masjid Al-Irsyad - Jl. Iskandar Muda
104.	Jawa Timur	Surabaya	Masjid Arrahmah, Teluk Buli
105.	Jawa Timur	Gresik	Masjid Attaqwa SMP 12 Muhammadiyah GKB
106.	Jawa Timur	Sidoarjo	Masjid Shalahuddin, Perumahan Puri Surya Jaya
107.	Jawa Timur	Sidoarjo	Masjid Al Muhajirin, Perumahan Puri Surya Jaya
108.	Jawa Timur	Sidoarjo	Masjid Al Millah Jl. Ponti Pondok Jati
109.	Jawa Timur	Sidoarjo	Masjid Al Ilham Wage Taman
110.	Jawa Timur	Sidoarjo	Masjid Al Ikrom Wage Taman
111.	Jawa Timur	Pasuruan	Masjid Albassam, Besuki Kejapanan
112.	Kalimantan Barat	Pontianak	Masjid Raya Mujahidin
113.	Kalimantan Barat	Singkawang Tengah	Masjid Hidayatullah
114.	Kalimantan Barat	Kota Singkawang	Masjid Raya Kota Singkawang
115.	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Selatan	Masjid Ar-Raudah Kandangan
116.	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Masjid Raya SabilAl-Muhtadin
117.	Kalimantan Tengah	Sampit	Masjid Jami' Nur Qolbu
118.	Kalimantan Tengah	Pangkalanbun	Masjid Besar Sirajul Muhtadin Pasar Baru
119.	Kalimantan Tengah	Kota Waringin Barat	Masjid Sirajul Muhtadin
120.	Kalimantan Timur	Balikpapan	Masjid Assalam WIKA
121.	Lampung	Bandar Lampung	Masjid Baitul Makmur
122.	Lampung	Bandar Lampung	Masjid Al-Huda
123.	Lampung Tengah	Lempuyang Bandar	Masji Jami Al Fatah
124.	Riau	Pekanbaru	Masjid Agung Ar-Rahman
125.	Riau	Kab. Kuantan	Masjid Agung Kuantan Singingi
126.	Kep. Riau	Batam	Masjid At Taqwa Sekupang
127.	Sulawesi Selatan	Makassar	Masjid Amirul Mukminin (Anjungan Pantai Losari)
128.	Sulawesi Barat	Mamuju	Markaz Dakwah Muhammadiyah
129.	Maluku	Ambon	Masjid Agung Al Buruuj
130.	Sumatera Barat	Bukit Tinggi	Masjid Agung Tengah Sawah
131.	Sumatera Barat	Padang	Masjid Nurul Iman

132.	Sumatera Selatan	Palembang	Masjid Daarul Muttaqin Pasar Kuto
133.	Sumatera Selatan	Palembang	Masjid Nurul Hidayah Pasar Cinde
134.	Sumatera Selatan	Palembang	Masjid Qiblatin Kalidoni
135.	Sumatera Utara	Medan	Masjid Agung Medan
136.	Sumatera Utara	Medan	Masjid Al Ikhlas

Data diolah oleh peneliti dari <https://www.nahimunkar.org/foto-merinding-jamaah-subuh-1212-masjid-pusdai-bandung-membludak/>, <http://www.suara-islam.com/> dan <https://www.portal-islam.id/>

Dari data tersebut, ada 23 Masjid yang terdapat di DKI Jakarta dengan rincian 11 masjid di Jakarta Selatan, 8 masjid di Jakarta Timur, 2 masjid di Jakarta Utara, dan masing-masing 1 masjid di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Hal ini menunjukkan banyaknya para pengurus masjid di DKI Jakarta mengikuti program Gerakan Shalat Subuh Berjamaah yang diajak dan diserukan oleh GNPf-MUI pasca masifnya aksi gerakan demonstrasi yang bertajuk Aksi Bela Islam I (Aksi 14 Oktober 2016), Aksi Bela Islam II (Aksi 411) dan Aksi Bela Islam III (Aksi 212).

Subuh di tanggal 2 Desember 2016 yang bertepatan dengan Aksi Bela Islam III (Aksi 212), sekitar ratusan umat Islam melaksanakan shalat subuh berjamaah di lapangan Monumen Nasional (MONAS) Jakarta. Di lain tempat, Masjid Istiqlal pada hari yang sama juga dihadiri oleh para jemaah umat Islam dengan jumlah yang lebih banyak yaitu sekitar ratusan ribu orang. Mereka hendak melaksanakan shalat subuh berjamaah sebelum mereka berjalan menuju Monumen Nasional sebagai tempat aksi demonstrasi atas tuduhan kasus penistaan agama oleh Gubernur Ahok.

Pasca PILKADA DKI Jakarta 2017, Gerakan ini mendeklarasikan dirinya sebagai Gerakan Indonesia Shalat Subuh (GISS) dengan pimpinan Muhammad al-Khaththath (ketua FUI) di Masjid Agung al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan pada tanggal 4 November 2017. Deklarasi menyebutkan tiga poin utama; pertama, umat Islam diminta untuk melaksanakan shalat subuh berjemaah secara istiqomah. Kedua, umat Islam diminta untuk mengajak keluarga, saudara, teman dan tetangganya untuk melaksanakan shalat subuh berjemaah di masjid daerah masing-masing. Ketiga, GISS bertekad dan bercita-cita bahwa pada tahun 2020, shalat subuh di Indonesia dilaksanakan seperti jumlah jemaah shalat jum'at.²⁶⁵

Penggunaan masjid pada kesempatan kali ini juga dimanfaatkan untuk menggulingkan Ahok sebagai Gubernur dengan sejumlah aksi penolakan dan permintaan pemenjaraan Ahok atas tuduhan kasus penistaan agama. Bahkan lebih masif lagi, masjid menjadi sarana media komunikasi para penolak dan lawan Ahok untuk memberikan pengaruhnya kepada para jemaah yang hadir di dalam program Gerakan Shalat Subuh Berjemaah di masjid-masjid untuk menolak Ahok dan menolak pemberian tim sukses Ahok di waktu Serangan Fajar (waktu pagi subuh menjelas pencoblosan) agar tidak memilihnya sebagai pemimpin (yang dianggap “kafir) di PILKADA DKI Jakarta.

4. Khotbah Jum'at

Permasalahan lain dalam komodifikasi agama di saat PILKADA DKI Jakarta 2017 adalah banyaknya aksi-aksi GNPF-MUI yang dilakukan pada hari jum'at. Berkaitan dengan hari jum'at, shalat jum'at adalah shalat yang paling banyak diikuti oleh para jemaah Muslim laki-laki dalam pelaksanaan ibadahnya, khususnya daerah-daerah perkotaan di Indonesia. khotbah Jum'at menjadi bagian

²⁶⁵ <https://kabar.dewandakwah.com/deklarasi-gerakan-indonesia-shalat-subuh-digelar-di-masjid-al-azhar-jakarta/> diakses 27 Agustus 2018.

dari rukun dalam pelaksanaan shalat Jum'at sehingga terkadang para penceramah (khotib jum'at) menyampaikan isi khotbahnya kepada para jemaah dengan pemilihan tema khotbah yang beragam dan aktual.

Di antara tema yang diambil oleh para penceramah GNPF-MUI adalah larangan memilih pemimpin non-Muslim dan masalah penistaan agama. Misalnya apa yang disampaikan oleh Ketua GNPF-MUI dalam khotbah jum'at-nya di Masjid al-Munawwar Tanah Abang, Jakarta Pusat yang juga direkam dalam video yang diunggah oleh Channel Youtube AQL Islamic Centre pada tanggal 22 Januari 2016. Video ini sempat viral karena dipotong dengan durasi video 2.54 menit dan diunggah oleh pengguna Facebook dengan nama akun "Ibn Mashuri" pada tanggal 7 September 2016²⁶⁶.

Tema khotbah yang disampaikannya adalah "manusia khalifah di muka bumi, jangan pilih pemimpin kafir". Di dalam video khotbah yang berdurasi asli 27.25 menit tersebut, Bachtiar Nashir secara jelas menerangkan manusia dijadikan sebagai khalifah di bumi karena untuk meniadakan kerusakan dan pertumpahan darah. Perbuatan meniadakan kerusakan dan pertumpahan darah tidak bisa dilakukan oleh orang kafir. Peniadaan kerusakan dan pertumpahan darah hanya dapat terealisasi apabila diciptakan struktur sosial Islam dan menjadi khalifah yang muslim secara total.

Mengenai khalifah, Bachtiar Nasir mengutip surat al-An'am ayat 165 tentang "khalifah di bumi" yang diartikannya dengan para penguasa yang diberikan

²⁶⁶ <https://www.portal-islam.id/2016/09/ust-bachtiar-nasir-siapa-yang-memilih.html> diakses pada 27 Agustus 2018.

level jabatan yang berbeda-beda. Penguasa atau pemimpin Islam menjadi kewajiban bagi jemaah shalat jum'at untuk dipilih sekalipun dia melakukan korupsi dari pada seorang pemimpin kafir yang tidak korupsi. Hal ini karena dia menganggap bahwa kepemimpinan Islam adalah bagian dari akidah. Dia mengklaim "*barangsiapa yang memilih pemimpin kafir, maka ia bagian dari si kafir, ini bukan masalah sederhana...dan urusannya sampai ke neraka bro., bisa kekal kita di dalam neraka. Ini persoalan akidah*".²⁶⁷ Klaim memilih pemimpin kafir adalah kafir diawali dengan kutipan Bachtiar Nasir atas Surat al-Maidah ayat 51:

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ^ظ yang menurut penafsirannya adalah barangsiapa di antara

kamu yang mengambil mereka menjadi pemimpin maka, sesungguhnya dia termasuk golongannya. Terma "wali" diartikan sebagai pemimpin, bukan bersekutu atau teman sebagaimana terjemahan Kemenag.

Bachtiar Nasir melihat ada syi'ar-syiar tradisi keislaman yang sudah menjadi simbol Islam seperti tradisi takbir keliling telah dibatasi oleh Gubernur Ahok dan dia membandingkan tradisi tersebut dengan kegiatan Jakarta Festival Night yang diadakan oleh Gubernur Ahok dengan tuduhan bahwa Gubernur Ahok ingin meniadakan simbol-simbol Islam yang terdapat pada budaya keislaman di Jakarta. Padahal, Gubernur Ahok membatasi malam takbiran keliling untuk menghindari kemacetan di sepanjang jalan utama Jakarta sehingga kegiatan tersebut kendati hanya sekedar dibatasi namun tetap diartikan sebagai motif untuk

²⁶⁷ Dikutip dari video AQL Islamic Center yang merekam khotbah jum'at yang disampaikan oleh Bachtiar Nasir di Masjid al-Munawwarah, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Diakses pada 27 Agustus 2018.

meniadakan budaya keislaman. Hal inilah yang membawa Bachtiar Nasir berpendapat dalam khotbah-nya “*oke tidak macet, tapi akidahmu macet, pendidikan Islam-mu macet, syi’ar-syiar Islam macet, diganti takbiranmu dengan Jakarta Night Festival karena dia tidak faham apa itu syiar.*”²⁶⁸

Di akhir khotbah, Bachtiar Nashir menegaskan bahwa kalau memang pemimpin kafir tersebut telah dapat mengatasi permasalahan-permasalahan Ibu kota Jakarta seperti penanganan kemacetan dan banjir. Akan tetapi, dia sebenarnya justru akan membanjiri kemaksiatan dan investasi-investasi haram yang tidak memberikan keberkahan sedikitpun pada masyarakat Jakarta. Terlebih lagi, dia tidak dapat mengajak masyarakat Muslim Jakarta untuk masuk surga karena dia seorang kafir. Kepemimpinan kafir adalah penyakit kemusyrikan yang jauh lebih susah untuk disembuhkan dari pada penyakit korupsi.

Contoh lainnya adalah khotbah jum’at yang disampaikan oleh seorang penyanyi dangdut populer, H. Roma Irama. Khotbah jum’at dilakukan di Masjid Baitul Makmur, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada tanggal 10 Maret 2017. Beliau menyampaikan khotbahnya dengan tema “Islam sebagai agama rahmatan lil alamin bagi umat Islam dan sesama manusia, termasuk non-Muslim. Dalam hubungan dengan orang non-Muslim, H. Roma Irama menjelaskan bahwa umat Islam diperbolehkan untuk melakukan hubungan atau interaksi sosial dengan umat non-Muslim kecuali pada dua hal; yaitu mengawini atau menikahi orang-orang

²⁶⁸ Ibid.

non-Muslim dengan mengutip Surat al-Baqarah ayat 221 dan larangan memilih pemimpin dari non-Muslim dengan mengutip Surat al-Maidah ayat 51²⁶⁹.

Penggunaan khotbah Jum'at sebagai sarana penyebaran kampanye hitam dengan dalil-dalil agama di saat dan menjelang pelaksanaan PILKADA DKI Jakarta tidak dapat diketahui secara detail dalam bentuk jumlah, berapa kali para penceramah (khotib) telah menggunakan khotbah jum'atnya sebagai ajang untuk mengajak dan menyerukan para jemaah jum'at akan keharaman memilih pemimpin kafir dan sebaliknya kewajiban mereka dalam memilih pemimpin Muslim. Dalam pandangan Sumanto al-Qurtuby, penggunaan masjid-masjid di Jakarta, khususnya khotbah jum'at untuk media dalam berkampanye dan propaganda memenangkan salah satu pasangan calon. Bukan sampai di situ, para penceramah khotbah jum'at juga merendahkan dan memojokkan pasangan calon lainnya. Penggunaan tersebut sangat jelas untuk kepentingan politik praktis-pragmatis dalam mendukung pasangan calon tertentu²⁷⁰.

5. Tamasya al-Maidah

Ketika kasus tuduhan penistaan Ahok terhadap agama Islam menjadi populer, maka surat al-Maidah ayat 51 pun semakin menjadi komoditas dalam pemberian nama untuk suatu produk maupun untuk nama gerakan. Salah satunya adalah gerakan tamasya al-Maidah yang dipimpin oleh Ansufrri Idrus Sambo, salah satu simpatisan Aksi 212. Gerakan ini berawal dari gerakan ajakan dan kampanye simpatisan Aksi 212 di media sosial agar umat Muslim di Jakarta maupun di luar

²⁶⁹ <http://nadi.or.id/?p=3822> diakses pada 27 Agustus 2018.

²⁷⁰ Sumanto al-Qurtuby, *Manipulasi Agama dalam PILKADA Jakarta* dalam opini <https://www.dw.com/id/manipulasi-agama-dalam-pilkada-jakarta/a-38379477> diakses pada 28 Agustus 2018.

daerah Jakarta ikut mengawal dan mengawasi pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdekat dalam PILKADA DKI Jakarta 2017.

Program tamasya al-Maidah pada dasarnya adalah Aksi Bela Islam di mana masyarakat Islam (umat) di berbagai daerah diserukan untuk berdatangan secara ramai (bertamasya) ke Jakarta dalam mengawal penegakan Surat al-Maidah ayat 51 dengan cara mengawasi serta merekam segala peristiwa termasuk hasil perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh wilayah Jakarta dengan aplikasi yang sudah dipersiapkan oleh pengurus Tamasya al-Maidah yang disebut dengan aplikasi “tamasya al maidah”.

Para peserta Tamasya al-Maidah harus mengikuti tata cara yang disebarkan oleh panitia melalui media sosial (Instagram, Facebook, WhatsApp Group) seperti peserta diwajibkan membiayai dirinya sendiri, peserta harus mengunduh aplikasi “Tamasya al-maidah” dan di *google play store* dan mendaftar di aplikasi tersebut, selanjutnya peserta harus mengisi data TPS yang mau dituju dan tidak diperkenankan pindah lokasi TPS yang lain. Peserta pria diwajibkan menggunakan baju putih dan songkok hitam sementara perempuan diwajibkan mengenakan baju gamis dan jilbab warna gelap, kemudian peserta diharuskan menempelkan “stiker sobek” bertuliskan “saatnya umat memilih” yang dipasangkan di baju kemeja pria dan kerudung bagi peserta perempuan.

saatnya ummat memilih

TAMASYA AL MAIDAH

19 April 2017

Program TAMASYA AL MAIDAH ini pada dasarnya adalah AKSI BELA ISLAM

Ummat di luar Jakarta diserukan untuk datang ke TPS-TPS pilkada DKI Jakarta untuk mengawal penegakan QS Al Maidah 51

Aturan mainnya:

1. Peserta membiayai sendiri seluruh keperluan selama tamasya.
2. Peserta mulai sekarang sudah bisa mendaftar melalui aplikasi Tamasya Al Maidah di google play store
3. Setelah mendaftar peserta akan mengetahui harus pergi tamasya ke TPS yang mana. Dan pada tgl 19 April 2017 dilarang pindah ke lokasi TPS lain.
4. Peserta pria wajib mengenakan kemeja putih dan songkok hitam, sedang peserta perempuan mengenakan gamis dan jilbab warna gelap.
5. Pada kemeja dan jilbab wajib ditempelkan brevet (stiker sobek) atau disablon "saatnya ummat memilih" sebagaimana standar desain di poster ini.
6. Informasi lebih lanjut hubungi WA di bawah ini

Asma Dewi: 08128219260

Tetet Sito: 082122337880

Gimy: 085717464408

Gambar. 3.6 Flyer mobilisasi Tamasya al-Maidah di media sosial
Sumber. Dari instagram @vsdini

Gerakan tamasya al-Maidah di media sosial tersebar sepekan sebelum dilaksanakannya pemungutan suara (coblosan) PILKADA DKI Jakarta 2017 Putaran Kedua yang diadakan pada tanggal 19 April 2017. Harapan dari kegiatan ini adalah untuk menjaga serta mengawal proses pemungutan suara yang jujur dan adil serta mencegah kecurangan di Tempat Pemungutan Suara PILKADA DKI Jakarta 2017. Gerakan ini sebenarnya telah diinisiasi dan dimobilisasi oleh GNPF-MUI dengan alasan bahwa GNPF-MUI telah menerima sinyal adanya potensi

praktik kecurangan yang terjadi menjelang pencoblosan suara di TPS-TPS yang tersebar di Jakarta. Alasan lainnya adalah GNPF-MUI ingin mendorong pelaksanaan PILKADA DKI Jakarta 2017 Putaran Kedua berlangsung tertib dan damai dimulai dari sebelum pemilihan (pencoblosan) hingga pasca pemilihan²⁷¹.

Di balik alasan tersebut, terdapat *free rider* (pembonceng bebas) yang terselubung di mana gerakan Tamasya al-Maidah tersebut sebenarnya di dalam kegiatan pengawalan terhadap proses pemilihan di TPS-TPS sekitar Jakarta adalah untuk menegakkan Surat al-maidah ayat 51 dengan cara memenangkan calon gubernur Muslim. Klaim ini berdasarkan pada logika Aksi Bela Islam yang menyatakan bahwa negara mayoritas Muslim penduduknya jika dipimpin oleh non-Muslim maka negara berada dalam musibah besar.

6. Penolakan Shalat Jenazah bagi Muslim Pendukung Ahok

Komodifikasi agama yang terjadi di dalam PILKADA DKI Jakarta 2017 adalah adanya sejumlah tempat ibadah dari agama Islam yang membentangkan spanduk tentang penolakan shalat jenazah bagi Muslim pendukung Ahok dan adanya fatwa larangan menshalatkan jenazah pendukungnya yang dikeluarkan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) melalui surat Fatwa Nomor: 06/B-MAFATIHA/II/1438/2017 itu diberi judul "Sanksi Agama bagi Pendukung Penista Agama dan Pemilih Calon Pemimpin Non-Muslim.

²⁷¹ Wawancara dengan Kapitra Ampera (Advokat GNPF-MUI) dengan media kiblata.net. sumber <https://www.kiblata.net/2017/03/16/ini-alasan-program-tamasya-al-maidah-diluncurkan/> diakses pada 29 Agustus 2018.

a. Spanduk Penolakan Shalat Jenazah Pendukung Ahok

Tempat ibadah tersebut adakalanya masjid dan musala. Hampir rata-rata, tulisan spanduk menyebutkan bahwa masjid atau musala ini tidak menshalatkan jenazah bagi pendukung dan pembela penista agama. Dalam konteks PILKADA, penista agama yang dimaksudkannya adalah Gubernur Ahok yang dituduh melakukan penistaan agama dalam kunjungan dinas di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu yang juga menjadi salah satu calon Gubernur dari petahana di PILKADA DKI Jakarta 2017. Sedangkan, pendukung dan pembela penista agama lazim disebut dengan *Ahokers*.

Pemasangan spanduk penolakan shalat jenazah bagi Muslim pendukung Ahok tentu tidak dapat dipisahkan dengan para pengurus takmir masjid dan musala yang mendapatkan surat arahan dari para tokoh agama yang ada tergabung dalam GNPf-MUI. Mereka menganggap spanduk tersebut adalah bagian dari dakwah (disebut spanduk dakwah)²⁷². Dengan sengaja, spanduk terpasang di depan masjid dan musalah karena masih ingin melanjutkan mobilisasi masyarakat agar benar-benar mengikuti instruksi yang dikonsepsikan oleh GNPf-MUI.

Tidak tanggung-tanggung, penggunaan ayat sebagai komoditas untuk dasar legitimasi keberadaan spanduk-spanduk aksi penolakan shalat jenazah tersebut semakin komersial. Kali ini, ayat yang dimodifikasikan adalah tulisan terjemahan al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 84, "*Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) yang mati di antara mereka dan janganlah kamu*

²⁷² Informasi diambil dari hasil Wawancara dengan salah seorang pengurus takmir Masjid al Jihad atas nama Abu Hamzah. Wawancara dilakukan oleh media panjimas.com. sumber; <https://www.panjimas.com/news/2017/03/13/spanduk-tolak-shalatkan-jenazah-ahokers-dicopot-dan-hilang-misterius/> diakses pada 29 Agustus 2018.

berdiri untuk mendoakan di kuburannya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan di antara mereka mati dalam keadaan fasik”.



Sumber: www.Panjimas.com

Gambar 3.7 Spanduk Dakwah Penolakan Shalat Jenazah bagi Pendukung dan Pembela Penista Agama di Masjid at-Tawwab, Cakung Barat, Jakarta Timur

Selain spanduk dakwah, terdapat juga klaim dari pengurus takmir masjid yang menyatakan bahwa spanduk tersebut adalah spanduk tauhid. Sebuah spanduk yang menjadi identitas masjid (tempat ibadah Islam lainnya) dalam pemberian sikap atas masalah penistaan agama yang dianggapnya sebagai orang yang keluar dari ranah tauhid. Konsekuensinya, masjid tersebut menolak shalat jenazah bagi orang-orang yang dianggapnya keluar dari tauhid (akidah) lantaran mendukung dan membela orang yang menistakan agama.

Dalam proses PILKADA DKI Jakarta 2017, spanduk ini menjadi viral ketika pelaksanaan PILKADA sudah melewati Putaran Pertama. Ketika itu, terdapat seorang nenek yang bernama Hindun, warga Setiabudi Jakarta Selatan

meninggal dunia. Keluarga mending tidak dapat melakukan proses pengurusan jenazah termasuk menshalatinya dikarenakan tidak adanya pengurus masjid dan musala yang mau datang ke rumah untuk mengurus penshalatan jenazah almarhumah. Perbuatan ini dianggap sebagai sanksi sosial oleh masyarakat sekitar dikarenakan ibu Hindun di saat sakit terindikasi telah mencoblos Ahok di surat suara yang dibawakan oleh para panita TPS setempat ke rumahnya pada waktu pemilihan Putaran Pertama. Sanksi sosial tersebut mengintimidasi keluarga Ibu Hindun dengan sebutan pendukung penista agama bahkan sebutan kafir²⁷³. Berlanjut dari kejadian tersebut, ketika Ibu Hindun meninggal dunia, beberapa warga sekitar tidak berani membawa jenazah Ibu Hindun ke musala al-Mu'minin yang terdekat karena dipasang spanduk tauhid oleh pemuda dari Masjid al-Jihad sehingga salah satu ustadz dari musala tersebut datang ke rumah jenazah untuk melakukan shalat atas jenazah di dalam rumahnya dan berkoordinasi dengan pengurus Tempat Pemakaman Umum (TPU) Menteng Pulo²⁷⁴.

Berkaitan dengan kejadian tersebut, spanduk “tauhid” yang melarang masjid atau musala terdekat adalah Masjid al-Jihad, Jalan BB Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan. Tidak sampai di situ, spanduk “tauhid” juga banyak dipasang dengan mengatasnamakan jemaah masjid atau musala daerah tertentu. Seperti spanduk yang terpasang di Jalan Haji Sadikin, Pondok Pinang Jakarta Selatan yang dipasang di jalanan gang menuju musala dengan tulisan “Warga Sekitar Tidak Menshalatkan Jenazah Pendukung dan Pembela Penista Agama. Mari Dukung

²⁷³ Ali Thaufan DS and Dedi Sutiadi, “Partisipasi Politik Umat Islam Dalam Aksi Massa 212 Dan Implikasinya Terhadap Wajah Islam Indonesia,” *Ilmu Ushuluddin* 7, no. 2 (2020): 127–150.

²⁷⁴ <https://tirto.id/sengkarut-pilkada-dki-pada-jenazah-nenek-hindun-ckBb> diakses pada 29 Agustus 2018.

Gubernur Muslim”. Spanduk juga terpasang di Masjid al-Anwar dan Masjid Jami’ at-Tawab Cakung Barat, Jakarta Timur dengan tulisan “Masjid ini serta Seluruh Jema’ah Masyarakat Muslim yang Patuh dan Taat kepada Kitab Suci al-Qur’an Surat at-Taubah Ayat 84 tentang Orang Munafiq. Tidak akan Menshalatkan, Mentahlilkan, dan Membantu Pengurusan Jenazah Orang-orang Munafiq yang Membela dan Mendukung Penista al-Qur’an”.²⁷⁵



Sumber: www.panjimas.com

Gambar 3.8 Spanduk Tauhid Penolakan Shalat Jenazah bagi Pendukung dan Pembela Penista Agama di rumah sekitar Masjid al-Anwar Bangka II G, Jakarta.

Spanduk “tauhid” hadir sebagai media mobilisasi masyarakat Muslim di Jakarta dengan menampilkan simbol-simbol keagamaan seperti masjid, musala,

²⁷⁵ <https://kumparan.com/kumparannews/membandingkan-4-spanduk-tolak-salatkan-jenazah-pendukung-ahok/full> diakses pada tanggal 30 Agustus 2018.

ayat al-Qur'an, dan shalat jenazah. Simbol-simbol tersebut dilihat sebagai komoditas yang paling mudah untuk dipertukarkan kepada masyarakat Muslim Jakarta dengan pemberian stigma negatif kepada masyarakat yang mendukung Ahok dan sebaliknya pemberian dukungan suara kepada calon Gubernur yang diinginkan oleh kelompok GNPf-MUI.

Pasca surat al-Maidah ayat 51, kini mereka membolehkan sejumlah pihak yang berkuasa atas tempat-tempat ibadah untuk menggunakan al-Qur'an lagi sebagai komoditas baru dalam penyebaran ideologi keagamaan mereka kepada masyarakat. Penggunaan al-Qur'an tersebut tercerminkan dalam spanduk tauhid dengan mengutip Surat at-Taubah ayat 84 tentang larangan menshalahkan jenazahnya orang munafik. Warga Muslim Jakarta diasumsikan oleh mereka sebagai konsumen tetap atas materi-materi tentang keagamaan dan kepemimpinan yang telah disajikan oleh GNPf-MUI yang telah menganggap dirinya bagian dari kelas istimewa.

Perintah untuk memilih calon Gubernur yang Muslim di dalam tulisan spanduk tauhid mempunyai korelasi kuat dengan Risalah Istiqlal (18 September 2016) agar umat Islam DKI Jakarta hanya memilih calon gubernur Muslim saja. Risalah Istiqlal merupakan suatu kesepakatan sejumlah ulama dan tokoh masyarakat Jakarta sehingga masyarakat Muslim Jakarta apabila tidak mengindahkan dan mengikutinya maka konsekuensinya adalah keluar dari kesepakatan ulama. Pemahaman kesepakatan ulama di dalam Risalah Istiqlal tersebut dipersepsikan sebagai ijma' yang harus diikuti dan memiliki dasar yurisprudensial di dalam hukum Islam. Hal ini sangat berkaitan karena para aktor

GNPF-MUI terdiri dari orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai Pengawal Risalah Istiqlal (Perisai).

Secara agama, mereka memobilisasi pemahaman masyarakat tentang kepemimpinan dan penolakan terhadap orang non-Muslim. Sementara, secara politik, mereka memobilisasi pemahaman tentang keagamaan dan dalil-dalil untuk menjauhi orang yang terlibat dengan non-Muslim. Ini berarti dapat dikatakan sebagai ideologisasi komoditas untuk konteks pertama dan komodifikasi ideologi keagamaan untuk konteks yang kedua. Dua hal ini kemudian mempengaruhi persepsi publik Muslim tentang realitas yang dikonstruksi oleh GNPF-MUI melalui penggunaan simbol keagamaan sebagai komoditas yang dipertukarkan dengan keharusan pilihan suara untuk calon Gubernur yang mereka inginkan.

b. Fatwa DDII: Larangan Shalat Jenazah Pendukung Ahok

Sempat menggegerkan jagat dunia maya, lantaran dikeluarkannya Fatwa larangan untuk menshalatkan jenazah Muslim yang mendukung Ahok di PILKADA DKI Jakarta 2017. Fatwa ini dikeluarkan oleh Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) dengan surat Fatwa Nomor: 06/B-MAFATIHA/II/1438/2017 dengan judul besarnya “Sanksi Agama bagi Pendukung Penista Agama dan Pemilih Calon Pemimpin Non-Muslim” yang ditandatangani dan disahkan langsung oleh Ketua Pusat Kajian DDII Zain an-Najah dan Sekretaris Pusat Kajian DDII H. Syamsul Bahri Ismail pada tanggal 25 Februari 2017 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta yang bertepatan juga dengan Hari Haflah Setengah Abad Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII).

Pengeluaran surat fatwa DDII tersebut bersamaan dengan maraknya spanduk-spanduk pelarangan shalat jenazah kepada pendukung Ahok di sejumlah masjid dan musala di Jakarta. Ketua Pusat Kajian DDII, Zain an-Najah memberikan alasan atas pengeluaran surat Fatwa tersebut bahwa dilarangnya shalat jenazah kepada pendukung Ahok di mana Ahok sendiri adalah penista agama sebagai pemberian sanksi hukum agama dengan cara memberikan pembelajaran sosial dan efek jera atas tanggungjawab pelaku perbuatan penistaan agama tersebut. Selain itu, fatwa ini bertujuan untuk memberikan kemaslahatan umum, rasa keadilan dan realisasi ketaatan terhadap syariat agama Islam.²⁷⁶

Secara epistemik, Dewan Dakwah Islam Indonesia menganggap masyarakat Muslim yang mendukung Ahok yang dianggapnya sebagai penista agama adalah termasuk golongan orang munafik. Kemunafikan mempunyai kesamaan struktur penghancur agama dan negara di bawah posisi kekufuran dan kemusyrikan yang menjadi musuh utama dalam agama Islam. Dengan dasar pengetahuan agama, DDII bermaksud menyampaikan temuan hukum agama yang mendasari pengeluaran fatwa larangan menshalatkan jenazah pendukung Ahok tersebut. Mengutip surat at-Taubah ayat 80 dan 84 yang menjelaskan tentang tertolaknya pertobatan orang-orang munafik dan larangan untuk melakukan shalat jenazah serta mendoakan jenazah mereka.

Fatwa tersebut memberikan pernyataan keputusan yang terangkum dalam lima putusan berikut:

²⁷⁶ Bilal, *Dewan Dakwah Rilis Fatwa Larangan Shalatkan Jenazah bagi Pendukung Ahok*, terbit 27 Februari 2017. Sumber: <https://www.voa-islam.com/read/aqidah/2017/02/27/49136/dewan-dakwah-rilis-fatwa-larangan-shalatkan-jenazah-bagi-pendukung-ahok/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2018.

- Orang yang dengan sadar memilih pemimpin dari non-Muslim dalam suatu pemilihan (baik PILPRES, PILEG, PILKADA, PILKADES dan pemilihan di semua tingkatan) adalah termasuk golongan orang munafi yang nyata (*nifāq jahran/nifāq ‘amālī*).
- Jenazah orang munafik nyata tidak boleh dishalatkan oleh jema’ah yang tahu kemunafikannya. Adapun kalau tidak tahu, maka boleh menshalatkannya
- Sebagai upaya pembelajaran dan efek jera, DDII mendorong gerakan masjid-masjid di tanah air untuk tidak menshalatkan jenazah bagi para pendukung penista agama secara khusus dan para pemilih pasangan calon pemimpin non-Muslim secara umum.
- Menyerukan segenap kaum Muslimin agar tidak memperdulikan pendapat, pemikiran dan seruan yang menyimpang dan bertentangan dengan al-Qur’an dan as-Sunnah.

Kendati demikian, pengeluaran fatwa haram bagi umat Islam untuk menshalatkan dan mendoakan jenazah pendukung Ahok tersebut tidak luput dari tujuan-tujuan essensial-politis. *Pertama*, pengeluaran fatwa tersebut ditujukan untuk memobilisasi umat Muslimin Jakarta untuk tidak memberikan sanksi sosial bagi para pendukung Ahok yang Muslim dengan penolakan shalat jenazah bagi mereka lantaran telah memilih Ahok (mencoblosnya) di PILKADA DKI Jakarta 2017. Bahkan mobilisasi umat dengan fatwa tersebut mengeneralisasikan untuk seluruh kontestasi pemilihan di Indonesia. *Kedua*, seruan atas penolakan shalat jenazah tersebut menunjukkan secara eksplisit adanya penerapan mobilisasi

tindakan kolektif untuk kelompok kepentingan politik tertentu dengan dalih jihad politik. Bukan untuk kelompok kepentingan filantropi agama yang benar-benar menginginkan untuk kemaslahatan umat. *Ketiga*, DDII menyamakan antara perilaku politik dengan perilaku agama individual di mana para pemilih Muslim diharuskan mempertimbangkan agama individual tertentu dari pada perilaku politiknya. Tanpa melihat perilaku politiknya tepat atau tidak, perilaku individu yang berbeda agama lebih mempunyai *cost* (kerugian) dari pada *benefit*-nya (keuntungan). *Keempat*, pengorganisasian masjid-masjid di Indonesia untuk mengikuti fatwa haram shalat jenazah bagi pendukung penista agama tersebut sebagai manifestasi dari pengorganisasian pengaruh kepentingan yang bersifat politis. Kelompok kepentingan ini menganggap dirinya sebagai “kelas istimewa” karena penguasaannya atas pengetahuan agama sehingga secara legitimate, dapat mendorong serta memobilisasi masjid dan pengurusnya untuk ikut terlibat dalam aksi-aksi yang dikonstruksi dan dibentuknya. *Kelima*, sebuah fatwa tidak dapat keluar dari pelibatan orang banyak (kolektif) atau dapat dikatakan kalau fatwa hukum itu adalah sebuah barang publik. Ini berarti ia sangat mungkin dimasuki oleh free ride (penumpang gratis) dari kelompok kepentingan yang besar. Tentunya, kelompok kepentingan besar tersebut mempunyai korelasi dengan pelaksanaan PILKADA DKI Jakarta 2017.

C. Bentuk Komodifikasi Agama Tim Pemenangan Pasangan Calon dalam PILKADA DKI Jakarta 2017

1. Strategi Marketing Politik Tim Pemenangan Pasangan Calon

Marketing adalah proses dan aktivitas yang dilakukan oleh seperangkat institusi untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan dan menukar tawaran-tawaran berupa barang (*products*) atau jasa layanan publik (*public services*) yang mempunyai nilai bagi para *customers* (*voters/non-voters*), klien, rekanan maupun masyarakat secara umum. Di dalam marketing politik, *positioning* dan manajemen mempertemukan tujuan dari tawaran-tawaran yang bersifat *tangible* dan *intangible*. Tawaran *tangible* dapat berupa program dan aktivitas politik, sedangkan tawaran *intangible* seperti layanan (*services*), budaya, nilai dan emosi²⁷⁷.

Pasca hasil perolehan suara Putaran Pertama PILKADA DKI Jakarta 2017, masing-masing tim pemenangan calon baik dari kubu Ahok-Djarot dan Anies-Sandi sama-sama mempersiapkan agenda kampanye dan strategi marketing politik guna mendapatkan perolehan suara yang jauh lebih banyak lagi di Putaran Kedua ketimbang apa yang mereka peroleh dari Putaran Pertama. Namun, dengan adanya keterlibatan calon Gubernur Petahana, Ahok dalam kasus penistaan agama yang dituduhkannya pada waktu kunjungan dinas di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, tim pemenangan Anies-Sandi yang diketuai oleh Mardani Ali Sera (PKS) sedikit diuntungkan dengan situasi tersebut karena diprediksikan suara

²⁷⁷ Alessandro Bigi. *Political Marketing: Understanding and Managing Stance and Brand Positioning. Doctoral Thesis in Industrial Marketing*. KTH. Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden. 2017. 107.

mengambang dari masyarakat Muslim Jakarta (*swing voters*) akan beralih kepada pilihan Anies-Sandi, baik mereka di Putaran Pertama memilih Agus-Sylvi, namun kalah maupun mereka yang memilih Ahok-Djarot, namun berpindah karena tertarik pada isu penistaan agama.

Meskipun demikian, tim pemenangan Ahok-Djarot tetap mengaplikasikan strategi kampanye sebagai marketing politik dengan metode *canvassing*. *Canvassing* merupakan sebuah metode promosi (pemasaran) sekaligus memperkenalkan sebuah produk yang ada di bidang manajemen marketing. *Canvassing* dianggap sebagai metode yang paling kuat bagi seorang atau kelompok *canvasser* (aktor *canvassing*) dalam mempengaruhi sikap dan perilaku para pemilih (klien) karena dilakukan dengan cara *door to door*.²⁷⁸

Pihak tim pemenangan Ahok-Djarot mula-mula melakukan pendataan terhadap sejumlah masyarakat pemilih (klien) yang sudah menjadi pemilih tetapnya dan pemilih yang ada di posisi mengambang (*swing voters*). Terutama masyarakat pemilih dari pendukung Agus-Sylvi yang kalah di Putaran Pertama khususnya di Jakarta bagian Selatan dan Timur. Relawan dan Tim pemenangan di satu sisi juga menjadi seorang *Canvasser* di mana dia berperan penting dalam memasarkan program-program dan kebijakan publik yang sudah terjadi sehingga muncul citra politik bahwa Ahok-Djarot adalah pasangan pemimpin Jakarta yang sudah terbukti, teruji dan tegas dalam kepemimpinan dan manajemen

²⁷⁸ Betsy Sinclair, Margaret McConnell, and Melissa R. Michelson, "Local Canvassing: The Efficacy of Grassroots Voter Mobilization," *Political Communication* 30, no. 1 (2013): 42–57; Yosef Bhatti et al., "Is Door-to-Door Canvassing Effective in Europe? Evidence from a Meta-Study across Six European Countries," *British Journal of Political Science* 49, no. 1 (2019): 279–290.

pemerintahan, transparan dalam bekerja dan program serta konsisten dalam pemberantasan korupsi²⁷⁹. Selain memasarkan, *canvasser* di Tim pemenangan pasangan calon Ahok-Djarot melakukan proses pengenalan atas program-program baru yang menjadi janji politik Ahok-Djarot jika nanti terpilih menjadi seorang Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Tujuan dari *canvassing* ini adalah untuk memberikan kekuatan yang benar-benar *confident* terhadap para pemilih Ahok-Djarot, sekaligus dapat merespon semua isu yang tersebar ke masyarakat tentang hoax, fitnah atau black campaign yang tertuju kepada Pasangan Calon Ahok-Djarot khususnya masalah tuduhan penistaan agama di Kepulauan Seribu.

Di lain pihak, Tim pemenangan pasangan calon Anies-Sandi melakukan kampanye politik dengan metode *focusing on grassroots*. Wilayah Jakarta yang paling dijadikan titik fokus dalam kampanye *grassroot* ini adalah Jakarta Timur. Alasannya adalah Jakarta Timur merupakan wilayah penyumbang suara tertinggi kepada Pasangan Calon Agus-Sylvi pada Putaran Pertama yang mencapai 19,42 % dari pada wilayah Jakarta Pusat, Selatan, Barat dan Utara. Kendatipun Jakarta Timur suara Anies-Sandi pada Putaran Pertama juga lumayan tinggi yaitu 41,76% yang berarti masih menjadi wilayah basis massa pendukung Anies-Sandi, akan tetapi wilayah ini dianggap sebagai wilayah *swing voters* yang juga diperebutkan oleh Ahok-Djarot.²⁸⁰

²⁷⁹ <https://tirto.id/timses-ahok-targetkan-rebut-separuh-lebih-suara-agus-sylvi-ckEA> diakses pada 15 Juni 2018.

²⁸⁰ <https://tirto.id/siasat-ahok-djarot-dan-anies-sandi-berkampanye-putaran-dua-clBs> diakses pada 15 Juni 2018.

Grassroot adalah sebuah istilah yang mempunyai arti sebenarnya “akar rumput”. Istilah ini untuk menandai masyarakat pemilih dari tingkat bawah. *Grassroot* (akar rumput) diperlukan untuk membangun jaringan relawan untuk menangani kegiatan sehari-hari dalam menjalankan kampanye. Upaya *grassroot* terjalin menjadi satu saluran informasi yang menyampaikan pesan kandidat dari organisasi partai atau tim pemenangan kepada pemilih dan sekaligus menjadi umpan balik (*feedback*) dari pemilih kepada kandidat. Tujuan lainnya adalah untuk tersebarinya pesan kandidat serta upaya membangun dan meningkatkan hubungan dengan para pemilih dan para *brokers* dalam satu kekuatan politik²⁸¹.

Mardani Ali Sera (PKS) sebagai ketua tim pemenangan Anies-Sandi melakukan *focusing on grassroot* selama satu setengah bulan dengan target 40 persen suara pemilih yang baru. Selain itu, Anies-Sandi memperkuat pasukan di darat (*home to home*), di udara (*social media*) dan operasi politik (gerilya). Penguatan ini penting untuk mengantisipasi fitnah, *hoax*, maupun *black campaign*, yang dikhawatirkan makin marak di putaran kedua²⁸². Terlebih lagi, pasangan Anies-Sandi lebih diuntungkan dengan masalah keadaan politik ketimbang Pasangan Calon Ahok-Djarot yang terjerat dalam kasus tuduhan penistaan agama.

Dari sekian banyaknya program kampanye yang ditawarkan oleh kedua pasangan calon, terdapat program yang dapat dikatakan sebagai strategi primer

²⁸¹ Maik Bohne, Alicia Folar Prevost, and James A. Thurber, *Handbook of Political Management*, ed. Dennis W Johnson, *Routledge Handbook of Political Management* (London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2009). 75.

²⁸² <https://news.detik.com/berita/d-3425183/strategi-ahok-vs-anies-di-putaran-dua> diakses pada 19 Juni 2018.

dalam usaha menarik simpati masyarakat Jakarta (publik pemilih) yaitu program pasangan Ahok-Djarot seperti “*People-Centred Development*” di antaranya mengutamakan jaminan kesehatan, jaminan pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP), jaminan perumahan rakyat (rumah susun), transportasi murah, jaminan sembilan bahan pokok dan pinjaman modal usaha dengan sistem bagi hasil 80% (warga) dan 20% (pemerintah).²⁸³ Selanjutnya, Program pasangan Anies-Sandiaga yang dikenal dengan “Oke Oke”, “Naturalisasi Sungai, “Tolak Reklamasi” dan “DP 0 Rupiah” untuk perumahan rakyat.

Ironisnya, mayoritas masyarakat pemilih lebih melihat aspek primordialisme agama dalam politik dari pada program-program unggulannya. Pasangan Ahok-Djarot yang notabene adalah calon petahana yang diprediksikan akan menang, menuai segala kritikan dan cemoohan dari masyarakat karena Ahok terlibat dalam kasus penistaan agama yang dituduhkan oleh masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai umat Islam ketika Ahok memberikan ceramah kunjungan kerja di Pulau Pramuka Kabupaten Kepulauan Seribu pada tanggal 6 September 2016 dengan menyinggung adanya lawan politiknya menggunakan ayat 51 Surat al-Maidah sebagai ayat untuk menolak pemimpin dari non-Muslim. Keadaan primordial ini berlanjut hingga pada saat pencoblosan Putaran Kedua yang secara umum memberikan dampak yang luar biasa terhadap preferensi pemilih dari masyarakat Jakarta khususnya alasan agama.

²⁸³ <https://pilkada.tempo.co/read/833574/jelang-debat-kandidat-ahok-djarot-unggulkan-program-ini/full&view=ok> diakses pada 05 Juni 2018.

Unggul karena faktor identitas, pasangan calon Anies-Sandi dan tim pemenangannya mempunyai *positioning* bagus yang dapat mempengaruhi pesona *branding* yang bagus pula. Menurut Kotler, *brand* adalah sebuah nama, terma, simbol, tanda, desain atau kombinasi dari semuanya itu yang dapat mengidentifikasi sekaligus membedakan produk dan layanan (*services*) seorang penjual dengan para kompetitornya²⁸⁴. Strategi tersendiri untuk melakukan kampanye dengan model “bergerak dengan senyap”. Bergerak dengan senyap merupakan istilah strategi marketing politik yang menggabungkan serangan darat dengan operasi politik yang populer dengan istilah “bergerilya” hingga ke ranah elektoral yang paling bawah. Simpatisan (relawan) dan juru kampanye dari tim pemenangan Anies-Sandi setidaknya mempunyai emosi dan kultur politik yang cenderung bersifat spartan di mana menjelang tiga hari waktu coblosan, mereka melakukan ronda yang di setiap wilayah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan mendatangi satu persatu rumah (*door-to-door*) warga masyarakat DKI Jakarta. Tim pemenangan Anies-Sandi menyebutnya sebagai Relawan Penggerak yang tersebar di seluruh TPS di DKI Jakarta, di mana 1 TPS dengan jumlah 10 orang Relawan Penggerak yang juga ternyata didominasi oleh kelompok ibu-ibu dengan perbandingan delapan banding dua (8 wanita : 2 laki-laki).

Dari segi keanggotaan relawan, Relawan Penggerak adalah mayoritas alumni peserta Aksi Bela Islam 212 di MONAS Jakarta. Di antara mereka adalah komunitas yang menamakan dirinya sebagai komunitas “Tamasya al-Maidah” yang juga mempunyai program untuk melakukan gerilya dari TPS satu ke TPS

²⁸⁴ P. Kotler, *Marketing Management*. (New Jersey: Prentice Hall, 2003).

lainnya untuk menjaga dan mengawasi jalannya proses pencoblosan di PILKADA DKI Jakarta 2017 Putaran Kedua.

Dengan serangan darat dan operasi politik (bergerak dengan senyap), mereka berusaha untuk memasarkan produk kebijakan politik dari pasangan Anies-Sandi apabila mereka memenangkan PILKADA seperti UMKM yang disebut dengan gerakan OK-OC, pemberian fasilitas budaya keagamaan di sejumlah tempat umum di Jakarta, DP 0 Rupiah untuk perumahan rakyat, naturalisasi sungai dan lain sebagainya. Selain itu juga, mereka mengkampanyekan pandangan-pandangan keagamaan dari para tokoh GNPF-MUI (*religious services*) mulai dari pandangan tentang larangan kepemimpinan DKI Jakarta dari warga negara yang beragama selain Islam (non-Muslim) hingga pandangan kebangkitan ekonomi Indonesia seiring dengan kebangkitan umat Islam yang tergabung di sejumlah Aksi Bela Islam di Jakarta dan di daerah-daerah lainnya. Nampaknya, tawaran layanan berjangka-panjang di sektor ekonomi inilah (*long-term services*) dalam watak *market* dianggap yang paling realistis bagi para pemilih dari pada aktivitas politik yang terkadang tidak sesuai dengan kenyataannya.

2. Komodifikasi Agama dalam Marketing Politik Tim Pemenangan

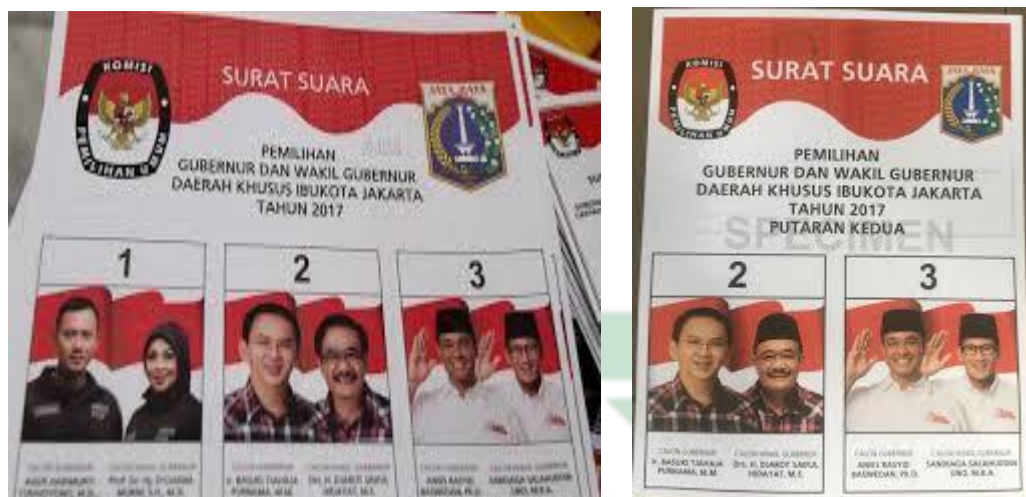
Anies-Sandi

Agama menjadi sangat komoditif dalam Putaran Kedua PILKADA DKI Jakarta 2017. Hal ini setidaknya terindikasi dari adanya produk “Sabun al-Maidah” dalam kegiatan komunitas OK-OC, maraknya spanduk tauhid di masjid dan musala, banyaknya *flyer* haramnya pemimpin kafir (baca; non-Muslim) di

media sosial, majlis taklim dan khutbah jum'at dengan jelas mengarahkan pemimpin yang ideal hanyalah dari pemimpin Muslim, gerakan shalat subuh berjemaah, gerakan Aksi Bela Islam dan tabligh akbar bertajuk politik Islam di mana semua tindakan-tindakan ini dimobilisasi untuk menolak keberadaan Ahok di dalam pemerintahan serta memarjinalisasi siapa pun orang yang membela dan mendukungnya. Selain itu, penggunaan ayat al-Qur'an seperti surat al-Maidah ayat 51 tentang haramnya memilih pemimpin kafir, surat an-Nisa ayat 138-139 tentang memilih pemimpin kafir adalah orang munafik dan surat at-Taubah ayat 84 tentang haramnya menshalatkan jenazah orang munafik.

Ketua tim pemenangan Anies-Sandi, Mardani Ali Sera (PKS) melihat situasi kasus penistaan agama dan Aksi Bela Islam yang terjadi di tengah-tengah PILKADA DKI Jakarta 2017 sebagai isu yang sangat komersial sehingga dapat dimanfaatkan untuk memenangkan pasangan calon Anies-Sandi di Putaran Kedua. Hal ini cukup beralasan dikarenakan Mardani Ali Sera meminta foto pasangan calon Anies-Sandi agar berpeci hitam yang tampil di dalam surat suara baik di Putaran Pertama maupun Kedua. Walaupun, Djarot yang berpasangan dengan Ahok juga mengenakan peci hitam di saat Putaran Kedua. Tetapi, *image* pasangan Anies-Sandi sudah terpatri sejak Putaran Pertama. Tidak dapat dipungkiri, bahwa peci hitam menjadi sebuah simbol pakaian yang identik dengan keislaman dan kesalehan seseorang. Cerminan *image* seorang Muslim adalah sesuatu yang sangat relevan dengan komersialisasi isu penistaan agama dan Aksi Bela Islam yang sedang menguat. Kendati penggunaan peci hitam dianggap tindakan yang biasa, namun efek suara yang diperoleh oleh pasangan Anies-Sandi juga luar biasa yang

disebabkan oleh adanya keterkaitan antara isu penistaan agama, Aksi Bela Islam dan marketing politik dengan simbol-simbol Islam yang digunakan.



Sumber: www.kumparan.com

Gambar. 3.9 Surat Suara PILKADA DKI Jakarta 2017 Putaran Pertama dan Kedua

Apa yang disampaikan oleh Mardani Ali Sera sebagai ketua tim pemenangan Anies-Sandi juga diamini oleh konsultan politik-nya, Eep Saefulloh Fattah. Salah seorang konsultan politik dari PolMark yang mampu mengantarkan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama memenangi kontestasi politik di PILKADA DKI Jakarta 2012 dan saat PILKADA DKI Jakarta 2017 mengantarkan Anies-Sandi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Menurutnya, PILKADA DKI Jakarta mempunyai tiga babak strategi dalam pemenangan pasangan calon. Tiga babak strategi tersebut adalah babak putaran satu sebelum isu al-Maidah (babak pertama) dalam kurun waktu akhir September sampai pertengahan November, babak setelah isu al-Maidah (babak kedua) dengan waktu pertengahan November sampai 15 Februari 2017 dan babak Putaran Kedua (babak ketiga) mulai dari 15 Februari 2017 (hari pemilihan Putaran Pertama) sampai dengan 19 April 2017 (hari pemilihan Putaran Kedua).

Tabel 3.3 Tanggal Peristiwa Aksi Bela Islam dan Segmentasi Babak Marketing Politik

NO	Tanggal Peristiwa	Aksi Gerakan	Segmentasi Babak
1.	14 Oktober 2016	Aksi Bela Islam I	Babak Pertama
2.	4 November 2016	Aksi Bela Islam II (411)	
3.	2 Desember 2016	Aksi Bela Islam III (212)	Babak Kedua
4.	11 Februari 2017	Aksi Bela Islam IV (112)	
5.	15 Februari 2017	Coblosan Putaran I	
6.	21 Februari 2017	Aksi Bela Islam V (212 Jilid 2)	Babak Ketiga
7.	31 Maret 2017	Aksi Bela Islam VI (313)	
8.	19 April 2017	Coblosan Putaran II	
9.	05 Mei 2017	Aksi Bela Islam VII	Pembacaan Vonis Ahok

Data diolah peneliti dari berbagai sumber.

Perubahan foto di dalam surat suara pada Putaran Pertama dari foto berlatar belakang dengan warna biru di mana partai pengusung Anies-Sandi tidak ada yang beridentitas biru, dan berlawanan dengan partai pengusung Agus-Sylvi, sehingga ketika babak kedua sudah memasuki fase pembentukannya dan secara kebetulan foto surat suara Agus dan Djarot sebagai muslim namun tidak memakai peci sebagai simbol identitas Muslim, maka foto surat suara Anies-Sandi dimodifikasi kembali dengan memakai peci, baju putih, latar belakang foto merah serta kedua figur calon bersama-sama mengangkat kedua tangan yang sejajar dengan posisi kepala untuk menunjukkan “salam sapa” bagi setiap orang yang melihatnya.²⁸⁵

²⁸⁵ Eep Saefullah Fattah, *wawancara*, Jakarta, 11 Juli 2017. Diambil dari hasil wawancara dengan Zen RS dan Windu Jusuf di <https://tirto.id/saya-tidak-mengkapitalisasi-sentimen-sara-cso6> diakses pada 30 Agustus 2018.

Komodifikasi simbol Islam yang bertepatan dengan menguatnya isu al-Maidah menyebabkan konfigurasi politik yang terpusat pada kontestasi simbol dalam PILKADA DKI Jakarta. Pada satu sisi, GNPF-MUI memobilisasi isu al-Maidah harus ditegakkan dan dikawal sampai benar-benar pemimpin non-Muslim tersingkirkan dalam proses PILKADA. Pada sisi yang lain, tim pemenangan melakukan strategi-strategi jitu dalam marketing politik. Tim pemenangan Anies-Sandi melihat peta elektoral yang terbagi dalam 30%, 40% dan 30%. Terdapat 30% yang sudah menjatuhkan pilihannya kepada Ahok-Djarot. Namun, terdapat pula 30% yang menolak Ahok-Djarot karena banyak faktor dan bukan agama sebagai satu-satunya faktor (9,7% menurut Exitpoll). Akan tetapi ada juga karena cara komunikasi yang dianggap terlalu arogan, karena pengusuran, karena isu reklamasi dan lapangan pekerjaan. Sementara 40% adalah representasi calon pemilih yang ada di posisi tengah-tengah. Dari sini, tim pemenangan Anies-Sandi melihat sebagai celah untuk dapat menambah jumlah suara dengan cara berkampanye sesuai yang diinginkan oleh para calon pemilih 40% tersebut seperti kampanye dalam lapangan pekerjaan, biaya pendidikan, penyediaan perumahan rakyat, hingga model perekonomian dengan label OK-OC.

Dengan demikian, tim pemenangan Anies-Sandi hanya fokus kepada 40% calon pemilih yang dianggap sebagai sasaran mengambang (*swing voters*). Sebagaimana yang disampaikan oleh Eep Saefullah bahwa “*yang 40 ini mengambilnya bukan lewat takbir. Lewat jalan menengah. Mereka kelas menengah, berpendidikan, anak muda, anak millennial dengan segala kemandiriannya, netizen, orang-orang yang sangat pandai bergaul dengan media*

sosial”²⁸⁶. Dari pernyataan tersebut, peneliti melihat adanya upaya menggaet selebriti yang juga penggiat media sosial seperti Rafli Ahmad-Nagita Slavina, Pandji Pragiwaksono, Kartika Putri, dan Ahmad Dani.

Adapun terhadap calon pemilih 30% orang yang menolak Ahok, tim pemenangan Anies-Sandi tidak begitu melihatnya sebagai kantong suara yang harus diupayakan dengan strategi-strategi jitu lagi. Hal ini dikarenakan mereka sudah dapat dipastikan menolak Ahok-Djarot dengan segala alasannya. Sebelum memasuki Putaran Pertama, Anies-Sandi seringkali melakukan kunjungan silaturahmi kepada para tokoh agama Islam. Strategi ini digunakan untuk dapat merebut simpati mereka sebelum pasangan calon Agus-Sylvi masuk dengan cara yang sama. Strategi ini cukup beralasan karena isu al-Maidah sangat menguntungkan bagi para calon Gubernur yang Muslim untuk menampilkan pendekatan-pendekatan Islam. Silaturahmi kepada tokoh agama Islam dan ulama adalah simbol dari pendekatan itu.

Bentuk silaturahmi Anies-Sandi dengan tokoh agama Islam dan ulama, setidaknya peneliti menemukan dua bentuk. Bentuk pertama adalah silaturahmi langsung di mana Anies-Sandi secara aktif mendatangi langsung kepada tokoh agama dan ulama atau sebaliknya tokoh agama atau ulama yang mendatangi Anies-Sandi. Bentuk kedua adalah silaturahmi tidak langsung, di mana silaturahmi ini kebanyakan diadakan oleh GNPF-MUI dalam suatu acara atau kegiatan tertentu yang mengundang Anies-Sandi dan tokoh-tokoh agama atau ulama baik untuk sekedar sebagai tamu undangan maupun narasumber.

²⁸⁶ Ibid.

Contoh bentuk silaturahmi langsung adalah pertemuan silaturahmi Anies-Sandi dengan Forum Ulama dan Habaib (FUHAB) yang terdiri dari KH. Syukron Makmun, dan KH. Abdul Rasyid Abdullah Syafi'I (23 Februari 2017), silaturahmi Pengurus NU se-DKI ke rumah Anies Baswedan (24 Februari 2017) seperti KH. Beky Mardani (PWNNU DKI Jakarta), KH. Ali Mahfudz (PCNU Jakarta Utara), KH. Farurozi (PCNU Jakarta Barat), KH. Fathonah (PCNU Jakarta Timur), KH. A. Natsir (PCNU Jakarta Pusat) dan KH. Abdur Razak (PCNU Jakarta Selatan). Termasuk kunjungan silaturahmi Anies-Sandi kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di kantor PBNU Jakarta Pusat (14 Maret 2017). Selain itu, Anies-Sandi juga melakukan silaturahmi ke Pimpinan Pengurus Muhammadiyah DKI Jakarta (6 Februari 2017) dan silaturahmi dengan sejumlah ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) di kantor MUI Jalan Menteng Jakarta Pusat (16 April 2017). Sebelumnya, Anies Baswedan mendatangi markas besar FPI di Petamburan Jakarta Pusat untuk memenuhi undangan silaturahmi dengan Rizieq Shihab (1 Januari 2017).

Bentuk silaturahmi tidak langsung seperti Anies Baswedan diundang oleh GNPF-MUI pada acara Tabligh Akbar Politik Islam dengan tema "Memilih Pemimpin Muslim" di Masjid al-Azhar, Jakarta Selatan (15 Januari 2017) bersama tamu undangan lainnya seperti Amien Rais, Hamdan Zoelva, Sylviana Murni, Bachtiar Nasir (ketua GNPF-MUI) dan Tengku Zulkarnain (Wakil Sekjen MUI). Acara silaturahmi lain bernama Aksi 112 yang dibalut dengan agenda gerakan shalat subuh berjamaah yang juga mengangkat tema "Dzikir dan Tausiyah" di Masjid Istiqlal Jakarta (11 Februari 2017) yang dihadiri oleh Anies Baswedan-

Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono, Hidayat Nur Wahid, Hatta Radjasa dan Rizieq Shihab. Acara ini sekalipun bertemakan dzikir dan tausiyah tetapi mayoritas isi tausiyahnya adalah kewajiban memilih calon Gubernur Muslim. Sebelumnya, dalam bentuk aksi yang sama yaitu shalat subuh berjamaah juga dilakukan oleh GNPf-MUI yang mengundang Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Masjid Sunda Kelapa pada tanggal 12 Desember 2016 atau yang dikenal dengan aksi 1212.

Gerakan shalat subuh berjamaah di dalam Masjid memberikan peluang besar yang menguntungkan bagi tim pemenangan Anies-Sandi yang telah menyiapkan Anies-Sandi sebagai pasangan sosok pemimpin yang paling diinginkan oleh GNPf-MUI dan komunitasnya dari pada pasangan calon Muslim lainnya seperti Agus-Sylvi. Tim pemenangan Anies-Sandi telah mengkonstruksi pribadi Anies-Sandi sebagai pemimpin yang bercitrakan Muslim, saleh, dan santun di mana ketiga hal tersebut mungkin dapat dikatakan sebagai indikator yang kontradiktif dengan gubernur Ahok yang dicitrakan dengan pemimpin non-Muslim, kasar dan arogan. Kesantunan Anies-Sandi inilah yang menjadi distingsi dalam gaya retorika dan gaya bersosial dalam kepemimpinan dengan Agus-Sylvi yang dicirikan dengan tegas namun kaku dalam beretorika dan bersosial di antara masyarakat.

Di samping itu, Anies Baswedan dalam ceramahnya pasca mengikuti shalat subuh berjamaah di Masjid Sunda Kelapa (12 Desember 2016) yang bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi, dia mengatakan bahwa gerakan shalat subuh berjamaah terjadi karena adanya spirit Aksi Bela Islam 212 yang dirasakan oleh

umat Islam dalam menuntut keadilan di Indonesia²⁸⁷. Apa yang disampaikan tentu berkaitan erat dengan masalah hukum yang sedang dihadapi oleh kompetitornya dalam PILKADA DKI Jakarta 2017 yaitu Gubernur Ahok dan segala Aksi Bela Islam yang terjadi dalam waktu yang berdekatan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, komodifikasi masjid untuk tujuan politik juga terlihat dimanfaatkan oleh tim pemenangan Anies-Sandi untuk meningkatkan elektabilitas politik pasangan calon Anies-Sandi dengan adanya GNPF-MUI yang sudah melakukan proses mobilisasi jema'ah masjid untuk menolak kepemimpinan dari orang non-Muslim melalui gerakan shalat subuh berjemaah dan pengajian tabligh akbar tentang kepemimpinan non-Muslim. Konsultan marketing politik Anies-Sandi, Eep Saepulloh pernah diundang oleh para aktivis GNPF-MUI di Masjid al-Azhar Jakarta Selatan untuk memberikan ceramah pada bulan Agustus 2016. Di dalam ceramahnya, Eep Saepulloh menjelaskan tentang bagaimana umat Islam dapat berpartisipasi penuh dalam kontestasi politik di PILKADA DKI Jakarta 2017 karena melihat bagaimana sebagian kelompok dari umat Islam Jakarta (FPI, GMJ, dan MPJ) pada waktu itu mempunyai hubungan tidak baik dengan gubernur Ahok sehingga punya rencana untuk bagaimana sebisa mungkin dapat menjegal Ahok mulai dari penunjukannya sebagai gubernur untuk menggantikan Joko Widodo, pencalonan gubernur hingga penentuan pemilihan dari hasil PILKADA DKI Jakarta 2017.

²⁸⁷ <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/12/12/oi1pqv301-anies-baswedan-beri-ceramah-pada-gerakan-subuh-berjemaah> diakses pada 02 September 2018.

Eep Saepulloh juga menjelaskan tentang bagaimana mereka dapat memanfaatkan segala sumber daya (*resources*) yang ada untuk memenangkan sebuah kontestasi PILKADA. Dia mencontohkan bagaimana partai politik Islam FIS (*Front Islamique du Salut*) dari al-Jazair dapat menang di sana. Dia menunjukkan bagaimana partai Islam FIS menang bukan karena jaringan partai politiknya akan tetapi karena adanya jaringan-jaringan masjid yang difungsikan untuk menyerukan dan mensuarakan tegaknya keadilan dan hak-hak orang banyak. Bukan seruan-seruan politik untuk memilih seseorang atau menolak calon yang lainnya. Bagaimana masjid disuarakan untuk menyeru kepada umat Islam agar dapat menegakkan keadilan dan melawan kezaliman dengan cara-cara yang beradab sesuai dengan cara yang telah diajarkan oleh Islam.²⁸⁸

Pernyataan ini sebenarnya bertentangan dengan realitas yang terjadi di masjid-masjid yang melampaui batas untuk sampai menyerukan untuk memilih pasangan calon tertentu dan menolak pasangan calon yang lain dengan sebutan pemimpin Muslim atau sebaliknya pemimpin non-Muslim. Hal ini menurut Eep Saepulloh karena ada video yang merekamnya di saat ceramah dan mengeditnya sehingga kontennya adalah menyerukan untuk melakukan hal yang sama dalam kontestasi PILKADA DKI Jakarta dengan cara memanfaatkan masjid-masjid yang ada untuk mengalahkan gubernur Ahok.

Puncaknya adalah beredarnya spanduk-spanduk penolakan shalat bagi jenazah pendukung Ahok di beberapa Masjid di Jakarta. Hal ini sebenarnya ditolak

²⁸⁸ Eep Saefullah Fattah, *wawancara*, Jakarta, 11 Juli 2017. Diambil dari hasil wawancara dengan Zen RS dan Windu Jusuf di <https://tirto.id/saya-tidak-mengkapitalisasi-sentimen-sara-cso6> diakses pada 30 Agustus 2018.

dan tidak diharapkan oleh tim pemenangan Anies-Sandi yang menilai masyarakat Islam yang berkuasa atas masjid telah melampaui batas-batas kemanusiaan dan meninggalkan kampanye-kampanye yang tidak beradab dan manusiawi. Anomali-anomali seruan politik yang terjadi di masjid-masjid tidak dapat disalahkan begitu saja kepada tim pemenangan Anies-Sandi lantaran karena salah satu konsultan politiknya pernah menceritakan kemenangan partai Islam FIS al-Jazair di pemilihan umum al-Jazair dengan memfungsikan semaksimal mungkin masjid-masjid sebagai salah satu *resources* umat Islam yang berharga.

Sekalipun konsultan politik Anies-Sandi tidak membenarkan adanya mobilisasi umat Islam dalam penggunaan masjid sebagai sumber daya politik melawan gubernur petahana, Ahok di kontestasi PILKADA DKI Jakarta 2017, namun masifnya komodifikasi masjid sebagai alat untuk menjelaskan keharusan kepemimpinan muslim dan larangan pemimpin non-Muslim, bahkan larangan pelaksanaan shalat jenazah atas seorang muslim yang mendukung Ahok di berbagai masjid-masjid DKI Jakarta mungkin telah dimobilisasi oleh para aktor yang memiliki kekuasaan atas masjid sebagai sumber daya dakwah di wilayahnya masing-masing. Apabila peneliti kembali melacak masjid-masjid yang melakukan pelanggaran pelaksanaan shalat jenazah muslim pendukung Ahok dan melakukan gerakan shalat subuh berjemaah maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa aktor-aktor tersebut adalah para aktivis dan pendukung GNPf-MUI.

Komodifikasi masjid yang dilakukan oleh para aktivis dan pendukung GNPf-MUI tersebut secara tidak langsung memberikan keuntungan secara elektoral kepada tim pemenangan dan pasangan calon Anies-Sandi. Dalam

kerangka teori tindakan kolektif, bagaimana GNPF-MUI bertindak selaku produsen yang terus-menerus memproduksi komodifikasi masjid dan agenda dakwah politik tentang kepemimpinan Muslim dan larangan pemimpin non-Muslim demi memaksimalkan keuntungan yang didapatkan agar semaksimal mungkin dapat mengasingkan Ahok dari segala aksentuasi pemerintahan. Sementara tim pemenangan Anies-Sandi berperan sebagai konsumen yang memaksimalkan utilitasnya dalam mengonsumsi simbol-simbol agama yang dikomodifikasikan oleh GNPF-MUI tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

MAKNA DAN MOTIF KOMODIFIKASI AGAMA GNPF-MUI DAN TIM PEMENANGAN ANIES-SANDI DI PILKADA DKI JAKARTA 2017

A. Makna Di Balik Tindakan Komodifikasi Agama: GNPF-MUI dan Tim Pemenangan Anies-Sandi di PILKADA DKI Jakarta 2017

Tidak dapat dipungkiri, GNPF-MUI mempunyai hubungan yang tidak harmonis dengan Gubernur DKI Jakarta Ahok di saat itu. Selain juga, dia adalah pemimpin yang tidak diinginkan karena latar belakang perbedaan agama. Di PILKADA DKI Jakarta 2017, GNPF-MUI menyuarakan kepada pihak kepolisian agar menangkap serta menindak Ahok yang terlibat dalam kasus penistaan agama yang dituduhkan kepadanya dalam pengutipan Surat al-Maidah ayat 51 di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. GNPF-MUI pula menolak kepemimpinan kepala daerah yang non-Muslim sehingga secara otomatis arah dan pandangan politik GNPF-MUI yang tersisa, hanya mencakup pasangan calon Agus-Sylvi dan pasangan calon Anies-Sandi.

Namun, dari kedua pasangan calon tersebut, nama pasangan calon yang terakhir (Anies-Sandi) yang memiliki hubungan yang sangat dekat dan akrab dengan sejumlah tokoh GNPF-MUI. Kedekatan hubungan tersebut telah memanifestasi dalam tindakan-tindakan komodifikasi agama yang dilakukannya selama pelaksanaan PILKADA DKI Jakarta 2017 maupun sebelumnya. Kedekatan tersebut terindikasi pada pertemuan Anies Baswedan dengan ketua GNPF-MUI, Bachtiar Nashir dalam satu majelis dalam kegiatan shalat shubuh berjemaah dan

pengajian politik Islam yang dilakukan di Masjid Agung al-Azhar Jakarta pada tanggal 15 Januari 2017. Indikasi lainnya adalah pertemuan Anies Baswedan dengan Habib Rizieq Shihab (Petinggi FPI) dalam agenda silaturahmi di markas Besar FPI, Petamburan, Tanah Abang Jakarta pada awal tahun 2017.

Tindakan-tindakan komodifikasi agama di PILKADA DKI Jakarta 2017 tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya makna-makna di balik tindakan komodifikasi agama tersebut. Berikut ini adalah penjelasan tentang makna-makna dari komodifikasi agama yang terjadi pada kasus PILKADA DKI Jakarta 2017.

1. Makna Di Balik Tindakan Komodifikasi Agama: GNPF-MUI dan Anies Baswedan

Komodifikasi agama yang dilakukan oleh GNPF-MUI dapat dimasukkan ke dalam kategori sebuah tindakan dengan alasan bahwa komodifikasi adalah aktivitas menjadikan suatu hal atau masalah yang sensitif dan serius sebagai komoditas masyarakat secara publik. Sementara aktivitas ini disebut sebagai tindakan karena berdasarkan pada teori tindakan Habermas bahwa ia merupakan aktivitas atau perilaku aktor dengan memberikan ekspresi-ekspresi simbolis yang diproduksi dan diciptakan agar berhubungan dengan pemaknaan terhadap suatu dunia (dunia objektif)²⁸⁹.

Dunia yang objektif dapat didefinisikan sebagai totalitas keadaan yang terjadi melalui suatu upaya yang diciptakan atau keadaan yang diusahakan untuk terjadi lewat intervensi bertujuan²⁹⁰. Komodifikasi agama GNPF-MUI dan tim

²⁸⁹ Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action: Reason and The Rationalization of Society*...., 96.

²⁹⁰ Ibid., 111.

pemenangan Anies-Sandi adalah serangkaian tindakan yang menggunakan agama sebagai komoditas politik selama perhelatan PILKADA DKI Jakarta 2017 di mana aktor-aktor (GNPF-MUI dan tim pemenangan Anies-Sandi) menampilkan ekspresi-ekspresi simbolis dengan cara melekatkan makna subjektif atas pemimpin Muslim dan penistaan agama terhadap Ahok.

Kebutuhan masyarakat Jakarta terhadap pemimpin Muslim dan sebaliknya tiadanya kebutuhan pada Ahok yang dituduh sebagai penista agama dalam memimpin DKI Jakarta adalah realitas dunia objektif. Dasar atas objektivikasi dua permasalahan tersebut bersumber pada rasionalisasi proposisi dalam oposisi biner antara “pemimpin; penista agama dan pemimpin; pembela agama/Muslim”. Para aktor yang ada di dalam GNPF-MUI dan tim pemenangan Anies-Sandi melakukan objektivikasi atas masalah penistaan agama dan pemimpin Muslim dalam PILKADA DKI Jakarta 2017 melalui tindakan yang diatur secara normatif.

Pengaturan tindakan normatif seperti penggunaan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi, membekali aktor dalam membentuk klaim kebenaran tentang segala keadaan yang terjadi pada kasus penistaan agama melalui media persepsi di satu sisi. Dan pada sisi yang lain, aktor dapat mengembangkan maksud-maksud dengan tujuan mewujudkan perolehan suara elektoral yang diinginkannya pada PILKADA. Melalui klaim kebenaran tentang penistaan agama dan maksud-tujuan untuk perolehan suara elektoral, para aktor baik di GNPF-MUI dan tim pemenangan Anies-Sandi dapat melakukan dua relasi rasional dengan dunia kepemimpinan Islam secara total. Di sinilah, para aktor melakukan ekspresi yang terbuka dengan

melakukan intervensi agama dalam PILKADA yang berorientasikan pada ketercapaian suatu tujuan (menjadi pemenang atau gagal di PILKADA).

Aktor GNPf-MUI bermaksud untuk menjadikan dunia kepemimpinan Islam sebagai dunia yang objektif. Dunia kepemimpinan Islam diatur secara normatif dengan cara mentransmisikan bahasa agama sebagai media yang harus dijadikan sebagai referensi utama dan kesepakatan bersama (konsensus sosial). GNPf-MUI selalu memaksudkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah orang Muslim. Ini bagian dari dunia yang diobjektifikasikan sebagai pemahaman atas persepsi “harus sama” dengan masyarakat lain bahwa mayoritas itu adalah paling layak dalam pemimpin dan kepemimpinan. Selebihnya, konsep bahasa agama menempatkan komunikasi sebagai media yang terus menerus diwicarakan di berbagai tempat baik dunia nyata maupun dunia maya. Penggunaan bahasa agama sebagai media komunikasi dengan sengaja diterapkan oleh GNPf-MUI untuk merealisasikan pencapaian pemahaman yang sama tentang kepemimpinan Islam kepada umat Islam di Jakarta secara khusus dan Indonesia pada umumnya.

Oleh karenanya, untuk tercapainya pemahaman tentang kepemimpinan Islam di PILKADA DKI Jakarta 2017, peneliti meminjam kerangka teori tindakan komunikatif Habermas dengan tiga akar utamanya; lokusioner (proposisi), ilokusioner (penampilan) dan perlokusioner (efek ekspresif). Lokusioner menunjukkan kandungan kalimat secara proposisional (*p*) atau isi kalimat nominal yang proporsional (bahwa *p*) ketika mengatakan sesuatu (sebagai *states of affairs*). Penutur atau pembicara (S) di dalam i-lokusioner -yang disimbolkan dengan Mode Proposisi (*MP*)- menampilkan (*performs*) suatu tindakan ketika mengatakan

sesuatu tersebut dengan frase kalimat kata kerja performatif atau imperatif. Sedangkan, di dalam perlukosioner, pembicara atau penutur memberikan efek bagi pendengar (*audience*) yang timbul dari proses keluarnya pernyataan tersebut sehingga ia dapat menyebabkan terjadinya suatu peristiwa atau momentum penting di dunia ini.²⁹¹

Sebagai contoh, peneliti mengambil beberapa pernyataan atau proposisi dari Bachtiar Nashir (Ketua GNPf-MUI), Muhammad al-Khaththath (Sekjen FUI dan anggota GNPf-MUI), Tengku Zulkarnai (Wasekjen MUI dan anggota GNPf-MUI) dan Anies Baswedan (Calon Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 3) di acara Tabligh Akbar Politik Islam (Shalat Subuh Berjemaah Spirit 212) di Masjid Agung al-Azhar Jakarta yang diadakan pada 15 Januari 2017, dengan penjelasan sebagaimana berikut:

Tabel. 4.1 *Pernyataan-pernyataan pembicara utama dalam Tabligh Akbar Pengajian Politik Islam di Masjid Agung al-Azhar, Jakarta.*

NO	PEMBICARA	PROPOSISI
1	Bachtiar Nashir	saya berpesan...mudah-mudahan setelah ini, kita konsisten dan tidak akan lagi memilih pemimpin kafir, siap! Siap (jemaah/audiens). Para calon pemimpin muslim, percayalah...modal logistik, sosial, politik kita sekarang termasuk ekonomi, sekarang ini kita umat Islam kalau kita udah mencet tombol nih, akan lahir koperasi raksasa, insha Allah di Indonesia, dan stakeholdernya adalah umat Islam semua ²⁹² .
2	M. Al-Khaththath	mudah-mudahan sejarah mencatat bahwa dari al-Azhar inilah cahaya politik Islam di Indonesia naik dan akan mengambil alih, mengambil

²⁹¹ Ibid., 355-356.

²⁹² GNPf-MUI Media Center, *Tabligh Akbar Politik Islam - Masjid Agung Al-Azhar Jakarta*, terunggah pada 15 Januari 2017 (Video). <https://www.youtube.com/watch?v=qNqw12iLc5U&t=3090s> diakses pada 20 Nopember 2018.

		kembali, tentang apa yang sudah diberikan oleh Allah subhanallah wa ta'ala kepada orang-orang saleh (jemaah; amin). Kita seneng nggak punya gubernur yang soleh?? (jema'ah; iya), makanya kenapa tadi takbirnya itu tiga kali (jemaah; tertawa). Paham! Kita seneng gak punya gubernur yang mau membebaskan tabligh akbar di Monas? (jema'ah; iya). Kita seneng gak punya gubernur yang nanti membolehkan kembali shalat jum'at di Monas? (jema'ah; mau). Oleh karena itu jangan salah pilih saudara! Betul? (jema'ah; betul). ²⁹³
3	Tengku Zulkarnain	<p>“munib” itu orang yang bertaubat dari angan-angan mau melanggar hukum Allah, belum dilakukan. Kalo sudah dilakukan kan namanya ta'ibun... mau berangan-angan mau milih orang bukan-Islam menjadi gubernur.</p> <p>Hentikan angan-anganmu untuk memilih pemimpin yang tidak berpihak pada agamamu, apalagi dari golongan lain. Tobat duluan dari pemikiran, belum lagi pekerjaannya. Belum nyoblos, belum...baru angan-angan, berhentikan Kata Allah! sebelum datang azab kepadamu dan kamu tidak bisa ditolong ketika azab itu datang. Jelas! Jelas!...(jema;ah; jelas) yang penting terus istiqomah membela agama, insha Allah ya? (jema'ah; insha Allah). Pokoknya coblos, yang tengah gak usah, lewatin aja dah. Yang kotak-kotak, gak usah kotak-kotak. Nanti kita akan dikotak-kotak. Jadi kita akan pilih yang tidak ada kotaknya²⁹⁴</p>
4	Anies Baswedan	Insha Allah, nanti bapak-ibu sekalian menentukan di bulan depan...titipan saya terakhir saja dah, saya gak boleh kampanye di mesjid itu, jadi gak boleh bilang pilih saya gitu. Gak boleh, tapi barusan ngomong padahal (<i>audience</i> tertawa), tapi gak boleh itu, gak boleh. karena gak boleh kampanye, jada saya mau nitip aja, bapak-ibu sekalian, insha allah qiyamul lailnya gak bolong ya, shalat malam gak bolong ya, jaga ya...? Mohon doakan kalo shalat malam ya, doakan agar kita menjadi orang amanah

²⁹³ Ibid.

²⁹⁴ GNPf-MUI Media Center, *Tabligh Akbar Politik Islam - Masjid Agung Al-Azhar Jakarta*, terunggah pada 15 Januari 2017 (Video). <https://www.youtube.com/watch?v=qNqw12iLc5U&t=3090s> diakses pada 20 Nopember 2018.

	<p>(jemaah; amin), doakan agar dekat dengan ikhlas (jemaah: amin), doakan agar dijauhkan dengan fitnah (jemaah; amin), dan kalo sudah mendoakan, selesai shalat, bapak ibu witr! Ya...shalat witr bapak ibu ya! Shalat witr itu 1 roka'at boleh ndak? (jema'ah; boleh), boleh ya? (jema'ah; boleh). Kalo 2 roka'at boleh nggak? (jema'ah; enggak), enggak boleh ya? (jema'ah; nggak). Betul 2 roka'at nggak boleh? (jema'ah; nggak boleh). Kalo 3 roka'at boleh nggak? (jema'ah: boleh), boleh 3 roka'at ya? (jema'ah; boleh). Biasanya 1 apa 3? (jema'ah; 3), Ya udah itu diinget-inget ya (jema'ah; tertawa), terimakasih²⁹⁵.</p>
--	--

Tindakan komunikatif dari Bachtiar Nashir, M. al-Khatthath, Tengku Zulkarnain dan Anies Baswedan di acara Tablligh Akbar Pengajian Politik Islam tersebut sejak awal sudah membuka kemungkinan adanya kesepakatan bersama dengan mengemukakan alasan-alasan keagamaan yang sama (sebagai *lifeworld*) secara intersubjektif di balik peristiwa penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok yang notabene juga sebagai salah satu kandidat kuat di PILKADA DKI Jakarta 2017. Masing-masing dari empat aktor tersebut berorientasikan pada klaim validitas dari alasan-alasan yang ditawarkan kepada para jema'ah (partisipannya) demi tercapainya pemahaman yang sama sekaligus mempengaruhi *rational choice* satu sama yang lainnya di pemilihan nanti.

Demi tercapainya pemahaman dan mempengaruhi tersebut, keempat aktor tersebut memanfaatkan bahasa kultural-keagamaan sebagai media komunikasi yang bebas tekanan sekalipun menyalahi aturan larangan kampanye di tempat

²⁹⁵ Ibid.

ibadah. Hal ini karena mereka menerapkan model normatif dalam tindakan komunikatifnya yaitu bahasa kultural-keagamaan dengan pengutipan ayat dan pengatasanamaan agama Islam, menjadikan isi pembicaraan dan pesan tentang pemimpin kafir, pemimpin soleh, wajib bertobat bagi simpatisan penista agama dianggap sebagai suatu pernyataan yang bersifat normatif. Bahasa kulturalis-agamis yang mereka gunakan dengan reproduksi simbol-simbol agama berupa ayat dan penafsirannya untuk memudahkan mereka dalam mentransmisikan alasan dan tujuan teleologis mereka. Secara teleologis, mereka mengajak para jema'ah (partisipan) untuk mencapai kesepakatan dan pemahaman bersama yaitu menolak gubernur Ahok sebagai pemimpin dan sebaliknya memilih pemimpin Muslim. Bahkan, para aktor agamis (Bachtiar Nashir, al-Khaththath dan Tengku Zulkarnain) dengan bahasa kulturalis-agamis menjadikan isi dan pesan pembicaraannya sebagai maksud yang harus diyakini oleh para jema'ah.

Di lain pihak, Anies Baswedan yang juga sebagai aktor pembicara menerapkan model tindakan dramaturgis bahwa bahasa yang digunakan di acara tabghih pengajian politik Islam sebagai media presentasi-diri yang sudah di-*drive* oleh para aktor sebelumnya tentang pemimpin kafir vis a vis pemimpin Muslim. Dalam konteks ini, isi pembicaraan Anies Baswedan secara proposisional dapat diabaikan sehingga yang diutamakan untuk ditonjolkan adalah fungsi penampilan-diri yang ekspresif. Artinya, dia mengekspresikan dirinya sebagai pemimpin Muslim yang sudah dikategorikan secara naratif-proposisional dari masing-masing aktor sebelumnya.

Dari sinilah, strategi kampanye politik secara metodis yang menurut peneliti sebagai suatu hal yang baru dalam penggunaan simbol agama sebagai komoditas politik (komodifikasi agama) dari pada model-model strategi kampanye politik dengan penggunaan simbol agama secara sederhana seperti peci, baju koko, kerudung, foto di sampul atribut keagamaan dan sebagainya. Di sini, Anies Baswedan tidak perlu menonjolkan atribut-atribut keagamaan yang bersifat *packaging* (kemasan luar). Akan tetapi cukup menampilkan diri dari proposisi-proposisi yang disampaikan oleh para aktor sebelumnya melalui bahasa kulturalis-agamis dengan pola *personal-branding* sebagai seorang calon pemimpin Muslim yang sudah dibicarakan secara diskursif dalam even pengajian politik Islam.

Adapun untuk memahami maksud dan makna dari para pembicara di kegiatan pengajian politik Islam di Masjid al-Azhar Jakarta tersebut, maka peneliti menggunakan tiga kerangka teori Austin; lokusioner, i-lokusioner dan perlokusioner dengan penjelasan dan penjabaran sebagaimana berikut:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Tabel 4.2 Proses Lokusioneer dan I-Lokusioneer dan Perlokusioneer dalam pernyataan Bachtiar Nashir di kegiatan Tabligh Pengajian Politik Islam

N O	Speech-Act Actor	Lokusioneer	I-Lokusioneer		Perlokusioneer
		"p" atau bahwa "p"	Mode of Proposition	Makna I-lokusioneer	(Efek)
1	Bachtiar Nashir	saya berpesan...mudah-mudahan setelah ini, kita konsisten dan tidak akan lagi memilih pemimpin kafir, Siap! siap (jemaah/audiens). Para calon pemimpin muslim, percayalah! modal logistik, sosial, politik kita sekarang termasuk ekonomi, sekarang ini kita umat Islam kalau kita udah mencent tombol nih, akan lahir koperasi raksasa, insha Allah di Indonesia, dan stakeholdernya adalah umat Islam semua	Frase Imperatif: Berpesan mudah-mudahan	1. terwujudnya tindakan para jema'ah di pemilihan umum untuk memilih pemimpin Muslim 2. terwujudnya tindakan para jema'ah terlibat di kegiatan ekonomi spirit 212	1. jema'ah memilih pemimpin Muslim di PILKADA DKI Jakarta 2017 pada putaran pertama: 15 Februari 17 2. jema'ah menjadi pelaku ekonomi dan sumber kegiatan ekonomi dan koperasi

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Berdasarkan pada tabel 4.2, dengan menggunakan modus proposisi imperatif, Bachtiar Nashir selaku aktor pertama (*SI*) meminta para jema'ah (*H*) melakukan tindakan memilih pemimpin yang bukan seorang non-Muslim dalam menghadapi PILKADA DKI Jakarta 2017 baik yang terjadi pada putaran pertama (15 Februari 2017) maupun jika ada kemungkinan terjadi juga pada putaran kedua (tindakan “*A1*”). Selain itu, *SI* juga meminta *H* agar melakukan solitadiras atas dalih keummatan dalam proses kegiatan ekonomi berbasis spirit 212 baik itu bentuk koperasi syariah maupun dalam bentuk kegiatan ekonomi lainnya (tindakan “*A2*”). Dengan demikian, dapat peneliti deskripsikan makna-maknanya melalui frase kalimat berikut ini:

- *SI* berkata kepada *H* bahwa *H* seharusnya berhati-hati agar tidak lagi memilih pemimpin non-Muslim.
- *SI* menjelaskan kepada *H* bahwa *H* harus mewujudkan tidak memilih pemimpin non-Muslim agar menjadi kenyataan
- Permintaan yang dikatakan oleh *S* harus dipahami dengan pemahaman bahwa *H* harus menimbulkan pemilihan pasangan calon Muslim.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Tabel 4.3 Proses Lokusioneer dan I-Lokusioneer dan Perlokusioneer dalam pernyataan M. al-Khaththath di kegiatan Tabligh Pengajian Politik Islam

NO	Speech-Act Actor	Lokusioneer	I-Lokusioneer		Perlokusioneer
		"p" atau bahwa "p"	Mode of Proposition	Makna I-lokusioneer	(Efek)
2	M. Al-Khaththath	<p>mudah-mudahan sejarah mencatat bahwa dari al-Azhar inilah cahaya politik Islam di Indonesia naik dan akan mengambil alih, mengambil kembali, tentang apa yang sudah diberikan oleh Allah subhanallah wa ta'ala kepada orang-orang saleh (jemaah; amin). Kita seneng nggak punya gubernur yang soleh? (jema'ah; iya), makanya kenapa tadi takbirnya itu tiga kali (jemaah; tertawa). Pahami! Kita seneng gak punya gubernur yang mau membebaskan tabligh akbar di Monas? (jema'ah; iya). Kita seneng gak punya gubernur yang nanti membolehkan kembali shalat jum'at di Monas? (jema'ah; mau). Oleh karena itu jangan salah pilih saudara! Betul? (jema'ah; betul)</p>	<p>Frase Imperatif: mudah-mudahan</p> <p>Frase Imperatif Larangan: Jangan salah pilih!</p>	<p>1. terwujudnya tindakan para jema'ah dalam menyukai gubernur sholeh</p> <p>2. terwujudnya tindakan para jema'ah yang cenderung memilik calon gubernur nomor 3 atau paslon Anies-Sandi</p>	<p>1. jema'ah menyukai calon gubernur sholeh di PILKADA DKI Jakarta 2017</p> <p>2. jema'ah cenderung menjatuhkan pilihannya untuk pasangan calon gubernur dengan nomor urut 3 (Anies-Sandi)</p> <p>3. jema'ah mengambil perannya sebagai orang-orang saleh dengan cara mengambil kembali dan mengambil alih kegiatan tradisi Islam yang sebelumnya dilarang oleh gubernur Ahok</p>

Pada tabel 4.3, Muhammad al-Khaththath sebagai aktor kedua (S2) juga memberikan pernyataan (lokusional/ “*p*”) dengan modus pernyataan (MP) frase imperatif (mudah-mudahan dan larangan). Muhammad al-Khaththath (S2) meminta para jema’ah (*H*) yang hadir pada acara tersebut agar melakukan tindakan pilihan preferensial yang hanya tertuju pada narasi “pemimpin soleh atau calon gubernur soleh” dan indikasi nomor urut 3 sebagaimana yang dinarasikan dengan bacaan takbir tiga kali. Selain itu, S2 melarang *H* agar memilih pasangan calon pemimpin yang menolak kegiatan keagamaan (tabligh akbar dan shalat jum’at) yang diadakan di tempat-tempat umum seperti Monumen Nasional Jakarta. Dengan demikian, peneliti dapat merangkai frase pemahaman atas makna pernyataan-pernyataan tersebut berikut ini:

- S2 berharap *H* agar *H* melakukan tindakan memilih yang tertuju pada pasangan calon yang dikategorikan sebagai calon gubernur saleh.
- S2 menjelaskan bahwa *H* seharusnya di PILKADA DKI Jakarta 2017 tidak memilih pasangan calon yang bukan termasuk kategori gubernur saleh.
- S2 menjelaskan bahwa *H* seharusnya merealisasikan tindakannya dalam memilih pasangan calon gubernur dengan nomor urut 3 (Anies-Sandi)
- Permintaan *S* kepada *H* agar *H* menyenangi dan menyukai pasangan calon gubernur yang berpihak kepada *H* yang berjanji untuk memberikan izin pelaksanaan kegiatan keagamaan (tabligh akbar, shalat jum’at berjamaah dan lain-lainnya) di Monumen Nasional, Jakarta.

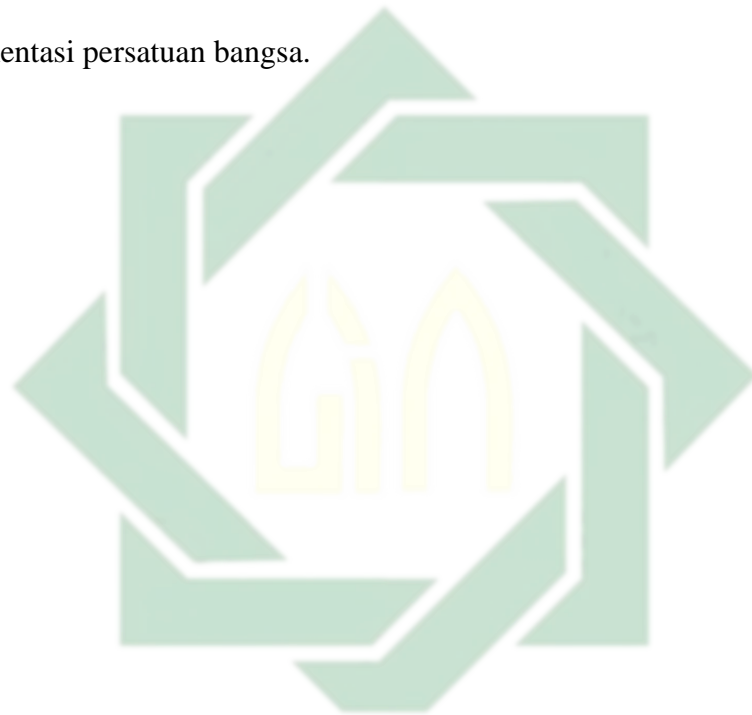
Tabel 4.4 Proses Lokusioneer dan I-Lokusioneer dan Perlokusioneer dalam pernyataan Tengku Zulkarnain di kegiatan Tabligh Pengajian Politik Islam

NO	Speech-Act Actor	Lokusioneer	I-Lokusioneer		Perlokusioneer
		"p" atau bahwa "p"	Mode of Proposition	Makna I-lokusioneer	(Efek)
3	Tengku Zulkarnain	<p>“munib” itu orang yang bertaubat dari angan-angan mau melanggar hukum Allah, belum dilakukan. Kalo sudah dilakukan kan namanya ta’ibun... mau berangan-angan mau milih orang bukan-Islam menjadi gubernur. Hentikan angan-anganmu untuk memilih pemimpin yang tidak berpihak pada agamamu, apalagi dari golongan lain. Tobat duluan dari pemikiran, belum lagi pekerjaannya. Belum nyoblos, belum...baru angan-angan, berhentikan Kata Allah! sebelum datang azab kepadamu dan kamu tidak bisa ditolong ketika azab itu datang. Jelas! Jelas!...(jema;ah; jelas) yang penting terus istiqomah membela agama, insha Allah ya? (jema’ah; insha Allah). Pokoknya coblos, yang tengah gak usah, lewatin aja dah. Yang kotak-kotak, gak usah kotak-kotak. Nanti kita akan dikotak-kotak. Jadi kita akan pilih yang tidak ada kotaknya,</p>	<p>Frase Imperatif Larangan: Hentikan berpikiran untuk memilih pemimpin yang tidak bela agama Islam</p> <p>Frase Imperatif Permintaan: Pokoknya coblos selain yang tengah (nomor urut 2)</p>	<p>1. terwujudnya tindakan para jema'ah untuk berhenti memilih pemimpin yang tidak membela agama Islam</p> <p>2. terwujudnya tindakan para jema'ah memilih calon gubernur antara nomor 1 (paslon Agus-Sylvi) atau 3 (paslon Anies-Sandi)</p>	<p>1. jma'ah yang sebelumnya mempunyai keinginan untuk memilih paslon Ahok-Djarot harus menghentikan keinginannya tersebut sebelum ancaman azab Allah menimpanya.</p> <p>2. jema;ah cenderung menjatuhkan pilihannya untuk pasangan calon gubernur Agus-Sylvi atau Anies-Sandi</p> <p>3. jema'ah memilih pasangan calon yang tidak menggunakan seragam kotak-kotak yang dianggap sebagai kelompok pemecah belah persatuan</p>

Adapun tabel 4.4, Tengku Zulkarnain (*S3*) yang juga seorang aktor *speech-act* dalam hal ini dia menggunakan modus pernyataan imperatif dengan pemahaman proposisi bahwa Tengku Zulkarnain (*S3*) meminta para jema'ah (*H*) agar menghentikan segala kehendak hati dan pikiran mereka dalam memilih pasangan calon Ahok-Djarot dengan mengilustrasikannya sebagai perbuatan dosa yang harus dilakukan dengan cara bertobat sebelum adanya azab Tuhan menimpanya. Selain itu, *S3* meminta *H* agar tidak memilih pasangan calon yang tidak membela agama Islam pasca peristiwa penistaan agama surat al-Maidah 51. *S3* juga meminta *H* agar tidak memilih pasangan calon yang identik dengan warna seragam kotak-kotak. Alasannya mereka telah dianggap memecah belah persatuan dan kesatuan di Indonesia. Dari pernyataan-pernyataan tersebut, dapat diambil makna-makna sebagai berikut:

- *S3* meminta *H* agar meninggalkan tindakan *H* yang berkeinginan atau berangan-angan untuk memilih pasangan calon gubernur yang dianggap penista agama di PILKADA nanti.
- *S3* menjelaskan kepada *H* bahwa tindakan *H* yang berangan-angan untuk memilih pasangan calon gubernur penista agama tersebut adalah bagian dari dosa besar di mana pelanggarnya harus segera melakukan pertaubatan kepada Allah.
- *S3* menjelaskan kepada *H* bahwa tindakan *H* yang mempunyai angan-angan tersebut akan mendapatkan azab Tuhan yang tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya.

- Permintaan S3 kepada H agar memilih (mencoblos) pasangan calon gubernur yang membela agama Islam dan satu golongan saja pasca kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada gubernur non-aktif Ahok.
- Permintaan S3 kepada H agar tidak memilih pasangan calon gubernur yang menggunakan atribut pakaian kotak-kotak yang dianggap telah melakukan fragmentasi persatuan bangsa.

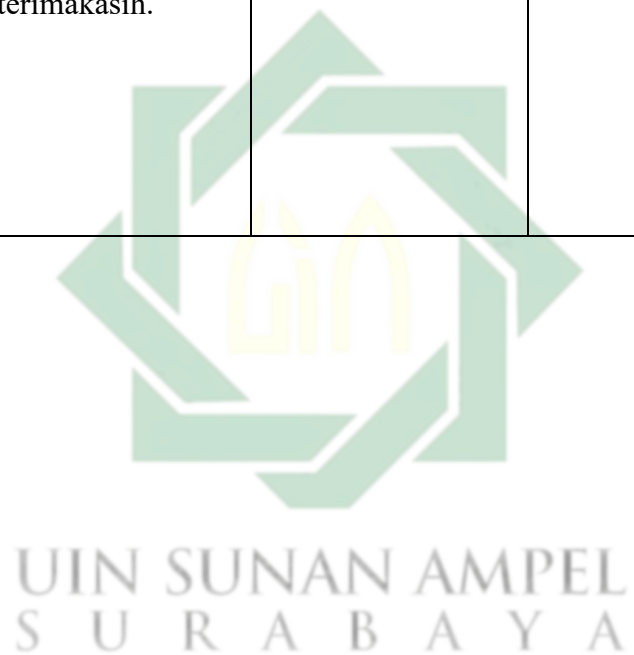


UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Tabel 4.5 Proses Lokusiner dan I-Lokusiner dan Perlokusiner dalam pernyataan Anies Baswedan di kegiatan Tabligh Pengajian Politik Islam

NO	Speech-Act Actor	Lokusiner	I-Lokusiner		Perlokusiner (Efek)
		"p" atau bahwa "p"	Mode of Proposition	Makna I-lokusiner	
4	Anies Baswedan	Insha Allah, nanti bapak-ibu sekalian menentukan di bulan depan...titipan saya terakhir saja dah, saya gak boleh kampanye di mesjid itu, jadi gak boleh bilang pilih saya gitu. Gak boleh, tapi barusan ngomong padahal (audience tertawa), tapi gak boleh itu, gak boleh. karena gak boleh kampanye, jada saya mau nitip aja, bapak-ibu sekalian, insha allah qiyamul lailnya gak bolong ya, shalat malam gak bolong ya, jaga ya...? Mohon doakan kalo shalat malam ya, doakan agar kita menjadi orang amanah (jemaah; amin), doakan agar dekat dengan ikhlas (jemaah: amin), doakan agar dijauhkan dengan fitnah (jemaah; amin), dan kalo sudah mendoakan, selesai shalat, bapak ibu witr! Ya shalat witr bapak ibu ya! Shalat witr itu 1 roka'at boleh ndak? (jema'ah; boleh), boleh ya? (jema'ah; boleh). Kalo 2 roka'at boleh nggak? (jema'ah; gak), enggak boleh ya? (jema'ah; nggak). Betul 2 roka'at	<p>Frase Imperatif: titipan saya</p> <p>Frase Imperatif ajakan: titipan saya mohon doakan shalat witr ya diinget-inget ya</p>	<p>1. adanya tindakan para jema'ah boleh kampanye di mesjid</p> <p>2. terwujudnya tindakan para jema'ah yang memilih calon gubernur dengan nomor urut paslon ganjil yaitu 1 atau 3</p> <p>3. terwujudnya tindakan para jema;ah untuk memilih calon gubernur dengan nomor urut paslon 3 (Anies-Sandi)</p>	<p>1. jema'ah melakukan kampanye politik di masjid dengan cara yang samar-samar</p> <p>2. jema;ah cenderung menjatuhkan pilihannya untuk pasangan calon gubernur dengan nomor urut 1 atau 3 (ganjil)</p> <p>3. jema'ah mengambil perannya sebagai pemilih di PILKADA DKI Jakarta 2017 dengan menentukan pilihannya kepada paslon nomor urut 3 yaitu Anies-Sandi</p>

		nggak boleh? (jema'ah; nggak boleh). Kalo 3 roka'at boleh nggak? (jema'ah: boleh), boleh 3 roka'at ya? (jema'ah; boleh). Biasanya 1 apa 3? (jema'ah; 3), Ya udah itu diinget-inget ya (jema'ah; tertawa), terimakasih.			
--	--	--	--	--	--



Pada tabel 4.5, Anies Baswedan (*S4*) yang juga bertindak selaku calon gubernur di PILKADA DKI Jakarta 2017, memberikan penegasan bahwa kampanye politik di masjid tidak diperbolehkan namun karena masjid agung al-Azhar Jakarta sudah dikondisikan sebagai acara tabligh akbar pengajian politik Islam, Anies Baswedan (*S4*) mencoba untuk melakukan tindakan tersebut (kampanye politik) dengan penggunaan kalimat retoris. Penegasan tidak bolehnya melakukan tindakan kampanye politik di dalam masjid, akhirnya Anies Baswedan (*S4*) memberikan pernyataan dengan modus proposisi (*MP*) “*saya nitip*” yang berarti saya pesan kepada para jema’ah (*H*) agar melakukan dua hal; pertama, menjalankan shalat sunnah witr (shalat sunnah ganjil raka’atnya) di rumah masing-masing dan kedua; memilih pasangan calon gubernur bernomor urut 3 di PILKADA DKI Jakarta 2017. Makna ilokusioner lainnya adalah Anies Baswedan (*S4*) meminta para jema’ah (*H*) untuk mengingat nomor 3 sebagai mana bilangan raka’at shalat sunnah witr yang berjumlah tiga raka’at. Dengan demikian, makna dari pernyataan-pernyataan Anies Baswedan (*S4*) secara lokusioner adalah sebagai berikut:

- *S4* meminta para jema’ah agar tidak melakukan tindakan kampanye politik secara terang-terangan (eksplisit) di masjid, namun tindakan tersebut mungkin dapat dilakukan dengan cara bahasa retoris.
- *S4* menjelaskan kepada *H* bahwa tidak diperbolehkannya kampanye politik di masjid, maka *S4* berpesan kepada *H* agar tidak melupakan shalat malam khususnya shalat sunnah witr dengan jumlah bilangan raka’atnya 3

- *S4* berpesan kepada *H* agar juga tidak melupakan bilangan ganjil yang disukai dalam shalat sunnah witr yaitu bilangan 3 sebagai pilihan ibadahnya sekaligus pilihan politiknya di PILKADA DKI Jakarta 2017
- Permintaan *S4* kepada *H* agar merealisasikan tindakan pilihan politik pada calon gubernur urutan ketiga dan selalu mengingatkannya di PILKADA DKI Jakarta 2017.
- Perimtaan *S4* kepada *H* agar merealisasikan tindakan doa dan restu *H* kepada pasangan calon nomor urut 3 (*S4*) dengan kalimat harapan “amanah” dan “ikhlas”.

Dari keempat aktor *speech-act* tersebut, terdapat “tiga kategori pemimpin” yang dapat diambil dari aktor *speech-act* ketiga pertama tersebut (*S1*, *S2* dan *S3*) yaitu; “*pemimpin Muslim*”, “*pemimpin Soleh*” dan “*pemimpin pembela agama*”. Sementara aktor terakhir atau *S4* merepresentasikan dirinya secara dramaturgis sebagai calon pemimpin yang amanah, ikhlas dan soleh dalam tindakan-tindakan kesehariannya yang berkaitan dengan amal ibadah keagamaan dari seorang Muslim.

Korelasi antara ekspresi-ekspresi linguistik dari *S1*, *S2* dan *S3* dengan ekspresi simbolis yang direpresentasikan oleh *S4* menunjukkan pemahaman bahwa keterpaduan antara ekspresi linguistik dan ekspresi simbolis memperkuat koordinasi tindak-wicara dalam makna suatu ucapan yang nantinya akan mempengaruhi keputusan-keputusan politik para pendengarnya (*H*) di PILKADA DKI Jakarta 2017.

S1, *S2* dan *S3* memproduksi ekspresi-ekspresi linguistik dengan memaksimalkan rasionalitas dan kekuasaannya atas pengetahuan-pengetahuan keagamaan pada satu pihak. Di antaranya seperti 1) menggunakan pemahaman atas tafsir surat al-Maidah 51

dalam kata “*wāli*” yang diartikannya sebagai teman dekat, pelindung dan pemimpin; 2) wajib pemilih mencari dan memilih pemimpin yang soleh; 3) menyebut pemilih yang berangan-angan memilih pemimpin non-Muslim sebagai “*munīb*” (orang yang kembali bertaubat dari angan-angan melakukan perbuatan dosa). Sementara di pihak lain, S4 memanfaatkan sumber dayanya dengan mengekspresikan secara simbolis sebagai seorang agen yang seakan-akan dibicarakan atau didiskusikan oleh para aktor S1, S2, S3 dengan para jema’ah (H) tentang kebutuhan mereka terhadap pemimpin Muslim yang sudah dirasionalisasikan melalui ekspresi linguistik aktor-aktor tersebut.

Dalam mengucapkan suatu proposisi imperatif, para penutur S1, S2 dan S3 mengatakan apa yang harus dilakukan oleh para jema’ah (H). Namun, keberhasilan tindakan para jema’ah (H) dalam melakukan apa yang diminta oleh para penutur tersebut bergantung pada ketercapaian pemahaman mereka kepada maksud-maksud yang terhubung dengan makna ekspresi simbolis dari mereka yang terkandung dalam makna i-lokusionernya.

Dalam hal ini, proposisi-proposisi lokusioner (“*p*”) dari keempat aktor *speech-act* tersebut mengacu pada keadaan-keadaan faktual (*states of affairs*) yang terjadi pada saat itu. Keadaan yang faktual pada konteks itu adalah adanya kasus penistaan agama Surat al-Maidah 51 beserta hubungannya dengan PILKADA dan kebutuhan akan pemimpin Muslim. Para aktor *speech-act* (S1, S2, S3 dan S4) mengilustrasikan bagaimana kebutuhan masyarakat DKI Jakarta kepada pemimpin Muslim pasca terjadinya tuduhan pelanggaran penistaan agama yang dilakukan oleh seorang pemimpin non-Muslim yaitu gubernur DKI Jakarta non-aktif Ahok.

Dengan proposisi lokusioner yang bersifat imperatif, para aktor *speech-act* tersebut mengajukan klaim validitas atas proposisi-proposisi yang dibicarakannya di depan para jema'ah (*H*) dengan cara memperkuat proposisi itu dengan penguasaan pengetahuan atas dalil-dalil agama dan pengalaman subjektif atas permasalahan ekonomi-politik Indonesia sehingga hal ini dapat menyebabkan para jema'ah (*H*) tunduk akan klaim-klaim yang terkandungnya. Oleh karenanya, para jema'ah (*H*) dapat menafsirkan dan memahami makna i-lokusioner dari muatan proposisional para aktor *speech-act*. Selanjutnya, para jema'ah (*H*) dengan kehendaknya akan menuruti muatan-muatan proposisional tersebut yang menurut mereka telah mempunyai dasar validitas yang diobjektivikasikan menurut klaim-klaim kebenaran proposisional dan tindakan para aktornya.

Tindakan “*tunduk*” dan “*kepatuhan*” para jema'ah terhadap pemahaman makna mereka atas pernyataan-pernyataan lokusioner tersebut dapat dilihat dari jawaban para jema'ah yang menunjukkan “*persetujuannya*” seperti:

Tabel. 4.6 Proses Respon Perlokusioner Jema'ah Tabligh Pengajian Politik Islam

NO	Speech-Act Actor	Lokusioner	Respon Jema'ah (H)
1.	Bachtiar Nashir (S1)	kita konsisten dan tidak akan lagi memilih pemimpin kafir, siap!	Siap
2.	M. al-Khaththath (S2)	...akan mengambil alih, mengambil kembali, tentang apa yang sudah diberikan oleh Allah subhanallah wa ta'ala kepada orang-orang saleh	Amin
		Kita seneng nggak punya gubernur yang soleh?? Paham!	Iya
		makanya kenapa tadi takbirnya itu tiga kali	Tertawa
		Kita seneng gak punya gubernur yang mau membebaskan tabligh akbar di Monas?	iya

		Kita seneng gak punya gubernur yang nanti membolehkan kembali shalat jum'at di Monas?	Mau
		Oleh karena itu jangan salah pilih saudara! Betul?	Betul
3.	Tengku Zulkarnain (S3)	Hentikan angan-anganmu untuk memilih pemimpin yang tidak berpihak pada agamamu, apalagi dari golongan lain. Tobat duluan dari pemikiran, belum lagi pekerjaannya. Belum nyoblos, belum...baru angan-angan, berhentikan Kata Allah! sebelum datang azab kepadamu dan kamu tidak bisa ditolong ketika azab itu datang. Jelas! Jelas!	Jelas
		yang penting terus istiqomah membela agama, insha Allah ya?	Insha Allah
		Pokoknya coblos, yang tengah gak usah, lewatin aja dah. Yang kotak-kotak, gak usah kotak-kotak. Nanti kita akan dikotak-kotak. Jadi kita akan pilih yang tidak ada kotaknya,	Betul
4.	Anies Baswedan (S4)	Insha Allah, nanti bapak-ibu sekalian menentukan di bulan depan...titipan saya terakhir saja dah, saya gak boleh kampanye di mesjid itu, jadi gak boleh bilang pilih saya gitu. Gak boleh, tapi barusan ngomong padahal	Tertawa
		jadi saya mau nitip aja, bapak-ibu sekalian, insha allah qiyamul lailnya gak bolong ya, shalat malam gak bolong ya, jaga ya...?	Iya
		Mohon doakan kalo shalat malam ya, doakan agar kita menjadi orang amanah, doakan agar dekat dengan ikhlas, doakan agar dijauhkan dengan fitnah,	Amin
		dan kalo sudah mendoakan, selesai shalat, bapak ibu witr! Ya shalat witr bapak ibu ya!	Iya
		Shalat witr itu 1 roka'at boleh ndak?, boleh ya?	Boleh
		Kalo 2 roka'at boleh nggak?, enggak boleh ya?. Betul 2 roka'at nggak boleh?	Gak boleh
		Kalo 3 roka'at boleh nggak?, boleh 3 roka'at ya?	Boleh

		Biasanya 1 apa 3? Ya udah itu diinget-inget ya. terimakasih.	Tiga
--	--	--	------

Posisi masing-masing aktor *speech-act* dalam tabel di atas, menunjukkan bahwa bagaimana suatu *speech-act* (tindak-wicara) mereka tentang rasionalisasi pemahaman keagamaan dalam proses pemilihan pemimpin di PILKADA DKI Jakarta 2017 dapat ditengarai “*dapat diterima*” oleh para jema’ahnya (*H*) karena mereka (*H*) mengambil posisi “*ya*” terhadap klaim-klaim ekspresi linguistik dan simbolik yang diajukan oleh para aktor *speech-act*. Hal ini dibuktikan oleh adanya sejumlah pengakuan intersubjektif dari para jema’ah (*H*) dengan jawaban “*iya, betul, insha Allah, boleh, gak boleh, tiga*” dari klaim-klaim yang diajukan kepadanya.

Jawaban responsif para jema’ah tersebut mengindikasikan adanya sikap afirmatif makna i-lokusioner yang diekspresikan oleh para aktor *S1*, *S2*, *S3* dan *S4* dengan menggunakan berbagai macam klausa imperatifnya. Akhirnya makna i-lokusioner ini membentuk kesepakatan spesifik dari mereka (*H*) tentang kewajiban-kewajiban yang relevan dengan proses interaksi yang membentuknya. Kewajiban yang relevan ini tidak lain adalah kewajiban memilih pemimpin atau calon kepala daerah yang sudah diajukan secara konsekuen dalam makna-makna proposisional tersebut.

Kesepakatan spesifik dari jema’ah (*H*) -dapat dikatakan di sini- adalah suatu tawaran yang diajukan oleh para aktor *speech-act* dengan melakukan praktik komodifikasi agama untuk tujuan PILKADA di mana para jema’ah (*H*) menerimanya dengan suatu jawaban responsif atas apa yang disepakati dari kandungan sebuah pernyataan dan makna ekspresif yang dimunculkannya dengan mengikuti kewajiban-kewajiban yang relevan dengan proses interaksi komunikatif di dalamnya. Dengan

demikian, kesepakatan ini dapat menyebabkan adanya potensi tindakan para jema'ah yang tipikal yang berlangsung di dalam kekuatan sosial-keagamaan baik yang terikat secara institusional maupun non-institusional.

Dengan kesepakatan spesifik yang keluar dari para jema'ah (H), S1, S2 dan S3 (para aktor) dapat dengan mudah menyampaikan maksud dan niatnya kepada para jema'ah (H) dengan ekspresi-ekspresi yang melekat baik kepada linguistik maupun simbolis. Dalam hal ini, S1, S2 dan S3 melekatkan ekspresi-ekspresi linguistik berupa "pemimpin Islam, pemimpin sholeh dan pemimpin pembela agama". Sementara aktor S4 melekatkan penampilan-diri secara ekspresif-simbolis berupa identitas kepribadian pemimpin Islam, sholeh, pembela agama tanpa harus banyak menggunakan atribut-atribut Islam lainnya (hanya sewajarnya peci dan baju putih).

Pelekatan ekspresi-diri linguistik GNPf-MUI dan penampilan-diri ekspresif-simbolis tidak dapat terjaring secara efektif tanpa adanya rasionalitas intersubjektif para jema'ah (partisipan aksi komodifikasi agama yang terlibat) tentang adanya keyakinan mereka terhadap kesatuan dunia yang diobjektifikasikan (penistaan agama oleh pemimpin DKI Jakarta) yang telah melampaui batas pandangan subjektif-nya sendiri. Hal tersebut berakhir pada munculnya mutualitas keyakinan dalam pengalaman intersubjektif tersebut bahwa; 1) masalah penistaan agama akibat dari kepemimpinan non-Muslim dan 2) masalah keharusan kepemimpinan Muslim atas masyarakat yang mayoritas Muslim.

Keyakinan atas kepemimpinan Muslim atas daerah yang mayoritas berpenduduk Muslim ("p") ini merepresentasikan persediaan pengetahuan yang sama-sama dimiliki oleh pihak GNPf-MUI (A) dan Tim Pemenangan Anies-Sandi (B). GNPf-MUI (A)

mengambil bagian dari sekian anggotanya sebagai pembicara atau penutur dalam kegiatan keagamaan Islam (melalui dakwah) dan mengemukakan pernyataan “p” (kepemimpinan Muslim atas daerah mayoritas orang Muslim). Tim Pemenangan Anies-Sandi atau Anies Baswedan (B) memilih sebuah cara -berdasarkan keyakinannya atas “p” – yang dianggapnya cocok untuk mencapai tujuan perolehan suara elektoral dan kemenangan atas calon gubernur petahana di PILKADA DKI Jakarta 2017.

Dengan demikian, GNPF-MUI (A) dan Tim Pemenangan Anies-Sandi atau Anies Baswedan (B) menggunakan pengetahuan atas “p” yang sama, dengan cara yang berbeda. GNPF-MUI (A) dengan cara dakwah (dalil agama), sedangkan Tim Pemenangan Anies-Sandi (B) dengan cara politik (kampanye politik). Akan tetapi, berdasarkan makna perlokusioner di atas, menunjukkan bahwa GNPF-MUI (A) lebih intensif menggunakan instrumen politik dalam agama (melalui dakwah) sedangkan tim pemenangan Anies-Sandi atau Anies Baswedan (B) lebih menggunakan instrumen agama dalam politik (dengan cara kampanye).

2. Komodifikasi Agama karena Jaringan Skenario Tuhan

Dalam pelaksanaan PILKADA DKI Jakarta 2017, baik GNPF-MUI dan Tim Pemenangan Anies-Sandi sama-sama berupaya sebisa mungkin untuk menarik simpati publik atas peristiwa penistaan agama (surat al-Maidah ayat 51 sebagai *states of affairs*²⁹⁶) yang dituduhkan kepada Gubernur Ahok di saat kunjungan dinas di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Penarikan simpati publik ini setidaknya akan berjalan efektif dan efisien apabila dilakukan melalui penggunaan kepemilikan sumber daya

²⁹⁶ *States of affairs* merupakan suatu istilah teoritis dalam kajian tindakan yang disematkan untuk keadaan-keadaan yang diekspresikan oleh penutur atau pembicara ketika dia sedang mengatakan sesuatu. Jurgen Habermas, *Rasio dan Rasionalisasi Masyarakat...*, 354.

doktriner (*islamic doctrinaire properties*) yang berkaitan erat dengan rasionalitas pengetahuan serta penguasaan atas keilmuan Islam-eksklusif. Selain itu, penggunaan sumber daya simbol keislaman (*islamic symbol properties*) juga tidak luput dari perhatian mereka untuk senantiasa diproduksi sebagai komoditas yang relevan dengan Islam dan umat Islam yang dikonstruksi sebagai pihak yang merasa disinggung atas masalah penistaan agama tersebut.

Para aktor tindakan komodifikasi agama di PILKADA DKI Jakarta 2017 menggunakan *islamic doctrinaire properties* yang dimilikinya seperti pemahaman atas tafsiran surat al-Maidah ayat 51, pengeluan fatwa dan pernyataan dalil agama tentang kepemimpinan Islam dan lain-lainnya yang berhubungan dengan rasionalitas keilmuan mereka atas Islam secara interpretatif. Di samping itu, mereka juga menggunakan *islamic symbol properties* seperti tempat ibadah, pakaian simbol keislaman (peci dan baju putih), pengajian atau majlis taklim, tabligh akbar, khutbah jum'at, shalat subuh berjema'ah dan lain sebagainya.

Namun kendati demikian, penggunaan atas *islamic doctrinaire properties* dan *islamic symbols properties* tidak dapat berjalan tanpa adanya koordinasi yang sistemik dalam suatu bentuk jaringan komodifikasi agama. Jaringan ini dirancang oleh sejumlah aktor GNPF-MUI secara sistemik yang diklaim oleh mereka sebagai jaringan skenario Tuhan dengan mengadopsi ayat al-Qur'an; "*wa makarū wa makara Allāhu wa Allāhu Ḥairu al-mākirīn*"²⁹⁷, "*mereka punya rencana, Allah juga punya rencana, yang jadi*

²⁹⁷ Surat Ali Imran: 54, yang artinya "Mereka membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya".

adalah rencana Allah”²⁹⁸. Tindakan komodifikasi agama dalam PILKADA DKI Jakarta 2017 melibatkan Jaringan Skenario Tuhan yang disituasikan secara sosial yang melekat pada kelompok-kelompok Islam-eksklusif yang tergabung dalam GNPf-MUI²⁹⁹ dan tim pemenangan (partai politik pendukung).

Jaringan Skenario Tuhan membentuk sebuah sistem jaringan yang melibatkan GNPf-MUI dan tim pemenangan yang sama-sama melakukan turun ke bawah masyarakat langsung untuk mendapatkan perolehan suara elektoral. Hal ini dilakukan dapat merekonstruksi suatu intersubjektivitas masyarakat Muslim Jakarta sebagai unsur pemahaman-diri yang terikat kuat dengan agenda politik yang sudah diskenariokan. GNPf-MUI -misalnya- meningkatkan masifitas agenda dakwah dan *tabligh* di tempat-tempat pengajian, masjid dan musala. Sasaran utama dari agenda dakwah tersebut adalah masyarakat sub-pemilih DKI Jakarta dari kategori kelompok agama dan kelompok “umat mengambang”³⁰⁰.

Materi dakwah dan *tabligh*nya adalah materi politik Islam yang berkaitan dengan interpretasi Surat al-Maidah mulai ayat 50 sampai 54. Pengambilan fokus materi dakwah pada konteks kata “*wāli*” yang berarti teman dekat, orang yang dipercayai, pelindung dan bahkan pemimpin. Rasionalisasi yang digalakkan oleh para juru dakwah adalah klaim kebenaran atas proposisi yang menyatakan bahwa “tidak semua teman dekat adalah pemimpin, tapi pemimpin sudah pasti teman dekat” (P1), “tidak semua orang yang dipercayai adalah pemimpin, tapi setiap pemimpin sudah pasti dipercayai”

²⁹⁸ Mardani Ali Sera, *Mardani Ali Sera- 3 Rahasia Kemenangan Anies-Sandi Pilgub DKI 2017*, diunggah pada 20 Juni 2018. <https://www.youtube.com/watch?v=3xI6BVTf5Qc> diakses pada tanggal 27 Agustus 2018.

²⁹⁹ Hadiz, “The ‘Floating’ Ummah in the Fall of ‘Ahok’ in Indonesia.” *TRANS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia* 7, no. 2 (2019): 271–290.

³⁰⁰ *Ibid.*,

(P2), dan “tidak semua pelindung adalah pemimpin, tapi sudah pasti semua pemimpin adalah pelindung” (P3)³⁰¹. Maka, kesimpulan yang dirasionalisasikannya adalah tidak boleh menjadikan orang Yahudi dan Nashrani sebagai teman dekat (P1), sebagai orang yang dipercayai (P2), sebagai pelindung (P3) apalagi menjadikannya sebagai pemimpin.

Para aktor yang tergabung dalam GNPf-MUI saling menghubungkan jaringannya secara sistemik dengan menjalankan koordinasi-koordinasi sosial yang membentuk ekspresi diri secara linguistik di dalam dakwah-dakwah dan tabligh-tabligh guna menciptakan reproduksi komoditas politik dalam agama. Ekspresi diri melalui pengambilan ruang dakwah dan tabligh diyakini dapat mempengaruhi putusan-putusan politik masyarakat pemilih di DKI Jakarta secara terbuka di forum-forum keagamaan yang diperkuat dengan perintah atau suruhan otoritatif dari para tokoh agama (GNPF-MUI) melalui pendekatan kultural-keagamaan.

Tim pemenangan Anies-Sandi sesuai dengan peranannya dalam PILKADA DKI Jakarta 2017, menjalankan rencana-rencana strategisnya untuk mendapatkan perolehan suarat semaksimal mungkin. Mereka menggunakan marketing politik yang sudah diagendakan demi memasarkan seluas-luasnya rencana dan program politik yang ditawarkan oleh pasangan calon Anies-Sandi untuk menarik simpati banyak pemilih dari kalangan pemilih Muslim, Muslim mengambang dan pemilih pasangan Agus-Sylvi yang kalah pada Putaran Pertama.

Ketika umat Muslim Jakarta masuk dalam kompleksitas situasi yang genting (*states of affairs*) terkait kasus Ahok yang dianggap “menistakan agama Islam” sehingga

³⁰¹ Habib Riziq Shihab, *Tabligh Akbar Politik Islam* 8, diunggah pada Channel Forum Umat Islam, 27 Maret 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=i36C82vqKGQ> diakses pada 28 Agustus 2018.

membalikkan kehendak politik mereka untuk mendapatkan seorang pemimpin dari kalangan Islam, maka tim pemenangan Anies-Sandi melihatnya sebagai keuntungan sendiri yang seharusnya mereka maksimalkan sebaik mungkin dengan cara menggalakkan marketing politiknya. Anies-Sandi dikonstruksikan sebagai pasangan calon yang *low-profile*, santun dan taat agama. Tidak hanya itu saja, program-program Anies-Sandi diatur sebaik mungkin untuk menjawab permasalahan-permasalahan esensial yang ada di DKI Jakarta seperti penyelesaian reklamasi, penanganan banjir dengan proyek naturalisasi, Kartu Jakarta Pintar Plus, transportasi, perumahan dan perekonomian rakyat.

Berkaitan dengan komodifikasi agama, Anies-Sandi memasarkan “penampilan-diri” mereka secara *image* sebagai pasangan calon kepala daerah yang dekat dan lekat dengan simbol keislaman. Sekalipun, Anies-Sandi tidak menggunakan atribut Islam yang banyak kecuali hanya peci dan baju putih, namun penampilan-dirinya seakan-akan menunjukkan representasi pemimpin Islam atau contoh figur politikus Islam yang kompeten. Hal ini bukan disebabkan oleh intensitas penggunaan atribut Islam oleh pasangan calon kepala daerah akan tetapi dipengaruhi oleh pemahaman-diri dari intersubjektivitas masyarakat Islam Jakarta yang dikonstruksi oleh tindakan-tindakan komodifikasi agama yang dikoordinasikan oleh ekspresi linguistik para aktor GNPF-MUI dan ekspresi simbolik tim pemenangan Anies-Sandi. Ini berarti, ketika para aktor GNPF-MUI mereproduksi komoditas politik dalam agama maka tim pemenangan justru sebaliknya melakukan reproduksi komoditas agama dalam politik.

Sifat terbolik-balik ini dilatarbelakangi oleh masifnya kampanye politik Anies-Sandi di masjid dan musala, akan tetapi aktornya, bukanlah tim pemenangan, namun

mereka adalah komunitas dari GNPF-MUI. Hal ini cukup beralasan karena apabila tim pemenangan Anies-Sandi yang melakukan kegiatan kampanye politik di masjid dan musala maka hal itu bertentangan dengan peraturan kampanye Komisi Pemilihan Umum yang secara eksplisit melarang kampanye politik di tempat-tempat ibadah³⁰². Berbeda kalau pelaksana kegiatan tersebut dilakukan oleh pengurus takmir masjid yang terafiliasi dengan GNPF-MUI sebagaimana yang terjadi di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan Masjid Abu Bakar, Pekayon Jakarta Timur.

Di Masjid Agung al-Azhar, pengurus masjid berkoordinasi dengan panitia Tabligh Akbar Politik Islam untuk mengadakan kegiatan Shalat Subuh Berjema'ah dan berlanjut Tabligh Akbar Politik Islam yang bertemakan dengan "*memilih pemimpin Muslim*". Para pengurus dapat menghindari pemahaman atas pelanggaran kampanye di dalam masjid dengan mengklaimnya sebagai pengajian untuk kepentingan umat serta bebas dari alat-alat peraga kampanye seperti brosur dan spanduk politik, bendera partai, kaos dan simbol-simbol politik lainnya yang ada di sekitar lingkungan masjid. Kendatipun, pengajian ini membahas politik dengan sub-tema pemimpin Muslim, mereka dapat menghindari sanksi dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) karena alasan pendidikan politik. Pendidikannya melalui mengedukasi umat yang awalnya mempunyai sikap apatis terhadap perpolitikan, utamanya PILKADA maka kegiatan ini justru memerintahkan umat Islam agar tidak mengambil GOLPUT sebagai pilihan politiknya, sehingga angka partisipasi masyarakat semakin meningkat. Hal ini sangat

³⁰² Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Diunduh dari https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%204%202017_UPLOAD.pdf diakses pada 27 Oktober 2018.

relevan dengan motivasi KPU agar masyarakat DKI Jakarta memaksimalkan suara pemilihannya dan menghindari GOLPUT.

Di tempat lain, Habib Rizieq Shihab memberikan materi pengajian Tabligh Akbar Politik Islam ke-8 di Masjid Abu Bakar As-Shidiq, Pekayon Jakarta Timur.³⁰³ Dengan menafsirkan kata “*wāli*” sebagai teman dekat, orang yang dipercaya, pelindung dan pemimpin dalam surat al-Maidah ayat 51, Habib Rizieq Shihab mengajak para jema’ah agar menolak orang Yahudi dan Nashrani menjadi pemimpin bagi mereka. Bahkan, dia mengklaim bahwa pembahasan dan penyampaian larangan memilih pemimpin non-Muslim di dalam masjid, tabligh akbar dan khutbah jum’at berhukum wajib untuk disampaikan kepada umat Islam karena larangan tersebut bersumber dari surat al-Maidah ayat 51 di mana ia adalah firman Allah yang mempunyai keharusan untuk dibacakan dan disampaikan dalam forum-forum majlis keagamaan. Secara eksplisit, muatan proposisional tersebut mempengaruhi ekspresi-diri para jema’ah dan sejumlah juru dakwah untuk senantiasa mengumandangkan dan menyiarkan pembahasan surat al-Maidah ayat 51 yang diyakininya sebagai firman Tuhan ke pelbagai kegiatan kultural-keagamaan bahkan dari rumah ke rumah warga. Berdasarkan pemahaman tersebut, para ulama dan juru dakwah GNPf-MUI semakin terlibat dan terhubung satu sama lain dalam suatu jaringan dengan atas nama “skenario Tuhan”.

³⁰³ Habib Rizieq Shihab, *Tabligh Akbar Politik Islam 8*, diunggah pada Channel Forum Umat Islam, 27 Maret 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=i36C82vqKGQ> diakses pada 28 Agustus 2018.

3. Kuasa atas Komodifikasi Agama: Dakwah atau Kampanye Politik?

Intensitas penggunaan agama sebagai komoditas politik di PILKADA DKI Jakarta 2017 dapat dikatakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dipicu bukan karena surat al-Maidah ayat 51-nya yang menjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran kata “*wāli*”, akan tetapi karena lebih banyak dipicu oleh siapa yang mengucapkannya dan bagaimana hubungan orang tersebut dengan kelompok tokoh agama Islam dari GNPF-MUI (Bachtiar Nashir, KH. Colil Ridwan, Habib Riziq Shihab, M. al-Khaththath dan lainnya) yang notabene mendukung penafsiran ayat itu tentang larangan pemimpin dari kalangan non-Muslim. Bahkan *the state of affairs* (keadaan faktual dan sensitif tentang kepemimpinan Islam) pada saat itu sudah dimulai dari kurang setengah tahun akan ada pelaksanaan PILKADA DKI Jakarta 2017.

Selain itu, orang yang mengucapkannya (Ahok) pun kurang mendapatkan simpati dari kelompok tokoh agama Islam tersebut dan kerap kali mendapatkan perlawanan dengan berupa aksi demonstrasi kepada gubernur Ahok pasca pasangannya, Joko Widodo menang dalam PILPRES 2014 dan dia menggantikannya sebagai gubernur DKI Jakarta secara konstitusional. Dari sini, tidak kurang-kurang para tokoh agama yang tidak menyukainya mulai melancarkan serangan-serangan secara linguistik dengan mengambil ruang-ruang publik-agama sebagai tempat melontarkan ketidaksetujuannya tersebut. Serangan ekspresif tersebut tentu saja menggunakan ayat-ayat suci al-Qur’an tentang “*wāli*” “*wallā*”, “*tawallā*” dan sejenisnya seperti dalam surat al-Maidah ayat 51 sebagai alat untuk ekspresi-diri mereka atas ketidakpuasannya terhadap pemerintah yang memberikan jabatan publik kepada orang non-Muslim di daerah mayoritas Muslim. Hal ini tentu saja berbeda dengan beberapa penelitian yang

menyimpulkan sentimen anti-minoritas untuk merebut kekuasaan dipicu oleh penggunaan politik identitas yang berawal dari kasus Ahok dalam penistaan agama.

Hal ini tentu saja berbeda dengan beberapa penelitian yang menyimpulkan sentimen anti-minoritas untuk merebut kekuasaan dipicu oleh penggunaan politik identitas yang berawal dari kasus Ahok dalam penistaan agama³⁰⁴. Padahal, ekspresi-diri para tokoh GNPf-MUI tersebut karena ketidakpuasan atas hasil politik menyebabkan mereka melakukan sejumlah tindakan komodifikasi agama tentang larangan dan penolakan mereka atas pemimpin non-Muslim serta menyodorkan rekomendasi pemimpin Muslim untuk Jakarta dengan *cover* “dakwah” yang disebarkannya di majelis taklim, khutbah jum’at, tabligh akbar dan pengajian-pengajian lainnya di dalam masjid-masjid maupun musala-musala.

Dalam hal ini, baik GNPf-MUI dan tim pemenangan Anies-Sandi mulai bekerja sesuai dengan porsi dan ranahnya masing-masing sehingga tujuan politik di kontestasi PILKADA DKI Jakarta 2017 dapat tercapai dan berhasil dengan mengalahkan dominasi suara pemilih Ahok yang notabene menyukainya karena kinerjanya. Misalnya, GNPf-MUI mempunyai kegiatan yang diberi nama **DUM** (Dakwah Ustadz Memberi), di mana kegiatan ini yang biasanya seorang ustadz itu datang di sebuah kegiatan keagamaan dan diberi *bisyyarah* (vakasi) atas ceramahnya oleh panitia penyelenggara kegiatan. Tetapi di kegiatan DUM tersebut, ustadz datang ke sebuah acara atau kegiatan dan memberi. Para ustadz yang diutus oleh GNPf-MUI datang ke tempat-tempat marginal dan yang

³⁰⁴ Mietzner, “Authoritarian Innovations in Indonesia: Electoral Narrowing, Identity Politics and Executive Illiberalism.” *Democratization* 27, no. 6 (2020): 1021–1036. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266>. Setijadi, “Ahok’s Downfall and the Rise of Islamist Populism in Indonesia.” Greg Fealy, *Accommodating Indonesia’s Islamist Fringe: The Case for a More Inclusive Electoral System*, *Indonesian Journal of Political Research (IJPR)*, Volume 1, December 2020, 25-40.

terpinggirkan seperti 3 kali daerah Pinang Rantai (diadakan acara sebanyak 3 kali) dan daerah Komplek Pemulung (2 kali) dan daerah sekitar Tanjung Priok (satu kali).

Para ustadz GNPf-MUI datang dan memberikan dana untuk membayar konsumsi dan menyewa *sound system* dan untuk keperluan lain-lain. Kemudian para ustadz tersebut memberikan ceramah dengan ceramah politik dan ekonomi kepada masyarakat, khususnya terkait dengan larangan pemimpin non-Muslim dan mewajibkan masyarakat untuk memilih pemimpin Muslim. Setelah selesai kegiatan ceramah, masyarakat diberi nasi kotak yang di dalamnya ada amplop yang isinya minimal 50.000 rupiah. Satu kali kegiatan DUM, menghabiskan paling sedikit 60 juta rupiah. Untuk menghadapi hari pemilihan 15 Januari 2017 PILKADA DKI Jakarta, maka GNPf-MUI mengadakan DUM 3 kali sehingga menghabiskan biaya 180 juta dan dikenakan menjadi 200 juta. Sumber dana DUM berasal dari donatur tetap GNPf-MUI dan donasi jema'ah di kegiatan tabligh akbar politik dan kegiatan keagamaan lainnya.³⁰⁵

Di pihak lain, tim pemenangan Anies-Sandi untuk memenangkan pasangan calon gubernurnya, mereka menggunakan tiga strategi kampanye politik; yaitu serangan darat, serangan udara dan operasi politik. Serangan darat adalah suatu strategi pemenangan politik yang diadakan secara darat dengan menyediakan relawan-relawan terlatih di 12.504 tempat pemungutan suara serta menyediakan koordinator untuk setiap RW dan regu penggerak pemilih untuk setiap gang di wilayah teritori kekuasaan yang akan ditaklukkan. Relawan terlatih selain ditugaskan sebagai saksi di tiap-tiap TPS, mereka juga diperintahkan agar menyisir warga di TPS-nya yang dianggap masuk dalam

³⁰⁵ Cholil Ridwan, Tabligh Akbar Politik Islam 7 – Subuh Berjamaah Spirit 212, diunggah oleh Channel Youtube Masjid Agung al-Azhar pada 18 Januari 2017. https://www.youtube.com/watch?v=GIR_SVsiQg&t=1856s diakses pada 02 Oktober 2018

kategori *swing voters* sehingga dapat diajak langsung untuk mengenal pasangan calon Anies-Sandi³⁰⁶. Relawan lebih banyak dari kalangan ibu-ibu dengan alasan karena ibu-ibu lebih mudah dan netral dalam berkomunikasi baik dengan sesama perempuan maupun laki-laki³⁰⁷.

Serangan udara lebih dekat dengan kegiatan-kegiatan yang berada di bidang teknologi informasi dan komunikasi sehingga tim pemenangan Anies-Sandi memberuk tim media yang meliputi media konvensional, media sosial dan tim data saksi pemilih. Khusus di media sosial, mereka didukung oleh relawan-relawan yang sudah di-setting untuk mengenalkan program dan personalitas Anies-Baswedan baik dari relawan tim pemenangan murni maupun dari relawan GNPf-MUI yang pernah dibai'at oleh Muhammad al-Khaththath di Masjid Agung al-Azhar, Jakarta Selatan pada saat pelaksanaan Tabligh Akbar Politik Islam tanggal 15 Januari 2017.

Strategi yang ketiga adalah operasi politik. Istilah operasi sangat dekat dengan dunia perang militer. Namun, tujuannya berbeda karena operasi militer bertujuan untuk keamanan, sedangkan operasi politik untuk perebutan kekuasaan politik. Operasi politik dapat diartikan sebagai suatu aksi perencanaan dan pengaturan yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan calon untuk mengendalikan pertempuran kampanye politik dari pihak lawan dengan cara muslihat. Misalkan, relawan Ahok menyebut dirinya dengan nama “teman Ahok” karena faktor kepemimpinan Ahok yang dinilai berhasil membawa sistem pemerintahannya yang bebas korupsi, kerja keras, transparansi dan akuntabilitas.

³⁰⁶ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161007001700-32-163861/tiga-strategi-kampanye-pilkada-dki-tim-pemenangan-anies-sandi> diakses pada tanggal 18 September 2017

³⁰⁷ Mardani Ali Sera, 3 Rahasia Kemenangan Anies-Sandi Pilgub DKI 2017, diunggah di Channel Youtube Mardani Ali Sera pada tanggal 20 Juni 2018. <https://www.youtube.com/watch?v=3xI6BVTf5Qc&t=141s> diakses pada tanggal 20 September 2017.

Hal ini dilawan dengan manuver politik melalui pemahaman arti “*wāli*” dalam surat al-Maidah ayat 51 yang diartikan dengan “teman setia”, sehingga terdapat larangan bagi sejumlah masyarakat untuk menjadikan orang non-Muslim sebagai teman setia.

4. Kepentingan Kelompok dan Identitas: GNPf-MUI dan Tim Pemenangan Anies-Sandi

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, bahwa baik GNPf-MUI dan tim pemenangan pasangan calon Anies-Sandi mempunyai strateginya masing-masing untuk melancarkan kegiatan dan capaian politiknya. Mereka adalah kelompok yang mempunyai kalkulasi rasional dalam kepentingan mengorganisasi dan memobilisasi umat Islam secara politik untuk memenuhi dukungan dan kepentingan rezim politik yang diinginkannya dengan cara reformulasi identitasnya yang baru³⁰⁸. Reformulasi identitas tersebut dapat dipastikan berupa gerakan politik Islam “212”. Identitas inilah yang menunjukkan bentuk-bentuk tuntutan dan kepentingan apa saja di balik demonstrasi yang mereka lakukan. Secara rasional, mereka meminimalkan kekalahan dan sebaliknya memaksimalkan capaian dua perolehan utama, yaitu; *pertama* yang berorientasikan pada keberhasilan pemahaman ideologis dan *kedua*; berorientasikan pada tujuan kemenangan politik.

Dengan bahasa lain, maksimalisasi capaian dua perolehan utama tersebut adalah agenda politik yang bermuatan kepentingan material (*material interests*). Hal ini cukup terlihat ketika GNPf-MUI berupaya untuk mengalahkan dominasi Ahok di DKI Jakarta dengan mengorganisasikan umat Islam dalam Aksi Bela Islam sehingga Ahok dapat

³⁰⁸ Jeffrey Kopstein and Mark Lichbach, *Comparatives Politics: Interests, Identities and Institutions in a Changing Global Order*, Second. (Cambridge: Cambridge University Press, 2005). 4.

ditindak secara hukum dan dijauhkan dari kepemimpinan di tiap elemen pemerintahan sesuai dengan pemahaman ideologis mereka tentang “larangan pemimpin kafir”. Di sisi yang lain, tim pemenangan mengorganisasikan masyarakat pemilih DKI Jakarta yang notabene beragama Islam untuk mengalihkan *voting*-nya dari yang semula memilih Ahok bergeser menjadi pemilih Anies-Sandi. Struktur kepentingan material yang mereka ajukan adalah bagaimana kepentingan-kepentingan tersebut diorganisasikan secara terstruktur di tengah-tengah masyarakat DKI Jakarta, bahkan Indonesia untuk mendapatkan kekuasaan yang dimotivasi oleh kesamaan identitas (sebagai orang Islam).

Kelompok kepentingan yang paling banyak mendapatkan kemanfaatan politik (*political utility*) adalah GNPF-MUI (termasuk organisasi masyarakat yang berafiliasi dengannya) dan tim pemenangan pasangan calon Anies-Sandi. Peneliti di bab sebelumnya (bab ketiga) sudah menjelaskan bahwa kelompok GNPF-MUI mempunyai hubungan yang tidak harmonis, bahkan rasa ketidaknyamanan dengan keberadaan Ahok di dalam struktur pemerintahan DKI Jakarta. Ketidaknyamanan tersebut kerap kali diwujudkan dalam bentuk demonstrasi di depan Balai Pemerintahan DKI Jakarta serta provokasi penolakan atas kebijakan publik yang telah dibuatnya. GNPF-MUI menemukan momentum untuk melawan serta menolak Ahok ketika ia tertuduh sebagai penista agama terkait penyampaian opininya tentang tafsiran Surat al-Maidah ayat 51.

Dengan aktor-aktor kunci seperti Bachtiar Nashir, Muhammad al-Khatthath dan Habib Rizieq Shihab, GNPF-MUI dapat menggerakkan dan mengumpulkan orang lebih dari setengah juta orang di Monumen Nasional Jakarta dalam Aksi Bela Islam 212 (Aksi Bela Islam Jilid III). Sebelumnya, mereka hanya dapat mengumpulkan orang yang tidak lebih dari 500.000 orang di dalam aksinya. Secara kelompok, GNPF-MUI terdiri

dari FPI (Front Pembela Islam), MIUMI Jakarta (Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia), FUI (Forum Umat Islam) sebagai kelompok utama yang melakukan penolakan dan demonstrasi kepada Ahok. Namun, kemudian disusul oleh kelompok organisasi Islam lainnya yang ikut serta memberikan dukungannya atas aksi-aksi mereka seperti HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) MMI (Mejlis Mujahidin Indonesia), Wahdah Islamiyah, Tarbiyah-PKS, DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia), KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), FS-LDK (Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus) dan lain sebagainya.

Di kasus Aksi Bela Islam 212, GNPF-MUI dengan para aktornya merasa dirinya sebagai kelompok yang mempunyai status “kelas istimewa” dengan identitas “pejuang Bela Islam 212” di mana para aktornya duduk di atas panggung politik dengan *cover* kegiatan keagamaan seperti istighosah, shalawat, shalat dan khutbah jum’at menyambut para pejabat pemerintahan termasuk Presiden Joko Widodo yang dianggap sebagai tamu undangan mereka di acara tersebut. Di balik penggunaan simbol-simbol ritual keagamaan tersebut, aktor GNPF-MUI menyampaikan maksud dan keinginannya agar menindak Ahok secara hukum sebagaimana mestinya dan segera menon-aktifkannya dari jabatan gubernur DKI Jakarta.

Kelompok-kelompok Islam yang berafiliasi dalam GNPF-MUI tersebut (HTI, MMI dan seterusnya) masing-masing mempunyai insentif sendiri (untuk kemudian dianggap kepentingan) atas pilihan selektif mereka di dalam penentuan alasan mereka mengikuti dan terlibat di dalam sejumlah aksi Bela Islam yang dimotori oleh GNPF-MUI tersebut. Berkenaan insentif kepentingan, sebagian mereka terlibat dalam Aksi Bela Islam hanya untuk meminta keadilan kepada pemerintah atas tuduhan penistaan

agama kepada Ahok. Sebagaimana lain menginginkan adanya penguasaan mereka pada semua pemilihan umum (PILKADA, PILPRES dan PILEG) dengan cara mengkonsolidasi umat Islam agar memilih pemimpin yang berkualitas secara agama dan personal³⁰⁹.

Dibalik kenyataan itu, terdapat kelompok lain sebagai kelompok pemboncengan (*free rider*) yang menghendaki insentif yang melebihi dari semua insentif kepentingan di atas. Kelompok ini menghendaki agenda politik yang melebihi sekedar tuntutan keadilan atas kasus Ahok. Mereka menuntut adanya revolusi di pemerintahan. Tuntutan revolusi cukup variatif, di antaranya adalah keinginan politik dalam penggulingan pemerintah yang sah secara konstitusional (Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla) di balik agenda demonstrasi di MONAS tersebut. Kelompok ini terdiri beberapa orang yang dianggap atau dituduh “akan atau berencana melakukan makar”, seperti Rachmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet dan Ahmad Dhani. Mereka dituduh akan melakukan makar dengan cara menuntut Sidang Istimewa kepada MPR RI agar dapat menggulingkan Presiden Joko Widodo. Mereka ditangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia atas tuduhan makar pada pukul 03.00 WIB sampai dengan 06.00 WIB waktu pagi hari Jum’at³¹⁰.

Dalam perspektif kelompok pemboncengan (*free rider*), kasus PILKADA DKI Jakarta 2017 dapat diletakkan dalam konteks yang lebih luas tentang relasi Islam dan negara yang ternyata tidak selesai. Bahkan muncul kembali gerakan-gerakan politik Islam di era pasca reformasi di mana salah satu di antaranya adalah menguatnya relasi

³⁰⁹ Rohmatin Bonasir wawancara dengan advokat GNPF-MUI; Kapitra Ampera di dalam “*Dengan 212 umat Islam ingin berkuasa lewat Pilkada, Pemilu dan Pilpres*”. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42184928> pada tanggal 22 Januari 2020.

³¹⁰

Islam dan negara dengan kemunculan “Islamisme”. Peneliti melihat para pengusung dan pembela GNPF-MUI tampak sekali bahwa mereka adalah penganut Islamisme formal yang cukup luar biasa di dalam keterlibatan mereka di sejumlah Aksi Bela Islam. Buktinya adalah banyaknya mereka membawa bendera hitam bertuliskan “*la ilaha illa allah muhammad rasulullah*” dan membentangkan bendera besar dan mengaraknya dari Jalan MH Thamrin menuju Tugu MONAS. Selain itu, para pendukung GNPF-MUI dan Aksi Bela Islam ini pun banyak diisi oleh orang-orang yang terlibat aktif di dalam organisasi kelompok Islam yang lekat identitasnya dengan gerakan politik Islam berideologi “Islamisme” seperti Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia, kelompok Tarbiyah yang dominan dengan orang-orang PKS, Wahdah Islamiyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Umat Islam (FUI). Meskipun kelompok-kelompok Islam tersebut sama-sama mengusung “syariah” atau paham Islamisme, akan tetapi dalam pandangan Indonesia sebagai *nation-state*, mereka terdapat perbedaan pandangan di mana HTI, MMI, Wahdah Islamiyah menginginkan penerapan “Islamisme” secara sempurna dan menolak nasionalisme. Sementara FPI dan FUI lebih menginginkan nasionalisme berlandaskan agama atau “NKRI ber-Syariah”.



Gambar. 4.1 Para Pandemo Mengarak Bendera Hitam di Jl. MH. Thamrin.
Sumber: www.panjimas.com

Komodifikasi agama di PILKADA DKI Jakarta 2017 tidak sekedar untuk memenangkan politik di DKI Jakarta, tapi dapat dibaca dalam konteks yang lebih luas tentang relasi Islam dan negara di Indonesia (dalam pengertian Islamisme) ketika kelompok-kelompok Islam yang dimotori oleh Habib Rizieq Shihab, KH. Fachrurazi, KH. Cholil Ridwan, dan Bachtiar Nashir membentuk Majelis Tinggi Jakarta ber-Syariah dengan kewajiban untuk memilih gubernur Muslim. Ironisnya, kelompok “pembonceng” menginginkan insentif yang melebihi dari sekedar penuntutan Ahok agar dipenjara oleh pihak kepolisian. Mereka berharap dengan pemilihan gubernur Muslim di PILKADA, menyebabkan DKI Jakarta dapat bersyariah nantinya. Bahkan, kejadian Aksi Bela Islam 212 dapat menjadi momentum besar yang dapat melancarkan keinginan politik “Islamisme” mereka terjadi dengan cara penggulingan Presiden Republik Indonesia yang seolah-olah sama seperti momentum peristiwa “Arab Spring” di Tunisia, Libya, Mesir, Maroko, Yaman dan Syiria.

Di pihak lain, di balik komodifikasi agama pada PILKADA DKI Jakarta 2017, terdapat kelompok “pembonceng” lainnya dari tim pemenangan pasangan calon Anies-Sandi. Sebagaimana didiskusikan di Bab sebelumnya bahwa PILKADA DKI Jakarta 2017 tidak dapat terlepas dari penggunaan ayat dan elemen penting dalam syiar agama Islam untuk meminta secara terang-terangan untuk memilih pemimpin atau gubernur Muslim dan tidak memilih pemimpin non-Muslim sekaligus penista agama kepada para jema’ah umat Islam. Kelompok ini secara paradigmatik menggeserkan pemahaman tentang Pemilihan atau coblosan ke pemahaman tentang keimanan. Penggeseran hak-hak politik menuju kepentingan keimanan tersebut terindikasi dengan adanya seruan dan kampanye politik melalui dakwah keagamaan bahwa siapapun dari orang Muslim yang tidak menyakini Surat al-Maidah 51 berarti larangan memilih pemimpin non-Muslim adalah patut dihukumi “kafir”. Dan apabila dia menyakini akan tetapi tetap memilih Ahok di PILKADA DKI Jakarta 2017 dan membelanya tidak bersalah dalam kasus penistaan agama maka dihukumi sebagai “orang munafik”, sehingga jenazahnya tidak pantas dishalatkan dan dibacakan doa serta tahlil atasnya.

Nampaknya, seruan-seruan kampanye politik yang berkedok “penggunaan narasi keagamaan” tersebut cukup berhasil meyakinkan serta mempengaruhi sejumlah masyarakat Muslim Jakarta bahkan di luar Jakarta untuk tidak menggunakan hak politiknya agar memilih calon Gubernur yang non-Muslim (Ahok) sekalipun dikatakan telah cukup berhasil memberikan program kebijakan publik yang baik. Hal ini terbukti dari tingkat partisipasi politik di PILKADA DKI Jakarta 2017 terdapat 78% melebihi tingkat partisipasi politik masyarakat Jakarta pada tahun-tahun sebelumnya yaitu sekitar 68%. Peningkatan partisipasi politik tersebut mengindikasikan bahwa terdapat

masyarakat Muslim di DKI Jakarta tidak begitu baik responnya terhadap sejumlah pelaksanaan Pemilihan Umum di DKI Jakarta lantaran adanya keyakinan sebagian kelompok Islam tidak menerima Indonesia sebagai *nation-state* yang sistem penerapannya adalah demokrasi (demokrasi dianggap *Taghut*). Selain itu, sebagian masyarakat Muslim Jakarta terpanggil untuk mendatangi Tempat Pungutan Suara (TPS) bukan karena panggilan sebagai warga negara untuk mendukung proses demokratisasi di PILKADA akan tetapi lebih dipengaruhi oleh panggilan keimanan untuk melawan kekuasaan Ahok yang dianggap telah zalim dalam kasus penistaan agama dan reklamasi Teluk Jakarta Utara.

Militansi kelompok Islam dalam memperjuangkan ideologi Islamisme-nya di Indonesia dimanfaatkan oleh kelompok tim pemenangan pasangan calon Anies-Sandi (dalam hal ini, bertindak sebagai *free rider*) dengan melakukan sejumlah aksi gerilya untuk mendapatkan kekuatan dukungan elektoral dari masyarakat pemilih DKI Jakarta. Sebagaimana yang telah dipaparkan di pembahasan sebelumnya tentang strategi tim pemenangan Anies-Sandi melalui tiga cara; yaitu strategi darat, udara dan operasi politik serta adanya strategi lainnya sesuai dengan arahan konsultan politiknya tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh umat Islam untuk memenangkan kontestasi politik di PILKADA DKI Jakarta 2017 sebagaimana yang terjadi di partai politik FIS al-Jazair. Pemanfaatan sumber daya tersebut salah satunya adalah memperkuat jaringan antar-masjid untuk menyuarakan tegaknya keadilan sehingga tidak hanya memperkuat jaringan partai politik saja.

Kelompok-kelompok Islam yang terafiliasi dengan GNPF-MUI dengan semangat militansinya (konon biasanya disebut dengan “spirit 212”) memanfaatkan

sumber daya simbol Islam tersebut dengan menjadikan “masjid” sebagai pusat mobilisasi dan kampanye tentang kepemimpinan seorang pasangan calon Muslim berhukum wajib di dalam PILKADA DKI Jakarta 2017. Dari sini muncul, kelompok Islam yang biasanya dianggap sebagai kelompok “jihadis Islamisme” beralih menjadi kelompok “jihadis elektoral” untuk dapat menguasai perpolitikan di Jakarta hingga Indonesia dengan cara dakwah, fatwa, pengajian di majlis taklim untuk mendorong masyarakat Islam agar datang di Tempat Pemungutan Suara di wilayahnya masing-masing.

Argumentasi tersebut cukup beralasan dikarenakan ia berdasarkan pada adanya sekelompok jihadis elektoral yang menyebut dirinya sebagai kelompok “tamasya al-maidah” yang mempunyai program di antaranya adalah 1) bergerilya untuk mengetuk pintu satu persatu di wilayah anggotanya masing-masing dan mengampanyekan larangan untuk memilih calon pemimpin non-Muslim. 2) mendatangi TPS-TPS yang tersebar di pelbagai pelosok DKI Jakarta yang bertujuan untuk mengawal jalannya pemilihan di TPS tersebut pada saat hari pencobloasan, seraya mengingatkan para calon pemilih agar senantiasa mengikuti petunjuk dan arahan mereka. 3) bergerilya dari masjid satu ke masjid yang lain atau dari musala satu ke musala lainnya untuk mengampanyekan bagaimana larangan surat al-Maidah ayat 51 untuk memilih calon gubernur non-Muslim.

Fakta lainnya adalah kelompok jihadis elektoral yang sejatinya representasi dari operasi politik yang sebagaimana ditunjukkan oleh tim pemenangan pasangan calon Anies-Sandi sebagai salah satu strategi pemenangan politik mereka. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai jiwa militansi dalam beribadah dan ber-*jaulah*

(berkeliling) dari satu masjid ke masjid yang lain atau dari satu musala ke musala lainnya yang semula bertujuan untuk mensyiarkan agama dan berdakwah, kemudian berubah aksinya untuk mendakwahkan keharusan dan kewajiban umat Islam untuk memilih calon pemimpin yang Muslim sekalipun di negara demokrasi. Di samping itu, para jihadis elektoral ini menggunakan gerakan shalat subuh berjema'ah untuk menangkal dan melakukan konfrontasi atas serangan subuh dari sejumlah tim sukses pasangan calon lainnya di mana waktu pagi menjelang waktu pemilihan (coblosan) sangat rentan dengan praktik *money politics* dan pembagian sembako.

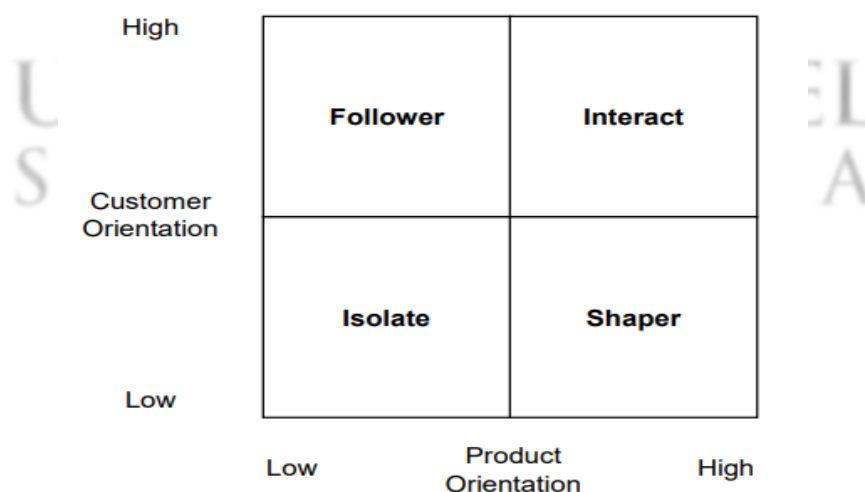
5. Pola Dasar Orientasi GNPF-MUI dan Tim Pemenangan Anies-Sandi dalam Komodifikasi Agama di PILKADA DKI Jakarta 2017

GNPF-MUI dan tim pemenangan Anies-Sandi mempunyai keterlibatan yang sangat kuat sepanjang perhelatan PILKADA DKI Jakarta 2017. Seperti yang sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, bahwa perhelatan PILKADA DKI Jakarta 2017 tidak dapat lepas dari peristiwa demonstrasi masyarakat Islam melalui Aksi Bela Islam pasca kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok yang juga notabene adalah seorang calon gubernur dari petahana. Secara *political marketing*, penjaringan calon gubernur (kandidasi) sebelum perhelatan kontestasi pemilihan umum tentu didasarkan pada hasil survei kandidat calon. Hasil survei kandidat ini dijadikan sebagai dasar kebutuhan masyarakat calon pemilih (*demand*) terhadap calon pemimpin yang diinginkannya guna menjadi lawan politik bagi pasangan calon yang terkuat (dalam hal ini Ahok, sebagai petahana).

Idealnya, sebuah produk akan mendapatkan penjualan yang menarik berdasarkan pada tingginya permintaan masyarakat (*demand*). Seorang calon pemimpin

adalah representasi dari produk yang dibentuk dan diciptakan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik (koalisi). Calon pemimpin ini (*as product*) sebaiknya relevan dengan permintaan masyarakat (*demand*). Dalam kasus PILKADA DKI Jakarta 2017, peneliti melihat bagaimana tim pemenangan Anies-Sandi menentukan pasangan calon Anies-Sandi berdasarkan tingginya permintaan masyarakat akan kebutuhan calon pemimpin yang berperilaku sopan santun, tidak arogan, dan berkata tidak kasar.

Spesifikasi terhadap kebutuhan calon pemimpin dalam proses kandidasi tersebut bergeser pada persoalan identitas agama. Pergeseran pola dasar ini dilatarbelakangi oleh adanya keterlibatan para tokoh GNPF-MUI menciptakan pandangan-pandangan keagamaannya (produsen) tentang tidak sahnya kepemimpinan non-Muslim yang terus menerus diproduksi secara komersial (komodifikasi agama). Oleh karenanya, komodifikasi agama tidak dapat lepas dari orientasi market (*costumer market*) dan orientasi produk (*product orientation*) dengan empat strategi utama; *follower*, *interact*, *shaper*, *isolate*.³¹¹



³¹¹ P. Berthon, J. M. Hullbert, and L. F. Pitt, "To Serve or Create? Strategic Orientation towards Customers and Innovations", *California Management Review*, Vol. 42. No. 1, 1999. pp. 37-58.

High	<p><i>Follower</i> <i>Market</i> mendorong produk; di mana produsen/perusahaan dengan sadar membangun standar produk dan jasa layanan kepada <i>customer/market</i> baik yang terstruktur maupun tidak. Produsen mengkaji kepuasan <i>customer</i> dan kualitas jasa layanan.</p>	<p><i>Interact:</i> Ada dialog antara <i>market</i> dan produk di mana masing-masing keduanya mempunyai hubungan sehingga mereka sudah mengarah pada tahap negosiasi</p>
	<p><i>Isolate:</i> Tidak ada komunikasi antara produk dan <i>market</i>, bahkan cenderung terisolasi salah satunya. Di sini, perusahaan hanya fokus pada nasibnya sendiri. Ia tidak melakukan semacam studi terhadap kebutuhan <i>customer</i> karena disibukkan oleh keadaannya sendiri.</p>	<p><i>Shaper:</i> Produk datang sebagai pembentuk <i>market</i>. <i>Customer</i> potensial dalam hal ini <i>market</i>, tidak sadar kalau mereka membutuhkan atau menginginkan keuntungan-keuntungan dari inovasi produk yang ditawarkan. Strategi ini mendasarkan pada prinsip bahwa inovasi produk tertentu menentukan kebutuhan manusia sekaligus menentukan sifat kebutuhan <i>customer</i> melalui pemberian produk/service yang baru, sehingga dapat menyebabkan perubahan pada perilaku dasar dalam <i>rational choice</i>.</p>
Low	Low	High

Gambar. 4.2 Strategi Marketing Berbasis pada Orientasi Market dan Produk
Diolah dari Berthon, Hullbert, & Pitt (1999).

Jika peneliti memanfaatkan pola dasar dalam strategi marketing di atas untuk menemukan pola dasar GNPF-MUI dan tim pemenangan Anies-Sandi dalam praktik komodifikasi agama di PILKADA DKI Jakarta 2017 maka peneliti menemukan GNPF-MUI di balik sebagai institusi keagamaan, dia seakan-akan menjadi sebuah perusahaan yang memproduksi calon pemimpin bagi DKI Jakarta pasca kasus penistaan agama dan ketidakharmonisan hubungan antara sebagian para tokoh GNPF-MUI dengan calon

gubernur petahana, Ahok. Calon pemimpin dalam hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah produk dengan menciptakan kriteria calon pemimpin dan terlibat dalam penjurangan bakal calon yang direkomendasikan kepada partai-partai politik di PILKADA DKI Jakarta 2017. Kriteria yang paling fundamental adalah calon gubernur yang mewakili orang Muslim Jakarta sehingga muncul “komersialisasi” Gubernur Muslim di PILKADA DKI Jakarta 2017. Di sini, GNPf-MUI merekomendasikan nama-nama sebagai bakal calon seperti Adhyaksa Dault, Nurdin Abdullah, Sandiaga Uno, Yusril Mahendra, Suyoto, Letjend. Sjafrie Sjamsoedin, Ustadz Yusuf Mansur dan Anies Baswedan.

Partai politik yang bertindak sebagai tim pemenangan yang berafiliasi dengan GNPf-MUI seperti PKS dan GERINDRA melihat bahwa di perhelatan PILKADA DKI Jakarta 2017 terdapat dua strategi kunci dalam marketing politik yang berdasarkan pada orientasi *market/customer* dan orientasi pada produk. Orientasi pada *market/customer* diartikan sebagai kemunculan para masyarakat Islam yang ikut terlibat di dalam Aksi demonstrasi Bela Islam 212 dan sebagainya yang menginginkan adanya tuntutan di dalam penindakan hukum kepada calon gubernur petahana, Ahok yang dituduh sebagai penista agama di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Ini adalah bukti banyaknya masyarakat Islam di saat itu yang tidak suka terhadap Ahok. Bila dilihat dari sudut pandang segmentasi pasar, maka masyarakat ini dapat dianggap sebagai “*market/customer* 212” yang membutuhkan calon pemimpin baru yang dapat menggantikan Ahok di DKI Jakarta. Ini berarti *market* atau *customer* butuh akan suatu produk baru yang dianggap dapat memaksimalkan keinginannya dalam konteks kepemimpinan dan pelayanan publik (*follower: market drives a product*).

Di dalam proses kandidasi tersebut, muncul pasangan calon Anies-Sandi sebagai tawaran produk yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan *market* (para *customer*) di mana tim pemenangan Anies-Sandi juga melakukan dua inovasi produk agar dapat menarik suara yang signifikan dari segmentasi pasar (*market*) lain yang berstatus “*swing voters*” (pemilih yang masih dapat berubah)³¹² dengan maksud agar mereka menjadi pemilih pasangan calon Anies-Sandi nantinya (*shaper: innovations of product shape market*). Dua inovasi produk itu adalah inovasi program kebijakan dan *branding* produk.

Inovasi program kebijakan seperti DP 0 Rupiah untuk persoalan perumahan yang pro-rakyat, naturalisasi sungai, program UMKM berbasis OK OC, menolak Reklamasi Teluk Jakarta, Kartu Jakarta Pintar Plus, interkoneksi antarmoda, dan meningkatkan bantuan sosial untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan keagamaan, lembaga sosial, Sekolah Minggu dan Majelis Taklim berbasis asas proporsionalitas dan keadilan. Adapun *branding* produk berarti menjual nama, citra, slogan, simbol, tanda atau kombinasi dari kesemuanya itu yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang dipromosikan oleh seorang calon³¹³. Di PILKADA DKI Jakarta 2017, pasangan Anies-Sandi -dalam hal ini- sebagai produk yang di-*branding* oleh tim pemenangnya dengan pasangan calon gubernur yang sopan santun, tidak arogan, dan Muslim. Branding produk tersebut sengaja dimunculkan oleh tim pemenangan pasangan calon yang bertugas sebagai tim marketing politik guna menjadi anti-tesis atas pesona

³¹² Di BAB III, peneliti telah menjelaskan bagaimana tim pemenangan Anies-Sandi selain fokus pada pemilih tetap mereka (30%), juga fokus pada pemilih yang status *swing voters* (40%). Pemilih *swing voters* ini dari para pemilih pasangan calon Agus-Sylvi di PILKADA DKI Jakarta 2017 Putaran Pertama dan kelompok pemilih berkategori kelas menengah, berpendidikan dan millennial dengan merekrut para selebritas sebagai juru kampanyenya.

³¹³ P. Kotler, V. Wong, J. Saunders, & G. Armstrong. *Principles of Marketing*. (Essex: Pearson Education Limited, 2005). 459.

calon gubernur petahana yang disimbolkan dengan arogan, ceplas-ceplos dan tidak beragama Islam. Tujuannya sangat jelas untuk mempengaruhi perilaku politik dari para *costumers/voters* baik dari segi segmentasi pemilih tetap, mengambang maupun pemilih lawan.

Tidak berhenti di sini, GNPF-MUI dan tim pemenangan pasangan calon Anies-Sandi melanjutkan marketing politiknya di poin “*interact*” di mana baik market maupun pasangan calon Anies-Sandi (*as product*) saling berinteraksi dan berdialog dalam berbagai negosiasi politik. Di sini selain berinteraksi yang berbasis pada orientasi market dan produk, telah terjadi juga praktik klientelistik antara calon dengan konstituennya. Interaksi antara market dan produk seperti contoh masyarakat 212 dengan pasangan calon Anies-Sandi di kegiatan pengajian politik Islam yang dilakukan di Masjid al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di sinilah muncul motif-motif yang melatarbelakangi terjadinya komodifikasi agama di PILKADA DKI Jakarta 2017.

B. Motif Komodifikasi Agama GNPF-MUI dan Tim Pemenangan Anies-Sandi di PILKADA DKI Jakarta 2017

Dalam pelaksanaan PILKADA DKI Jakarta 2017, baik GNPF-MUI dan Tim Pemenangan Anies-Sandi sama-sama berupaya sebisa mungkin untuk menarik simpati publik atas peristiwa penistaan agama (surat al-Maidah ayat 51) yang dituduhkan kepada Gubernur Ahok di saat kunjungan dinas di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Penarikan simpati publik ini setidaknya akan berjalan efektif dan efisien apabila dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya-sumber daya yang dimiliki oleh mereka berupa rasionalitas pengetahuan serta penguasaan pengetahuan atas keilmuan Islam yang bersifat doktriner (dalam hal ini peneliti menyebutnya sebagai *islamic doctinaire*

properties). Selain itu, pemanfaatan sumber daya simbol keislaman juga tidak luput dari perhatian mereka untuk senantiasa diproduksi sebagai komoditas yang relevan dengan Islam dan umat Islam (untuk kemudian peneliti menyebutnya dengan *islamic symbols properties*). Termasuk, arti kata “*wāli*” dalam surat al-Maidah 51 secara linguistik telah dikonstruksi oleh mereka sebagai simbol pemimpin Muslim dengan perbandingan simbolis terhadap Gubernur DKI Jakarta non-aktif Ahok (pemimpin non-Muslim) yang dianggap sebagai penista agama.

Bersamaan dengan perbandingan simbolis tersebut, GNPF-MUI meyakini dan meyakinkan kepada umat Islam bahwa terjadinya kasus penistaan agama dalam surat al-Maidah ayat 51 yang dituduhkan kepada Gubernur DKI Jakarta Ahok tersebut menyebabkan serangkaian tindakan dan gerakan umat Islam yang tidak dapat dihindari oleh siapapun karena mereka menganggapnya hal tersebut sejalan dengan skenario Tuhan. Dengan mengadopsi ayat al-Qur’an “*wa makarū wa makara Allāhu wa Allāhu Hoirul mākirin*”, sejumlah aktor merancang tindakan-tindakan strategis melalui mekanisme program dakwah dengan pelibatan unsur rasionalitas keilmuan Islam dan penguasaan atas properti simbol-simbol keislaman demi keberhasilan berorientasi-pemahaman secara ideologis kepada umat Islam.

Di samping itu, tim pemenangan Anies-Sandi juga tidak dapat luput dari sejumlah aktivitas komodifikasi agama dalam kontestasi politik lokal. Sekalipun, intensitas aktivismenya tidak begitu sering seperti halnya yang dilakukan GNPF-MUI. Namun, marketing politik yang dilakukannya seolah-olah mem-*branding* Anies dan Sandi sebagai figur politik yang disimbolkan sebagai pemimpin Muslim karena melekatnya “penampilan-diri” mereka dengan *branding* agamis dan bermoral.

Komodifikasi *branding* agamis dan bermoral pada pemimpin Muslim tersebutlah memberikan indikasi kuat adanya praktik tindakan komodifikasi agama pada tubuh pasangan calon pemimpin dengan ekspresi-ekspresi simbolis di dalam penampilan-diri keislaman, melebihi atas praktik-praktik penggunaan simbol-simbol agama yang bersifat formalistik. Tindakan komodifikasi agama ini dilakukan agar dapat mencapai keberhasilan yang berorientasikan pada tujuan politik. Berikut ini adalah penjelasan motif-motif yang mendasari tindakan komodifikasi agama baik yang dilakukan oleh GNPf-MUI dan tim pemenang Anies-Sandi di PILKADA DKI Jakarta 2017.

1. Motif Konflik Ideologi Politik

Tidak dapat dipungkiri bahwa GNPf-MUI menginginkan sebuah uji ketahanan ideologi yang diimplementasikan oleh Indonesia, yaitu Pancasila dari segala ancaman lainnya yang bersifat ideologis. Komodifikasi agama dalam PILKADA DKI Jakarta 2017 tidak meninggalkan terjadinya sebuah motif yang berlatarbelakang perbedaan kepentingan ideologi (*ideological interest conflicts*). Motif konflik ideologi politik adalah sebuah alasan politik yang mendorong para aktor GNPf-MUI untuk melakukan perlawanan karena adanya kepentingan ideologi politik yang berbeda. Perlawanan tersebut sepertihalnya GNPf-MUI menggunakan ayat-ayat al-Qur'an dan penafsirannya sebagai komoditas konfrontasi atas kejadian penistaan surat al-Maidah ayat 51 pada peristiwa Pilkada DKI Jakarta 2017.

Guna mendukung kesimpulan tersebut, berdasarkan pada pernyataan konflik ideologi yang disampaikan oleh Ketua GNPf-MUI, Bachtiar Nashir dalam menjelaskan masalah penistaan agama dengan tertuduh gubernur Ahok, di mana ia menunjukkan adanya hubungan ayat 51 surat al-Maidah secara literal dengan ayat sebelumnya (ayat

50 surat al-Maidah) yang ia terjemahkan bahwa “apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki?”. Dia menyatakan bahwa mereka (orang-orang yang berideologi non-Islamis) menginginkan hukum jahiliyah dengan tuduhan bahwa mereka memaksa umat Islam agar menerapkan Sila Pertama Pancasila dengan pernyataan “Ketuhanan” saja, tanpa “Yang Maha Esa”.

Dalam pandangan Bachtiar Nashir, konsep ideologi “Bertuhan” secara umum dengan penghapusan kata “Yang Maha Esa” adalah pengejawantahan dari penerapan hukum jahiliyah. Ini juga terjadi pada Sila Kedua di mana dalam pandangannya, “Kemanusiaan” akan dijahiliyahkan karena tidak ada nantinya kata-kata “yang adil dan beradab”. Adanya sejumlah permohonan hak pengakuan atas LGBT dengan dalih hak asasi manusia internasional membuat Sila Kedua tersebut diartikan sebagai kebebasan tanpa batas dari segala otoritas. Sila Ketiga pun turut dipersepsikan olehnya sebagai sila yang akan juga dirubah dari “Persatuan Indonesia” menjadi “Persatuan Global”. Persatuan global dapat diartikan sebagai negara-negara yang didukung oleh kekuatan dua negara, Cina dan Rusia yang tengah mengalahkan hegemoni dunia Barat. Dia menuduhkan kalau Indonesia saat ini tengah dijadikan sebagai negara “ultra-Tongkok”.

Pentolan GNPF-MUI tersebut menganggap kalau Indonesia sudah benar-benar menggunakan sistem liberal sehingga negara ini sudah menerapkan sistem jahiliyah yang mereka inginkan. Berkaitan dengan keadilan di Indonesia, ia melihat bagaimana keadilan justru mengalir pada kemakmuran elitis yang memihak para pengusaha Cina dan praktik kartel dalam partai politik dengan sistem korporasi politik. Keterlibatan pemodal dalam kontestasi politik lokal juga menunjukkan bagaimana sistem politik

yang masih dalam pola-pola kejahiliah³¹⁴. Jahiliah di sini dapat dipahami sebagai sebuah sistem yang mencakup cara berpikir, bersikap dan berideologi yang sama seperti di masa jahiliah dan masa penjajahan.

Termasuk bagian dari kejahiliah tersebut adalah banyaknya orang Muslim bersimpati untuk memilih Ahok kembali menjadi gubernur DKI Jakarta dalam kontestasi politik PILKADA DKI Jakarta 2017. Bachtiar Nashir menilai bahwa hal tersebut cerminan dari penyebaran ideologi sekuler-liberal dalam diri umat Muslim dan takut memilih pemimpin se-agama karena takut dianggap (dicap) sebagai pelaku SARA secara sosial-masyarakat. Padahal, agama Islam melarang umat Muslim untuk menjadikan orang non-Muslim sebagai teman dekat apalagi menjadi seorang pemimpin sebagaimana yang ada di dalam surat al-Maidah ayat 51. Pemahaman demikian menjadi sumber konflik ideologis bagi GNPf-MUI di mana ideologi politik Islamisme seharusnya menjadi penuntun bagi Pancasila sebagai ideologi politik negara Indonesia.

Oleh karenanya, mereka mengambil jalan jihad politik sebagai tanda perlawanan ideologis tersebut dengan meyakini bahwa ber-jihad adalah bagian dari dakwah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan umat Islam di PILKADA DKI Jakarta 2017 yang kala itu sudah dipermalukan dan dipecundangkan oleh kekuasaan hegemoni Cina melalui kepemimpinan gubernur Ahok di Jakarta. Para aktor GNPf-MUI mewajibkan pemerintah agar melek dan kembali kepada *sunnah*, di mana ranah politik adalah lokomotif dakwah yang dicontohkan oleh *rasūlullah* dan *khulafā rāshidīn*³¹⁵.

³¹⁴ Bachtiar Nashir, Hikmah Surat al-Maidah Ayat 50-54. Diunggah oleh Channel Youtube AQL Islamic Center pada 21 November 2016. <https://www.youtube.com/watch?v=2w6ZgbIMZE8&t=735s> diakses pada 02 Oktober 2018.

³¹⁵ Cholil Ridwan, Tabligh Akbar Politik Islam 7 – Subuh Berjamaah Spirit 212, diunggah oleh Channel Youtube Masjid Agung al-Azhar pada 18 Januari 2017. https://www.youtube.com/watch?v=GIR_SVsiOg&t=1856s diakses pada 02 Oktober 2018

Konflik ideologi antara ideologi non-Islam dan ideologi Islamis mendorong KH. Cholil Ridwan, seorang aktivis GNPf-MUI untuk berasumsi bahwa musuh utama umat Islam saat PILKADA DKI Jakarta 2017 adalah *Hizbu as-shaytan* (Pasukan atau pendukung Partai Setan). Sementara, umat Islam adalah *Hizbu Allah* (Pasukan atau Pendukung Partai Allah). Ia membedakan dua kelompok kepartaian di PILKADA DKI Jakarta 2017 dengan dua sebutan; *front-Kuffar* dan *front-mukminin*.³¹⁶ Kontestasi politik di PILKADA DKI Jakarta 2017 bukan hanya memperebutkan siapa yang menjadi pemimpin secara eksekutif di DKI Jakarta akan tetapi bergeser secara asuntif menjadi perebutan kekuasaan ideologi politik dari ideologi non-Islamis menjadi ideologi Islamisme. Termasuk juga soal kepemimpinan Islam dalam sebuah negara adalah bagian ideologi Islamisme di mana ideologi ini diyakini sebagai bagian dari pada akidah (keyakinan).

2. Motif Rasionalitas Moral dalam Politik

Tindakan komodifikasi agama kerap terjadi di dalam ruang-ruang publik Islam seperti masjid, musala, majlis taklim dan tabligh akbar. Majlis taklim dan tabligh akbar sama-sama menerapkan metode pengajian di mana ia adalah kegiatan pendidikan keumatan. Tidak jarang, para aktor GNPf-MUI (ulama dan juru dakwah yang terafiliasi di dalamnya) menjadikan pengajian sebagai sarana penyampaian materi keagamaan sesuai dengan masalah kekinian. Dan masalah kekinian sesuai konteks keadaan aktual saat itu (*the state of affairs*) adalah surat al-Maidah 51 dan pemimpin Muslim yang dihubungkan secara paradoksial, dengan penistaan agama melalui surat al-Maidah 51 oleh Ahok dan pemimpin non-Muslim di dalam PILKADA DKI Jakarta 2017.

³¹⁶ Ibid.

Tidak dapat dipungkiri, kalau muatan pengajian tersebut bernuansa politik meskipun para aktor GNPF-MUI memahaminya sebagai bagian dari dakwah yang harus disampaikan kepada umat Islam karena mereka menganggapnya sebagai tanggung jawab moral. Klaim atas tanggung jawab moral tersebut berpengaruh pada bagaimana para aktor GNPF-MUI melampaui batasnya dari seorang juru dakwah dan penyampai isi pesan al-Qur'an menjadi juru kampanye dan penyampai standar moral. Misalkan, para ulama dan juru dakwah GNPF-MUI menganggap dirinya sebagai penggerak moral umat yang seharusnya diperlukan untuk memilih pemimpin di PILKADA DKI Jakarta di saat umat Islam dibingungkan dengan persoalan moral-etis terhadap salah satu pasangan calon yaitu Ahok sebagai petahana (*incumbent*) yang dianggap baik dalam kinerja dan kepemimpinannya di pemerintahan DKI Jakarta namun di sisi lain, ia adalah seorang non-Muslim yang tertuduh menistakan agama melalui Surat al-Maidah ayat 51.

Persoalan moral pada diri gubernur petahana Ahok tersebut tidak cukup di situ. GNPF-MUI melihat bagaimana seorang pemimpin non-Muslim memimpin masyarakat Jakarta yang mayoritas Muslim adalah persoalan yang dianggap “tidak bermoral”. Sejak pengangkatannya sebagai wakil gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Joko Widodo hingga akhirnya dia menggantikannya sebagai pejabat teknis dan selanjutnya gubernur DKI Jakarta yang sah secara konstitusional, keberadaan Ahok yang notabene adalah seorang non-Muslim dan dari keturunan Cina (kelompok minoritas), mereka sebelum munculnya gerakan GNPF-MUI sudah mempunyai pandangan “menolak” Ahok sebagai pemimpin DKI Jakarta.

Di antara mereka ini adalah Bachtiar Nashir yang saat itu menjadi Sekretaris Jenderal Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia (MIUMI) dan ketua Majelis

Pelayan Jakarta (MPJ) dan Habib Rizieq Shihab (Petinggi FPI) sudah menentang keras adanya kepemimpinan dari tangan non-Muslim, bahkan seseorang yang berketurunan Cina di mimbar-mimbar pengajian keagamaan. Penentangan tersebut diungkapkan dengan narasi yang spontanitas mengarah pada identitas personal Ahok seperti sebutan “pemimpin kafir” dan “Cina”.

Para aktor GNPf-MUI menolak apabila sebutan “pemimpin kafir” dan “Cina” dianggap sebagai suatu hal yang menyangkut SARA. Alasannya adalah ulama adalah agen dakwah dan pendidikan bagi umat Islam, secara moral dia harus mengingatkan umat Islam untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan agamanya, selayaknya tokoh Islam menasehati Muslimah agar tidak memilih suami kafir. Dalam rasionalitas mereka, standarisasi penyebutan SARA atau bukan itu bergantung pada siapa yang mengucapkan dan kepada siapa ucapan itu disampaikan. Jika ucapan untuk memilih pemimpin Islam dari tokoh Islam kepada umat Islam maka hal itu bukanlah termasuk SARA melainkan suatu hal yang boleh dibilang ber-moral karena tujuannya untuk pengamanan internal umat Islam.³¹⁷

3. Motif Mitigasi Politik

Komodifikasi agama dalam PILKADA DKI Jakarta 2017 semakin gencar dilakukan karena ada motif yang mendorongnya dengan apa yang disebut sebagai motif mitigasi politik. Motif mitigasi politik adalah motif yang dilatarbelakangi oleh sejumlah pikiran kekhawatiran GNPf-MUI akan terjadinya bencana berupa krisis dan kerugian yang dapat mengancam masa depan umat Islam secara ekonomi politik, sebab dominasi

³¹⁷ <https://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2016/09/15/46170/wajib-memilih-pemimpin-muslim-itu-seperti-melarang-muslimah-suami-kafir/> diakses pada 28 September 2018.

politik kartel antara pengusaha asing (Cina) dan pemerintah. Serangkaian upaya dilakukan oleh GNPF-MUI untuk mengurangi atau menghindari risiko krisis tersebut dengan cara jihad pemikiran dan politik agar dapat merebut kekuasaan politik dan ekonomi. Dua kekuasaan tersebut harus direbut dengan sebuah pertarungan baik itu pertarungan ekonomi maupun pertarungan politik di tanah Ibukota DKI Jakarta, khususnya pertarungan dalam perebutan hak lahan di kampung Luar Batang yang diproyeksikan sebagai jalur pelintasan menuju Pulau Reklamasi Teluk Jakarta Utara.

Dalam penelitian Charlotte Setijadi, ketidakstabilan ekonomi dan politik di Indonesia menyebabkan sentimen anti-Cina semakin meningkat di saat pelaksanaan PILKADA DKI Jakarta 2017 dengan salah satu calon gubernurnya adalah Ahok yang notabene berketurunan etnis Cina. Tidak menutup kemungkinan terjadinya sentimen anti-Cina yang menjadikan masyarakat Indonesia berketurunan Cina menjadi sasaran kelompok umat Islam yang merasa frustrasi akibat persaingan ekonomi global yang juga turut memberikan *impact* kepada perekonomian Indonesia.³¹⁸

Masalah tersebut menamhan kekhawatiran GNPF-MUI apabila kepemimpinan Ahok berlanjut dua periode pada kemenangannya di PILKADA DKI Jakarta 2017. Mereka khawatir kepemimpinan Ahok bukannya memberikan solusi kehidupan yang nyaman dan damai akan tetapi sebaliknya kehidupan yang membuat masyarakat Muslim Jakarta krisis dan terpinggirkan akibat praktik kartel politik dalam proses perumusan kebijakan dan *rent-seeking* dalam pengelolaan sumber daya ekonomi di Jakarta. Hal ini menandai adanya persaingan politik yang begitu kompleks yang melibatkan aktor

³¹⁸Setijadi, "Anti-Chinese Sentiment and the 'Return' of the Pribumi Discourse." *Contentious Belonging*, 2019, 194–213.

politik (elite) di tingkat pemerintah DKI Jakarta dan masyarakat yang saling bersaing dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan ekonomi dan politik.

Ketua GNPF-MUI, Bachtiar Nashir bersama KH. Cholil Ridwan (aktivis GNPF-MUI), KH. Abdul Raysid Abdullah Syafi’I, KH. Syuhada Bahri (mantan Ketua DDII), dan Neno Warisman (muballighah) pernah melakukan konfrontasi politik kepada gubernur DKI Jakarta Ahok di bulan Mei 2016 karena Ahok telah melakukan penggusuran tanah pada sejumlah masyarakat Jakarta yang tinggal di Kampung Akuarium, pasar ikan dan Luar Batang, Jakarta Utara. Di kawasan tersebut, Ahok berencana akan membangun wisata religi dan wisata bahari dengan konsep plaza dari arah Teluk Sunda Kelapa ke Masjid Luar Batang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat itu ingin menertibkan permukiman dan Pedagang Kaki Lima di sekitaran Pelabuhan Sunda Kelapa yang dianggapnya telah menyalahi aturan dalam menempati lahan negara dan bibir laut. Penertiban dilakukan agar dapat ditata lebih rapih lagi menjadi kawasan situs sejarah Jakarta (kampung *Heritage*) yang tidak jarang didatangi oleh para peziarah dari berbagai daerah. Akan tetapi sejumlah pihak menganggapnya sebagai penggusuran warga setempat.

Kekhawatiran atas dominasi peran Ahok dalam situs-situs bersejarah di kompleks permukiman Islam menyebabkan para aktor GNPF-MUI mulai melakukan tindakan komodifikasi agama dengan menyebutnya sebagai pemimpin yang mengusir warganya dari kampung halamannya demi kepentingan kekuasaan ekonomi-politik. Bachtiar Nashir kemudian mengutip ayat al-Qur’an dari Surat al-Mumtahanah: 8-9 yang diartikannya “Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama, dan tidak mengusir kamu dari

halaman kamu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil”. Ayat berikutnya “sesungguhnya Allah melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu; orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan Agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka kawan, mereka itulah orang-orang zalim”. Dari dua ayat tersebut, setidaknya masalah pengusuran warga Kampung Akuarium, Pasar Ikan dan Luar Batang sudah mencakup dua kriteria yang disebutkan yaitu; Ahok memusuhi mereka (umat Islam) dan mengusir dari kampung mereka³¹⁹.

Sebagai konfrontasinya, apabila gubernur Ahok menggunakan Peraturan Daerah (Perda) dan mengatasmakan hukum untuk melakukan sejumlah tindakan koersif yang dapat mengancam kehidupan warga Muslim Jakarta maka GNPF-MUI tidak menggunakan politik identitas (rasis) sebagaimana para peneliti lainnya sampaikan, akan tetapi justru menggunakan penafsiran-penafsiran agama secara lingustik-skriptualistik yang diproduksi sebagai komoditas publik sesuai dengan keadaan situasi aktual (*the state of affairs*) yang telah dikonstruksinya, seperti pengusuran tempat permukiman warga Islam dan penataan situs-situs Islam di Teluk Sunda Kelapa, Jakarta Utara.

Keberlanjutan kepemimpinan Ahok di kursi jabatan gubernur DKI -jika menang lagi- juga diasumsikan akan mengancam kehidupan dan kebebasan masyarakat Muslim Jakarta dengan sejumlah aktivitas persaingan ekonomi dan kepemilikan tanah. Krisis-krisis yang melanda masyarakat Muslim Jakarta semakin tidak dapat terhindarkan dan

³¹⁹ Bachtiar Nashir, Ini Dalil Melawan Kezaliman Ahok. Diunggah oleh Channel AQL Islamic Center pada 23 April 2016. <https://www.youtube.com/watch?v=6FuHjvm9XL0&t=594s> diakses pada 29 September 2018.

harus dicarikan penanganan sedini mungkin sekalipun itu dengan cara perjuangan Islam yang bersifat keras baik dalam bentuk jihad intelektualisme pemikiran dan jihad aktivisme politik.

Penguasaan serta perebutan atas lahan dan kawasan di Jakarta Utara seperti perbandingan kehidupan warga di kampung Pluit dan kampung Luar Batang menandai adanya jarak yang cukup signifikan dalam kecemburuan sosial di mana kampung Pluit yang dikelilingi perumahan dan permukiman mewah sementara kampung sebelahnya yaitu kampung Luar Batang terkesan tidak rapih dan jauh dari gemerlap pembangunan. Menariknya adalah rumah kediaman gubernur Ahok ada di komplek Pantai Mutiara, sekitaran Kampung Pluit Jakarta Utara yang notabene menjadi kawasan elite warga beretnis Tionghoa. Hal ini kemudian di balik pertarungan lahan dan kawasan, fakta tersebut dinarasikan juga sebagai perbedaan latar belakang sosial; Tionghoa dan Pribumi.

Bukan menjadi rahasia umum, bahwa Kampung Luar Batang adalah tempat kelahiran ketua GNPF-MUI, Bachtiar Nashir di mana kampung ini menjadi salah satu tempat yang akan menjadi akses pintu masuk menuju proyek reklamasi Teluk Jakarta Utara. Ketakutan dan kekhawatiran masyarakat Kampung Luar Batang makin nampak ketika muncul isu ancaman penggusuran bagi warga Kampung Luar Batang yang tinggal hidup di area kawasan yang bukan hak dan miliknya atau milik pemerintah daerah karena dianggap Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebagai permukiman liar yang harus ditertibkan. Memang begitu jelas, pemerintah DKI Jakarta tersebut dipimpin oleh Gubernur Ahok yang saat itu masih menjabat. Penolakan itu tetap terjadi meskipun

pemerintah DKI Jakarta berencana menyiapkan rumah susun bagi warga yang tergusur³²⁰.

Oleh karena itu, dalam konteks PILKADA DKI Jakarta 2017, GNPf-MUI mewajibkan ulama dan tokoh Islam agar melek politik atas situasi kepemimpinan Ahok di saat itu yang juga mewajibkan mereka agar melek agama (politik Islam) sebagai ideologi moral politik menyikapi dan memahami muatan-muatan proposisional surat al-Maidah ayat 51 (yang digunakan untuk melawan PERDA atau atas nama hukum) dengan berbagai macam ekspresi-diri secara linguistik yang disampaikan di kegiatan-kegiatan keagamaan (majlis taklim, khutbah jum'at dan pengajian tabligh akbar).

4. Motif Hegemoni Politik Ulama 212

Tidak dapat dipungkiri, bahwa keberlangsungan komodifikasi agama yang terjadi di PILKADA DKI Jakarta 2017 tidak terlepas dari pengorganisasian GNPf-MUI dalam membentuk jaringan sistemik yang terbentuk melalui produksi bahasa dan sistem tanda simbolis “Islam, syariah dan ulama” dengan proyeksi populisme Islam “tegaknya keadilan dan hukum” bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Pengorganisasian ini dapat dilihat dari bagaimana serangkaian aksi tindakan yang menggunakan agama sekaligus beralih atas nama agama secara simbolis menjadi objek konsumsi yang bersifat pasti yang tampil dan tampak di Aksi Bela Islam dan mobilisasi umat Islam untuk menolak dalam memilih Ahok dan memberikan dukungan elektoralnya kepada Anies Baswedan. Penolakan tersebut tidak cukup di sini karena penolakan tersebut sejatinya memberikan

³²⁰ Wawancara Alvin dengan Bachtiar Nashir, *Pandangan Ustaz Bachtiar soal Ulama Terjun ke Politik Part 02 - Alvin & Friends 22/04*, dalam kanal Youtube Prime Show yang diunggah pada 22 April 2019.

<https://www.youtube.com/watch?v=rWoAj8cOJog> diakses pada tanggal 18 Nopember 2019

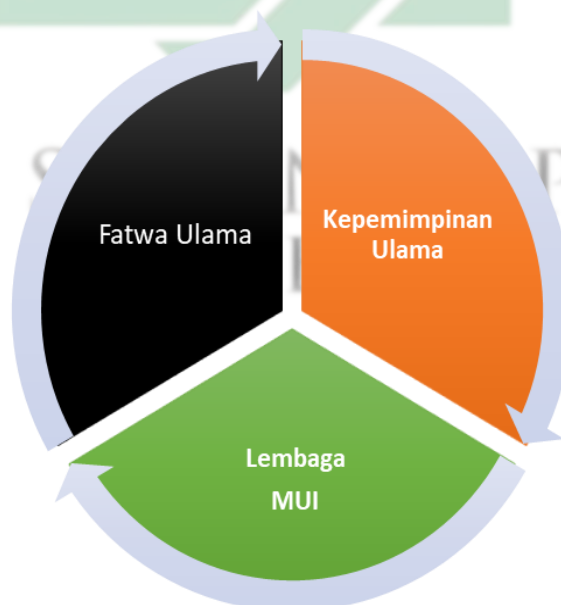
motif lain agar ikut menolak segala aktivitas tindakan ekonomi dan politik orang yang mempunyai kesamaan identitas kultural-sosial-politik dengan Ahok.

Penolakan tersebut cukup beralasan karena GNPF-MUI merasa ada praktik politik oligarkis dan ekonomi oligopolis yang terjadi di DKI Jakarta. Berkali-kali, GNPF-MUI di balik menarasikan pandangan politik dan ekonominya dengan kekuatan simbol agama, mereka juga secara populis mensyiarkan kekuatan politik lokal di DKI Jakarta, bahkan Indonesia dikuasai oleh segelintir orang dari kelompok pemodal asing. Karena sasarannya adalah Ahok, maka kelompok pemodal tersebut ditujukan pada kesamaan identitas etnis Cina (9 Naga). Ini terlihat bagaimana mereka kerap kali memperjuangkan hak orang-orang yang terdampak isu reklamasi Teluk Jakarta. Di samping itu, kelompok pemodal Cina juga dianggap sebagai kelompok yang memainkan ekonomi serta mengendalikan sebagian besar aset dalam pasar untuk sebuah sektor properti dan ekonomi.

Di sini, GNPF-MUI ingin terlibat dan menghadapi langsung kekuasaan politik oligarkis dan ekonomi oligopolis tersebut dalam konteks persaingan sempurna. Persaingan sempurna merupakan mekanisme pasar yang memiliki konsep penjual dan pembeli dalam jumlah yang besar. Politik oligarkis dan ekonomi oligopolis dianggap sebagai dua bentuk penyimpangan yang paling ekstrem dalam persaingan sempurna. Kendati demikian, persaingan sempurna tidak membutuhkan modal yang sedikit. Ukuran kekayaan modal dari tiap-tiap aktor GNPF-MUI sangat kecil jika dibandingkan dengan total kekayaan yang ada di dalam pasar oligarkis dan oligopolis tersebut. Oleh karenanya, GNPF-MUI menggunakan citra dan ruang agama sebagai moda produksi umat Islam dengan pemberian pemahaman naratif melalui dakwah dan

pengajian (*tarbiyah*) agar umat Islam dapat membantu dan mendonasikan tenaga dan uangnya dalam agenda politik GNPF-MUI di pusran persaingan sempurna tersebut.

Dalam hal ini, nampaknya, GNPF-MUI mencoba untuk melakukan efisiensi hegemoni. Efisiensi ini dilakukan dengan cara memaksimalkan keuntungan momentum “kasus Ahok dalam penistaan agama” untuk pemenuhan kebutuhan pribadi para aktor GNPF-MUI yang menginginkan hegemoninya secara laten terpatri di dalam kultur persaingan kekuasaan politik dan ekonomi di DKI Jakarta atau bahkan nasional. Untuk memberikan kekuatan hegemoni politiknya, GNPF-MUI mempunyai tiga kerangka berpikir yang harus ditaati oleh anggota kelompok dan simpatisannya (peneliti menyebutnya sebagai trias epistemologi politik 212), yaitu; Fatwa ulama, kepemimpinan ulama dan lembaga MUI yang secara spesifik mendapati transisi dari alam pikiran GNPF-MUI menuju budaya produktivitas interpretasi keagamaan yang potensinya tak terbatas.



Gambar.5.1 Trias Epistemologi Politik 212

Sumber: peneliti mengolah dari pidato Bachtiar Nashir di kegiatan Spirit 212: Energi al-Maidah 51 di Masjid Raya, Makassar, pada 2 Januari 2017.³²¹

Trias epistemologi politik 212 melahirkan politik tokoh ulama 212 dengan melanjutkan visi GNPf-MUI dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan keadilan berdasarkan hukum. Penegakan tersebut mempunyai hubungan korelasional dengan realisasi visi tegaknya al-Maidah ayat 51 pasca kasus Ahok dalam penistaan agama di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Bukanlah suatu hal yang samar lagi, bahwa tuntutan tegaknya al-Maidah 51 berarti terwujudnya pemimpin Muslim bagi segenap umat Islam di perpolitikan lokal dan bahkan nasional. Bahwa porsi keadilan sesuai dengan ukuran jumlah penduduk di daerah atau Indonesia secara umum³²². Inilah yang kemudian menjadi landasan pemikiran politik ulama 212 bahwa di mana ada umat Islam sebagai mayoritas penduduknya, maka pemimpin haruslah dari kalangan Islam. Politik Ulama 212 tidak mempersoalkan suatu daerah dipimpin oleh orang non-Muslim jikalau di daerah tersebut didominasi oleh penduduk non-Muslim baik sebagai gubernur, walikota ataupun bupati, seperti daerah Bali, Papua, Maluku Barat Daya, Nusa Tenggara Timur dan lain-lain. Akan tetapi, jika konteksnya adalah Pemilihan Presiden maka ulama 212 secara politik tidak akan menerima keberadaan calon pemimpin dari kalangan non-Muslim baik sebagai calon presiden maupun wakil presiden sesuai dengan standar proporsional jumlah pemeluk agama di Indonesia.

Melalui fatwa ulama, keharusan taat pada ulama dan pembelaan terhadap Majelis Ulama Indonesia, para tokoh ulama politik 212 secara otomatis telah

³²¹ diambil dari video ceramah Bachtiar Nashir dalam Kanal Youtube UmmatTV dengan tanggap unggah 2 Januari 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=JSiMqsedRTA> . diakses pada 23 September 2019.

³²² Ibid.

membentuk kelompok masyarakat baru yang boleh peneliti sebut sebagai masyarakat 212. Masyarakat 212 adalah sekelompok orang yang berusaha mengafirmasi, meneguhkan identitas dan perbedaannya dengan identitas sosial lainnya yang sedang mengalami kenikmatan dalam mengonsumsi sistem tanda yang telah diproduksi oleh tokoh ulama politik 212. Sistem tanda yang dimaksud di sini adalah tanda simbolis yang melekat pada pergerakan dan asosiasi kelompok mereka yang dikodekan dengan “spirit 212”. Kenikmatan dalam mengonsumsi spirit 212 ini menjadi aturan bagi pelbagai signifikansi dalam bahasa, tingkah laku dan interaksi pertemanan dalam masyarakat 212. Di sinilah, terjadi pelekatan hegemoni politik ulama 212 berjalan dan berlaku dalam sistem sosial-kultural yang baru sehingga secara politis kemudian lahirlah bentukan-bentukan 212 yang lain dalam situasi dan kondisi yang mendatang seperti Persaudaraan Alumni (PA) 212, Ijtima Ulama 212 di PILPRES 2019 dan Partai Syariah 212.

5. Motif Insentif Ekonomi

Dengan jumlah pemilih yang hampir 80% beragama Islam serta banyaknya lembaga dan komunitas Islam di DKI Jakarta, tidak menutup kemungkinan perilaku politik mereka lebih cenderung kepada pasangan Anies-Sandi di PILKADA DKI Jakarta 2017. Hal ini cukup beralasan karena selain faktor isu penistaan agama yang disampaikan oleh calon gubernur petahana, Ahok yang tampil sebagai lawannya. Terdapat alasan lain yang menurut peneliti lebih jelas sebagai salah satu indikator keberhasilan dalam proses kemenangan pasangan Anies-Sandi, yaitu praktik praktik insentif ekonomi yang dilakukan antara para aktor kuat dengan tim marketing politiknya, jika pasangan Anies-Sandi menang di PILKADA.

Praktik insentif ini muncul dalam program kerja (janji politik) pasangan Anies-Sandi yang akan dijadikan sebagai kebijakan pemerintah propinsi DKI Jakarta apabila keduanya mampu memenangkan PILKADA DKI Jakarta 2017. Sepanjang penelusuran peneliti, dari 55 program kerja yang dicanangkan oleh kedua pasangan tersebut, terdapat hampir sekitar $\frac{1}{3}$ nya merupakan program kerja yang dijual untuk kepentingan komunitas Islam DKI Jakarta. Misalnya, 1) pengembangan wirausaha Muslim dan pemodalan syariah dengan proyek OK OCE di Pondok Pesantren, dan majelis taklim; 2) Meningkatkan bantuan sosial untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan keagamaan, dan majelis taklim; 3) Meningkatkan bantuan sosial untuk masjid dan mejelis taklim dengan kemudahan proses pengajuan dan pencairan; 4) Pemberdayaan taman pendidikan al-Qur'an mulai dari kualitas guru, bantuan fasilitas TPA dan mempermudah pendiriannya; 5) Pemberdayaan PAUD dan Taman Pendidikan al-Qur'an dengan peningkatan kualitas guru dan fasilitasnya; 6) Festival budaya Islam dengan mempermudah perizinan kegiatan keagamaan; 7) Kebijakan Madrasah Jakarta dengan peningkatan kualitas madrasah melalui Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP); 8) Kartu Jakarta Sehat Plus dengan memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi guru mengaji, pengajar sekilah mingguan, penjaga rumah ibadah agama, orang yang khutbah, penceramah dan pemuka agama; 9) kemudahan dalam pengurusan tanah wakaf serta penggratiskan biaya pembuatan sertifikasi tanah wakaf.

Sembilan program kerja tersebut merupakan pengejawantahan dari janji politik pasangan Anies-Sandi yang didagangkan kepada para pemilih dari kelompok orang Islam untuk mendapatkan pertukaran politik dalam berupa suara (voting) di PILKADA

DKI Jakarta 2017. Tentu saja, janji politik yang ditawarkan di atas terbagi menjadi dua macam yaitu *tangible* dan *intangible*. *Tangible* seperti kebijakan dan aktivitas politik sementara *intangible* seperti layanan-layanan pemerintah (*services*), budaya dan emosi yang dapat memenuhi kepuasan para pemilih dari kelompok Islam yang mendukungnya. Dengan demikian, kepuasan para pemilih sebagai *customer* dalam dunia marketing dapat berupa insentif non-ekonomis (sosial-politik) dan insentif bermotifkan ekonomi.

Insentif non-ekonomis (sosial-politik) dapat berupa pelayanan pasangan calon Anies-Sandi ketika menjadi gubernur dan wakil gubernur terkait dengan pemberian kemudahan dalam perizinan kegiatan kebudayaan Islam di tempat-tempat publik yang di saat era gubernur Ahok tidak diperbolehkan seperti perizinan Takbir Keliling, dan kegiatan-kegiatan budaya Islam di lapangan Monumen Nasional (MONAS) Jakarta. Termasuk juga pelestarian cagar budaya Islam di Tanjung Priok serta pemberian izin pemotongan hewan kurban Hari Raya Idul Adha di sekolah dan instansi-instansi umum. Selain itu, ada kelonggaran dalam pengurusan surat sertifikat dari tanah wakaf, di mana pada umumnya tanah wakaf akan dijadikan objek “milik umat” sebagai rumah ibadah, tempat pendidikan agama atau makam umum sehingga dengan jumlah penduduk yang mayoritas, pengurusan sertifikat tanah wakaf yang mudah akan memberikan keuntungan sendiri bagi masyarakat Islam di Jakarta.

Insentif yang bersifat ekonomis setidaknya muncul dari peningkatan jumlah dana hibah dan bantuan sosial yang lebih menasar pada lembaga serta komunitas Islam. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa beberapa perhatian sosial penting yang dapat diperjualbelikan secara politik adalah pemberian dana bantuan sosial bagi rumah

ibadah, lembaga pendidikan keagamaan, dan majelis taklim. Secara fakta, dana bantuan sosial tersebut direalisasikan dalam bentuk kebijakan anggaran dana hibah Pemerintah Daerah DKI Jakarta ketika pasangan Anies-Sandi menjadi pemenang di PILKADA DKI Jakarta 2017. Bahkan menariknya, lokasi penerima bantuan dana hibah tersebut sebagian besar adalah lokasi-lokasi tempat pasangan Anies-Sandi memenangkan PILKADA DKI Jakarta 2017.

Tabel 4.7 Data Masjid, Musala dan Majelis Taklim Penerima Dana Hibah Tahun 2018

NO	NAMA	LOKASI	DANA HIBAH
1	Masjid Nahdlatul Wathan	Kramat Jati Jakarta Timur	100.000.000
2	Masjid Baitul Maqdis ar-Rahmah	Jl. Mohammad Ali IV	100.000.000
3	Masjid al-Qodliyatul Ikhlas	Cengkareng JAKBAR	100.000.000
4	Masjid Nurul Hidayah	Cengkareng Timur JAKTIM	100.000.000
5	Masjid Babul Minan	Joglo Kembangan JAKBAR	80.000.000
6	Masjid Jami al-Mu'awanah	Cempaka Putih Barat JAKBAR	75.000.000
7	Masjid al-Muhajirin	Ciracas JAKTIM	60.000.000
8	Masjid Asasul Islam	SDN INPRES Cakung JAKTIM	50.000.000
9	Masjid Darul Jamaah	Ciracas JAKTIM	40.000.000
10	Masjid Miftahul Jannah	Benhil II JAKPUS	40.000.000
11	Masjid Jami as-Sholihin	Lagoa Koja JAKUT	40.000.000
12	Musala Nurul Yaqin	Gedong Pasar Rebo JAKTIM	100.000.000
13	Musala al-Musywaroh	Susukan Ciracas JAKTIM	75.000.000
14	Musala Hidayatul Falihien	Krendang Tambora JAKBAR	75.000.000
15	Musala Nurul Mu'min	Lenteng Agung Jagakarsa JAKSEL	75.000.000
16	Musala as-Shiroth	Lubang Buaya Cipayung JAKTIM	60.000.000
17	Musala Baiturrahim	Petukangan Pesanggrahan JAKSEL	60.000.000
18	Musala al-Hikmah	Batu Ampar Kramat Jati JAKTIM	50.000.000
19	Musala Nurul Huda	Krendang Tambora JAKBAR	50.000.000
20	Musala as-Sa'adah	Tengah Kramat Jati JAKTIM	40.000.000
21	Musala al-Muflihun	Kalibaru Cilincing JAKUT	40.000.000
22	Musala Nurut Taqwa	Ragunan Pasar Minggu JAKSEL	30.000.000
23	Musala Arrizkiyah	Duren Tiga Jakarta	30.000.000
24	MT. Nurul Syifa	Jatinegara Kaum Pulogadung JAKT	25.000.000
25	MT. al-Ikhwan	Tengah Kramat Jati JAKTIM	20.000.000
26	MT. Khoirun Nisa	Kembangan Selatan JAKBAR	20.000.000
27	MT. Raudhatul Jannah	Lubang Buaya Cipayung JAKTIM	20.000.000
28	MT. al-IKHlas	Lubang Buaya Cipayung JAKTIM	20.000.000
29	MT. al-Wustho	Rawamangun Pulogadung JAKTIM	20.000.000
30	MT. al-Qoshwa	Tengah Kramat Jati JAKTIM	20.000.000
31	MT. Baitul Fitroh	Lubang Buaya Cipayung JAKTIM	15.000.000
32	MT. An-Nisa	Kramat Jati Jakarta Timur	15.000.000
TOTAL			1.645.000.000

Data diolah dari www.ehibahbansosdki.jakarta.go.id SK Gub. No. 1594 Tahun 2018

Pada tahun 2018, Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang dipimpin oleh pasangan Anies-Sandi telah mengalokasikan anggaran Dana Hibah sebesar Rp. 1,654 miliar yang diberikan kepada 11 masjid, 12 musala dan 9 majelis taklim di mana hampir semua lembaga penerima dana hibah tersebut berada di lokasi tempat pasangan Anies-Sandi menang dan hanya satu musala saja berada di tempat Anies-Sandi kalah yaitu Musala Nurul Huda di Jl. Krendang Tengah Tambora Jakarta Barat yang juga mendapatkan hibah sebesar Rp. 50 juta. Pada tahun ini, MUI Provinsi DKI Jakarta mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp. 7.290 miliar.³²³

Tabel. 4.8 Data Masjid, Musala dan Majelis Taklim Penerima Dana Hibah Tahun 2019

NO	NAMA	LOKASI	DANA HIBAH
1	Masjid Jami' al-Ikhlas	Cakung Barat JAKTIM	100.000.000
2	Masjid as-Salam Joglo	Komplek DKI Joglo JAKBAR	50.000.000
3	Masjid Nurul Hidayah	Susukan Ciracas JAKTIM	150.000.000
4	Masjid Uswatun Hasanah	Sungai Bambu Tanjung Priok JAKUT	75.000.000
5	Masjid Rofi'ul A'laa	Lagos Koja JAKUT	100.000.000
6	Masjid al-Marhamah	Kebon Bawang Tanjung Priok JAKUT	150.000.000
7	Masjid Jami al-Huda	Grogol Petamburan JAKBAR	75.000.000
8	Masjid Jami as-Sadiyah	Pinang Ranti Makasar JAKTIM	100.000.000
9	Masjid Jami Nurul Yaqin	Grogol Kebayoran Lama JAKSEL	150.000.000
10	Masjid Mansyaul Huda	Rawa Badak Utara Koja JAKUT	100.000.000
11	Masjid Annur Kota Intan	Pinangsia Tamansari JAKBAR	100.000.000
12	Masjid Jami Baiturrahmah	Kedoa Utara Kebon Jeruk JAKBAR	150.000.000
13	Masjid al-Muttaqin	Cipingan Besar Jatinegara JAKTIM	75.000.000
14	Masjid Jami al-Anshor	Makasar JAKTIM	100.000.000
15	Masjid ar-Ridho	Cibubur Ciracas JAKTIM	150.000.000
16	Masjid Jami al-Ihsan	Makasar JAKTIM	150.000.000
17	Masjid Jami al-Makmur Klender	Jatinegara Pulogadung JAKTIM	100.000.000
18	Masjid al-Barriyah	Tengah Kramat Jati JAKTIM	75.000.000
19	Masjid An-Nur	Kebon Sirih Menteng JAKPUS	40.000.000

³²³https://ehibahbansosdki.jakarta.go.id/info_terkini/01112018110612_SK_GUB_Nomor_1594_Tahun_2018.pdf diakses pada 23 Mei 2021.

20	Masjid Jami al-Amin	Serdang Kemayoran JAKPUS	100.000.000
21	Masjid Hikmatul Ilmi Univ. Ibnu Chaldun	Rawamangun JAKTIM	300.000.000
22	Masjid Jami at-Taubah	Tugu Utara Koja JAKUT	150.000.000
23	Masjid Jami Fathul Khoir	Pekayon Pasar Rebo JAKTIM	150.000.000
24	Masjid al-Ihsan	Cipinang Pulogadung JAKTIM	100.000.000
25	Musala as-Sa'adah	Kebon Sirih Menteng JAKPUS	50.000.000
26	Musala al-Qosam	Sungai Bambu Tanjung Priok JAKUT	100.000.000
27	Musala Ibnu Arma	Cakung Barat JAKTIM	75.000.000
28	Musala Nur Amanah	Pekayon Pasar Rebo JAKTIM	100.000.000
29	Musala Rawdhatussalihin	Pulogebang Cakung JAKTIM	100.000.000
30	Musala al-Barkah	Bangka Mampang Prapatan JAKSEL	50.000.000
31	Musala Darul Mu'minin	Karet Kuningan Setiabudi JAKSEL	75.000.000
32	Musala at-Taqwa	Duri Kosambi JAKTIM	100.000.000
33	Musala al-Muhajirin	Langgar Pengadegan Pancoran	150.000.000
34	Musala al-Hidayah	Pondok Bambu Duren Sawit JAKTIM	100.000.000
35	Musala an-Nuriyah	Lubang buaya Cipayung JAKTIM	75.000.000
36	Musala al-Maghfiroh	Kelapa Dua Wetan Ciracas JAKTIM	40.000.000
37	Musala al-Iman	Kelurahan Baru Pasar Rebo	80.000.000
38	Musala Darus Salam	Tugu Utara Koja JAKUT	100.000.000
39	MT. al-Mu'in	Warakas Tanjung Priok JAKUT	30.000.000
40	MT. al-Muttaqin	Pinangisia Tamansari JAKBAR	32.000.000
41	MT. Nur Muhammad Muslimat	Kramat Jati JAKTIM	14.300.000
42	MT. Raudhatun Nisa	Pramuka Sari JAKPUS	12.500.000
43	MT. Raudhatul Hasanah	Salemba Utan Barat JAKTIM	19.750.000
44	MT. An-Nur	Cibubur Ciracas JAKTIM	28.200.000
45	MT. Miftahul Jannah	Lubang buaya Cipayung JAKTIM	34.275.000
46	MT. Nurul Hidayah	Tengah Kramat Jati JAKTIM	34.000.000
47	MT. Muslimat Baitur Rahmah	Kalibaru Cilincing JAKUT	22.750.000
48	MT. al-Ikhwan	Tengah Kramat Jati JAKTIM	14.000.000
49	MT. al-Fajar	Langgar Kramat Jati JAKTIM	21.600.000
50	MT. An-Na'imiyah	Rawasari Cempaka Putih JAKPUS	39.000.000
51	MT. Babussalam	Pademangan Barat JAKUT	29.000.000
52	MT. Nurul Mubarak	Cempaka Putih Barat JAKPUS	23.000.000
53	MT. Raudhatul Sa'adah	Lubang buaya Cipayung JAKTIM	27.500.000
54	MT. al-Muhajirin	Susukan Ciracas JAKTIM	15.300.000
55	MT. al-Hidayah	Pinang Ranti Makasar JAKTIM	24.500.000
56	MT. Nurul Fiqri	Lubang buaya Cipayung JAKTIM	34.500.000
57	MT. Baytun Nisa	Lubang buaya Cipayung JAKTIM	32.325.000

58	MT. Nurussyifa	Sumur Batu Kemayoran JAKPUS	14.900.000
59	MT. al-Bayyinah	Tugu Utara Koja JAKUT	16.000.000
60	MT. Chairunnisa	Kramat Jati JAKTIM	21.500.000
61	MT. ASWAJA	Pademangan Barat JAKUT	36.625.000
62	MT. al-Mar'atus Sakinah	Kelapa Gading Timur JAKUT	24.680.000
63	MT. Baitul Iman	Tanah Tinggi Johar Baru JAKPUS	23.000.000
TOTAL			4.610.205.000

Data diolah peneliti dari <https://ehibahbansosdki.jakarta.go.id/> SK Gub. No. 209 Tahun 2019

Pada tahun 2019, Pemerintah Daerah DKI Jakarta juga menggelontorkan dana hibah sebesar Rp. 4,6 miliar kepada 25 masjid, 16 musala dan 13 majelis taklim yang mayoritas berada di tempat kemenangan pasangan Anies-Sandi di PILKADA 2017 dengan beberapa majelis taklim yang kembali mendapatkan bantuan dana hibah dari tahun sebelumnya (2018) seperti Majelis Taklim al-Ikhwan, Majelis Taklim Nurul Hidayah dan sebagainya. Untuk masjid, dari 25 masjid tersebut, terdapat 21 masjid berada di lokasi tempat pemenangan pasangan Anies-Sandi, bahkan menariknya di antaranya ada Masjid an-Nur sebagai penerima dana hibah sebesar Rp. 40 juta di mana masjid ini menjadi basis penginapan para alumni aksi 212 ketika melakukan reuni 212 di Jakarta Pusat. Sementara 16 musala berada di 14 kelurahan yang menjadi basis kemenangan suara telak bagi pasangan Anies-Sandi ketika PILKADA DKI Jakarta 2017.³²⁴

Tabel 4.9 Data Masjid, Musala dan Majelis Taklim Penerima Dana Hibah 2020

NO	NAMA	LOKASI	DANA HIBAH
1	Masjid al-Mabrur	Kebon Manggis Matraman JAKTIM	190.000.000
2	Masjid Jami Nurul Amal	Cengkareng Timur JAKBAR	190.000.000
3	Masjid Baitul Huda	Rawa Badak Utara Koja JAKUT	190.000.000
4	Masjid al-Mujahidin	Cempaka Baru Kemayoran JAKPUS	190.000.000
5	Masjid Jami Baiturrahmah	Krendang Tambora JAKBAR	175.000.000

³²⁴https://ehibahbansosdki.jakarta.go.id/info_terkini/20022019115303_01_Kepgub_209_Tahun_2019_Pemberian_Hibah_Bansos_dan_Bankeu_APB_D_2019.pdf diakses pada 23 Mei 2021.

6	Masjid Jami Nurul Huda	Cibubur Ciracas JAKTIM	175.000.000
7	Masjid as-Syuro	Cempaka Putih Timur JAKPUS	164.855.000
8	Masjid Jami al-Huda	Lagos Koja JAKUT	151.000.000
9	Masjid al-Furqan D. Dakwah Islam Indonesia	Kramat Senen JAKPUS	150.000.000
10	Masjid Jami al-Mu'awanah	Cempaka Putih JAKPUS	150.000.000
11	Masjid Jami al-Inayah	Cipedak Jogakarsa JAKSEL	140.000.000
12	Masjid Nurul Mursalin	Bungur Senen JAKPUS	117.000.000
13	Masjid Nurul Iman	Tanah Tinggi Johar Baru JAKPUS	112.250.000
14	Masjid Hayatul Amal	Bukit Duri Tebet JAKSEL	100.000.000
15	Masjid at-Taqwa	Cakung JAKTIM	100.000.000
16	Masjid al-Makmur	Cipedak Jogakarsa JAKSEL	100.000.000
17	Masjid Jami as-Sholihin	Lagos Koja JAKUT	100.000.000
18	Masjid al-Istikharah	Kenari Senen JAKPUS	85.750.000
19	Masjid Nahdlatul Wathan	Batuampar Kramat Jati JAKTIM	75.000.000
20	Masjid Jami Nurul Ishlah	Johar Baru JAKPUS	70.000.000
21	Masjid al-Kusuf	Duren Sawit JAKTIM	70.000.000
22	Masjid Darul Mukhtar	Pengadegan Pancoran JAKSEL	66.900.000
23	Masjid Jami Tafrihul Mu'minin	Kedoya Selatan Kebun Jeruk JAKBAR	64.150.000
24	Masjid Syarif Hidayatullah	Kp. Rawa Johar Baru JAKPUS	58.850.000
25	Musala at-Taubah	Lubang buaya Cipayung JAKTIM	190.000.000
26	Musala al-Badru	Susukan Ciracas JAKTIM	175.522.300
27	Musala Miftahul Jannah	Pejaten Barat Psr. Minggu JAKSEL	150.000.000
28	Musala Nurul Yaqin	Gedong Pasar Rebu JAKTIM	122.830.500
29	Musala Darus Salam	Bidaracina Jatinegara JAKTIM	108.215.000
30	Musala Hidayatul Falihin	Krendang Tambora JAKBAR	102.935.000
31	Musala al-Istiqomah	Cengkareng Timur JAKBAR	100.000.000
32	Musala al-Muffihun	Kalibaru Cilincing JAKUT	100.000.000
33	MT. al-Mahbubiyah	Lubang buaya Cipayung JAKTIM	54.000.000
34	MT. Darussa'adah	Cilandak Timur Psr. Minggu JAKSEL	50.950.000
35	MT. al-Ikhlas	Pegadungan Kalideres JAKBAR	50.000.000
36	MT. Bidayatul Hidayah	Petojo Utara Gambir JAKPUS	43.550.000
37	MT. Nurul Islam	Tegal Alur Kalideres JAKBAR	42.100.000
38	MT. Baitul Mu'minin	Tegal Alur Kalideres JAKBAR	40.600.000
39	MT. al-Muthmainnah	Tanah Tinggi Johar Baru JAKPUS	28.700.000
40	MT. al-Istiqomah	Johar Baru JAKPUS	27.500.000
41	MT. al-Anwar	Krukut Taman Sari JAKBAR	26.700.000
42	MT. ar-Ruhaniyah	Rorotan Cincing JAKUT	24.660.000
43	MT. Raudhatul Jannah	Lubang buaya Cipayung JAKTIM	22.000.000
44	MT. Salman al-Farisi	Joglo Kembangan JAKBAR	17.650.000

45	MT. al-Ikhlâs	Lubang buaya Cipayung JAKTIM	16.000.000
TOTAL			4.479.667.800

Data diolah peneliti dari <https://ehibahbansosdki.jakarta.go.id/> SK Gub. No. 143 Tahun 2020

Pada Tahun 2020, anggaran dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta memang sedikit turun yaitu Rp. 4.47 miliar dengan jumlah penerima sebanyak 24 masjid, 8 musala dan 13 majelis taklim. 13 majelis taklim tersebut merupakan lokasi kemenangan suara pasangan Anies-Sandi di samping juga memberikan dana Hibah untuk Forum Komunikasi Majelis Taklim (FKMT) Jakarta sebesar Rp. 793 Juta. Menariknya, pasangan Anies-Sandi juga memberikan dana hibah kepada Forum Ulama Habaib Jakarta sebesar 646.600.000 dan MUI Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 11 miliar di mana forum dan lembaga-lembaga tersebut pernah menjadi sasaran silaturahmi politik ketika di masa kampanye PILKADA DKI Jakarta 2017.³²⁵

C. Implikasi Komodifikasi Agama secara *Political Economy* dalam PILKADA DKI Jakarta 2017

1. Adanya *Political Islamic Engagement*

Komodifikasi agama di PILKADA DKI Jakarta 2017 bukanlah sebuah fakta yang lahir dari dalam ataupun lahir secara alamiah, namun ia diciptakan oleh para aktor intelektual GNPf-MUI dan tim pemenangan politisi. Yang pertama menyusun serangkaian asumsi dan stereotipe mengenai kepemimpinan non-Muslim melalui dakwah dan pengajian di ruang-ruang publik-keagamaan. Sementara yang kedua

³²⁵https://ehibahbansosdki.jakarta.go.id/info_terkini/14022020122857_Kepgub_Nomor_143_Tahun_2020_ttg_Pemberian_Hibah_Bansos_dan_Bankeu_TA_2020-stempel.pdf diakses pada 21 Mei 2021.

menyusun tindakan strategis dalam upaya perolehan suara elektoral melalui proses kampanye politik.

Secara epistemik, GNPF-MUI adalah kelompok intelektual pengawal fatwa-*exclusive* yang memposisikan dirinya sebagai subjek. Subjek yang memiliki sumber daya islam doktriner (*islamic doctrinaire properties*) dan menguasai kepemilikan atas simbol islamis (*islamic symbols properties*). Sebagai subjek pemilik *islamic doctrinaire properties*, ia adalah subjek yang mempunyai kekuasaan pengetahuan yang dianggap cukup otoritatif dalam memberikan penafsiran atas ayat 51 Surat al-Maidah dan sekaligus penggunaannya untuk apa. Ketika momentumnya adalah PILKADA dan kasus isu penistaan agama terhadap calon gubernur dari petahana (Ahok) maka mereka tidak mempermasalahkan untuk menggunakan ayat tersebut untuk tujuan tercapainya keberhasilan pemahaman politik Islam tentang kepemimpinan Muslim.

Mereka berdalih bahwa selama Ahok menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, ia kerap kali dianggap telah melakukan penindakan dan pelarangan atas tradisi keagamaan seperti pelarangan jual hewan kurban di jalan trotoar, penyembelihan di tempat atau lembaga pendidikan, takbir keliling di malam hari raya Islam dan sebagainya. Pelarangan tersebut menggunakan aparat pemerintah dan hukum sehingga hal ini menyebabkan mereka menggunakan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an untuk menentang kepemimpinan Ahok pada satu sisi dan melawan konstitusi secara umum di sisi yang lain. Tidak jarang kemudian muncul perang sosial media dengan tagar “pilih ayat suci atau konstitusi”. Kejadian virtual ini pun direspon oleh Ahok dan Rizieq Shihab dengan respon yang jelas-jelas berseberangan.

Dari dasar *empirical cases* tersebut, mereka mulai gencar melakukan penggunaan ayat-ayat suci al-Qur'an untuk melawan pemerintah sekaligus implementasi peraturan yang dibuatnya. Termasuk surat al-Maidah ayat 51, di mana sejumlah ORMAS Islam seperti MPJ, FPI, GMJ, FUI, HTI, FBB, DDII dan PERISAI sudah melakukan komodifikasi agama melalui ayat tersebut dengan penegasan kata “*auliyā' - wālī*” diinterpretasikan sebagai teman dekat, pelindung, yang dipercayai dan pemimpin dengan pengambilan kesimpulan akhir bahwa umat Islam dilarang menjadikan orang non-Muslim sebagai pemimpinnya. Untuk mencapai keberhasilan pemahaman tentang larangan pemimpin non-Muslim tersebut, mereka menyusun rencana-rencana strategis dengan membaginya menjadi dua kekuatan; *pertama*, strategi jihad pemikiran melalui dakwah dan pengajian di ruang-ruang publik-keagamaan (*islamic symbols properties*), sedangkan *kedua*; strategi jihad pergerakan melalui demonstrasi dan operasi politik Islam.

Dari tujuan keberhasilan pemahaman tentang larangan pemimpin non-Muslim inilah kemudian pemahaman tersebut menyebar hingga masyarakat Jakarta tidak lagi dikonsumsi ajaran keagamaan selain dakwah larangan pemimpin non-Muslim di tempat-tempat ibadah Islam dan majlis taklim di Jakarta. Sejumlah penelitian menyebutkan masalah tersebut sebagai politik identitas yang digunakan oleh kelompok Islam konservatif sehingga dapat memberikan keuntungan kepada pasangan calon Anies-Sandi dalam kontestasi politik PILKADA DKI Jakarta 2017.³²⁶ Akan tetapi

³²⁶ Mujani, “Religion and Voting Behavior Evidence from the 2017 Jakarta Gubernatorial Election” *Al-Jami'ah* 58, no. 2 (2020): 419–450.; Nasrudin and Nurdin, “Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada DKI Periode 2018-2022)” *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 1 (2019): 34–47.; Lestari, “Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas Di Indonesia” *Simulacra: Jurnal Sosiologi* 2, no. 1 (2019): 31.; Triantoro, “Praktik Politik Identitas Dalam Akun Media Sosial Anies-Sandi” *Jurnal ILMU KOMUNIKASI* 16, no. 1 (2019); Hadiz, “The ‘Floating’

penelitian ini menegaskan kalau terjadinya politik identitas dikarenakan adanya komodifikasi agama kelompok Islam anti-Ahok dalam penafsiran ayat 51 surat al-Maidah sebelum Ahok mengutipnya di kunjungan kedinasan di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Memasuki babak kampanye putaran pertama PILKADA DKI Jakarta 2017 yang telah dicanangkan oleh KPU DKI Jakarta mulai 28 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017, tim pemenangan politisi mulai melakukan rancangan strategi kampanyenya. Tak terkecuali juga dilakukan oleh tim pemenangan pasangan calon Anies-Sandi yang dipimpin oleh Mardani Ali Sera dari PKS, menyusun tiga strategi yang disebut serangan darat, serangan udara dan operasi politik. Narasi politik yang mereka susun adalah strategi populisme³²⁷ yang sama seperti yang terjadi pada PILKADA DKI Jakarta 2012 yaitu narasi “*Old Jakarta versus New Jakarta*”³²⁸ di mana Eep Saepulloh sebagai konsultan politik Joko Widodo-Ahok di kala itu, pada faktanya juga menjadi konsultan politik bagi pasangan calon Anies-Sandi. Narasi politik yang

Ummah in the Fall of ‘Ahok’ in Indonesia” *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia* 7, no. 2 (2019): 271–290.; Herdiansah, Djuyandi, and Sumadinata, “Extending Aliran Politics in Electoral Contest: An Insight of Indonesia’s Democracy in the Post-2014” *Central European Journal of International and Security Studies* 13, no. 4 (2019): 518–545.; Mietzner, “Authoritarian Innovations in Indonesia: Electoral Narrowing, Identity Politics and Executive Illiberalism.” *Democratization* 27, no. 6 (2020): 1021–1036. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266>.

³²⁷ Prayogi, “Populisme Islam Dan Imajinasi Politik Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017” *Politeia: Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 2 (2019): 31–43.; Mietzner and Muhtadi, “Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation” *Asian Studies Review* 42, no. 3 (2018): 479–497, <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335>; Ahyar and Alfitri, “Aksi Bela Islam: Islamic Clicktivism and the New Authority of Religious Propaganda in the Millennial Age Indonesia” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 1 (2019): 1–29.; Aidulsyah and Mizuno, “The Entanglement between Anti-Liberalism and Conservatism: The Insists and Miami Effect within the “212 Movement” in Indonesia” *Journal of Indonesian Islam* 14, no. 1 (2020): 1–25.; Rusydhan Fathy, “Gnpf Mui: Strategi Pembingkaihan Dan Keberhasilan Gerakan Populis Islam Di Indonesia,” *Asketik* 3, no. 1 (2019): 29–45; Kusumo and Hurriyah, “Populisme Islam Di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela Islam Oleh GNPf-MUI Tahun 2016-2017.” *Jurnal Politik* 4, no. 1 (2019)

³²⁸ Hamid, “Populism in the 2017 Jakarta Gubernatorial Election.” *Journal of Governance* 4, no. 1 (2019).

cenderung konfrontatif untuk mengadu gagasan antara Jakarta Asli dan Jakarta Pendetang. Lebih luas lagi pada PILKADA DKI Jakarta 2017 di mana narasi politik yang dikonstruksi berkenaan dengan ketimpangan sosial-ekonomi antara “Masyarakat Jakarta Pribumi vs Masyarakat Jakarta Cina”³²⁹ sehingga hal ini tidak luput dari kompleksitas sosial yang melibatkan sentimen ras-etnis³³⁰ dan praktik komodifikasi agama GNPf-MUI itu sendiri.

Dari sini cukup jelas bahwa pelibatan sentimen etnis-Cina sebagai konsekuensi strategi politik populis adalah narasi yang dikembangkan oleh tim pemenangan Anies-Sandi sebagai cakrawala untuk ketiga strateginya, darat, udara dan operasi politik. Sementara sebagian aktor GNPf-MUI sebenarnya tidak mempermasalahkan hubungan sosial mereka dengan masyarakat yang beretnis Cina atau Tionghoa akan tetapi yang menjadi *starting point* dalam problematika mereka adalah dua hal; *pertama* karena pemimpin non-Muslim yang bersumber dari Surat al-Maidah ayat 51; *kedua*, karena persaingan kekuasaan dalam bidang ekonomi dan sosial, hingga kemudian ke politik di saat PILKADA yang dianggap sebagai sumber kesenjangan sosial mereka.

Peta kesenjangan sosial-ekonomi tersebut semakin menguat ketika GNPf-MUI membandingkan kehidupan sosial-ekonomi antara masyarakat DKI Jakarta yang tinggal di Kampung Akuarium, Pasar Ikan dan Luar Batang dengan masyarakat yang notabene warga berketurunan Cina yang tinggal di Kampung Pluit, Jakarta Utara. Bahkan isu penertiban kampung Luar Batang yang di dalamnya adalah tempat situs dan tempat

³²⁹ Setijadi, “Chinese Indonesians in the Eyes of the Pribumi Public.” *Perspective*, no. 73 (2017): 1–12.

³³⁰ Setijadi, “Anti-Chinese Sentiment and the ‘Return’ of the Pribumi Discourse” *Contentious Belonging*, 2019, 194–213.” Mietzner, Muhtadi, and Halida, “Entrepreneurs of Grievance: Drivers and Effects of Indonesia’s Islamist Mobilization.” *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania*, Vol. 174, 159-187, 2018

bersejarah Islam Jakarta -yang notabene menjadi basis loyalis para habib- menjadi isu yang seksi untuk dilawankan pada rencana pemerintah DKI Jakarta yang dipimpin oleh Gubernur Ahok saat itu. Problematika ini bukan karena sentimen primordial terhadap etnis Cina secara umum sebagaimana kesimpulan Charlotte Setijadi yang menganggap masyarakat anti-Ahok telah melakukan sentimen etnis-Cina secara general sejak pelaksanaan PILKADA DKI Jakarta 2017 karena frustrasi massa Islam terhadap ketidakstabilan politik-ekonomi dan meningkatnya kekuatan konservatisme Islam.³³¹ Akan tetapi pada faktanya di kampung Luar Batang di mana menjadi titik problem perlawanan dari ketimpangan sosial-ekonomi tersebut sudah lama mengenal dan menjalin hubungan toleransi yang baik dengan masyarakat Jakarta Utara yang berketurunan Cina. Perlawanan mereka hanya tertuju secara personal kepada gubernur Ahok yang mengatasmakan “Peraturan Daerah” dalam penertiban dan penataan pemukiman di Kampung Luar Batang yang rencana akan dibuat sebagai wisata religi dan bahari. Persepsi publik yang diorganisasi secara doktriner bahwa kebijakan yang dibuat oleh gubernur Ahok tersebut adalah strategi konglomerat Cina sebagai kelompok pemodal yang berada di balik kepemimpinan Ahok untuk menguasai atas tanah, lahan dan perekonomian mereka dengan dalih PERDA (Peraturan Daerah) dan mereka tinggal di atas lahan negara serta tepian laut Jakarta Utara³³².

Adapun praktik komodifikasi agama GNPF-MUI mengalami perkembangan dari fase sebelumnya yaitu fase friksi yang melibatkan para aktor intelektual yang

³³¹ Setijadi, “Anti-Chinese Sentiment and the ‘Return’ of the Pribumi Discourse.” *Contentious Belonging*, 2019, 194–213.

³³² Pernyataan Bachtiar Nashir dalam *Ini Dalil Melawan Kezaliman Ahok*, Channel AQL Islamic Center. Diunggah 21 April 2016. <https://www.youtube.com/watch?v=6FuHjvm9XL0> diakses pada tanggal 02 Oktober 2018.

tergabung dalam GNPF-MUI dengan Ahok sejak ia menjadi Pelaksana Teknis (Plt) Gubernur DKI Jakarta tahun 2014 silam hingga kemudian komodifikasi agama GNPF-MUI ini masuk ke fase penguatan di awal Oktober 2016 (peristiwa pidato Ahok dan unggahan video Buni Yani) dan fase bangkit ketika menjelang pelaksanaan PILKADA DKI Jakarta 2017. Pada fase bangkit, komodifikasi agama mengalami peningkatan yang begitu masif dalam PILKADA DKI Jakarta 2017 yang menyebabkan adanya sebuah gerakan sebagai *political islamic engagement*. Bahkan peningkatan tersebut mempunyai relevansi dengan peningkatan sikap intoleran di kala itu³³³.

Di dalam kajian partisipasi politik, *political engagement* berhubungan dengan masalah *citizenship* di suatu negara demokrasi³³⁴. *Political Engagement* adalah bagian dari partisipasi politik. Namun, *political engagement* lebih umum dari pada partisipasi elektoral³³⁵. Partisipasi elektoral hanya fokus pada tingkat partisipasi politik dalam memberikan suara di suatu pemilihan umum, misalnya PILKADA. Akan tetapi, *Political engagement* jauh lebih umum di mana ia lebih fokus pada perilaku suara tersebut (*voting behaviors*) dan bentuk partisipasi politik tradisional seperti terlibat

³³³ Hadiz, "The 'Floating' Ummah in the Fall of 'Ahok' in Indonesia" *TRANS: Trans-Regional and National Studies of Southeast Asia* 7, no. 2 (2019): 271–290.; Fionna, "Manipulating 'Diversity': Campaign against Ahok Threatens Democracy." *Perspective* 2017, no. 6 (2017).; Setijadi, "Anti-Chinese Sentiment and the 'Return' of the Pribumi Discourse." *Contentious Belonging*, 2019, 194–213.

³³⁴ Angharad E Beckett, *Citizenship and Vulnerability: Disability and Issues of Social and Political Engagement* (New York: Palgrave Macmillan, 2006); Karolina Koc-Michalska, Darren G. Lilleker, and Thierry Vedel, "Civic Political Engagement and Social Change in the New Digital Age," *New Media and Society* 18, no. 9 (2016): 1807–1816; Eileen Saunders, "Youth Engagement, Civic Education, and New Vehicles of Political Participation," *Activating the Citizen: Dilemmas of Participation in Europe and Canada* (2009): 257–275; Dave Harker, "Political Consciousness but Not Political Engagement: Results from a Service-Learning Study.," *Michigan Journal of Community Service Learning* 22, no. 2 (2016): 31–47; Therese O'Toole and Richard Gale, *Political Engagement amongst Ethnic Minority Young People* (New York: Palgrave Macmillan, 2013); Joakim Ekman and Erik Amnå, "Political Participation and Civic Engagement: Towards a New Typology," *Human Affairs* 22, no. 3 (2012): 283–300.

³³⁵ O'Toole and Gale, *Political Engagement amongst Ethnic Minority Young People*. P. 45

dalam demonstrasi, jalin hubungan dengan anggota dewan atau politisi, terlibat dalam organisasi politik atau bahkan dalam gerakan mobilisasi sosial-politik tertentu³³⁶. Robert R. Putnam (1995 & 1997) menyebutnya sebagai “*civic engagement*” yang diartikannya sebagai keterlibatan masyarakat sipil sesuai dengan fungsi demokrasi dan ekonomi market seperti partisipasi politik, mengikuti berita politik, jejaring sosial, dan kepercayaan interpersonal dalam keterlibatan secara asosional³³⁷. Adler dan Goggin³³⁸ membatasi “*civic engagement*” sebagai keterlibatan sipil yang secara spesifik tentang layanan masyarakat, tindakan kolektif dan bahkan keterlibatan politik. Dari sini dapat dipahami, bahwa *political engagement* adalah keterlibatan warga negara secara politik partisipatif untuk mendapatkan inklusi yang lebih besar dan kesetaraan perhatian di dalam kehidupan politik negara demokrasi melalui berbagai tindakan dan proses politik yang demokratis.

Komodifikasi agama ketika memasuki fase penguatan, para aktor intelektual GNPF-MUI melihat bagaimana suara massa Islam yang terlibat dalam isu politik DKI Jakarta tidak terlalu cukup signifikan. Hal ini terbukti dari jumlah peserta umat Islam yang terlibat dalam aksi demonstrasi protes kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada gubernur Ahok pada Aksi Bela Islam pertama (14 Oktober 2016). Berbeda dengan jumlah peserta Aksi Bela Islam II (Aksi 411) apalagi Aksi Bela Islam III (212) yang mencapai angka di atas satu juta peserta³³⁹. Peneliti melihat bagaimana GNPF-

³³⁶ Koc-Michalska, Lilleker, and Vedel, “Civic Political Engagement and Social Change in the New Digital Age.”

³³⁷ R. D. Putnam. *Bowling Alone: America’s Declining Social Capital*. *Journal of Democracy* 6 (1), (1995). 65-78. R. D. Putnam. *Bowling Alone: Democracy in America at Century’s End*. In A. Hadenius (Ed.). *Democracy’s Victory and Crises*. Cambridge: Cambridge University Press. (1997).

³³⁸ R. P. Adler & J Goggin. What Do We Mean By “Civic Engagement”? *Journal of Transformative Education* 3 (3), (2005) 236-253.

³³⁹ Greg Fealy, *Accommodating Indonesia’s Islamist Fringe: The Case for a More Inclusive Electoral System*. *Indonesian Journal of Political Research (IJPR)*, Vol. 1, December 2020. P. 27.

MUI berusaha untuk memobilisasi umat Islam dengan mereproduksi surat al-Maidah ayat 51 sebagai komoditas publik yang layak untuk dikonsumsi oleh umat Islam yang dianggap masih belum terlibat secara partisipatif (*to engage*) dalam Aksi Bela Islam tersebut yang dimotori oleh kelompok gerakan politik Islam. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Mietzner dan Muhtadi³⁴⁰ tentang adanya pertumbuhan konstituen politik Islam dengan skala besar pasca pengerdilan kekuatan konservatisme Islam.

GNPF-MUI melihat adanya sebagian umat Islam yang tergolong kategori “mengambang” yang masih belum menentukan sikapnya terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok dan situasi PILKADA. Kendati Hadiz (2019) lebih suka menyebut mereka dengan istilah *floating ummah*³⁴¹ sedangkan Mietzner & Muhtadi (2018) lebih condong pada istilah *lower-class Muslims*³⁴², peneliti melihat bagaimana kelompok ini terbagi menjadi dua tipikal rasionalitas yang berbeda dalam pengambilan sikap akan keterlibatannya dalam sejumlah aksi yang sudah digagas dan digerakkan oleh FPI maupun anggota GNPF-MUI lainnya.

Tipikal rasionalitas pertama lebih dekat dengan kelompok umat Islam “mengambang” yang tidak ingin terlibat secara politik dengan arah dan proses perpolitikan di Jakarta dan Indonesia secara umum, bahkan persoalan PILKADA. Kelompok ini menyakini bahwa berpartisipasi dan terlibat dalam pemilihan umum di

³⁴⁰ Mietzner and Muhtadi, “*The Mobilisation of Intolerance and Its Trajectories: Indonesian Muslims’ Views of Religious Minorities and Ethnic Chinese.*” *Contentious Belonging*, no. Scherpen (2019): 155–174.

³⁴¹ Hadiz, “*The ‘Floating’ Ummah in the Fall of ‘Ahok’ in Indonesia.*” *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia* 7, no. 2 (2019): 271–290.

³⁴² Mietzner, Muhtadi, and Halida, “*Entrepreneurs of Grievance: Drivers and Effects of Indonesia’s Islamist Mobilization.*” *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania*, Vol. 174, 159–187, 2018.; Mietzner and Muhtadi, “*Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation.*” *Asian Studies Review* 42, no. 3 (2018): 479–497, <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335>

negara non-Muslim adalah sesuatu yang dilarang karena ayat 51 Surat al-Maidah. Mereka mengklaim bahwa ayat ini melarang Muslim untuk mengambil bagian dalam keterlibatan politik di negara-negara non-Muslim. Selain itu mereka beralasan takut mendapatkan label “*kafir*” apabila ia terlibat secara partisipatif di dalam politik. Partisipasi politik memerlukan persetujuan dan kesetiaan dari partisipannya sehingga ketika ia setuju dan setia kepada pemimpin non-Muslim maka hal ini menyebabkan partisipan juga menjadi bagian dari non-Muslim.

Adapun *tipikal rasionalitas yang kedua* adalah kelompok umat Islam “mengambang” yang tidak ingin terlibat dalam gerakan Aksi Bela Islam karena tidak ingin terlibat dalam perdebatan dan persaingan elektoral yang dilakukan oleh kelompok elit PILKADA sekalipun telah dikeluarkannya Surat tentang Sikap dan Pendapat Keagamaan Majelis Ulama Indonesia 11 Oktober 2016. Melihat fakta ini, GNPF-MUI mengkomodifikasi ayat al-Qur’an³⁴³ tentang orang-orang munafik, sehingga tidak jarang mereka memberikan label “munafik” kepada orang-orang yang mempunyai rasionalitas secara tipikal seperti kelompok ini.

Komodifikasi agama yang dilakukan oleh GNPF-MUI adalah pengaturan dua strategi dalam satu paket. Yaitu pada kelompok umat Islam “mengambang” yang pertama dengan cara penguatan ulang atas kata “*auliyā’-wāli*” dalam Surat al-Maidah ayat 51 sesuai dengan pemahaman kelompok ini dengan arti “teman setia dan pemimpin”. Kepada kelompok umat Islam “mengambang” tipikal kedua, GNPF-MUI mereproduksi pemahaman larangan pemimpin non-Muslim dalam surat al-Maidah 51 sekaligus mengkampanyekan label munafik bagi orang-orang yang tetap memberikan

³⁴³ Seperti Surat Taubah ayat 80 dan 84; Surat an-Nisa ayat 138-139; dan Surat al-Mujadalah ayat 14.

dukungan kepada kandidat petahana, Ahok di PILKADA DKI Jakarta. Oleh karenanya, tidak jarang GMPF-MUI mengumpulkan dua kelompok tipikal tersebut di ruang-ruang publik-keagamaan dengan pendekatan dakwah politik Islam. Ekstrimnya lagi, pemberian pengajian dakwah politik Islam kepada kelompok tipikal pertama, selain menggerakkan pemahaman mereka agar terlibat aktif dalam politik, juga menyebabkan keterlibatan mereka dalam gerakan politik Islam yaitu sebagai relawan jihadis-elektoral dalam perebutan suara elektoral di PILKADA DKI Jakarta 2017. Kelompok Tamasya al-Maidah adalah salah satu bukti nyata dalam kemunculan relawan jihadis-elektoral di PILKADA tersebut.

Political Islamic Engagement berkaitan erat dengan mobilisasi massa di dalam kontestasi politik elektoral yang disituasikan oleh perubahan strategi politik Islam di Indonesia dari posisi pasif menjadi reaktif karena kasus penistaan agama dan PILKADA DKI Jakarta dengan aktor yang tertuduh adalah Ahok sekaligus kandidat petahana. Hal ini sesuai dengan teori *political engagement* bahwa perubahan sosial-politik mempunyai signifikansinya dengan relevansi bentuk mobilisasi kolektif yang berbasis politik identitas, identitas kelompok yang kemudian menentukan *political engagement* manusia³⁴⁴. Terdapat karakter spesifik dalam *Islamic Political engagement*, yaitu kepatuhan terhadap kepemimpinan ulama dan fatwanya. Kepatuhan tersebut mengindikasikan pada keterikatan dan ketundukan umat yang dipimpin kepada pemimpinnya, yaitu ulama. Umat harus mendengar dan menaati ulama tersebut melebihi dari pada orang lain, termasuk pemerintah negara. Memang, ulama yang

³⁴⁴ O'Toole and Gale, *Political Engagement amongst Ethnic Minority Young People*. P. 19

dimaksud di sini adalah ulama-ulama yang berafiliasi dengan GNPF-MUI.³⁴⁵ Momentum aksi 212 di dalam kehidupan sosial-politik Indonesia menjadi kunci awal bagi aktor-aktor GNPF-MUI untuk memobilisasi umat Islam dengan memunculkan kesamaan identitas sebagai revolusi politik Islam di Indonesia.

Secara epistemologis, *Islamic political engagement* yang diprakarsai oleh GNPF-MUI ini mempunyai struktur sosial-politik Islam yang ditandai dengan tiga kerangka: yaitu umat Islam harus terikat dengan fatwa ulama; harus tunduk pada kekuatan ulama; harus memulyakan lembaga keilmuan dan keulamaan (MUI). Ketiga kerangka ini pernah disampaikan oleh Bachtiar Nashir di Masjid Raya Makassar pada tanggal 2 Januari 2017 dengan tujuan agar bagaimana umat Islam diberikan pilihan secara kolektif untuk melanjutkan perjuangan GNPF-MUI pasca aksi Bela Islam 212 di Jakarta. Pilihan kolektif ini nantinya yang akan menjadi agenda politik GNPF-MUI selanjutnya dengan mengambil dua pilihan apakah perjuangan politik yang digerakkan oleh mereka berlanjut hingga terwujudnya revolusi Islam di Indonesia ataukah tidak.

Momunteum PILKADA DKI Jakarta 2017 dijadikan oleh GNPF-MUI untuk meningkatkan animo keterlibatan masyarakat Muslim lainnya yang ada di penjuru daerah di Indonesia. Tidak jarang para aktor utama GNPF-MUI tersebut mendapatkan banyak undangan dari simpatisan mereka yang ada di daerah untuk meminta para aktor tersebut dalam pemberian spirit 212 di daerah seperti di Makasar, Bandung, dan lainnya. Pemberian spirit 212 ini dianggap sebagai pencarian keberkahan bagi para simpatisan GNPF-MUI daerah atas keberhasilan mobilisasi mereka terhadap ribuan massa Islam

³⁴⁵ Bahctiar Nashir, Spirit 212: Aksi Belas Islam 4 atau Revolusi? Terunggah di kanal Youtube Ummat TV pada 02 Januari 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=nmEa26v2ROQ> diakses pada tanggal 21 Nopember 2018.

dalam Aksi Bela Islam di Jakarta. Di sinilah, GNPF-MUI mengkonstruksi jaringan *Islamic political engagement* dari para simpatisannya yang ada di daerah.

Gegap gempita spirit 212 di daerah lebih banyak diikuti oleh orang-orang yang berpaham ideologi politik Islam “islamisme” yang mendukung sepenuhnya atas agenda politik lainnya yang dikonstruksi oleh GNPF-MUI yang semula hanya simpati karena kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok, merambah simpatinya pada jihad ekonomi politik di berbagai penjuru daerah dengan penekanan pada cara-cara komodifikasi agama untuk melawan kapitalisme ekonomi dan praktik politik oligarkis yang dituduhkan pada sejumlah pejabat dengan kelompok pengusaha yang berketurunan “Cina”. Akhirnya, melalui spirit 212, mereka menciptakan kondisi dan pasar perekonomian sendiri untuk mengalahkan dominasi ekonomi kapitalis lainnya. Selain itu, untuk melawan praktik politik oligarkis, mereka mengharuskan masyarakat pemilih Muslim agar senantiasa mengutamakan ayat suci dari pada konsitusi dalam bernegara serta harus memilih calon pemimpin Muslim di daerah yang mayoritas berpenduduk Muslim.

Dalam hal ini, *Islamic political engagement* dengan bingkai “spirit 212” dibawa oleh GNPF-MUI untuk lebih dekat lagi pada persaingan dan pertarungan dalam ideologi politik yang berkembang di Indonesia. Pertarungan pertama diarahkan untuk melawan kekuatan kelompok pemodal (kapitalis) di sejumlah perekonomian di daerah. Sedangkan pertarungan kedua ditujukan pada adanya indikasi praktik politik oligarkis yang melibatkan sejumlah elit pemerintah dan konglomerat berketurunan Cina dengan tuduhan pengamal ideologi politik sosialis-komunis. Mobilisasi umat Islam di daerah adalah cara untuk memompa umat Islam di daerah dengan penggunaan ayat agama

sebagai stimulus atas penarikan simpati dan dukungan dalam melawan praktik ideologi politik di luar yang mereka kehendaki.

2. *New-Market Disruption: “212 Market “*

Ketidakstabilan politik di DKI Jakarta tahun 2017 pasca kasus Ahok dalam penistaan agama, membuat kondisi pasar ekonomi tidak luput dari perhatian aktor tokoh agama 212. Aktor tokoh agama 212 melihat bagaimana kondisi politik DKI Jakarta menyeret kondisi politik nasional yang dituduhnya sedang dikuasai oleh pemodal Cina berkat hubungan kerjasama internasional antara pemerintah Indonesia dan Cina dalam hutang negara dan hubungan perdagangan lainnya. Hal ini menjadi persoalan bahwa seberapa besar kondisi politik tersebut memberikan pengaruh bagi kondisi pasar ekonomi nasional. Pengaruh tersebut sepertinya membuka peluang faktor kelompok penekan politik baik oposisi maupun kelompok yang duduk di parlemen mengamati kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah dianggap tidak sejalan dengan asas pembangunan ekonomi nasional. Dengan begitu, kondisi kekuatan pasar modal yang lemah dapat dimanfaatkan oleh para investor asing (Cina) dengan rasa nyaman dan tenang dalam aktivitas investasinya di pasar modal Indonesia karena terbilang cukup efisien.

Menyikapi persoalan ekonomi politik tersebut, propaganda besar Bachtiar Nashir selaku ketua GNPF-MUI adalah bagaimana umat Islam Indonesia mempunyai lokomotif ekonomi keummatan yang besar dan dapat menyaingi bahkan mengalahkan perekonomian di luar Islam yang digerakkan oleh umat Islam sendiri sebagai stakeholdernya dan orang-orang yang dipilih oleh ulama saja yang menjadi operatornya. Propaganda ini pernah disampaikannya di majelis Pengajian Politik Islam di Masjid al-

Azhar, 15 Januari 2017 yang silam.³⁴⁶ Dengan kemenangan GNPF-MUI dan tim pemenangan pasangan calonnya, mereka meyakini bahwa modal sosial dan politik sudah mereka kuasai dan taklukkan berkat pasangan calonnya Anies-Sandi mampu mengalahkan Ahok-Djarot di PILKADA DKI Jakarta 2017 yang mereka anggap itu bukan hanya sekedar kemenangan secara politik lokal saja akan tetapi sudah menjadi modal sosial-politik yang dapat merajai kekuasaan secara ekonomi atas praktik monopoli dan mengalahkan kelompok pemodal asing (dalam konteks ini adalah pemodal Cina yang diistilahkan dengan kekuatan pemodal 9 Naga) yang dimulai dulu dari DKI Jakarta hingga ke seluruh daerah di Indonesia.

Para tokoh agama 212 berpendirian bahwa untuk meningkatkan produksi satu barang, maka harus mengurangi produksi barang-barang lainnya. Tentu saja, produksi satu barang yang dimaksud adalah barang umat Islam 212 di mana peningkatan dan penghasilannya bergantung pada cara mengurangi produksi barang-barang orang di luar kalangan mereka. Dari sinilah, kemudian muncul beberapa merk produk dan toko minimarket yang tersebar di DKI Jakarta masuk ke dalam pusaran politik PILKADA DKI Jakarta 2017. Di antaranya penolakan umat Islam sebagai aksi Bela Islam untuk membeli merk produk minuman air mineral Equil dan makanan ringan Sari Roti. Muncul juga sejumlah aksi ajakan boikot yang tersebar di media sosial terhadap toko minimarket modern seperti Alfamart dan Indomaret yang dinarasikan sebagai milik kekuatan 9 Naga dan menganjurkan untuk melakukan kegiatan ekonomi di toko-toko Muslim. Narasinya adalah sebagai berikut: **MENINGATKAN LAGI!!!**

³⁴⁶ GNPF-MUI Media Center, *Tabligh Akbar Politik Islam - Masjid Agung Al-Azhar Jakarta*, terunggah pada 15 Januari 2017 (Video). <https://www.youtube.com/watch?v=qNqw12iLc5U&t=3090s> diakses pada 20 Nopember 2018.

INDOMARET & ALFAMART MILIK 9 NAGA JUGA, MAKA DIHIMBAU UTK ORG MUSLIM UTK BOIKOT MEREKA DAN ALIHKAN KE TIPTOP ATAU WARUNG2 MUSLIM LAINNYA. *HATI-HATI !!!* *PENGEMIS MODERN !!!*.³⁴⁷

Tindakan boikot terhadap sejumlah produk dan toko minimarket tersebut merupakan aksi umat yang dianggap sebagai aksi jihad ekonomi yang sesuai dengan misi GNPf-MUI yaitu tegaknya hukum dan keadilan. Kelompok aksi 212 menganggap minuman mineral bermerk Equil adalah minuman yang pernah diminum bersama-sama oleh Ahok dan Tito Karnavian sebagai Kapolri yang terdokumentasi dalam sebuah gambar yang tersebar di media sosial sehingga mereka melihat belum adanya penegakan hukum bagi Ahok yang tertuduh penista agama di Kepulauan Seribu lantaran Ahok dan Tito Karnavian sedang menikmati minuman Equil bersama-sama.

Melihat bergelornya spirit 212, GNPf-MUI menilai bahwa masyarakat umat Islam sudah lama menjadi kelompok yang termarginalkan secara ekonomi dan politik, sehingga aksi-aksi boikot dan dorongan untuk membangkitkan perekonomian yang lebih berpihak kepada mereka menyebabkan tuntutan mereka kepada GNPf-MUI untuk membuat sistem ekonomi yang berbasis syariah dan dapat mengakomodasi kepentingan ekonomi-politik mereka. Dari sini kemudian muncul beragam fitur bisnis tersebut seperti minimarket 212, koperasi 212, dan bank syariah 212 yang bermula berdiri di Masjid al-Ittihad Tebet, Jakarta Selatan kemudian baru diresmikan pada 6 Januari 2017 di al-Hambra, Andalusia Islamic Center, Sentul City, Bogor³⁴⁸.

³⁴⁷ Diambil dari arsip hasil diskusi group Facebook Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax (FAFHH). <https://turnbackhoax.id/2018/01/02/hoax-indomaret-dan-alfamart-milik-9-naga-juga/> diakses pada tanggal 26 Oktober 2018.

³⁴⁸ Eka Gumilar, **Eka Gumilar Blak-Blakan: Apakah Umat Muslim Siap Bangkit?** Dalam unggahan Twitternya yang terangkum dalam <https://www.eramuslim.com/suara-kita/suara-pembaca/eka->

Dengan kode simbolis “212”, riset ini melihat bagaimana aktor tokoh agama 212 setelah membangkitkan identitas umat Islam sebagai mujahid politik di PILKADA DKI Jakarta 2017, sehingga kemudian tercipta “masyarakat 212”. Mereka mulai membangun jaringan ekonominya dengan pembentukan segmentasi pasar yang baru; yaitu “212 market” (upaya pembentukan “pasar” baru). Bukan hanya itu saja, masyarakat 212 yang ikut terlibat di dalamnya sebagai pemodal, donatur, dan konsumen dianggap sebagai “*mujāhid* ekonomi”. “212 market” tersebut secara otomatis mempunyai label tanda “syariah” sesuai dengan hukum Islam dengan kepemimpinan dan fatwa ekonomi para ulama 212 dan Majelis Ulama Indonesia.

Dasar logika GNPf-MUI dalam menjaring anggotanya dalam konteks “212 market”, bahwa orang Islam adalah mayoritas penduduk Indonesia, dan setiap mayoritas adalah pemenang, maka kekuatan Islamlah yang dapat menjadi pemenang dalam perebutan modal politik dan modal ekonomi di Indonesia. Oleh karenanya, kemenangan ekonomi keumatan yang diinginkan oleh GNPf-MUI tidak dapat berhasil jika masyarakat Islam (menjadi masyarakat 212) tidak dibangkitkan aksi dan semangatnya sebagai mujahid politik dan ekonomi dengan merelakan nyawa dan hartanya. Dan tempat utama untuk membangkitkan aksi dan semangat tersebut adalah dimulai dari masjid dan tempat-tempat pengajian taklim.

Sebagai kelas istimewa di PILKADA DKI Jakarta 2017, GNPf-MUI membuat kebijakan-kebijakan dalam konteks perekonomian umat yang menempati posisi tertinggi yang harus diikuti dan ditaati melebihi kelompok-kelompok yang ada di

[gumilar-blak-blakan-apakah-umat-muslim-siap-bangkit.htm#.Yf4HrepBzIU](http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/gumilar-blak-blakan-apakah-umat-muslim-siap-bangkit.htm#.Yf4HrepBzIU). Diakses pada 20 Oktober 2018.

luarnya. Ia dengan mudah mengorganisasikan dan memobilisasi masyarakat Islam (masyarakat 212) untuk bergabung dan berpartisipasi dalam politik perekonomian keummatan dengan pilihan insentif-insentif yang berbalutkan agama. Ini lah mengapa secara ekonomi politik, kebijakan perekonomian syariah yang dibuat melalui kebijakan Ulama GNPF-MUI mempengaruhi perilaku konsumen, produktivitas dan komoditas perdagangan umat Islam di Indonesia. Melalui *branding* “syariah” dan “spirit 212” sebagai kemasan komoditas di pelbagai aktivitas dan produk ekonomi menentukan daya beli masyarakat Islam yang bukan saja bertautan dengan politik dan ekonomi sebagai alat pertukarannya. Melainkan, aspek kultural yang mengharuskan para konsumennya bersinergi dengan lokomotif ideologi keagamaan yang harus dipahami dan diikuti secara kolektif.

“212 *market*” adalah sebuah gerakan ekonomi pasar dengan prinsip syariat Islam yang melibatkan agen-agen ekonomi 212 di mana produksi, distribusi, investasi dan sektor produktif lainnya dikelola oleh sesama Muslim dengan sistem usaha amanah dan berjamaah. “212 *market*” merupakan pasar yang diciptakan oleh GNPF-MUI dengan membentuk segmentasi dan mekanisme pasar tersendiri. Kekuatan modal dan fiskal secara mayoritas disumbang oleh jama’ah 212 di mana keanggotaannya mempunyai kewajiban sebagai donatur dan nasabah tetap. Menurut peneliti, “212 *market*” merupakan *new-market disruption* di mana tujuan dari adanya “212 *market*” adalah menciptakan segmentasi baru di persaingan pasar sempurna dengan label “syariah” dan kode “212” untuk menjangkau konsumen yang sudah terbentuk akibat Aksi Bela Islam 212 di PILKADA DKI Jakarta 2017 dengan maksud untuk memberikan persaingan secara terbuka maupun terselubung kepada perusahaan-perusahaan *incumbent* yang

lebih dulu mapan dan stabil. Keberadaan “212 market” dapat menjadi gangguan terhadap kenyamanan bisnis-usaha dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Sebagai ekonomi umat 212, “212 *market*” mempunyai lokomotif ekonomi yang disebut dengan koperasi syariah 212 (*holding*). Di dalamnya terdapat berbagai macam fitur layanan perekonomian seperti 212 *mart*, pabrik komoditas 212 (air mineral 212), keuangan syariah, properti syariah, wakaf pengembangan ekonomi umat dan sektor produktif lainnya. Koperasi syariah 212 bercita-citakan sebagai koperasi raksasa yang dapat sukses dan besar selayaknya BUMN dengan bidang usaha dan bisnis yang variatif.

Bukan hanya itu saja, hegemoni koperasi syariah 212 didapuk sebagai koperasi raksasa yang benar-benar berkonsepkan syariah juga dapat menguasai label-label produsen dalam negeri baik yang lahir dari koperasi ekonomi syariah lokal - seperti Baitul mal wa Tamwil dan koperasi yang dimiliki ORMAS Islam lainnya dan pondok pesantren- maupun koperasi ekonomi lokal non-syariah. Bahkan Bachtiar Nashir menganggap koperasi syariah 212 ini adalah bagian dari jihad Islam dalam pertarungan ekonomi nasional dan global.³⁴⁹ Hegemoni mereka terhadap industri koperasi lainnya ini sangat logis, karena masyarakat 212 dan GNPF-MUI pada faktanya tidak melihat bagaimana pertukaran barang materi itu mempunyai daya guna atau kah tidak, melainkan mereka melihat bagaimana agama yang dijadikannya sebagai komoditas harus senantiasa melekat sebagai tanda dan simbol akan kebangkitan politik Islam bagi sejumlah pihak dan masyarakat lain yang berbeda ideologi secara ekonomi dan politik.

³⁴⁹ Bachtiar Nashir, *Jihad Ekonomi melalui Koperasi Syariah 212*, terunggah di kanal Youtube GNPF-MUI Media Center pada 08 Januari 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=Lfb6V5rI4NY&t=376s> diakses pada 21 Nopember 2018.

“212 *market*” menjadi sebuah pasar baru bagi umat Islam Indonesia, khususnya masyarakat 212 yang secara konsumtif tidak dapat menjauhi produk-produk yang berlabelkan syariah. Sebagai pasar baru, “212 *market*” mempunyai mekanisme kebijakan sendiri yang berbeda dengan ekonomi lainnya (sosialis dan kapitalis). Di antaranya larangan penjualan produk-produk yang dilarang oleh syariah seperti minuman keras, rokok dan alat kontrasepsi. Selain itu terdapat mekanisme lainnya, yaitu yang paling utama adalah sistemnya berbasis “jama’ah” yang berarti, selain ia sebagai *stake-holder*-nya (produsen dan konsumen), jama’ah juga harus menjadi kelompok sosial yang harus menguasai aset produktif nasional dan kepemilikan publik di berbagai sektor seperti keuangan, properti, ritel, *home industry* maupun manufaktur. Besarnya daya beli jama’ah serta jauhnya perekonomian jama’ah dari ekonomi yang benar-benar syariah menjadikan *positioning* koperasi ini sangat jelas, yaitu pemberdayaan jama’ah sebagai pemodal. Berbeda dengan kapitalis yang dimiliki oleh perseorangan dari kelompok pemodal dan sosialis yang alat produksinya dimiliki oleh negara atau publik. 212 *market* lebih eksklusif yang dimiliki oleh publik Muslim (jama’ah). Kendati demikian, sistem jama’ah yang dimiliki oleh “212 *market*” tidak lepas dari kelemahan seperti halnya sistem pengawasan dan SDM pengawas secara *technical-funtional* masih belum terlalu *settled* dan *established* dan sistem kepemilikan jama’ah menyebabkan inefisiensi di mana manajer dan pekerja tidak punya insentif yang nyata sehingga dapat berpotensi “bisnis usaha bodong” dengan modus berpura-pura menawarkan investasi berlabel syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian disertasi ini memiliki hasil penelitian yang dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Komodifikasi agama di PILKADA DKI Jakarta 2017 terjadi melalui tiga proses fase utama: 1) fase friksi; 2) fase penguatan; 3) fase bangkit. *Fase friksi* ditandai oleh adanya hubungan yang tidak harmonis antara para tokoh Islam Jakarta (aktor GNPF-MUI di tahun 2017) dengan gubernur DKI Jakarta non-aktif Ahok. Ketidakharmonisan pada fase friksi ini dimulai dari pertarungan politik di PILKADA DKI Jakarta 2012 di mana para tokoh Islam Jakarta mengalami pembelahan politik menjadi dua kekuatan pendukung. Pertama tokoh Islam Jakarta mendukung pasangan calon Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama dan kedua; tokoh Islam Jakarta yang menolak Ahok sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta karena beragama Kristen dan tokoh yang mendukung Fauzi Bowo. *Fase penguatan* ditandai oleh sejumlah ORMAS Islam seperti FPI, GMJ, FUI, HTI, FBB, DDII dan MIUMI Jakarta menyatakan sikap penolakannya secara politik atas dilantikannya Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta secara konstitusional yang menggantikan Joko Widodo. *Fase bangkit* ditandai oleh ORMAS Islam dan tokoh Islam yang menolak kepemimpinan Ahok tergabung dalam GNPF-MUI untuk mengawal fatwa MUI hingga ke persidangan dan PILKADA DKI Jakarta 2017. Bentuk komodifikasi agama yang mereka lakukan terbagi menjadi dua: *pertama*, bentuk komodifikasi

agama GNPF-MUI dengan penggunaan sejumlah ayat suci al-Qur'an yang ditafsirkan secara ideologis; masjid sebagai ruang komoditas politik; gerakan subuh berjemaah; khotbah jum'at; tamasya al-Maidah; spanduk dan fatwa penolakan shalat jenazah pendukung Ahok. **Kedua**; bentuk komodifikasi agama tim pemenang terbagi menjadi dua hal: 1) penampilan-diri secara simbolis seperti peci hitam dan baju putih; 2) penampilan-diri secara ekspresif seperti *branding personal* “pemimpin Muslim”, “pemimpin soleh” dan “pemimpin bela agama Islam”.

2. Tindakan komodifikasi agama di PILKADA DKI Jakarta 2017 mempunyai dua makna: 1) dengan orientasi keberhasilan pemahaman dakwah politik Islam, makna komodifikasi agama GNPF-MUI adalah mereproduksi komoditas politik dalam agama; 2) berorientasikan keberhasilan tujuan politik elektoral, makna komodifikasi agama tim pemenang Anies-Sandi adalah reproduksi komoditas agama dalam politik. Oleh karenanya, secara umum tindakan komodifikasi agama tersebut menyimpulkan bahwa setiap kuasa atas komodifikasi agama (*religious monopolies*) dapat menimbulkan tindakan konsumerisme politik Islam (*political islamic consumerism*) sekaligus kampanye politik dalam ruang-ruang publik-keagamaan. Dari makna tindakan komodifikasi, muncul jaringan secara sistemik yang disebut dengan Jaringan Skenario Tuhan serta munculnya kelompok pembonceng kepentingan. Selain itu, komodifikasi agama tersebut mempunyai beberapa motif, di antaranya: motif konflik ideologi; motif rasionalitas moral dalam politik; motif mitigasi politik; motif hegemoni politik ulama 212 dan motif insentif ekonomis di mana

kesemua motif tersebut memunculkan gejala ekonomi politik seperti *Islamic Political Engagement* dan *new-market disruption* yang disebut *212 market*.

B. Implikasi Teoretis

Penelitian komodifikasi agama dalam PILKADA memberikan daya tarik tersendiri bagi sejumlah peneliti di Indonesia karena melihat bagaimana momentum PILKADA kerap kali dikaitkan dengan hingar-bingar pesta demokrasi di dalam persaingan meraih kekuasaan baik di tingkat lokal maupun nasional. Termasuk penelitian ini, ia adalah lanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya tentang dua objek material utama yaitu komodifikasi agama dan kontestasi politik lokal (PILKADA). Namun, keragaman perspektif dan pengambilan kasus menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan dalam pengambilan kesimpulan yang bersifat teoretis. Di dalam penelitian ini secara metodis telah menggunakan landasan teori tindakan kolektif Olson (1965), tindakan komunikatif Habermas (1984) dan teori komodifikasi agama Greg Fealy (2008) demi mendapatkan temuan-temuan baru secara *political economy*. Dari sini, penulis menemukan beberapa implikasi teoretis sebagaimana berikut ini:

Pertama, disertasi ini menegaskan praktik komodifikasi agama di PILKADA DKI Jakarta 2017 lebih terarah pada reproduksi komodifikasi penafsiran larangan pemimpin non-Muslim dan penafsiran labelisasi munafik bagi pemilih PILKADA DKI Jakarta 2017 yang mendukung serta memilih kandidat yang terlibat kasus penistaan agama. Hal ini mengindikasikan bahwa komodifikasi agama di PILKADA DKI Jakarta 2017 menasar dua hal pada satu objek. Dua hal itu adalah memilih pemimpin Muslim dan memilih pemimpin yang tidak menistakan agama pada objek yang sama, yaitu

pasangan calon Anies-Sandi. Sebaliknya, tidak memilih pemimpin non-Muslim dan yang menistakan agama, yaitu calon gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Kedua, disertasi ini menyangkal kajian yang menjelaskan bahwa kemenangan pasangan calon Anies-Sandi dikarenakan politik populis. Penelitian ini berpandangan berbeda di mana politik populis (Pribumi versus Cina) tidak berjalan terlalu signifikan akan tetapi lebih dominan dikarenakan oleh praktik komodifikasi agama yang dikampanyekan oleh GNPf-MUI melalui skema jaringan politik Islam yang sistemik dan marketing politik.

Ketiga, disertasi ini juga merupakan koreksi atas sejumlah penelitian tentang PILKADA DKI Jakarta 2017 yang menyimpulkan terjadinya sentimen agama dan ras-golongan disebabkan oleh politik identitas atau identitas keagamaan. Akan tetapi, disertasi ini melihat bahwa politik identitas tersebut bukanlah satu-satunya faktor utama, namun ia karena lebih dahulu disebabkan oleh praktik komodifikasi agama yang sangat tinggi di ruang-ruang publik-keagamaan oleh para aktor GNPf-MUI sebelum isu penistaan agama.

Keempat, disertasi ini menyangkal temuan penelitian lainnya yang menganggap motif komodifikasi agama di berbagai PILKADA adalah karena alasan keuntungan politis, akan tetapi disertasi ini melihat bagaimana komodifikasi agama yang dipraktikkan dalam proses PILKADA DKI Jakarta 2017 berjalan karena disebabkan oleh motif insentif ekonomis dan sosial-politik (non-ekonomis).

Kelima, berkaitan dengan poin keempat tersebut, secara teoritis disertasi ini menambahkan apa yang terdapat dalam teori Greg Fealy tentang penggunaan aktivitas

agama sebagai komoditas yang dipertukarkan demi tujuan ekonomi, bahwa komodifikasi agama di PILKADA DKI Jakarta bukan hanya menghasilkan pertukaran secara ekonomis saja akan tetapi juga pertukaran secara sosial-politik. Pernyataan tersebut berdasarkan pada argumentasi adanya “spirit 212” bukan hanya menjadi slogan yang di-branding-kan di saat sejumlah demonstrasi Aksi Bela Islam saja akan tetapi jauh lebih didesain; *pertama*, sebagai mekanisme “pasar” baru yang berkonsepkan “syariah 212” di Indonesia (*212 market*); *kedua*, sebagai keterlibatan masyarakat Islam secara partisipatif pada pelbagai gerakan Islam politik (*islamic political engagement*) di Indonesia.

Dengan demikian, disertasi ini menemukan beberapa temuan; 1) proses komodifikasi agama dalam PILKADA dapat bersifat akut, jika ia mengalami proses tiga fase berikut; fase friksi, fase penguatan dan fase bangkit. 2) praktik komodifikasi agama dalam PILKADA jika dilakukan oleh tokoh agama maka praktiknya adalah mereproduksi politik sebagai komoditas di dalam agama. Sedangkan jika yang melakukannya adalah pasangan calon atau tim pemenangannya maka praktiknya adalah mereproduksi agama sebagai komoditas di dalam politik. 3) tokoh agama dalam praktik komodifikasi agamanya menggunakan alasan dakwah yang berorientasi keberhasilan pemahaman secara ideologis, sedangkan pasangan calon dan tim pemenangan dalam praktiknya menggunakan alasan jihad politik yang berorientasi keberhasilan tujuan secara politis. 4) praktik komodifikasi agama kelompok agama dengan ekspresi-diri secara linguistik-simbolis, sedangkan praktik komodifikasi agama pasangan calon dan tim pemenangannya dengan penampilan-diri secara ekspresif-branding. 5) munculnya *political islamic engagement* dalam pelaksanaan Pemilihan Umum sebagai akibat dari

percampuran masif antara komodifikasi agama dan politik praktis. 6) munculnya *new-market disruption* yaitu 212 *market* di dalam persaingan pasar sempurna.

C. Keterbatasan Studi

1. Penelitian ini hanya dilakukan secara netnografis dengan melakukan penelusuran sejumlah data yang bersifat virtual dan tersebar ke berbagai channel media virtual sehingga data terkait komodifikasi agama di PILKADA DKI Jakarta 2017 yang didapatkan belum dapat dikatakan sempurna secara metodologis.
2. Peneliti menyadari bahwa penelitian dengan menggunakan studi netnografi tentu mempunyai kelemahan. Kelemahan ini yang nantinya melahirkan keterbatasan studi penelitian ini, yaitu ia memiliki potensi bias pada data dan informasi tentang komodifikasi agama di PILKADA DKI Jakarta 2017 yang didapatkan dari akses media online yang itu tidak dapat juga dihindari dari penelusuran peneliti yang berpotensi subjektif, sehingga dapat membiaskan interpretasi dan analisis terhadap data online. Selain itu, keterbatasan peneliti dalam mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk melakukan sebuah kerangka kerja netnografis di setiap langkah-langkah riset secara metodologis sehingga penelitian komodifikasi agama di PILKADA DKI Jakarta dengan mengambil unit analisisnya; GNPF-MUI dan tim pemenangan pasangan calon cenderung tidak komprehensif karena dukungan data dan informasi hanya dari satu perspektif saja, yaitu perspektif dunia maya.
3. Dengan studi netnografi, peneliti juga menyadari adanya kurang mendalam di dalam memahami dan menjelaskan fenomena komodifikasi agama tersebut

karena peneliti mampu menjelaskan sebatas *on the screen* (pemahaman tampak luar) saja, dan kurang pendalaman terhadap apa yang terjadi dari sisi *behind the screen* (pemahaman di balik peristiwa), sehingga peneliti merasa bahwa untuk menemukan sisi *behind the screen* tersebut harus diadakan wawancara mendalam, sekalipun di dalam disertasi ini, peneliti sudah berusaha untuk menambahkan hasil wawancara dari beberapa media berita resmi dengan tokoh-tokoh yang terkait.

4. Berbicara tentang pengumpulan data seputar agama dan segala isunya yang berkaitan dengan PILKADA DKI Jakarta 2017, maka peneliti menyadari bahwa di dalam penelitian disertasi ini, ada banyak data tentang politisasi agama di PILKADA DKI Jakarta 2017 yang terkadang menimbulkan pemahaman yang “tumpang tindih” secara konseptual. Namun, peneliti melakukannya dengan alasan bahwa politisasi agama terjadi karena bertujuan politik praktis, sementara komodifikasi agama bertujuan ekonomis. Di dalam politisasi agama di PILKADA DKI Jakarta 2017, tersebar lebih dahulu proses komodifikasi agama yang dikomersialisasikan sebagai *public services* yang diberikan oleh para tokoh agama GNPF-MUI tentang kepemimpinan non-Muslim di DKI Jakarta. Ada banyaknya permintaan publik (*demand*) terhadap mereka inilah yang berimplikasi pada peningkatan ekonomi mereka di saat mereka diminta untuk berbicara di acara-acara keagamaan (*supply*). Komodifikasi agama tersebut diperparah dengan marketing politik yang dilakukan oleh sejumlah tim pemenangan pasangan calon yang didukung oleh GNPF-MUI.

D. Rekomendasi

Berdasarkan pada acuan kesimpulan yang diperoleh oleh penelitian ini maka peneliti memberikan catatan rekomendasi sebagai berikut:

1. Penelitian tentang komodifikasi agama dalam PILKADA sudah dilakukan oleh banyak peneliti, oleh karenanya pengambilan fokus penelitian yang berbeda akan memberikan warna baru dalam kajian komodifikasi agama dalam PILKADA. Dari penelitian ini, diharapkan terdapat studi penelitian yang mengambil fokus pada partisipasi politik masyarakat lokal maupun nasional dalam konteks pemilihan umum yang dikaitkan dengan ketertarikan partisipasi masyarakat terhadap simbol-simbol agama yang digunakan oleh para calon maupun ditawarkan oleh tokoh agama, sehingga dapat menambah khazanah perspektif baru tentang komodifikasi agama dalam PILKADA.
2. Perlunya pembahasan selanjutnya yang masih dalam perspektif ekonomi politik (*political economy*) tentang hubungan GNPF-MUI dengan para kelompok pemodal dari komunitas Pengusaha Islam Indonesia dalam persaingan ekonomi dan politik lokal.
3. Pembahasan selanjutnya yang lain adalah bentuk timbal balik secara ekonomis maupun non-ekonomis antara pasangan calon yang menang (Anies-Sandi) dengan GNPF-MUI serta kelompok pemodal pasca PILKADA DKI Jakarta 2017. Di dalam disertasi ini, mungkin terlalu sedikit mengungkap aspek insentif ekonomisnya sehingga diharapkan muncul penelitian selanjutnya yang dapat menyelesaikannya.

4. Dalam bingkai negara demokrasi, perlunya pemahaman dan kesepakatan yang sinergi antara pasangan calon, tim pemenangan, tokoh agama dan pengurus tempat ibadah dalam menyukseskan pemilihan kepala daerah yang demokratis dan humanis tanpa adanya komodifikasi agama untuk memonopoli politik elektoral.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Assyari. "Reading the Political Communication of the Islamic Defense Action Movement 212: Between Identity Politics and A." *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam* 41, no. 2 (2017): 202–212.
- Adler, R. P. & Goggin, J. What Do We Mean By “Civic Engagement”? *Journal of Transformative Education* 3 (3), (2005) 236-253.
- Afala, Laode Machdani. *Politik Identitas di Indonesia*. Malang: UB Press, 2018.
- Ahyar, Muzayyin, and Alfitri. “Aksi Bela Islam: Islamic Clicktivism and the New Authority of Religious Propaganda in the Millennial Age Indonesia.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 1 (2019): 1–29.
- Ali Thaufan, DS. and Sutiadi, Dedi. “Partisipasi Politik Umat Islam Dalam Aksi Massa 212 Dan Implikasinya Terhadap Wajah Islam Indonesia.” *Ilmu Ushuluddin* 7, no. 2 (2020): 127–150.
- Altinordu, Ates. *The Politicization of Religion: Political Catholicism and Political Islam in Comparative Perspective*. *Politics and Society*, 38 (4) 517-551, Sage Publications 2010.
- Aminah, Siti. & Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Anisa, Serra. Studi Netnografi Aksi Beat Plastic Pollution oleh United Nations Environment di Instagram, *Jurnal ASPIKOM*, Vol. 3 No. 6, Januari 2019.
- Arikuto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Aidulsyah, Fachri, and Mizuno, Yuji. “The Entanglement between Anti-Liberalism and Conservatism: The Insists and Miumi Effect within the "212 Movement" in Indonesia.” *Journal of Indonesian Islam* 14, no. 1 (2020): 1–25.
- Ardipandanto, Aryojati. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017: Strategi Politik Kandidat. *Jurnal Kajian*, Vol. 22, No. 1, Maret 2017. Hal. 15-31.
- Arjon, Sugit Sanjaya. “Religious Sentiments In Local Politics.” *Jurnal Politik* 3, no. 2 (2018): 171.
- Assyaukanie, Luthfi. “Religion as a Political Tool Secular and Islamist Roles in Indonesian Elections.” *Journal of Indonesian Islam* 13, no. 2 (2019): 454–479.
- Austin, J. L. *How To Do Things with Words*. Oxford: Oxford Press, 1962.
- Bakry, Umar Suryadi. Pemanfaatan Metode Etnografi dan Netnografi dalam Penelitian

- Hubungan Internasional, *Jurnal Global & Strategis*, No. 1, 2011.
- Baradaran, Shima. Scharffs, Brett G. dan Sewell, Elizabeth A. Religious Monopolies and the Commodification of Religion, *Pepperdine Law Review*. Vol. 32. L. Rev. 4 (2005).
- Barkin, Gareth. Commercial Islam in Indonesia: How Television Producers Mediate Religiosity Among National Audiences. *International Journal of Asian Studies*, 11, 1 (2014), pp. 1-24.
- Barker, Chris. *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. Bantul: Kreasi Wacana, 2004.
- Beckett, Angharad E. *Citizenship and Vulnerability: Disability and Issues of Social and Political Engagement*. New York: Palgrave Macmillan, 2006.
- Berthon, P. Hullbert, J. M. and Pitt, L. F. "To Serve or Create? Strategic Orientation towards Customers and Innovations", *California Management Review*, Vol. 42. No. 1, (1999). pp. 37-58.
- Bhatti, Yosef, Jens Olav Dahlgaard, Jonas Hedegaard Hansen, and Kasper M. Hansen. "Is Door-to-Door Canvassing Effective in Europe? Evidence from a Meta-Study across Six European Countries." *British Journal of Political Science* 49, no. 1 (2019): 279–290.
- Bigi, Alessandro. Political Marketing: Understanding and Managing Stance and Brand Positioning. *Doctoral Thesis in Industrial Marketing*. KTH. Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden. 2017.
- Black, James A. & Champion, Dean J.. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Bohne, Maik, Alicia Folar Prevost, and James A. Thurber. *Handbook of Political Management*. Edited by Dennis W Johnson. *Routledge Handbook of Political Management*. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2009.
- Brunello, Anthony R. The Effects of Politicization and Moralism in Religion and Public Thought. *Journal of Social Science for Policy Implications*, Vol. 2, No. 2, pp. 295-322, June 2014.
- Buchanan, James. "Public Without Romance: a Sketch of Positive Public Choice Theory and It's Normative Implications," in *The Theory of Public Choice*, ed. James M. Buchanan and Robert D. Tollison, Ann Arbor: University of Michigan Press: 1984.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.
- Caporaso, James A. dan Levine, David P. *Teori-teori Ekonomi Politik*. terj. Suraji, Cet.

2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Chabibi, Muhammad. *Pertukaran Politik Calon Tunggal Dalam Pilkada*, Depok: Gemala, 2020
- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan*, terj. A. Lintang Lazuardi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Daniel, B.K. *Handbook of Research Methods and Techniques for Studying Virtual Communities: Paradigms and Phenomena*. New York: Information Science Reference, 2011.
- Durkheim, Emile. *Elementary Forms of Religious Life*. New York, The Free Press, 1995.
- Ekman, Joakim, and Erik Amnå. "Political Participation and Civic Engagement: Towards a New Typology." *Human Affairs* 22, no. 3 (2012): 283–300.
- Ekelund, Robert. and Tollison, Robert D. *Microeconomics*. Boston: Little Brown, 1986.
- Facal, Gabriel. "Islamic Defenders Front Militia (Front Pembela Islam) and Its Impact on Growing Religious Intolerance in Indonesia." *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia* 8, no. 1 (2020): 7–20.
- Faisal, Sanapiah. *Penelitian Kualitatif*. Malang: YA3 Malang, 1990.
- _____. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.
- Fathy, Rusydan. "Gnpf Mui: Strategi Pembingkai dan Keberhasilan Gerakan Populis Islam Di Indonesia." *Asketik* 3, no. 1 (2019): 29–45.
- Fealy, Greg. "Consuming Islam: Commodified Religion and Aspirational Pietism in Contemporary Indonesia" dalam Greg Fealy and Sally White (ed)., *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia* (Singapore: ISAS, 2008).
- _____. Accomodating Indonesia's Islamist Fringe: The Case for a More Inclusive Electoral System, *Indonesian Journal of Political Research (IJPR)*, Volume 1, December 2020, 25-40.
- Featherstone, *Consumer Culture and Postmodernism*. London: Sage Publication, 1991.
- Ferris, Sharmila P. & Paterson, William. Millenials, Social Networking and Social Responsibility", dalam Information Resources Management Association, *Virtual Communities: Concepts, Methodologies, Tools and Applications*. (New York: Information Science Reference, 2010).
- Fernandes, Arya. "Politik Identitas Dalam Pemilu 2019 : Proyeksi Dan Efektivitas." *Centre For Strategic And International Studies*, no. 1 (2019): 1–10.

- Fionna, Ulla. "Manipulating 'Diversity': Campaign against Ahok Threatens Democracy." *Perspective* 2017, no. 6 (2017): 1–7.
- François, Abel. The Political Entrepreneur and the Coordination of the Political Process: A Market Process Perspective of the Political Market. *The Review of Austrian Economics* 16, 153–168 (2003). <https://doi.org/10.1023/A:1024588606724>
- Fuadi, Abdulloh, and Tasmin Tasmin. "Gerakan Sosial Baru Di Ruang Publik Virtual." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 1 (2019): 48–60.
- Garcia, A.C. Standlee, A.I. Bechkoff, J. & Cui, Y. Ethnographic Approaches to The Internet and Computer-Mediated Communication. *Journal of Contemporary Ehtnography*, 38 (1), 2009, 52-84.
- Gilpin, Robert. *The Political Economy of International Relations*. Princeton: Princeton University Press, 1987.
- _____, *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*. Princeton: Princeton University Press, 2001.
- Gulalp, Haldun. *Citizenship and Ethnic Conflict: challenging The Nation-State*, London: Routledge, 2006.
- Habermas, Jurgen. *The Theory of Communicative Action: Reason and The Rationalization of Society Vol. I*, Trans. Thomas MacCharty, Boston: Beacon Press, 1981.
- _____. *The Theory of Communicative Action: Lifeworld and System a Critique of Functionalist Reason*, Trans. Thomas MacCarthy. Boston: Bacon Press, 1987.
- Hadiz, Vedi R. "The 'Floating' Ummah in the Fall of 'Ahok' in Indonesia." *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia* 7, no. 2 (2019): 271–290.
- Hamid, Abdul. "Populism in the 2017 Jakarta Gubernatorial Election." *Journal of Governance* 4, no. 1 (2019).
- Harker, Dave. "Political Consciousness but Not Political Engagement: Results from a Service-Learning Study." *Michigan Journal of Community Service Learning* 22, no. 2 (2016): 31–47.
- Herdiansah, Ari Ganjar, Djuyandi, Yusa. and Sumadinata, Widya Setiabudi. "Extending Aliran Politics in Electoral Contest: An Insight of Indonesia's Democracy in the Post-2014." *Central European Journal of International and Security Studies* 13, no. 4 (2019): 518–545.
- Hershey, Marjorie Randon. "Partai Politik Sebagai Mekanisme Pilihan Rasional", dalam *Handbook Partai Politik*, ed. Richard S. Katz dan William Crotty, terj.

- Ahmad Asnawi, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2014.
- Heywood, Andrew. *Ideologi Politik: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Hilmy, Masdar. *Islam, Politik dan Demokrasi*. Surabaya: Imtiyar, 2014.
- Hine, C. *Virtual Ethnography*, London: Sage Publications, 2000.
- Illiyun, Naili Ni'matul. Commodification of Religion. *Jurnal Penelitian*, Vol. 15 No. 2 (2018). 94.
- Imamah, Fardan Mahmudatul. "Discourse on Penistaan Agama of Basuki Tjahaja Purnama's Blasphemy Trial in Twitter." *Religió: Jurnal Studi Agama-agama* 7, no. 1 (2017): 84–116.
- Ismail, Ervan. "Kontroversi Iklan Politik Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017." *Perspektif Komunikasi* 1, no. 3 (2018).
- Johan C, Ali Muhammad. Sistem Pemilihan Kepala Daerah pada Daerah yang Memberlakukan Desentralisasi Asimetris. *Al-Qisth Law Review*. Vol. 5 No. 1 2021.
- Kiki, Rakhmad Zailani. dkk, *Genealogi Intelektual Ulama Betawi: Melacak Jaringan Ulama Betawi dari Abad ke-19 Sampai Abad ke-21*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, 2018.
- King, D. B. Nicholas., Scott, G. L, M. etc. Contrasting Internet and Face-to Face Focus Group for Children With Chronic Health Conditions: Outcomes and Participant Experiences. *International Journal of Qualitative Methods*, 9 (1), 2010, 105-121.
- Kitiarsa, Pattana. *Religious Commodification in Asia: Marketing Gods*. London: Routledge, 2008.
- _____, Menuju Sosiologi Komodifikasi Agama, dalam *The New Blackwell Companion to The Sociology of Religion*, ed. B.S. Turner, Terj. Daryatmo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Klüver, Heike, and Jae-Jae Spoon. "Who Responds? Voters, Parties and Issue Attention." *British Journal of Political Science* 46, no. 3 (2016): 633–654.
- Koc-Michalska, Karolina, Darren G. Lilleker, and Thierry Vedel. "Civic Political Engagement and Social Change in the New Digital Age." *New Media and Society* 18, no. 9 (2016): 1807–1816.
- Kotler, P. *Marketing Management*. New Jersey: Prentice Hall, 2003.
- Kotler, P., Wong, V., Saunders, J. & Armstrong, G. *Principles of Marketing*. Essex:

- Pearson Education Limited. 2005.
- Kopstein, Jeffrey, and Mark Lichbach. *Comparatives Politics: Interests, Identitites and Institutions in a Changing Global Order*. Second. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Kozinets, Robert. *Netnography: Redefined*, London: Sage Publications, 2015.
- Kusumo, Rangga, and Hurriyah Hurriyah. “Populisme Islam Di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela Islam Oleh GNPf-MUI Tahun 2016-2017.” *Jurnal Politik* 4, no. 1 (2019): 87.
- Landman, Todd. *Issues and Methods in Comparative Politics; An Introduction*., London: Routledge, 2000.
- Lestari, Dina. “Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas Di Indonesia.” *Simulacra: Jurnal Sosiologi* 2, no. 1 (2019): 31.
- Mead, George H. *Mind, Self, and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist*. Chicago: University of Chicago Press, 1934.
- Mietzner, Marcus. “Authoritarian Innovations in Indonesia: Electoral Narrowing, Identity Politics and Executive Illiberalism.” *Democratization* 27, no. 6 (2020): 1021–1036. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266>.
- Mietzner, Marcus, and Muhtadi, Burhanuddin. “Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation.” *Asian Studies Review* 42, no. 3 (2018): 479–497. <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335>.
- _____. “The Mobilisation of Intolerance and Its Trajectories: Indonesian Muslims’ Views of Religious Minorities and Ethnic Chinese.” *Contentious Belonging*, no. Scherpen (2019): 155–174.
- Mietzner, Marcus. Muhtadi, Burhanuddin. and Halida, Rizka. “Entrepreneurs of Grievance: Drivers and Effects of Indonesia’s Islamist Mobilization.” *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania* 174, no. 2–3 (2018): 159–187.
- Muhsin, Fuad, Hanifah, Hani. and Al As Ari, Muhammad Hasan. “Islamic Defending Action And Fatwa Defenders Movement Indonesian Ulema Council.” *International Journal of Islamic Khazanah* 10, no. 1 (2020): 11–15.
- Mujani, Saiful. “Religion and Voting Behavior Evidence from the 2017 Jakarta Gubernatorial Election.” *Al-Jami’ah* 58, no. 2 (2020): 419–450.
- _____. *Muslim Moderat: Islam, Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

- Muzakki, Akh. "Transmitting Islam through Stories: The Sociology of Production and Consumption of Islam in Novel Literature." *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 1 (2017): 59–76.
- _____. "Islamisme dan Politisasi Agama Model PKS dalam PILPRES 2009", *Islamica*, Vol. 5, No. 1, September 2010
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nasrudin, Juhana, and Ahmad Ali Nurdin. "Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada DKI Periode 2018-2022)." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 1 (2019): 34–47.
- Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Pearson Education Limited, 2014. 490-491.
- Nugraha, Rahmadya P. & Puspitasari, Anastasya C. Strategi Kampanye Gubernur Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam Menghadapi PILKADA DKI Jakarta 2017. *Jurnal Komunikasi*, Vol. 10, No. 2, Desember 2018, hal. 142-149
- Nicholas, D. B., G. L. King., M. Scott, etc. Contrasting Internet and Face-to Face Focus Group for Children With Chronic Health Conditions: Outcomes and Participant Experiences. *International Journal of Qualitative Methods*, 9 (1), 2010, 105-121.
- Olson, Mancur. *The Logic of Collective Action*. Cambridge Mass: Harvard University Press, 1965.
- O'Toole, Therese, and Richard Gale. *Political Engagement amongst Ethnic Minority Young People*. New York: Palgrave Macmillan, 2013.
- Pamungkas, Setyaningrum, Arie. and Octaviani, Gita. "Aksi Bela Islam Dan Ruang Publik Muslim: Dari Representasi Daring Ke Komunitas Luring." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 4, no. 2 (2017): 108–125.
- Pamungkas, Cahyo, and Permana, Yogi Setya. eds. *Intoleransi Dan Politik Identitas Kontemporer Di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2020.
- Pandey, Prabhat and Pandey, Meenu Mishra. *Research Methodology: Tools and Techniques*. Buzau: Bridge Center, 2015.
- Peterson, Daniel. *Islam, Blasphemy, and Human Rights in Indonesia*. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2020.
- Pichardo, Nelson A.. Resource Mobilization: an Analysis of Conflicting Theoretical Variations. *Spring The Sociological Quartely*, Vol. 29, No. 1, 1988., pp. 97-110.

- Pizzorno, Alessandro. "Identitas dan Tindakan Kolektif", dalam *Sosiologi: Sejarah dan Berbagai Pemikirannya*, ed. Anthony Giddens, Daniel Bell, Michel Forse, etc. Terj. Ninik Rochani. Bantul: Kreasi Wacana, 2009.
- Prayogi, Irfan. "Populisme Islam Dan Imajinasi Politik Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017." *Politeia: Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 2 (2019): 31–43.
- Putnam, R. D. Bowling Alone: America's Declining Social Capital. *Journal of Democracy* 6 (1), (1995). 65-78.
- _____. *Bowling Alone: Democracy in America at Century's End*. In A. Hadenius (Ed.). *Democracy's Victory and Crises*. Cambridge: Cambridge University Press. 1997.
- Rey-Araujo, Pedro M. *Capitalism, Institutions and Social Orders: The Case of Contemporary Spain*. London: Routledge, 2021.
- Roof, W. C. *Spiritual Marketplace: Baby Boomers and the Remaking of American Religion*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1999.
- Rudnyckyj, D. Market Islam in Indonesia. *Journal of The Royal Anthropological Institute*. 15 (2009), pp. 183-201.
- Russmann, U. & Svensson, J. Introduction to Visual Communication in The Age of Social Media: Conceptual, Theoretical and Methodological Challenges. *Media and Communication*, 2017, 1-5.
- Saunders, Eileen. "Youth Engagement, Civic Education, and New Vehicles of Political Participation." *Activating the Citizen: Dilemmas of Participation in Europe and Canada* (2009): 257–275.
- Setijadi, Charlotte. "Ahok's Downfall and the Rise of Islamist Populism in Indonesia." *ISEAS Perspective*, no. 38 (2017): 1–9. https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2017_38.pdf.
- _____. "Anti-Chinese Sentiment and the 'Return' of the Pribumi Discourse." *Contentious Belonging*, no. December 2019 (2019): 194–213.
- _____. "Chinese Indonesians in the Eyes of the Pribumi Public." *Perspective*, no. 73 (2017): 1–12.
- Sinclair, Betsy, Margaret McConnell, and Melissa R. Michelson. "Local Canvassing: The Efficacy of Grassroots Voter Mobilization." *Political Communication* 30, no. 1 (2013): 42–57.
- Sumaktoyo, Nathanael Gratiyas. "Ethnic and Religious Sentiments in Indonesian Politics: Evidence From the 2017 Jakarta Gubernatorial Election." *Journal of East Asian Studies* 21, no. 1 (2021): 141–164.

- Tauda, Gunawan A.. Desain Desentralisasi Asimetris dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 1 Edisi 4 November 2018.
- Triantoro, Dony Arung. "Praktik Politik Identitas Dalam Akun Media Sosial Anies-Sandi." *Jurnal ILMU KOMUNIKASI* 16, no. 1 (2019): 19.
- Ubaid, Ahmad Hasan, and Subandi, H.B Habibi. "Political Polarization Based on Religious Identities: Empirical Evidence from the 2017 Jakarta gubernatorial." *Jurnal Studi Pemerintahan* 8, no. 4 (2017).
- Wahid, Umaimah. "Media and Commodification of Islamic Symbols in Political Campaign Towards General Election of Governor/Vice Governor of DKI Jakarta 2017." *Journal of Computational and Theoretical Nanoscience* 24, no. 4 (2018): 2213–2217.
- Wandling, Richard A. "Rasionalitas dan Pilihan Rasional, dalam *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Ke-21 Jilid 1*," ed. John T. Ishiyama dan Marijke Breuning, terj. A. Fedyani S. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2013.
- Ward, K.J. *Cyber-Ethnography and The Emergence of the Virtually New Community*. *Journal of Information Technology*, 1999, 95-105.
- Waardenburg, Jacques. *Islam: Historical, Social and Political Perspectives*. Berlin: Walter De Gruyter, 2002.
- Wicaksono, Agung. "Gubernur DKI Jakarta Dipilih Presiden: Sebuah Wacana Yang Patut Dipertimbangkan." *Jurnal PolGov* 1, no. 1 (2019): 35.
- Widya, A. P. and Sardini, N. H. "Strategi Pemenangan Pasangan Calon Anies Baswedan Dan Sandiaga Uno Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dki Jakarta Tahun 2017," *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 8, no. 03, Jul. 2019.
- Wittgenstein, Ludwig. *On Certainty*. New York: New York Press, 1972.

Sumber Internet:

- Amin, Makruf. Pernyataan Ketua MUI 2015-2020 KH. Ma'ruf Amin bahwa GNPf-MUI bukanlah bagian dari MUI di dalam kesaksian beliau di persidangan Ahok di Auditorium Kementerian Pertanian (KEMENTAN) Jakarta Selatan pada tanggal 31 Januari 2017. <https://news.detik.com/berita/d-3409988/maruf-amin-gnpf-bukan-bagian-mui> diakses pada tanggal 11 Agustus 2017.
- Bilal, *Dewan Dakwah Rilis Fatwa Larangan Shalatkan Jenazah bagi Pendukung Ahok*, terbit 27 Februari 2017. Sumber: <https://www.voaindonesia.com/read/aqidah/2017/02/27/49136/dewan-dakwah-rilis-fatwa-larangan-shalatkan-jenazah-bagi-pendukung-ahok/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2018.

- BPS, *Dokumen Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta* 2015. <https://jakarta.bps.go.id/statictable/2017/01/30/137/jumlah-penduduk-dan-rasio-jenis-kelamin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-2015.html> diakses tanggal 06 Mei 2018.
- Data 2015 bersumber dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta Berdasarkan Agama 2014. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/09/06/83-persen-penduduk-dki-jakarta-beragama-islam> diakses pada 20 Agustus 2018.
- Dokumen Fatwa MUI tentang *Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia* tertanggal 11 Oktober 2016.
- Fattah, Eep Saefullah. *wawancara*, Jakarta, 11 Juli 2017. Diambil dari hasil wawancara dengan Zen RS dan Windu Jusuf di <https://tirto.id/saya-tidak-mengkapitalisasi-sentimen-sara-cso6> diakses pada 30 Agustus 2018.
- Fealy, Greg. *Bigger Than Ahok: Explaining the 2 December Mass Rally, Indonesia at Melbourne*, 2016. Diunduh dan diakses dari <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/bigger-than-ahok-explaining-jakartas-2-december-mass-rally/> pada tanggal 13 April 2018.
- Fish, Stanley. "When Identity Politics is Rational". *The New York Times*, 17 Februari 2008. Diunduh 02 April 2018 dari <http://opinionator.blogs.nytimes.com/2008/02/01/whenidentitypoliticsisrational/>
- <https://www.cnnindonesia.com/kursipanasdki/20161127204559-522-175673/karpet-merah-islam-radikal-di-aksi-anti-ahok-212/> diakses pada tanggal 28 Februari 2019
- <https://tirto.id/mereka-yang-bersatu-dan-berseteru-dalam-aksi-bela-islam-ib1NY>, diakses pada tanggal 27 Februari 2019
- <https://news.detik.com/berita/d-3304708/peta-kekuatan-parpol-pendukung-ahok-agus-yudhoyono-dan-sandiaga> diakses pada 05 Mei 2018.
- <https://www.merdeka.com/politik/ini-seragam-tacticoool-ala-agus-yudhoyono-di-pilgub-dki.html> diakses pada 02 Juni 2018.
- <https://jakarta.bisnis.com/read/20161109/77/600786/makna-baju-kotak-kotak-ahok-djarot> diakses pada 02 Juni 2021.
- <https://pilkada.tempo.co/read/865525/makna-di-balik-baju-biru-anis-sandi-saat-debat-pilkada-dki/full&view=ok> diakses pada 02 Mei 2018.
- <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/04/16/ini-daftar-pengeluaran-biaya-kampanye-ahok-djarot-putaran-kedua-pilgub-dki>, <https://tirto.id/timses-ahok->

[djarot-laporkan-dana-kampanye-putaran-ii-ke-kpu-cmRg](#) diakses pada tanggal 13 Juni 2018.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/04/16/11153141/anies-sandi.habiskan.rp.17.9.miliar.pada.kampanye.putaran.kedua>

<http://jakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/04/Warta-Kota-2-1.pdf> diakses pada tanggal 13 Juni 2018.

<https://www.liputan6.com/pilkada/read/2877973/strategi-partai-pengusung-ahok-djarot-hadapi-putaran-dua> diakses pada tanggal 15 Juni 2018

<https://www.merdeka.com/politik/nachrowi-akui-banyak-relawan-agus-sylvi-berbelok-dukung-anies-sandi.html>

<https://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/20/20290451/survei.smrc.75.persen.warga.dki.puas.dengan.kinerja.ahok> diakses pada 05 Mei 2018.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/15/18593571/survei.lsi.74.persen.warga.puas.dengan.kinerja.ahok> diakses pada 05 Mei 2018.

<https://news.detik.com/berita/d-3286869/populi-center-743-warga-jakarta-puas-kinerja-ahok> diakses pada 5 Mei 2018.

<https://www.medcom.id/profile/buni-yani> diakses pada 19 Juni 2018.

<https://www.tribunnews.com/regional/2017/09/26/alasan-buni-yani-upload-video-ahok-di-facebook-saya-melihat-sesuatu-tidak-etis> diakses pada 19 Juni 2018.

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/10/161007_indonesia_ahok_la_poran diakses pada 19 Juni 2018.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/07/19203041/ahok.dilaporkan.dua.organisasi.ke.polda.metro.jaya.?page=all> diakses pada 18 Juni 2018.

<https://metro.tempo.co/read/810543/acta-laporkan-ahok-ke-bawaslu/full&view=ok>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/ahok-minta-polisi-usut-telepon-habib-novel-pada-tanggal-27-september.html> diakses pada 03 Juli 2018

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/80139/ahok-hanya-disangkakan-pasal-156-dan-156a> diakses pada 30 Juli 2017.

<https://tirto.id/kabar-makar-dan-pemakzulan-selimuti-gnpf-mui-b6w1> diakses pada 13 Agustus 2018

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20140924190605-20-4298/ahok-fitnah-fpi-yang-kurang-cerdas> diakses pada 18 Agustus 2018.

- https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/INSGUB_NO_67_TAHUN_20141.pdf diakses pada 18 Agustus 2018.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170814172156-20-234701/survei-wahid-institute-11-juta-orang-mau-bertindak-radikal> diakses pada tanggal 11 Oktober 2018.
- <https://nasional.tempo.co/read/1180478/survei-atma-jaya-sebut-politisasi-agama-perburuk-demokrasi> diakses pada tanggal 25 Februari 2019.
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/21/00005431/setara-institute-politisasi-agama-dalam-pilkada-2018-lewat-rekayasa-fakta> diakses pada tanggal 20 Februari 2019
- <https://nasional.kontan.co.id/news/sikap-politik-muslim-jakarta-cenderung-sekuler> diakses pada 14 Agustus 2018
- <https://santrinews.com/Nasional/7520/Bahtsul-Masail-Kiai-Muda-NU-Kepemimpinan-Non-Muslim-Sah-dan-Mengikat> diakses pada 15 Agustus 2018.
- <https://www.merdeka.com/politik/ulama-capreskan-rhoma-karena-fans-nya-jutaan-dan-fanatik.html> diakses pada 19 Agustus 2018.
- <https://www.voaindonesia.com/a/presidenokowiantik-ahok-jadi-gubernur-dki-jakarta/2526024.html> diakses pada tanggal 19 Agustus 2018.
- <https://www.beritasatu.com/megapolitan/97775/ahok-selamatkan-nyawa-lebih-penting-dari-akhlak> diakses pada 19 Agustus 2018.
- <https://www.panjimas.com/news/2014/09/21/maklumat-resmi-fpi-yang-menolak-ahok-kristen-jadi-gubernur-dki-jakarta/> diakses 20 Agustus 2018.
- <https://www.panjimas.com/news/2014/09/21/sekjen-fui-ahok-tak-pantas-posisikan-dirinya-sebagai-wakil-masyarakat-jakarta/> diakses 20 Agustus 2018.
- <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2014/11/18/33412/hti-dukung-ormas-yang-tolak-ahok-sebagai-gunernur-dki-jakarta.html> diakses pada 21 Agustus 2018.
- <https://www.panjimas.com/news/2014/09/17/spanduk-bertuliskan-usir-ahok-dari-jakarta-kembali-terpasang-di-dprd-dki/> diakses 20 Agustus 2018.
- <https://news.detik.com/berita/d-3348338/dukung-ahok-front-betawi-bersatu-jangan-takut-pak> diakses 20 Agustus 2018. .
- <https://nasional.republika.co.id/berita/nfbgmh/ustaz-miumi-buat-petisi-tolak-ahok> diakses pada 21 Agustus 2018.

- <https://nasional.tempo.co/read/605593/ahok-tolak-ruu-pilkada-mundur-saja-dari-gerindra/full&view=ok> diakses pada 20 Agustus 2018.
- <https://www.panjimas.com/news/2014/09/18/fpi-tegaskan-tolak-ahok-jadi-gubernur-dki-jakarta-harga-mati/> diakses pada 20 Agustus 2018.
- <https://metro.tempo.co/read/805214/ulama-deklarasikan-9-risalah-istiqlal-haram-pilih-nonmuslim/full&view=ok> diakses pada 21 Agustus 2018.
- <https://www.suara.com/news/2016/07/29/211740/mpj-dan-mtjb-gmj-klaim-yusril-calon-terkuat-gubernur-muslim?page=all> dan <https://www.republika.co.id/berita/odu836361/risalah-istiqlal-rekomendasikan-yusrilsandiaga-untuk-dki> diakses pada 25 Agustus 2018.
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38647137> diakses pada 25 Agustus 2018.
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38647137> diakses pada 25 Agustus 2018.
- <https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2016/09/18/ulama-dan-tokoh-islam-cetuskan-6-poin-risalah-istiqlal-terkait-pilgub-dki-2017/> diakses pada 28 Agustus 2018.
- <https://www.nahimunkar.org/miumi-jakarta-ulama-tolak-ahok-kite-ikut-aje/> diakses pada 25 Agustus 2018.
- <https://www.panjimas.com/news/2016/12/13/gnpf-mui-sebut-gerakan-shalat-subuh-menjadi-titik-tonggak-revolusi-damai/> diakses 26 Agustus 2018.
- <https://www.tarbawia.com/2016/12/foto-jamaah-subuh-1212-meluber-dan.html> diakses 26 Agustus 2018.
- <https://kabar.dewandakwah.com/deklarasi-gerakan-indonesia-shalat-subuh-digelar-di-masjid-al-azhar-jakarta/> diakses 27 Agustus 2018.
- <https://tirto.id/sengkarut-pilkada-dki-pada-jenazah-nenek-hindun-ckBb> diakses pada 29 Agustus 2018.
- <https://kumparan.com/kumparannews/membandingkan-4-spanduk-tolak-salatkan-jenazah-pendukung-ahok/full> diakses pada tanggal 30 Agustus 2018.
- <https://www.portal-islam.id/2016/09/ust-bachtiar-nasir-siapa-yang-memilih.html> diakses pada 27 Agustus 2018.
- <https://tirto.id/times-ahok-targetkan-rebut-separuh-lebih-suara-agus-sylvi-ckEA> diakses pada 15 Juni 2018.
- <https://tirto.id/siasat-ahok-djarot-dan-anies-sandi-berkampanye-putaran-dua-clBs> diakses pada 15 Juni 2018.

<https://news.detik.com/berita/d-3425183/strategi-ahok-vs-anies-di-putaran-dua>
diakses pada 19 Juni 2018.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161007001700-32-163861/tiga-strategi-kampanye-pilkada-dki-tim-pemenangan-anies-sandi> diakses pada tanggal 18 September 2017

<https://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2016/09/15/46170/wajib-memilih-pemimpin-muslim-itu-seperti-melarang-muslimah-suami-kafir/> diakses pada 28 September 2018.

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/12/12/oi1pqv301-anies-baswedan-beri-ceramah-pada-gerakan-subuh-berjamaah> diakses pada 02 September 2018.

<https://pilkada.tempo.co/read/833574/jelang-debat-kandidat-ahok-djarot-unggulkan-program-ini/full&view=ok> diakses pada 05 Juni 2018.

Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 67 Tahun 2014 tentang Pengendalian Penampungan dan Pematangan Hewan dalam Menyambut Idul Fitri dan Idul Adha Tahun 2014/1435 H, diunduh dari https://jdih.jakarta.go.id/himpunan/produk_download/4023 diakses pada 19 Agustus 2018.

Khadafi, Ahmad. Komoditas al-Maidah, *tirto.id*, 2017. Diakses dan diunduh dari <https://tirto.id/komoditas-al-maidah-cmRl> pada tanggal 14 April 2018.

KPU DKI Jakarta, *Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua*, 2017. Diunduh dari https://jakarta.kpu.go.id/file_data/BA%20Hasil%20Rekap%20Perolehan%20Suara%20Putaran%20Kedua%20ok.pdf pada tanggal 06 April 2018.

_____, *Data dan Infografik PILKADA DKI Jakarta 2017*, www.kpujakarta.go.id diakses tanggal 11 Agustus 2018.

_____, Hasil Rekapitulasi PILKADA DKI Jakarta 2012 Putaran Kedua. www.kpujakarta.go.id diakses tanggal 11 Agustus 2018.

_____, NOMOR: 05/Kpts/KPU-Prov-010/2011 Tentang Jumlah Kursi Dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah Untuk Calon Yang Diajukan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012. Diunduh Dari <https://jdih.kpu.go.id/Dkijakarta/Detailkepkpud-6e4a545870544e45> Pada Tanggal 16 Januari 2020.

_____, NOMOR: 04/Kpts/KPU-Prov-010/2011 Tentang Persyaratan Dukungan Dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Pasangan Calon Perseorangan Dalam

- Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota JAKARTA TAHUN 2012. Di unduh dari https://jdih.kpu.go.id/dkijakarta/data/data_kepkud/04-KEP-DUKUNGAN%20PERSEORANGAN.pdf pada tanggal 16 Januari 2020.
- KPU DKI Jakarta, PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Di unduh dari https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%203%202017_UPLOAD.pdf pada tanggal 20 Februari 2020.
- Komunitas Babe Asli. Jaringan 3000 pendukung Agus-Sylvi di Putaran Pertama. <https://metro.sindonews.com/berita/1192122/171/babe-asli-akan-kerahkan-ribuan-relawan-agus-sylvi-dukung-anies-sandi>
- Kuipers, Nick. Mosque Polling Stations Voting for Anies, *New Mandala*, 2017. Diunduh dan diakses dari <https://www.newmandala.org/anies-mosque-tps/> pada tanggal 13 April 2018.
- Mietzner, Marcus & Muhtadi, Burhanuddin. Ahok's Satisfied Non-Voters: an Anatomy, *New Mandala*, 2017. Diunduh dan diakses dari <https://www.newmandala.org/ahoks-satisfied-non-voters-anatomy/> pada tanggal 13 April 2018.
- MEDIAN, *Hasil Survei PILGUB DKI Jakarta 2017: Memahami Peta Kompetisi Putaran Ke-2 PILGUB DKI Jakarta*, Februari 2017. www.median.or.id, diakses pada tanggal 28 Maret 2018.
- Mujani, Saiful. Harian Kompas yang berjudul *De-aliranisasi Politik*, *Kompas*, 24 April 2001.
- Noor, Farish A. When Religion Becomes a Comodity. <https://www.straitstimes.com/opinion/when-religion-becomes-a-commodity>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2019.
- Sulistyo, Bambang, dkk. Mahalnya Kursi DKI-1. *Majalah Gatra*, Edisi 20 September-5 Oktober 2016
- Tim Hukum dan Hupmas KPU Provinsi DKI Jakarta, *Data dan Infografik PILKADA Jakarta 2017*, (Jakarta Pusat: KPU Provinsi DKI Jakarta, 2017). 24. Diunduh dari https://jakarta.kpu.go.id/file_pilkada pada 06 Mei 2018.
- UU. No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomoer 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang. Diunduh dari <http://perludem.org/2017/11/30/undang-undang-tentang-pemilihan-kepala-daerahpilkada/> pada tanggal 03 Mei 2018.

Pahlevi, Indra. PEMILUKADA DKI Jakarta Dua Putaran, *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, Vol. !V, No. 14/II/P3DI/Juli/2012.

Potongan Transkrip pidato Ahok di Kepulauan Seribu dari video lengkapnya <https://www.youtube.com/watch?v=MNdJv3ZAqQE> diunduh pada 18 Juni 2018.

Penggunaan Sejumlah ayat di Voa-islam.com <https://www.voa-islam.com/read/aqidah/2016/10/11/46667/antara-ayat-haramkan-daging-babi-dan-pemimpin-kafir-lebih-banyak-mana/> diakses pada 25 Agustus 2018.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Diunduh dari https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%204%202017_UPLOAD.pdf diakses pada 27 Oktober 2018.

Pernyataan Ahok dalam Ahok anggap sudah biasa didemo Gerakan Muslim Jakarta, sampai bosan. <https://www.merdeka.com/peristiwa/ahok-anggap-sudah-biasa-didemo-gerakan-muslim-jakarta-sampai-bosan.html> Diakses pada 14 Agustus 2018.

Qurtuby (al), Sumanto. *Manipulasi Agama dalam PILKADA Jakarta* dalam opini <https://www.dw.com/id/manipulasi-agama-dalam-pilkada-jakarta/a-38379477> diakses pada 28 Agustus 2018.

Terjemahan dari Qur'an Kemenag in Microsoft Word versi 2.0

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Diunduh dari <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf> diakses pada 20 Agustus 2018.

Wawancara dengan Kapitra Ampera (Advokat GNPf-MUI) dengan media kiblata.net. sumber <https://www.kiblata.net/2017/03/16/ini-alasan-program-tamasya-al-maidah-diluncurkan/> diakses pada 29 Agustus 2018.

Wawancara dengan salah seorang pengurus takmir Masjid al Jihad atas nama Abu Hamzah. Wawancara dilakukan oleh media panjimas.com. sumber; <https://www.panjimas.com/news/2017/03/13/spanduk-tolak-shalatkan-jenazah-ahokers-dicopot-dan-hilang-misterius/> diakses pada 29 Agustus 2018.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Diunduh dari https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%204%202017_UPLOAD.pdf diakses pada 27 Oktober 2018.

Video Channel Youtube:

- Baswedan, Anies. *Tabligh Akbar Politik Islam - Masjid Agung Al-Azhar Jakarta*, Channel GNPf-MUI Media Center, terunggah pada 15 Januari 2017 (Video). <https://www.youtube.com/watch?v=qNqw12iLc5U&t=3090s> diakses pada 20 Nopember 2018.
- Khaththath (al), Muhammad. *Tabligh Akbar Politik Islam - Masjid Agung Al-Azhar Jakarta*, GNPf-MUI Media Center, terunggah pada 15 Januari 2017 (Video). <https://www.youtube.com/watch?v=qNqw12iLc5U&t=3090s> diakses pada 20 Nopember 2018.
- Nashir, Bachtiar. *Ini Dalil Melawan Kezaliman Ahok*. Diunggah oleh Channel AQL Islamic Center pada 23 April 2016. <https://www.youtube.com/watch?v=6FuHjvm9XL0&t=594s> diakses pada 29 September 2018.
- _____, *Hikmah Surat al-Maidah Ayat 50-54*. Diunggah oleh Channel Youtube AQL Islamic Center pada 21 November 2016. <https://www.youtube.com/watch?v=2w6ZgbIMZE8&t=735s> diakses pada 02 Oktober 2018.
- _____, *Tabligh Akbar Politik Islam - Masjid Agung Al-Azhar Jakarta*, GNPf-MUI Media Center, terunggah pada 15 Januari 2017 (Video). <https://www.youtube.com/watch?v=qNqw12iLc5U&t=3090s> diakses pada 20 Nopember 2018.
- _____, *Spirit 212: Aksi Belas Islam 4 atau Revolusi?* Terunggah di kanal Youtube Ummat TV pada 02 Januari 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=nmEa26v2ROQ> diakses pada tanggal 21 Nopember 2018.
- Ridwan, Cholil. *Tabligh Akbar Politik Islam 7 – Subuh Berjamaah Spirit 212*, diunggah oleh Channel Youtube Masjid Agung al-Azhar pada 18 Januari 2017. https://www.youtube.com/watch?v=GIR_SVsiQg&t=1856s diakses pada 02 Oktober 2018
- Shihab, Riziq. *Tabligh Akbar Politik Islam 8*, diunggah pada Channel Forum Umat Islam, 27 Maret 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=i36C82vqKGG> diakses pada 28 Agustus 2018.
- Sera, Mardani Ali. *Mardani Ali Sera- 3 Rahasia Kemenangan Anies-Sandi Pilgub DKI 2017*, diunggah pada 20 Juni 2018. <https://www.youtube.com/watch?v=3xI6BVTf5Qc> diakses pada tanggal 27 Agustus 2018
- Zulkarnain, Tengku. *Tabligh Akbar Politik Islam - Masjid Agung Al-Azhar Jakarta*, Channel GNPf-MUI Media Center, terunggah pada 15 Januari 2017 (Video).

<https://www.youtube.com/watch?v=qNqw12iLc5U&t=3090s> diakses pada 20 Nopember 2018.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A